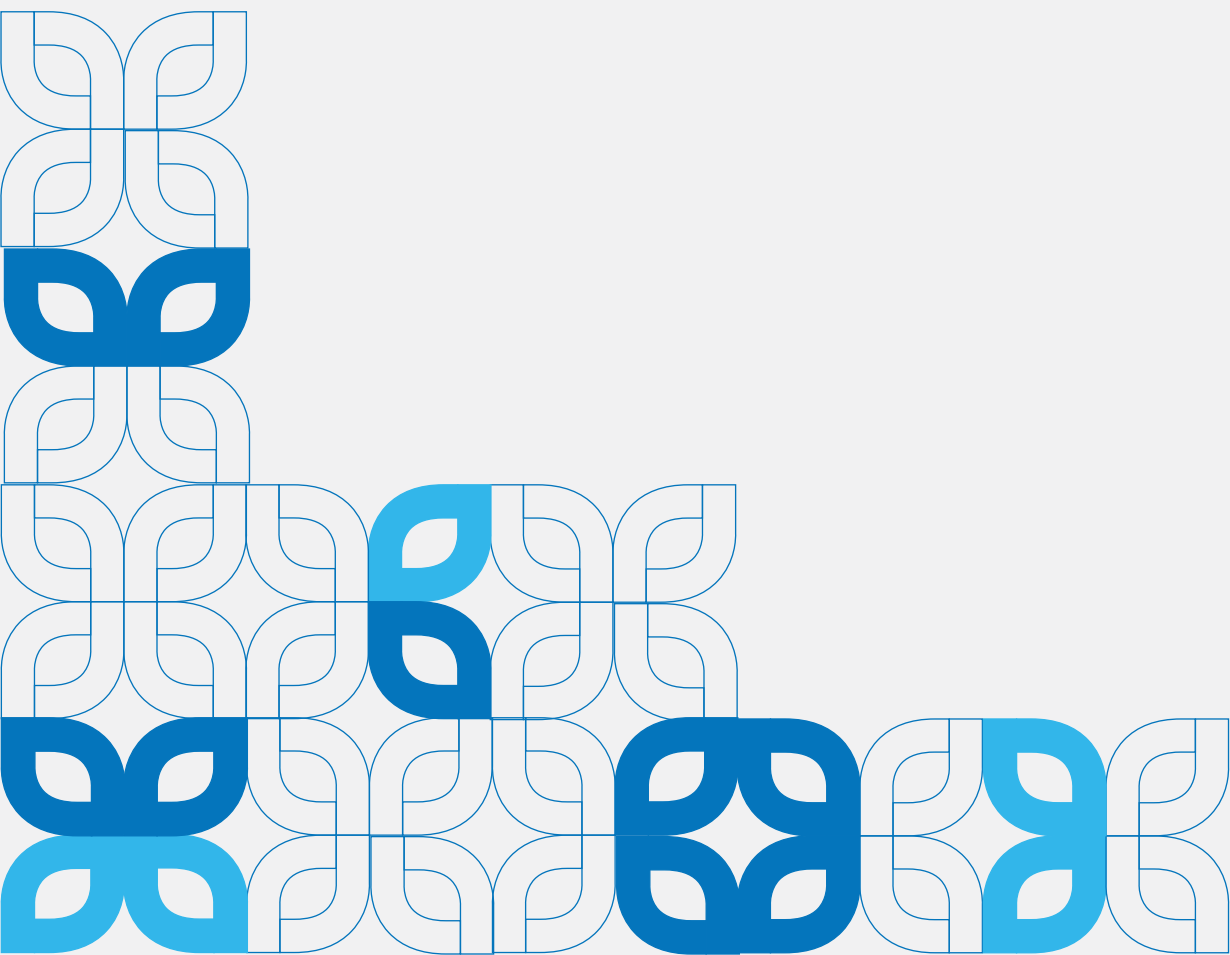
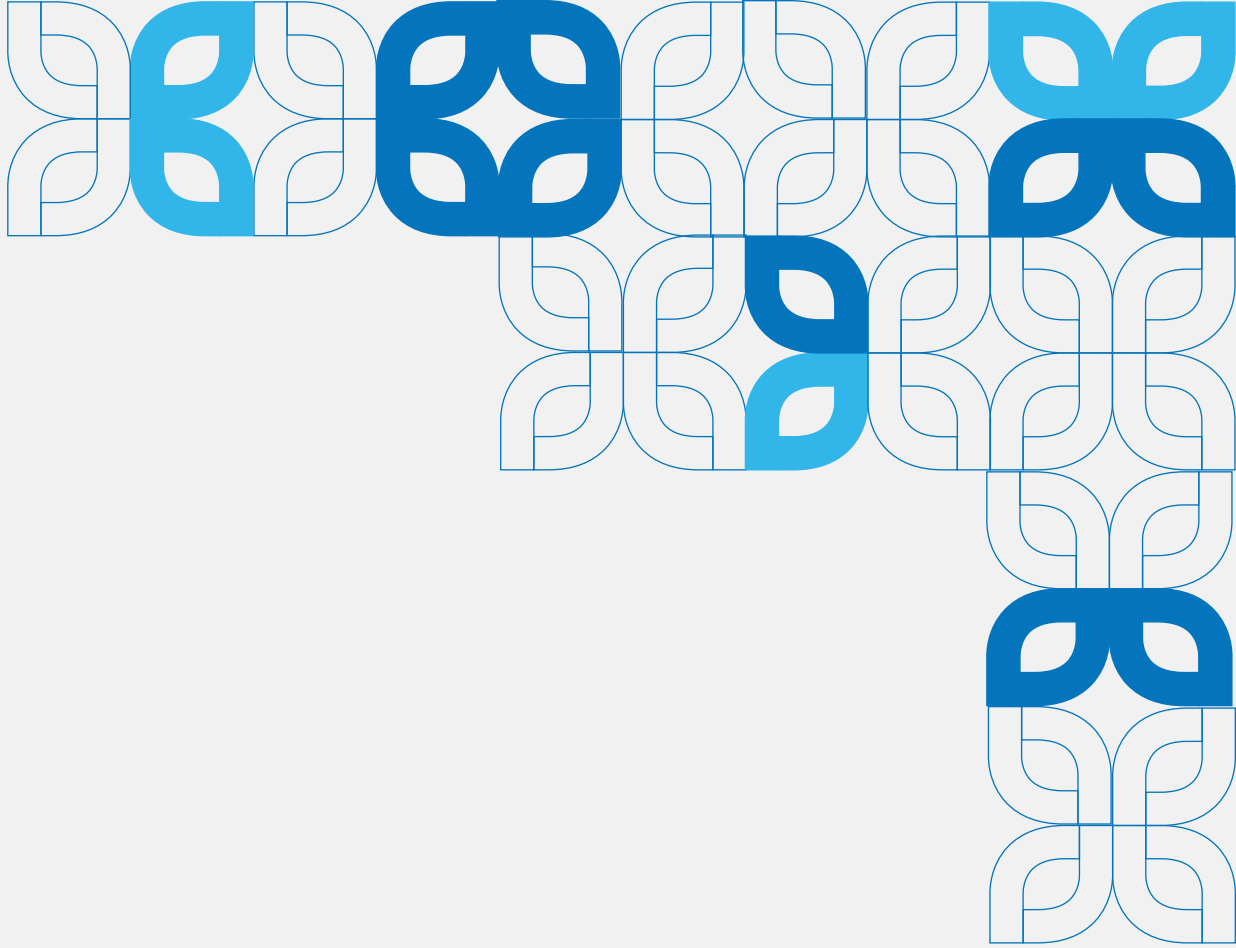


MENGHUBUNGKAN INDONESIA DENGAN DUNIA

Connecting Indonesia with The World





TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2022

About the 2022 Annual Report

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis tempat Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Pada pelaporan di tahun 2022 ini Perseroan juga membuat Laporan Keberlanjutan pertama kembali. Laporan Keberlanjutan dibuat sesuai dengan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 dan diterbitkan terpisah dari buku Laporan Tahunan. Dengan demikian, dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dan tidak dimuat dalam Laporan Tahunan ini.

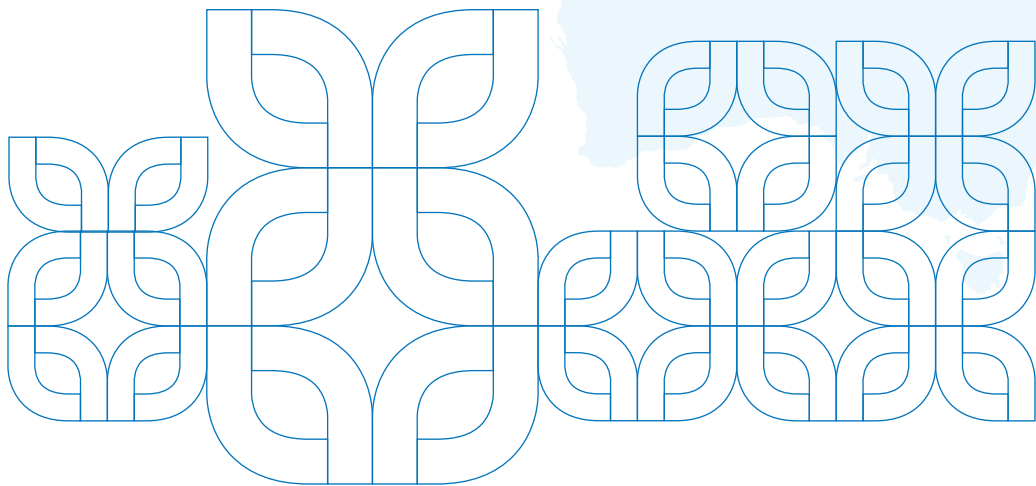
Informasi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan ini disampaikan secara konsolidasi per akhir tahun pelaporan pada 31 Desember 2022 mencakup PT Akses Pelabuhan Indonesia beserta dengan Anak Perusahaan yang selanjutnya dapat disebut sebagai "Perusahaan". Terdapat penyajian kembali dan konsolidasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan di tahun-tahun sebelumnya. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" atau "Rp" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia.

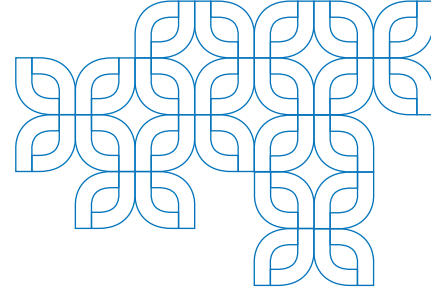
This annual report contains financial conditions, operation results, projections, plans, strategies, policies, as well as objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws and regulations, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to prospective risks, uncertainties, and other factors that can cause the actual results to differ materially from the expected results.

Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business environment where the Company conducts its business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

For the reporting period of 2022, the Company published its first Sustainability Report. The Sustainability Report was made by referring to SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 and was published separately from this Annual Report. Therefore, if the Sustainability Report is published separately from the Annual Report, the information concerning social and environmental responsibility should be presented in the Sustainability Report and not in this Annual Report.

This Annual Report contains information as of the end of reporting period on December 31, 2022, that has been consolidated among the group of PT Akses Pelabuhan Indonesia and its Subsidiaries which from this moment can be referred to as "Company". The Company's previous Financial Statements were restated and consolidated. This Annual Report used "Rupiah" or "Rp", which refers to the Republic of Indonesia's official currency.





Menghubungkan Indonesia dengan Dunia

*Connecting Indonesia
with The World*



JTCC yang diperkirakan akan mempersingkat waktu ke area Kalibaru dan Tanjung Priok hingga hanya 30-40 menit saja dari semula 2 (dua) jam lebih. Penghematan waktu akan menjadi sebuah efek domino yang mempercepat keseluruhan mata rantai aktivitas logistik secara nasional sehingga mendukung peningkatan tingkat keekonomisan aktivitas pelabuhan.

Sebagai jantung perekonomian nasional, Jakarta menjadi pusat keluar-masuknya komoditas yang sangat menentukan tingkat valuasi ekonomi dan aksesibilitas komoditas tersebut di seluruh Indonesia. Ketika seluruh Indonesia sudah terhubung, maka terbuka akses ke kesempatan yang lebih besar di dunia internasional.

Tema ini sejalan dengan tagline baru Pelindo "Indonesia Maritime Gateway". Kami membawa semangat budaya Indonesia yang penuh sejarah, tidak pernah menyerah pada tantangan untuk bersaing di arena global dan meningkatkan ekonomi bangsa secara keseluruhan.

JTCC will make the travel between Kalibaru and Tanjung Priok shorter from 2 (two) hours to only 30-40 minutes. Shorter travel time will have a domino effect to accelerate the national supply chain to increase the economic value of our national ports.

As the heart of the national economy, Jakarta is the center for commodities to enter and exit the country and it has a great influence on the economic value and accessibility of all national commodities. When all areas throughout Indonesia are connected, greater opportunities to connect with the international community will therefore open.

The story of our cover this year is in line with Pelindo's new tagline "Indonesia Maritime Gateway". We are carrying the spirit of Indonesia, with our historic culture that never gives up on challenges to compete in the global arena and improve this nation's economy.

Daftar Isi

Table of Contents

Kilas Kinerja 2022

Performance Highlights of 2022

- 10 Highlight Pencapaian 2022
The 2022 Achievement Highlight
- 11 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlight
- 12 Grafik Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights Chart
- 12 Rasio Keuangan
Financial Ratio
- 13 Informasi Mengenai Saham,
Obligasi, Aksi Korporasi
*Information On Shares, Bonds,
Corporate Actions*
- 14 Pencapaian Korporasi
Corporate Achievement
- 15 Penghargaan Dan Sertifikasi
Awards And Certifications
- 15 Peristiwa Penting 2022
Significant Events In 2022

Laporan Manajemen

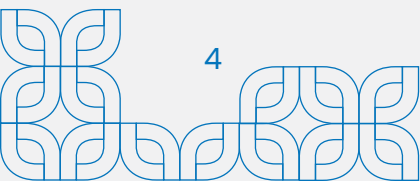
Management Report

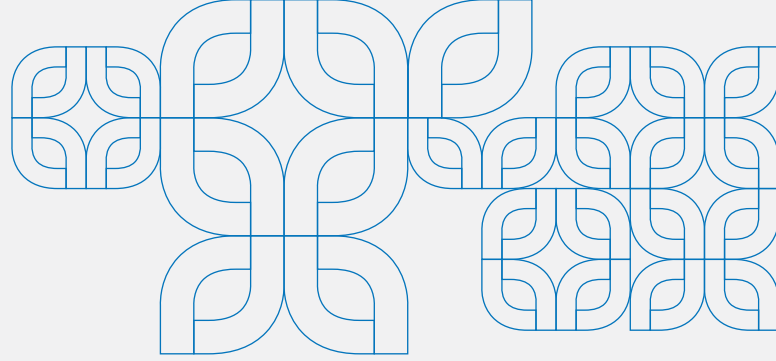
- 20 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report
- 28 Laporan Direksi
Board of Directors Report

Profil Perusahaan

Company Profile

- 36 Identitas Perusahaan
Corporate Identity
- 37 Keanggotaan Asosiasi
Association Membership
- 37 Sekilas Perusahaan
Company At A Glance
- 39 Bidang Usaha
Line Of Business
- 39 Visi & Misi
Vision & Mission
- 41 Nilai-Nilai Perusahaan
Corporate Values
- 42 Jejak Langkah Perusahaan
Company Milestone
- 44 Struktur Organisasi
Organization Structure
- 45 Demografi Karyawan
Employee Demographics
- 46 Profil Dewan Komisaris
The Board Of Commissioners Profile
- 50 Profil Direksi
The Board Of Directors Profile
- 53 Struktur Grup
Group Structure
- 53 Informasi Pemegang Saham
Shareholders Information
- 54 Profil Anak Perusahaan
Subsidiary Profile



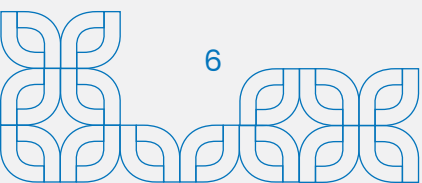


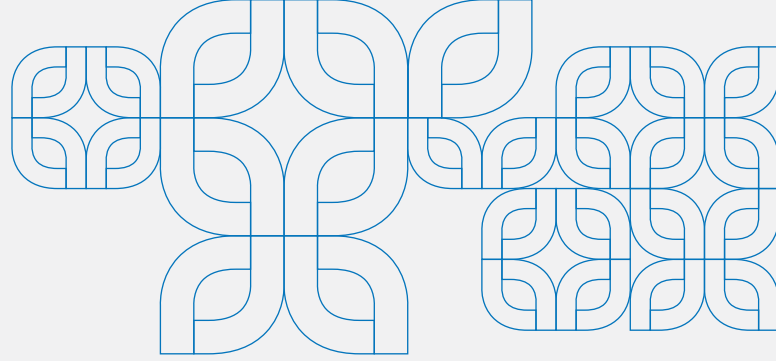
- 55 Profil Entitas Asosiasi
Associates Profile
 - 56 Lembaga dan Profesional Penunjang Pasar Modal/
Perusahaan
Information on Professional Institutions Supporting Capital Market or The Company
 - 57 Informasi Pada Situs Web Perusahaan
Information On The Company's Website
- Analisis dan Pembahasan Manajemen**
Management Discussion and Analysis
- 60 Tinjauan Umum
General Overview
 - 61 Tinjauan Operasi
Operational Review
 - 62 Tinjauan Keuangan
Financial Review
 - 69 Kemampuan Membayar Utang dan Informasi Mengenai Piutang
Solvency and Information on Trade Payables
 - 70 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and the Management Policy on Capital Structure
 - 71 Investasi Barang Modal
Capital Investment
 - 71 Kontribusi Kepada Negara
Contribution to the State
 - 72 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Subsequent to Accountant Report Date
 - 72 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
 - 72 Perbandingan Target dan Pencapaian 2022
Comparison Between 2022 Target and Achievement
 - 76 INFORMASI PEMBAGIAN DIVIDEN
DIVIDEND PAYMENT
 - 76 TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
 - 77 PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
CHANGES IN RULES AND REGULATION AND ACCOUNTING POLICY
 - 78 PROSPEK USAHA DAN TARGET 2023
BUSINESS PROSPECT AND TARGETS FOR 2023
 - 79 Teknologi Informasi
Information Technology

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

- 84 **Komitmen Penerapan GCG**
Commitment to Implementation of GCG Principles
- 84 **Penerapan Prinsip Dasar GCG**
Implementation of GCG Principles
- 86 **Dasar Hukum Penerapan GCG**
Legal Basis of GCG Implementation
- 87 **Tujuan dan Maksud Penerapan GCG**
Legal Basis of GCG Implementation
- 88 **Penilaian Penerapan GCG Tahun 2022**
Assessment of Gcg Implementation in 2022
- 93 **GCG Roadmap Perusahaan**
GCG Roadmap of The Company
- 94 **Struktur GCG**
GCG Structure
- 95 **Kebijakan GCG**
GCG Policies
- 96 **Menanamkan Nilai-Nilai GCG**
Embedding The Values of GCG
- 96 **Rapat Umum Pemegang Saham**
General Meeting of Shareholders
- 100 **Dewan Komisaris**
Board of Commissioners
- 107 **Direksi**
Board of Directors
- 113 **Rapat Dewan Komisaris dan Direksi**
Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors
- 114 **REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**
Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors
- 116 **Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi**
The Diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors
- 116 **Sekretaris Dewan Komisaris**
Secretary to The Board of Commissioners
- 118 **Komite Audit**
Audit Committee
- 120 **Komite Nominasi dan Remunerasi**
Nomination and Remuneration Committee
- 120 **Sekretaris Perusahaan**
Corporate Secretary
- 123 **Satuan Pengawas Internal (Spi) Atau Internal Audit**
Internal Control Unit or Internal Audit
- 126 **Akuntan Publik**
Public Accountant
- 127 **Sistem Pengendalian Internal**
Internal Control System
- 129 **Sistem Manajemen Risiko**
Risk Management System
- 135 **Perkara Penting**
Material Cases
- 135 **Sanksi Administratif**
Administrative Sanction
- 136 **Kode Etik Perusahaan**
Code Of Conduct
- 138 **Sistem Pelaporan Pelanggaran**
Whistleblowing System
- 140 **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**
Report of State Official Assets (LHKPN)





- 140 Penerapan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi
Implementation of Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies
- 142 Proses Pemilihan dan Evaluasi Penyedia Barang dan Jasa
Selection and Evaluation Process of Goods and Service Supplier
- 143 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company's Information and Data
- 144 Transparansi Praktik Bad Governance
Transparency of Bad Governance Practices

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

- 148 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
- 150 Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Laporan Keuangan

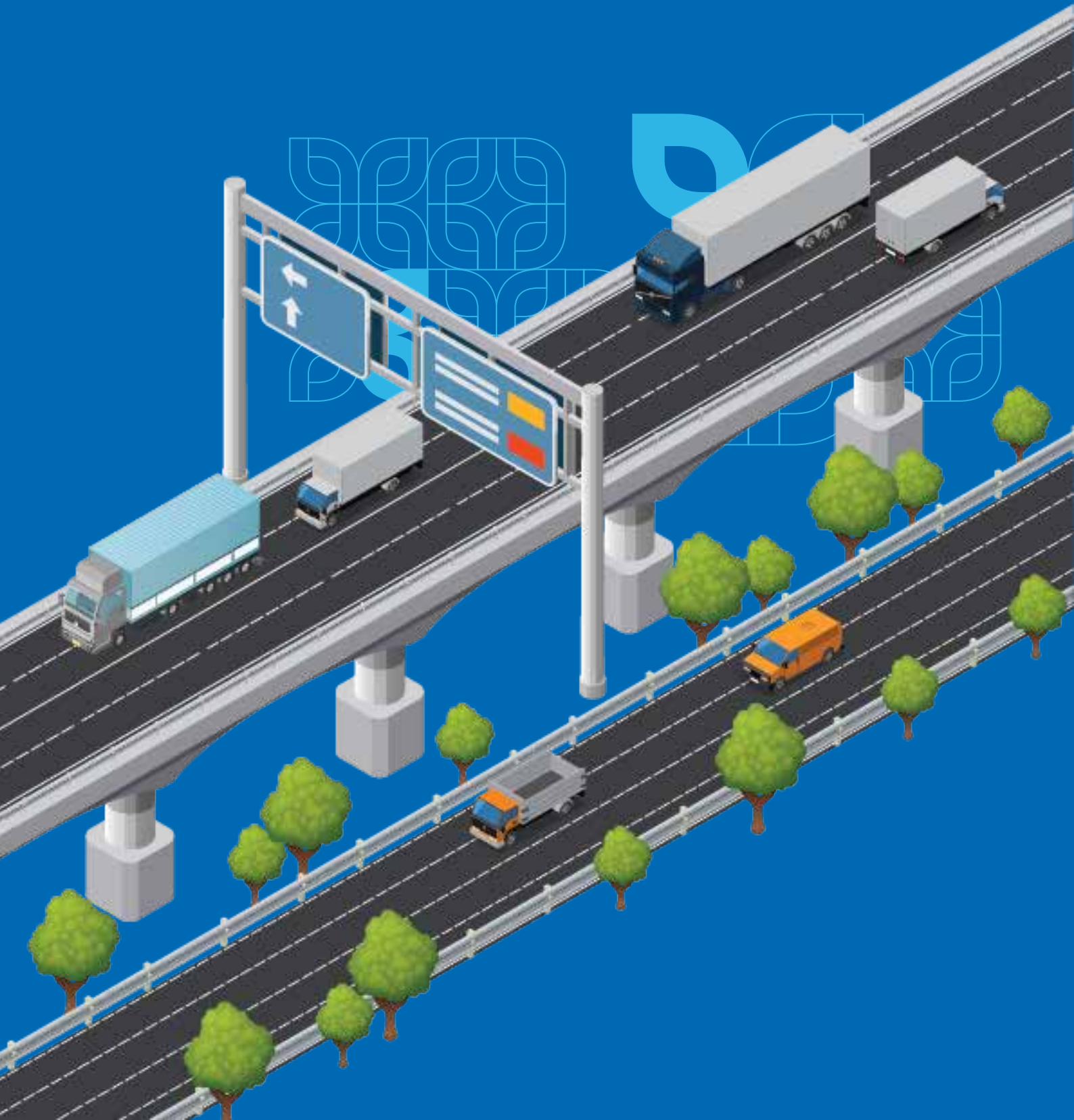
Financial Report



Kilas Kinerja 2022

*Performance Highlights
of 2022*





HIGHLIGHT PENCAPAIAN 2022

The 2022 Achievement Highlight

Total Aset
Total Assets



Rp12,50
Triliun
Trillion

Total Pendapatan*
Total Revenues



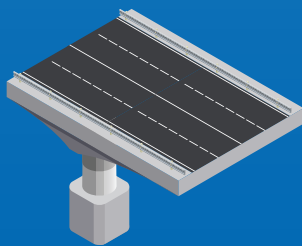
Rp1,65
Triliun
Trillion

Pembebasan Lahan
Jalan Tol Cibitung
Cilincing (JTCC)
Land Acquisition for JTCC



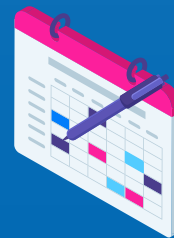
100%

Pembangunan Jalan Tol Cibitung
Cilincing (JTCC)
JTCC Toll Road Construction



98,70%

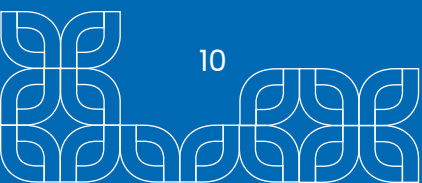
Realisasi Manajemen Proyek New
Priok Eastern Access (NPEA)
Realization of the NPEA Project
Management



79,88%

Keterangan | Remarks:

*Total pendapatan terdiri dari Rp55,18 miliar pendapatan jalan tol dan Rp1,60 triliun pendapatan konstruksi.
Total revenues consist of Rp55.18 billion total road revenues and Rp1.60 trillion construction revenue.



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlight

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In Million Rupiah, unless stated otherwise

| Keterangan Description | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Aset Lancar Current Assets | 312.377 | 513.335 |
| Aset Tidak Lancar Non-Current Assets | 12.188.796 | 10.512.809 |
| Total Aset Total Assets | 12.501.173 | 11.026.144 |
| Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities | 2.023.462 | 1.349.934 |
| Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities | 10.312.753 | 9.162.669 |
| Total Liabilitas Total Liabilities | 12.336.216 | 10.512.602 |
| Ekuitas Equity | 164.957 | 513.542 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity | 12.501.173 | 11.026.144 |
| Total Pendapatan Total Revenues | 1.651.722 | 1.944.395 |
| Beban Langsung Direct Costs | (1.621.314) | (1.942.344) |
| Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operations | (6.530) | (32.536) |
| Rugi Tahun Berjalan Loss for the Year | (348.847) | (78.509) |

Keterangan | Remarks:

Terdapat konsolidasi dan penyajian kembali dalam Laporan Keuangan Perusahaan di tahun-tahun sebelumnya.
The Company's previous Financial Statements were consolidated and restated.

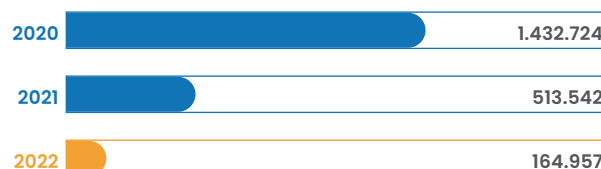
GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights Chart

TOTAL ASET (JUTA RUPIAH) TOTAL ASSETS (MILLION RUPIAH)



EKUITAS (JUTA RUPIAH) EQUITY (MILLION RUPIAH)



RASIO KEUANGAN

Financial Ratio

| Keterangan Description | Satuan Unit | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|---------|-----------|
| Rasio Profitabilitas Profitability | | | |
| EBIT | Rp Juta Rp Million | (7.650) | 342,96 |
| EBITDA | Rp Juta Rp Million | (1.451) | -236,19 |
| Operating Ratio | % | 113,48 | -584,19 |
| EBITDA Margin | % | -2,56 | 0,24 |
| Net Profit Margin | % | -614,38 | -1,42 |
| Asset Turnover | % | 3,07 | -30,45 |
| Return on Asset | % | -18,87 | -0,30 |
| Return on Equity | % | -190,69 | 342,96 |
| Return on Invested Capital | % | 25,32 | -0,30 |
| Rasio Likuiditas Liquidity | | | |
| Current Ratio | kali times | 0,07 | 0,13 |
| Quick Ratio | kali times | 0,01 | 0,09 |
| Cash Ratio | kali times | 0,01 | 0,09 |
| Operating Cash Flow to Sales | % | 19,40 | -3.536,60 |

| Keterangan Description | Satuan Unit | 2022 | 2021 |
|--|----------------|---------|---------|
| Rasio Solvabilitas Solvability | | | |
| Weighted Average Cost of Capital | % | 136,00 | 0,56 |
| Financing Debt to Invested Capital | % | 85,42 | 94,77 |
| Financing Debt to EBITDA | kali times | -166,64 | -294,56 |
| Net Debt to EBITDA | kali times | -156,21 | -283,71 |
| Financing Debt to Equity | kali times | 5,86 | 18,13 |
| Financing Debt to Asset | kali times | 0,08 | 0,84 |
| Financial Leverage | kali times | 10,11 | 21,46 |
| Interest Coverage Ratio | kali times | -0,02 | -0,67 |
| Debt Service Coverage Ratio | kali times | 0,00 | -0,01 |
| EBITDA to Debt Service | kali times | 0,00 | -0,01 |
| EBITDA to Interest | kali times | 0,00 | -0,66 |
| Rasio Aktivitas Activity | | | |
| Average Payment Period (APP) | hari day | 22.149 | 18.538 |
| Average Collection Period (ACP) | hari day | 0 | 2 |
| Collection Period | hari day | 1 | 4 |

INFORMASI MENGENAI SAHAM, OBLIGASI, AKSI KORPORASI

Information on Shares, Bonds, Corporate Actions

Sampai dengan 31 Desember 2022, API tidak melakukan aksi korporasi terkait penawaran saham secara umum, penerbitan efek ataupun obligasi lainnya.

Until December 31, 2022, API has never conducted any corporate action related to the public offering, or issuance of securities and other bonds.

PENCAPAIAN KORPORASI

Corporate Achievement

Training & Workshop kepada Karyawan

Training & Workshop to
All Employees



100%
terlaksana
achieved

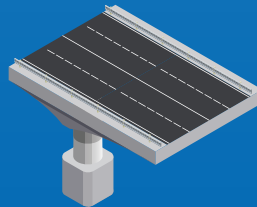
Divestasi kepemilikan saham PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP)

Divestment of CTP shares
ownership

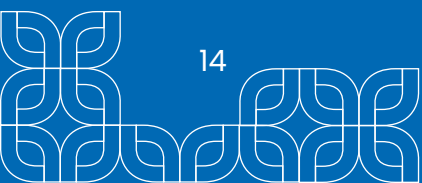


**Belum
terrealisasi**
Not realized yet

Progres Proyek JTCC JTCC Project Progress



98,7%
Konstruksi Seksi 4
Construction Section 4



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications



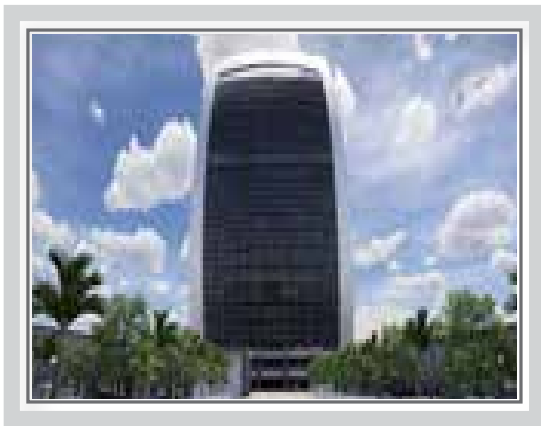
5 Star Rating Award

Acara/Ajang
Event

: Indonesia's Best SOEs in 2022
BUMN Terbaik Indonesia 2022

PERISTIWA PENTING 2022

Significant Events in 2022



3 JANUARI 2022

API menempati kantor baru di Menara Maritime atau Pelindo Tower di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

JANUARY 3, 2022

API relocated to new office at Maritime Tower or Pelindo Tower on Tanjung Priok, North Jakarta.



11 JULI 2022

API dan Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembelajaran, Penelitian dan Pengembangan Inovasi serta Implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam meningkatkan Pelayanan dan Kompetensi Sumber Daya Alam.

JULY 11, 2022

API and the National Research and Innovation Agency (BRIN) signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Learning, Research, and Innovation Development and Implementation of Science and Technology in Improving the Services and Competencies of Natural Resources.



20 SEPTEMBER 2022

Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, meresmikan JTCC Seksi 2 dan 3 Segmen Telaga Asih-Gabus-Tarumajaya.

SEPTEMBER 20, 2022

The President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo, inaugurated Sections 2 and 3 of JTCC covering the Telaga Asih-Gabus-Tarumaja Segments.

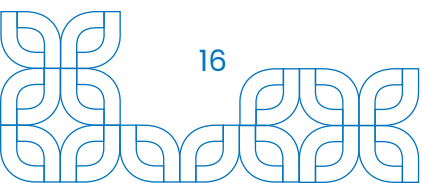


12 DESEMBER 2022

API dan BRIN melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kajian Pengembangan Akses *Hinterland* dan Pelabuhan di Indonesia.

DECEMBER 12, 2022

API and BRIN signed a Cooperation Agreement (PKS) on the Study of Indonesia's Hinterland and Port Access Development.





Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



Laporan Manajemen

Management Report





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Report

Jalan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC) Seksi 1–3 telah beroperasi. Pendapatan dari *traffic* kendaraan mencapai Rp47,25 miliar. Progres proyek NPEA dan pada akhir 2022 mencapai 79,88%.

The Cibitung–Cilincing Toll Road (JTCC) Sections 1–3 is in operation. The revenues from vehicle traffic reached Rp47.25 billion. The NPEA project management and its progress by the end of 2022 was 79.88%.

Pemegang Saham yang Terhormat,

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi PT Akses Pelabuhan Indonesia (“API” atau “Perusahaan”) di sepanjang tahun 2022. Kami sangat bersyukur bahwa API pada akhirnya dapat mengoperasikan Jalan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC) Seksi 1–3 dan sedang dalam proses mempercepat Seksi 4 dengan progres mencapai 98,70%. API juga telah memulai pekerjaan manajemen proyek *New Priok Eastern Access* (NPEA) dengan tingkat penyelesaian 79,88%. Kami sangat mengapresiasi kinerja Perusahaan yang telah mulai menunjukkan hasil nyata sehingga dapat menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai *hinterland* utama dengan daerah industri di bagian Timur.

KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2022

Progres pembebasan lahan JTCC telah seluruhnya selesai dilakukan, mencapai 100%. Saat ini progres pembangunan proyek sedang dalam tahap penyelesaian konstruksi Seksi 4. Direksi, bersama dengan mitra terkait, memonitor

Our Esteemed Shareholders,

The Board of Commissioners oversaw the Company’s management by the Board of Directors of PT Akses Pelabuhan Indonesia (“API” or “the Company”) throughout 2022. We are very grateful that API has succeeded in starting the operation of the Cibitung–Cilincing Toll Road (JTCC) Sections 1–3 and is in the process of finishing Section 4 with current progress reaching 98.70%. API has also started the project management of the *New Priok Eastern Access* (NPEA) with a completion rate of 79.88%. We highly appreciate what the Company has done, for being able to show real progress and is able to start realizing its objective of connecting Tanjung Priok Port, as the main *hinterland*, with the industrial estate in the East.

BOARD OF DIRECTORS’ PERFORMANCE IN 2022

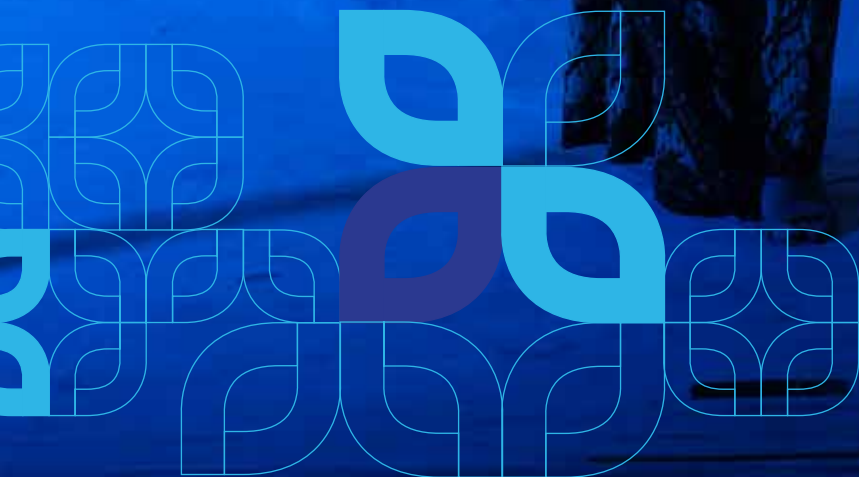
The land acquisition of JTCC has all been completed, reaching 100%. The project is now in its final stage to finish the construction of Section 4. The Board of Directors, together with our strategic partners, monitors the construction progress of





Banu Astrini

Komisaris Utama
President Commissioner



progres konstruksi Seksi 4 setiap minggunya. Dewan Komisaris juga mendapatkan informasi update progres terkini dari Direksi dan turut mendorong percepatan proyek. Harapannya, konstruksi Seksi 4 diharapkan selesai di awal 2023 untuk mengejar Uji Laik Fungsi dan mendapatkan Sertifikat Layak Operasi selambat-lambatnya di kuartal kedua.

JTCC Seksi 2 dan 3 telah resmi beroperasi, dan bertarif pada tanggal 10 Oktober 2022. Perusahaan telah memperoleh pendapatan dari *traffic* kendaraan mencapai Rp47,25 miliar. Tingkat pendapatan ini masih jauh di bawah RKAP 2022 sebesar Rp387,20 miliar walaupun sudah mengalami peningkatan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini tentunya sangat dipengaruhi oleh operasional JTCC. Walaupun demikian, Direksi telah bekerja dengan maksimal untuk memastikan JTCC resmi beroperasi dan menumbuhkan pendapatan usaha.

Perusahaan juga telah merealisasikan pekerjaan manajemen proyek NPEA dan pada akhir 2022 progres mencapai 79,88%. Perusahaan telah melakukan berkoordinasi secara intensif dengan berbagai mitra strategis dalam hal perizinan dan perencanaan teknis yang melibatkan pertemuan rutin dan kunjungan lapangan.

Bila dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI), skor pencapaian mencapai 80,25. Sebagian besar KPI tahun 2022 tercapai, hanya ada 2 (dua) target yang tidak terpenuhi yaitu EBITDA Margin dan produktivitas karyawan. EBITDA Margin tidak tercapai karena adanya keterlambatan pengoperasian JTCC. Produktivitas pegawai juga belum tercapai karena Perusahaan belum memaksimalkan perekrutan karyawan baru.

KEGIATAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasannya melalui mekanisme rapat internal dan rapat koordinasi dengan Direksi. Dalam rapat internal, Dewan Komisaris

Section 4 every week. The Board of Commissioners also receives the latest information from the Board of Directors and pushed them to accelerate the project. Hopefully, the construction of Section 4 will finish in early 2023 so that we can start the Roadworthiness Test and obtain the certificate at the latest in the second quarter.

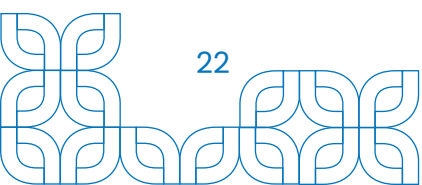
JTCC Sections 2 and 3 have started operating and collecting tickets since October 10, 2022. The Company has been earning revenues from vehicle traffic amounting to Rp47.25 billion. It was still below the targeted Rp387.20 billion of the 2022 RKAP, but three times higher than the previous year. This achievement was greatly influenced by the operation of JTCC. Nonetheless, the Board of Directors has worked very hard to ensure JTCC can finally operate and thus grew the Company's revenues.

The Company has also worked on the management of the NPEA project and its progress by the end of 2022 was 79.88%. The Company has been making intense coordination processes with strategic partners in terms of permits and technical plans which involve regular meetings and site visits.

In terms of Key Performance Indicators (KPI), the achievement score was 80.25. The Company has reached most targets in the KPI of 2022, except for two targets including EBITDA Margin and employee productivity. EBITDA Margin was not achieved due to delays in the operation of JTCC. Meanwhile, employee productivity could not be achieved because the Company has not been active in recruiting new employees.

OVERSIGHT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has performed the oversight through internal meetings, and coordination meetings with the Board of Directors. During the internal meetings, the Board



mengevaluasi kinerja Perusahaan dan tindak lanjut sebagai arahan kepada Direksi. Agenda pembahasan dalam rapat-rapat internal mencakup:

1. Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021;
2. Realisasi RKAP Tahun 2022;
3. Isu-isu Strategis Perusahaan;
4. Penyusunan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris.

Sedangkan dalam rapat koordinasi dengan Direksi di sepanjang tahun 2022, agenda pembahasan mencakup Pembahasan Progres Proyek dan Kinerja Perusahaan yang mencakup progres pencapaian Rencana Kerja Manajemen 2022, realisasi RKAP 2022, progres proyek JTCC, divestasi saham, progres pengembangan *rest area & logistic center*, laporan keuangan bulan berjalan.

Dalam hal realisasi RKAP Tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan evaluasi terhadap kebijakan Perusahaan terkait kinerja operasional dan kinerja keuangan.

Progres penyelesaian proyek JTCC selalu menjadi pembahasan rutin dan Dewan Komisaris menghimbau Direksi untuk mempercepat pembangunan proyek sehingga dapat selesai sesuai target dengan tingkat kualitas sesuai ekspektasi dengan biaya sesuai anggaran. Dewan Komisaris juga menasihati Direksi untuk memperhatikan rencana divestasi agar Perusahaan memperoleh hasil yang maksimal dengan memanfaatkan situasi pasar. Hal ini penting karena Perusahaan harus memastikan kesehatan usahanya agar dapat terus berjalan dalam jangka panjang.

Program kerja lainnya yang telah Dewan Komisaris lakukan adalah penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. Dewan Komisaris telah menyampaikan usulannya ke Direksi PT Pelindo Solusi Logistik, selaku Pemegang Saham.

of Commissioners evaluated the Company's performance and monitored the follow-up from the Board of Directors. The agendas during the internal meetings were around:

- 1. The Company's Annual Report and Ratification of Financial Statements for Fiscal Year 2021;*
- 2. Achievement of the 2022 RKAP;*
- 3. Strategic Corporate Issues;*
- 4. Preparation of the Board of Commissioners' Written Responses.*

Meanwhile, during the coordination meetings with the Board of Directors throughout 2022, the agendas were around Project Progress and Company Performance which includes the 2022 Management Work Plan, the 2022 RKAP, the JTCC progress, share divestment, the progress of rest area & logistics center, monthly financial report.

In terms of the 2022 RKAP realization, the Board of Commissioners has supervised the Board of Directors and evaluated the Company's policies regarding operational and financial performance.

The JTCC progress has always been one of the agendas and the Board of Commissioners has urged the Board of Directors to accelerate the construction to be completed within the timeline with the level of quality under the budget. The Board of Commissioners also advised the Board of Directors to pay attention to the divestment plan to allow the Company gains maximum results, leveraging on the market situation. This is important because the Company has to ensure the soundness of its business to keep continuing in the long term.

In addition, the Board of Commissioners has suggested the Public Accounting Firm (KAP) for the Company's Financial Statements for the Financial Year 2022. The Board of Commissioners has submitted the proposal to the Board of Directors of PT Pelindo Solusi Logistik, as the Shareholder.

Selain itu, dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi, telah diberikan sejumlah tanggapan/rekomendasi secara tertulis mencakup berbagai hal terkait jalannya Perusahaan.

PANDANGAN TERHADAP GCG

Dewan Komisaris sangat memperhatikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perusahaan. Hal ini penting mengingat API merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu penerapan GCG dapat memastikan bahwa Perusahaan tetap konsisten mencapai tujuan usaha dan terbebas dari segala macam risiko yang berkaitan dengan *fraud* dan pungutan liar (pungli), terutama dalam pengembangan kawasan dan pelayanan logistik.

Pada tahun 2022, API telah melaksanakan pelatihan atau *workshop* mengenai ISO 37001 untuk sistem manajemen anti penyuapan pada tanggal 17-18 November 2022. Melalui pelatihan ini diharapkan seluruh karyawan API dapat memperkuat integritas diri untuk menjadi individu yang tangguh dalam menolak segala bentuk penyuapan demi kepentingan Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan.

Perusahaan juga terbilang konsisten dalam penerapan GCG. Terbukti dari hasil *assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2021 mencapai nilai 85,01 dengan kualifikasi "BAIK". Pencapaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun buku 2020 sebesar 83,47. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut nilai penerapan GCG Perusahaan dikategorikan dalam kualifikasi BAIK.

Perusahaan juga secara konsisten menerapkan menjaga komitmen menerapkan kebijakan Anti Korupsi, Anti Gratifikasi, dan *Whistleblowing System* (WBS). Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan berkewajiban untuk menjalankan semua kebijakan tersebut, tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani oleh semua Insan Perusahaan.

In addition, during the coordination meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors, written responses/recommendations were given regarding various issues related to the Company's course.

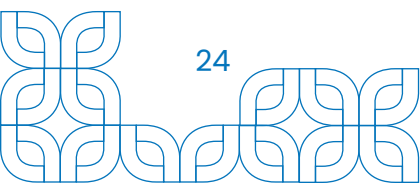
VIEW ON CGCG

The Board of Commissioners is very concerned about how the Company implements Good Corporate Governance (GCG). This is important considering that API is part of a State-Owned Enterprise (BUMN). In addition, the implementation of GCG can ensure that the Company remains consistent in achieving its objectives and is free from all kinds of risks related to fraud and extortion, especially during the construction of logistics estate and services.

In 2022, API has conducted a training or workshop on ISO 37001, an anti-bribery management system, from November 17 to November 18, 2022. Through this training, all employees can hopefully have more integrity to become strong individuals in rejecting all forms of bribery for the Company's best interest and all stakeholders.

The Company has also been consistent in implementing GCG. It is evident from the GCG assessment for the financial year 2021 with a score of 85.01, qualified as "GOOD". This achievement was slightly higher than the financial year 2020 at 83.47. For 2 (two) consecutive years, the Company has maintained the quality of its GCG implementation as GOOD.

The Company has also been consistent with its commitment to implementing Anti-Corruption, Anti-Gratification and Whistleblowing System (WBS). The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees are obliged to follow the provision of these policies, without exception. There is also an integrity pact signed by all personnel of the Company.



KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Audit. Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk membantu pengawasan internal terhadap pengelolaan Perusahaan.

KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2022, terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor: HM.03.03/26/4/7/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor: HK.55/26/4/1/PTP-22 tanggal 26 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris, maka susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Banu Astrini
Komisaris : Hotman Napitupulu
Komisaris : David Ratadhi Wironegoro

PROSPEK USAHA 2023

Prospek usaha tahun 2023 dipenuhi optimisme karena ekonomi Indonesia diperkirakan terus menguat seiring dengan dicabutnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Masyarakat akan menjalani hidup secara normal dan pasar akan bereaksi positif. Aktivitas transportasi yang mencakup distribusi, pergudangan, kepelabuhan juga akan mengalami peningkatan. Pada akhirnya, keberadaan JTCC akan sangat membantu roda perekonomian nasional secara keseluruhan. Ini merupakan sebuah peluang bagi Perusahaan untuk sesegera mungkin menyelesaikan keseluruhan seksi JTCC untuk mendorong peningkatan pendapatan mencapai target RKAP.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In assisting the oversight function of the Board of Commissioners, an Audit Committee was formed. The Board of Commissioners has seen how the Audit Committee has performed its duty in assisting with internal control over the management of the Company.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2022, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. Following the Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders (Circular Decision of the GMS) Number: HM.03.03/26/4/7/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number: HK.55/26/4/1/PTP-22 dated April 26, 2022, concerning the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners, the composition of the members of the Board of Commissioners is as follows:

*President Commissioner : Banu Astrini
Commissioner : Hotman Napitupulu
Commissioner : David Ratadhi Wironegoro*

BUSINESS PROSPECT IN 2023

It will be a year of optimism in 2023 when Indonesia's economy will continue growing stronger after the community activity restriction (PPKM) has been revoked. People will live their life normally and the market will react positively. Transportation activities which include distribution, storage, and ports will also increase. In the end, JTCC will greatly help the national economy. This is an opportunity for the Company to complete the entire section of JTCC as soon as possible to improve its revenues and achieve the targets set out in the RKAP.

Direksi perlu bekerja dengan penuh semangat dan memastikan tercapainya target usaha, terutama yang berkaitan dengan operasional proyek. Direksi juga perlu memperhatikan berbagai risiko usaha yang mengiringi penyelesaian proyek karena hal tersebut sangat mempengaruhi pengembalian investasi Pemegang Saham. Tentunya Perusahaan perlu untuk memberikan hasil maksimal bagi Pemegang Saham dan mencapai tujuan usaha untuk menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai *hinterland* utama dengan daerah industri di bagian Timur.

The Board of Directors needs to be more enthusiastic and ensure that business targets are achieved, especially when it comes to project operations. The Board of Directors should also be more concerned about business risks that accompany the completion of various projects because this greatly affects Shareholders' returns. Without a doubt, the Company has to generate maximum results for Shareholders and achieve business goals to connect Tanjung Priok Port, as the main hinterland, with industrial estates in the East.

APRESIASI

Sebagai penutup laporan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada para Pemegang Saham yang telah memberikan dukungannya kepada Perusahaan. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi serta seluruh Insan API yang telah memberikan komitmennya untuk kemajuan Perusahaan di tahun 2022.

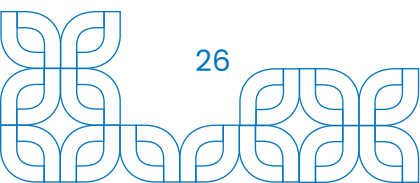
APPRECIATION

To conclude this report, we would like to thank the Shareholders who have trusted the Company. The Board of Commissioners also gives the highest appreciation to the Board of Directors and all personnel of API who have given their commitment to the Company to keep progressing in 2022.

Atas Nama Dewan Komisaris
*On Behalf of the Board of
Commissioners*



Banu Astrini
Komisaris Utama
President Commissioner





Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors Report

Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) mencapai 80,25 dengan pendapatan jalan tol meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp55,18 miliar.

The Key Performance Indicators (KPI) achievement reached 80.25 with toll road revenues escalated over three times than the previous year to reach Rp55.18 billion.

Pemegang Saham yang Terhormat,

Progres pembangunan JTCC pada akhir 2022 mencapai 98,70%. Progres pembebasan lahan mencapai 100%. Pendapatan Perusahaan dari jalan tol dan *management fee* NPEA mencapai Rp56,74 miliar. Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) mencapai 80,25. Berikut ini kami sampaikan ringkasan kinerja Manajemen di sepanjang tahun 2022.

REALISASI RENCANA KERJA MANAJEMEN

Progres konstruksi JTCC mencapai 98,70%, terdapat deviasi 0,14% dan proyek ini belum dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu (*behind schedule*). Secara keseluruhan proses pembebasan lahan di Kabupaten Bekasi dan DKI Jakarta telah semuanya selesai dilakukan (100%).

Saat ini telah beroperasi sebanyak 3 (tiga) Seksi yakni Seksi 1 ruas SS Cibitung-Telaga Asih sepanjang 3,03 Km, sudah beroperasi sepanjang 2,65 km sejak 2021 lalu. Selanjutnya Seksi 2 dan 3 Telaga Asih-Tarumajaya sepanjang 24,45 km telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kemudian

Our Esteemed Shareholders,

By the end of 2022, JTCC construction reached 98.70%. The land acquisition has all been processed (100%). The Company's revenue from toll road and NPEA management fees reached Rp56.74 billion. The achievement of Key Performance Indicators (KPI) reached 80.25. Through the following, please allow us to present the summary of Management's performance throughout 2022.

REALIZATION OF MANAGEMENT WORK PLAN

JTCC construction reached 98.70% and there was a 0.14% deviation that made this project behind schedule. The overall land acquisition process in Bekasi Regency and DKI Jakarta has all been completed (100%).

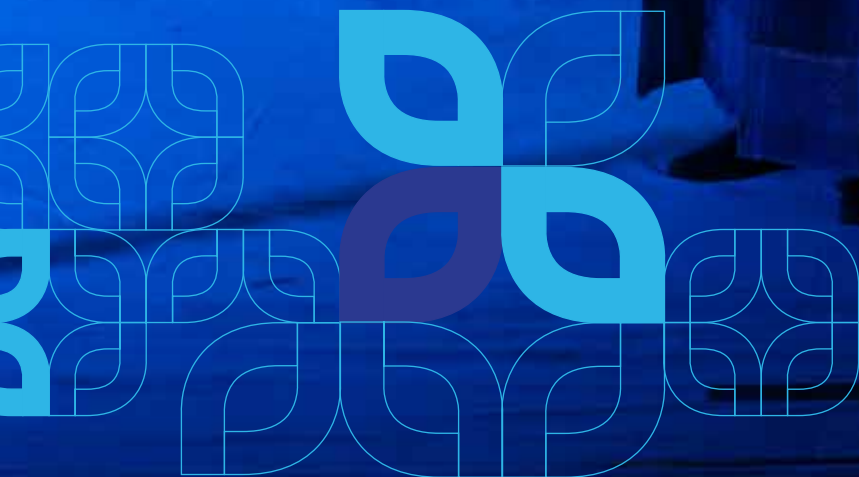
There are 3 (three) Sections operating including Section 1 of SS Cibitung-Telaga Asih (3.03 km), of which 2.65 km has been operating since 2021. Furthermore, Sections 2 and 3 (24.45 km) of Telaga Asih-Tarumajaya have been inaugurated by President Jokowi. Section 4 of Tarumajaya-





Iwan Ridwan

Direktur Utama
President Director



untuk Seksi 4 ruas Tarumajaya-Cilincing (7,52 km) sedang dalam tahap akhir penyelesaian konstruksi.

Pendapatan dari pengoperasian jalan tol mengalami peningkatan 312,08% di tahun 2022 mencapai Rp55,18 miliar dari Rp13,39 miliar di tahun sebelumnya. Pendapatan di tahun 2022 masih lebih rendah dari RKAP 2022 sebesar Rp387,20 miliar. Hal ini juga diakibatkan oleh rendahnya volume *traffic* kendaraan (unit) karena Seksi 4 masih konstruksi. Ruas JTCC belum tersambung seluruhnya dengan jaringan JORR1 & JORR2 dan jalan akses dari dan ke Tarumajaya di Marunda masih sempit dan padat.

Di tahun 2022 Perusahaan membukukan pendapatan baru dari *management fee* NPEA sebesar Rp1,56 miliar. Progres manajemen proyek NPEA pada akhir 2022 mencapai 79,88%. Saat ini progres manajemen proyek sedang dalam tahap pengurusan izin AMDAL. Pada akhir tahun 2022, Perusahaan telah berhasil menerbitkan sejumlah dokumen termasuk RKKPR/RTRW dan KKPRL. Selain itu dokumen DPPT juga telah selesai.

Perusahaan belum dapat merealisasikan divestasi 65% kepemilikan saham CTP sehingga menyebabkan laporan keuangan masih terkonsolidasi. Hal ini menyebabkan API membukukan kerugian sebesar Rp349 miliar dengan kontribusi beban paling signifikan adalah beban bunga kredit investasi dan ICL dari Pelindo mencapai Rp420 miliar.

Pada tahun 2022, Perusahaan telah melakukan sejumlah investasi. Investasi saham murni yang terealisasi di tahun 2022 adalah sebesar Rp805,39 miliar untuk penyertaan modal CTP. Perusahaan belum merealisasikan rencana investasi untuk pembangunan *Rest Area & Logistics Park* (Proyek Mermaid), untuk membeli saham MMI, ataupun untuk mengakuisisi saham WTR di CTP.

Investasi saham *multiyears* yang telah terealisasi di tahun 2022 adalah untuk *capital expenditure* (capex) proyek JTCC sebesar Rp1,60 triliun. Perusahaan belum merealisasikan investasi

Cilincing (7.52 km) is in the final construction stage.

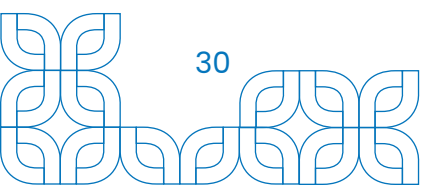
Revenue from toll road operations increased by 312.08% in 2022 and reached Rp55.18 billion from Rp13.39 billion in the previous year. Revenue in 2022 was lower than the targeted Rp387.20 billion of the 2022 RKAP. This was also due to the low traffic volume (vehicles) because Section 4 is still under construction. All sections of JTCC have not been fully connected with the JORR1 & JORR2 and the access from and to Tarumajaya in Marunda is still narrow and heavy traffic.

In 2022 the Company gained a new stream of revenue from the management fee of NPEA amounted to Rp1.56 billion. The management progress at the end of 2022 reached 79.88%. The project management is now in the process of obtaining the AMDAL permit. By the end of 2022, the Company has succeeded in issuing several documents including the RKKPR/RTRW and KKPRL. In addition, the DPPT documents have also been completed.

The Company has not been able to realize the 65% divestment of CTP's shares and thus the financial statements are still consolidated. This made API record a loss of Rp349 billion, most significantly from the expense of investment credit interest and ICL from Pelindo in the amount of Rp420 billion.

The Company has made several investments in 2022. The pure share investment the Company realized in 2022 was Rp805.39 billion equity participation on CTP. The Company has yet to realize its investment plans to construct the Rest Area & Logistics Park (Mermaid Project), acquire MMI shares, or acquire WTR's shares in CTP.

The multiyear investment in shares that have been realized in 2022 was the Rp1.60 trillion capital expenditure (capex) on the JTCC project. The Company has yet to realize the stock investment



saham pada *Joint-Venture Company* sebesar Rp50 miliar (dari total Rp224 miliar).

Sedangkan investasi fisik yang merupakan penyertaan modal adalah sebesar Rp1 miliar sebagai *intangible* asset Proyek Mermaid dan Rp4,2 miliar untuk capex furnitur CTP.

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Pada akhir tahun 2022, Perusahaan mencatat rugi neto sebesar Rp348,85 miliar. Perusahaan mengalami peningkatan rugi bersih dibandingkan rugi bersih tahun sebelumnya sebesar Rp78,51 miliar. Bila dibandingkan RKAP 2022, di tahun 2022 Perusahaan ditargetkan mendapatkan laba Rp407,97 miliar.

Total aset Perusahaan akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp12,50 triliun atau meningkat 13,38% dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp11,03 triliun. Aset Perusahaan mayoritas terdiri dari aset tidak lancar sebesar Rp12,19 triliun yang mengalami peningkatan 15,94% dari tahun 2021.

Total liabilitas Perusahaan di akhir tahun 2022 mencapai Rp12,34 triliun dari Rp10,51 triliun di tahun 2021. Liabilitas Perusahaan di tahun 2022 mayoritas terdiri dari liabilitas jangka panjang sebesar Rp10,31 triliun dibandingkan tahun sebelumnya berjumlah Rp9,16 triliun.

Total ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp164,96 miliar. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp348,59 miliar atau 67,8% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp513,54 miliar.

KINERJA PERUSAHAAN LAINNYA

Dari sisi SDM, Perusahaan telah memberikan kesempatan pelatihan kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut adalah mengenai ISO 37001 untuk sistem manajemen anti penyuapan pada tanggal 17-18 November 2022.

Perusahaan juga terus menjalankan penerapan GCG secara konsisten setiap tahunnya. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut nilai penerapan GCG Perusahaan dikategorikan dalam kualifikasi

in a Joint-Venture Company amounted to Rp50 billion (out of a total of Rp224 billion).

While the physical investment of capital participation was the Rp1 billion intangible assets for the Mermaid Project and the Rp4.2 billion capex on furniture for CTP.

THE FINANCIAL PERFORMANCE

By the end of 2022, the Company recorded a net loss of Rp348.85 billion. The net loss in 2022 has increased compared to the previous year's net loss of Rp78.51 billion. When compared to the 2022 RKAP, the Company is targeted to gain a profit of Rp407.97 billion.

The Company's total assets at the end of 2022 amounted to Rp12.50 trillion, higher by 13.38% than Rp11.03 trillion in the previous year. Most of the assets were non-current assets of Rp12.19 trillion, which was 15.94% higher than in 2021.

The Company's total liabilities at the end of 2022 reached Rp12.34 trillion from Rp10.51 trillion in 2021. Most of the Company's liabilities in 2022 consisted of non-current liabilities at Rp10.31 trillion compared to Rp9.16 trillion in the previous year.

The Company's equity amounted to Rp164.96 billion. It was lower by Rp348.59 billion or 67.8% compared to Rp513.54 billion in the previous year.

PERFORMANCE IN OTHER ASPECTS

In terms of HR, the Company has conducted a training or workshop on ISO 37001, anti-bribery management system, from November 17 to November 18, 2022.

The Company has also been consistent in implementing GCG. For 2 (two) consecutive years, the Company has maintained the quality of its GCG implementation as GOOD. The score of

BAIK. Hasil assessment penerapan GCG untuk tahun buku 2021 mencapai nilai 85,01 dan sedikit lebih tinggi dibandingkan skor tahun buku 2020 sebesar 83,47.

Perusahaan juga terus menjalankan kewajiban sosialnya untuk masyarakat melalui partisipasi kegiatan tanggung jawab sosial (CSR). Kegiatan CSR juga telah disesuaikan dengan arahan dari Pelindo. Secara total Perusahaan menghabiskan Rp300 juta untuk kegiatan CSR yang antara lain mencakup donasi perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, bantuan pendidikan Kejar Paket C, serta penanaman pohon.

Pada tahun 2022, Perusahaan juga mengembangkan teknologi perihal persiapan migrasi sistem informasi keuangan yang lebih handal dan penyesuaian *chart of account* (COA). Perusahaan telah mencapai target pengembangan dan COA Perusahaan saat ini telah disesuaikan dengan COA Grup Pelindo.

PROSPEK USAHA 2023

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2023 tetap kuat sebesar 4,9%-5,3%. Prakiraan peningkatan ekonomi tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan level mobilitas masyarakat yang semakin meningkat pasca pandemi, kegiatan logistik menjadi semakin meningkat untuk mengimbangi aktivitas permintaan & penawaran berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Keberadaan Tol Cilincing-Cibitung diperkirakan akan memperlancar konektivitas logistik, industri hingga mobilitas masyarakat mulai dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek di bagian selatan dan Jalan Tol Akses Tanjung Priok di bagian utara. Nantinya, Jalan Tol ini juga mendukung akses logistik menuju Pelabuhan Tanjung Priok hingga kawasan industri di sekitarnya.

the GCG assessment for the financial year 2021 reached 85.01, slightly higher than the financial year 2020 at 83.47.

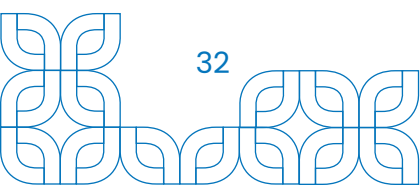
The Company continued to fulfill its social obligations to the community through social responsibility (CSR) activities. CSR activities have also been adjusted according to directions from Pelindo. In total, the Company spent Rp300 million for its CSR activities, which among others on donations for Eid al-Fitr and Eid al-Adha, educational assistance for Kejar Paket C (equivalent to senior high school), and planting trees.

In 2022, the Company has improved its technology in preparation to migrate its financial information system into a new chart of account (COA) that is more reliable. The Company has achieved its target and currently, the COA has been aligned with the COA of Pelindo Group.

BUSINESS PROSPECT IN 2023

Bank Indonesia projects strong economic growth in Indonesia in the range between 4.9% and 5.3% in 2023. The economic growth projection is in line with higher mobility of the community after the Community Restriction (PPKM) was dismissed, higher estimation of business prospects, higher Foreign Investment (PMA), and acceleration to finish the National Strategic Projects (PSN).

With higher mobility after the pandemic crisis, activities in logistics have also increased to accommodate the demand & supply of various commodities in the market. The Cilincing-Cibitung Toll Road is expected to bring logistics connectivity, and facilitate industrial and community mobility from the Jakarta-Cikampek Toll Road in the south and the Tanjung Priok Access Toll Road in the north. In the future, this toll road will also support logistic access to Tanjung Priok Port to its surrounding industrial areas.



KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pada tahun 2022, terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor: SK.03/14/3/2/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor: HK.55/14/3/1/PTP-22 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pemberhentian Direksi, maka susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

| | |
|---|--------------|
| Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis: | Iwan Ridwan |
| Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia: | Juli Tarigan |

APRESIASI

Demikian kami sampaikan laporan atas kinerja pengelolaan API tahun 2022. Terima kasih kami ucapkan kepada para Pemegang Saham untuk dukungan yang telah diberikan dan kepada Dewan Komisaris untuk rekomendasi dan arahan yang telah diberikan. Kepada seluruh karyawan, kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk dedikasi dan kinerja yang telah diberikan.

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In 2022 there was a change in the composition of the Board of Directors. Following the Resolution of Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders (Circular Decision of the GMS) Number: SK.03/14/3/2/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number: HK.55/14/3/1/PTP-22 dated March 14, 2022, concerning the Dismissal of the Board of Directors, the composition of the members of the Board of Directors is as follows:

| | |
|---|--------------|
| President Director and Act. Director of Operation and Business Development: | Iwan Ridwan |
| Director of Finance and Human Resources: | Juli Tarigan |

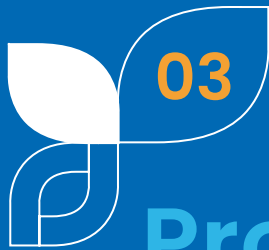
APPRECIATION

This concludes the management report for 2022. We would like to thank the Shareholders for trusting the Company and the Board of Commissioners for the recommendation and guidance. To all employees, we give our highest appreciation for the dedication and performance that all have given.

Atas Nama Direksi
On Behalf of Board of Directors

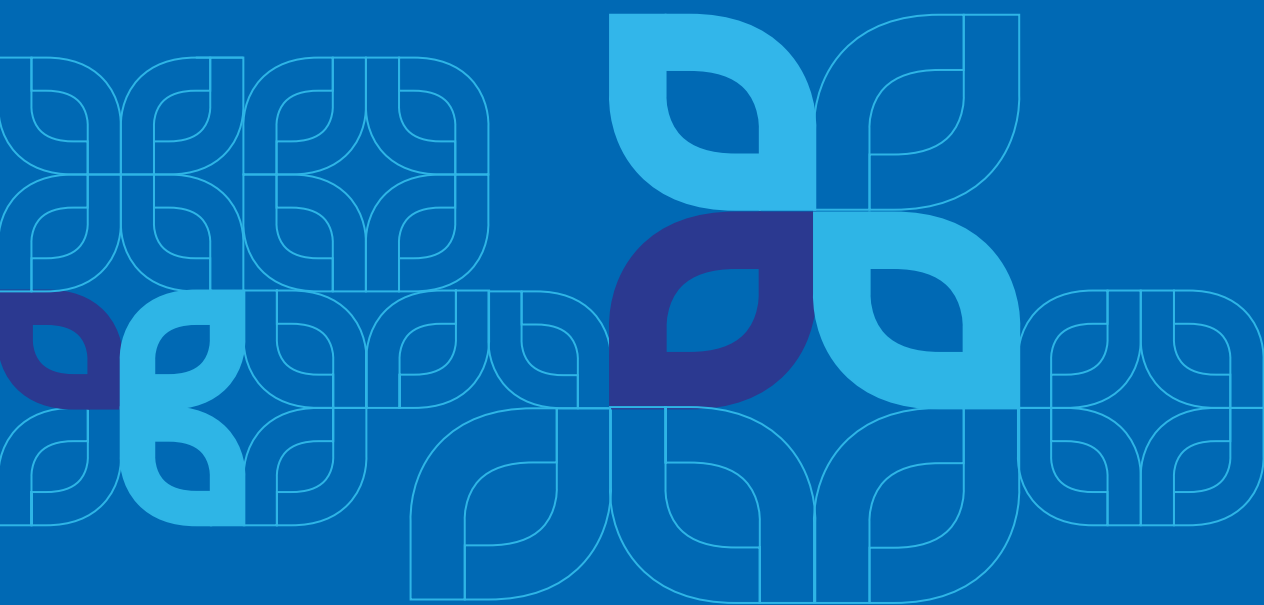


Iwan Ridwan
Direktur Utama
President Director



Profil Perusahaan

Company Profile





IDENTITAS PERUSAHAAN

Corporate Identity

Nama Name

PT Akses Pelabuhan Indonesia

Bidang Usaha Line of Business

Penyelenggaraan proyek jalan tol dan menjalankan perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol.
Concession of toll road project and management of a company in connection with the toll road project concession.

Status Perusahaan Company Status

Perusahaan Tertutup, Tidak Terdaftar
Private Non-Listed

Kepemilikan Ownership

PT Pelindo Solusi Logistik : 99,79%
PT Pelabuhan Tanjung Priok : 0,21%

Tanggal Pendirian Date of Establishment

4 Agustus 2014
August 4, 2014

Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment

Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014
Deed No. 29, dated July 24, 2014

Modal Dasar Authorized Capital

Rp3.874.000.130.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-In Capitals

Rp3.068.607.360.000

Alamat Kantor Office Address

Pelindo Tower, 12th Floor
Jl. Yos Sudarso No. 9
Jakarta 14230, Indonesia

Surel Email

adm.api@aksespelabuhan.co.id

Situs Website

www.aksespelabuhan.co.id

Jumlah Karyawan Total Employees

21 orang/*people*

Jumlah Aset Total Assets

Rp12.501.172.605.009

KEANGGOTAAN ASOSIASI

Association Membership

Hingga akhir Desember 2022, Perusahaan tidak tergabung dalam suatu asosiasi profesional dalam suatu industri.

By the end of December 2022, the Company was not part of any membership in a professional association of a particular industry.

SEKILAS PERUSAHAAN

Company at a Glance

PT Akses Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "API" atau "Perusahaan") merupakan anak perusahaan dari PT Pelindo Solusi Logistik (PSL) dan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yang didirikan pada tanggal 4 Agustus 2014. Perusahaan didirikan dengan berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Akses Pelabuhan Indonesia Akta Nomor 35 Tanggal 18 November 2022, yang dibuat di hadapan Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0078308 Tanggal 21 November 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Akses Pelabuhan Indonesia.

API didirikan karena dipicu oleh kebutuhan akses darat dengan kapasitas dan kualitas yang memadai untuk mendukung pengembangan Pelabuhan New Priok Kalibaru, yaitu proyek *New Priok Eastern Access (NPEA)*. Konstruksi Pelabuhan New Priok Kalibaru telah dimulai di tahun 2022 dan ditargetkan akan memiliki

PT Akses Pelabuhan Indonesia (hereinafter referred to as "API" or "Company") is a subsidiary of PT Pelindo Solusi Logistik (PSL) and PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) which was established on August 4, 2014. The Company was established based on Deed of Establishment No. 29 dated July 24, 2014, made before Yulianti Irawati, S.H., successor to Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. This deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014, and announced in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated June 4, 2013. The Company's Articles of Association have been amended lastly with Deed of Shareholders Resolution of PT Akses Pelabuhan Indonesia Number 35 dated November 18, 2022, made before Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta with its notification sent to and received by the Minister of Law and Human Rights through the Letter of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-AH.01.09-0078308 dated November 21, 2022 concerning Notification Receipt to the Amendment of the Articles of Association of PT Akses Pelabuhan Indonesia.

API was established because there is a need of land access with enough capacity and quality to support the development of New Priok Kalibaru Port – the New Priok Eastern Access (NPEA). The construction of New Priok Kalibaru Port has started in 2022 and it is projected to accommodate a container terminal of up to 4.5 million TEU/year

kapasitas yang mampu menampung terminal kontainer hingga 4,5 juta TEU/tahun dan terminal curah cair (*petroleum*) dengan kapasitas sebesar 10.000 *metric ton*/tahun. API berperan untuk memperlancar pembangunan tersebut dengan mengakuisisi saham Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang dimiliki oleh perusahaan Malaysia. Jalan Tol Cibitung-Cilincing merupakan jalan tol yang sangat strategis bagi Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi penghubung dengan *hinterland* utama yang merupakan daerah industri di bagian Timur.

Berdasarkan Rencana Kerja Manajemen (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022, prioritas kegiatan Perusahaan adalah mendorong percepatan proyek pembangunan JTCC dan melakukan divestasi saham Perusahaan pada PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP). Kegiatan penting lainnya yang diusulkan API kepada Pemegang Saham, dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau "Pelindo", adalah mengembangkan bisnis baru sebagai turunan dari investasi di JTCC. Bisnis baru tersebut adalah *Rest Area* Jalan Tol yang dilengkapi dengan *Rest Area & Logistic Center*. Selain itu, Perusahaan juga membantu Pelindo dalam proses perencanaan jalan akses dari JTCC menuju NPEA.

API merupakan pionir, baik bagi Pelindo maupun dalam skala nasional, di bidang penyediaan akses khusus dan/atau jalan tol ke pelabuhan dan fasilitas pendukungnya. Pada tahap awal, akses ini dibuat untuk menuju pelabuhan-pelabuhan di lingkungan Pelindo dan tidak tertutup kemungkinan untuk dimanfaatkan mendukung akses menuju pelabuhan-pelabuhan di luar Pelindo ke depannya.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Perusahaan tidak pernah mengalami pergantian nama dan hingga 31 Desember 2022 tetap menggunakan nama PT Akses Pelabuhan Indonesia.

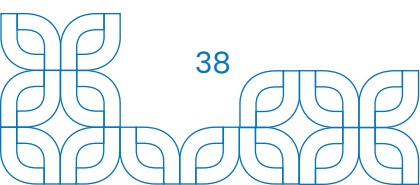
and a liquid bulk (petroleum) terminal with a capacity of 10,000 metric tons/year. API's role is to facilitate this development by first acquiring the Cibitung-Cilincing Toll Road shares owned by a Malaysian company. The Cibitung-Cilincing Toll Road is very strategic for the Tanjung Priok Port that connects it with the main hinterland, Eastern industrial area.

Based on the Management Work Plan (RKM) and the Company's Budget (RKAP) for 2022, the Company has the priority to accelerate the construction of JTCC project and divest its shares in PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP). Another important activities that API has proposed by API to Shareholders, in this case PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or "Pelindo", is to develop a new business as a derivative for the investment in JTCC. The new business is the Rest Area, equipped with a Logistic Center. In addition, the Company also assisted Pelindo in planning the road as an access between JTCC and NPEA.

API is a pioneer, both for Pelindo and on a national scale, in the field of providing special access and/or toll roads to ports and their supporting facilities. In the early stages, this access was made to go to ports within the Pelindo environment and it is possible to be used to support access to ports outside Pelindo in the future.

CHANGES IN COMPANY'S NAME

The Company has never changed its name and until December 31, 2022, the Company's name remains PT Akses Pelabuhan Indonesia.



BIDANG USAHA

Line of Business

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang konstruksi, pengangkutan dan pergudangan dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Saat ini, kegiatan Perusahaan dan entitas anaknya terutama bergerak dalam bidang penyelenggaraan proyek jalan tol.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of business of the Company is in the fields of construction, transportation and warehousing and professional, scientific and technical activities.

Currently, the Company and its subsidiary primarily engaged in a toll road project.

VISI & MISI

Vision & Mission



Visi

Vision

Menjadi Integrator Pelabuhan dan *Hinterland* Terkemuka di Indonesia

To become Top Leading Port and Hinterland Integrator in Indonesia.



Misi

Mission

Menciptakan Integrasi antara Pelabuhan dan *Hinterland* Guna Memperlancar Arus Barang.

Creating Integration between Port and Hinterland by Accelerating the Flow of Goods.

KOMPONEN VISI

Penyediaan akses Pelabuhan dari dan menuju Kawasan Industri

Terlibat dalam pengembangan proyek akses Pelabuhan menuju *hinterland* atau pusat produksi komoditas.

Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan Pelabuhan

Mengembangkan Kawasan industri yang terintegrasi langsung dengan Pelabuhan "*Port Associated Industry*".



COMPONENTS OF VISION

Providing Port access to and from the Industrial Estate

Involves in the development of port access projects to the hinterland or center of commodity production.

Developing the Estate that is integrated with Ports

*Developing the industrial Estate with a direct connection with the port, known as "*Port Associated Industry*".*

Penyediaan fasilitas dan jasa pendukung logistik dan lainnya

Menyediakan *added value* proyek dan jasa pendukung dalam lingkup akses Pelabuhan dari Pelabuhan menuju Kawasan *hinterland*.

KOMPONEN MISI

Stakeholder Perspective

- Memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder*, dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi *shareholder*
- Menjalankan proses korporasi dengan acuan *good corporate governance* (GCG)

Employee Perspective

- Menciptakan suasana yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas pegawai perusahaan
- Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan untuk mendukung loyalitas dan kreatifitas karyawan

Customer & Partner Perspective

- Mengembangkan proyek yang dapat mengintegrasikan Pelabuhan dan *hinterland* beserta fasilitas pendukungnya
- Mengimplementasikan kerja sama dengan mitra internal dan eksternal dengan asas saling menguntungkan dan mendorong sinergisasi grup

National Perspective

- Meningkatkan konektivitas logistik untuk menciptakan biaya logistik nasional yang terjangkau dan kompetitif

Visi dan Misi Perusahaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Akses Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-623-29012021-026 dan Nomor: HK.55/29/1/1/PTP-21 Tanggal 29 Januari 2021.

Perumusan visi dan misi dilakukan melalui kajian secara mendalam oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta jajaran manajemen lainnya, dan senantiasa ditelaah secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis serta tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan.

Providing logistics and other supporting facilities and services

Providing *added value* for the project and supporting services in terms of port access from the port to the *hinterland* Estate.

COMPONENTS OF MISSION

Stakeholder Perspective

- Providing *added value* for stakeholders and maximum benefits for shareholders
- Running the corporate by referring to *good corporate governance* (GCG)

Employee Perspective

- Creating a supporting atmosphere to increase the productivity of employees
- Improving the competency and welfare of employees to make them more loyal and creative

Customer & Partner Perspective

- Developing projects that can integrate Ports, *hinterlands*, and their supporting facilities
- Creating mutually beneficial cooperation with internal and external partners and encouraging group synergy

National Perspective

- Improving logistics connectivity to make national logistics costs more affordable and competitive

The Company's Vision and Mission are determined based on the Resolution of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders (Circular) of PT Akses Pelabuhan Indonesia Number: PPI-623-29012021-026 and Number: HK.55/29/1/1/PTP-21 dated January 29, 2021.

The vision and mission were prepared through in-depth studies by the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the management, and the statement has been reviewed periodically to ensure that it is still relevant to the current business development and challenges the Company has to face.



NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Corporate Values

AMANAHAH TRUSTWORTHY

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan
We uphold the trust given

KOMPETEN COMPETENT

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
We keep on learning and improving our capabilities

HARMONIS HARMONIOUS

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.
We care for others and respect differences

LOYAL LOYAL

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
We prioritise our dedication for Nation and Country

ADAPTIF ADAPTIVE

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
We keep on innovating and enthusiastic about moving or facing changes

KOLABORATIF COLLABORATIVE

Membangun kerja sama yang sinergis
We build strategic alliance



JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

Company Milestone

2014

Pendirian Perusahaan pada tanggal 4 Agustus 2014, dengan tujuan utama adalah akuisisi Jalan Tol Cibitung Cilincing (JTCC) untuk terlibat dalam penyediaan *World Class Port Access* ke lokasi Pelabuhan-pelabuhan Tanjung Priok, terutama pelabuhan New Priok Kalibaru.

The Company was established on August 4, 2014, with the main objective to acquire the Cibitung Cilincing Toll Road (JTCC) as part of providing World Class Port Access to Tanjung Priok Ports, particularly the New Priok Kalibaru Port.

2015

Menyelesaikan akuisisi kepemilikan saham 45% di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) dari MTD Capital Berhard-Malaysia (kepemilikan saham 90%) dan PT Nusacipta Etika Pratama (kepemilikan saham 10%) pada September 2015.

Completed the acquisition of 45% share ownership in the Toll Road Business Entity (BUJT), Cibitung-Cilincing Toll Road (JTCC) from MTD Capital Berhard-Malaysia (90% share ownership) and PT Nusacipta Etika Pratama (10% share ownership) on September 2015.

2017

PT Waskita Toll Road (WTR) menjadi pemegang saham MTDX menggantikan seluruh 55% saham MTDC dan NEP yang mencapai closing di bulan Mei 2017 dan merubah nama MTDX menjadi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP); API tetap memiliki 45% saham sisanya.

PT Waskita Toll Road (WTR) became the shareholder of MTDX replaced 55% of the closing MTDC and NEP in May 2017 and changed the name MTDX to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP); API still has the remaining 45% shares.

2016

Membantu MTDX melakukan pembebasan lahan JTCC.

Assisted MTDX to acquire the land for JTCC.

2019

API fokus untuk memonitor perkembangan Anak Usaha dalam akselerasi penyelesaian Proyek JTCC.

API focused on monitoring the progress of the Subsidiary in accelerating the completion of the JTCC Project.

2020

- Peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula sebesar Rp1 triliun menjadi sebesar Rp3,2 triliun.
- Melakukan perubahan kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- *Increased the Company's authorized capital from Rp1 trillion to Rp3.2 trillion.*
- *Changed the business activities to follow the Indonesian Standard Business Classification (KBLI).*

2021

- Meningkatkan porsi kepemilikan saham PT Cibitung Tanjung Priok Tollways hingga 100% setelah mengakuisisi saham PT Waskita Toll Road.
- Menjadi pemegang saham PT Menara Maritime Indonesia dengan porsi kepemilikan 0,03% setelah melakukan penyertaan modal.
- Menjadi pelaksana Manajemen Proyek New Priok Eastern Access (NPEA).
- *Increased the share ownership at PT Cibitung Tanjung Priok Tollways to 100% after acquiring the shares of PT Waskita Toll Road.*
- *Become a shareholder of PT Menara Maritime Indonesia with 0.03% ownership after injected a capital investment.*
- *Responsible for managing the New Priok Eastern Access (NPEA) Project.*

2022

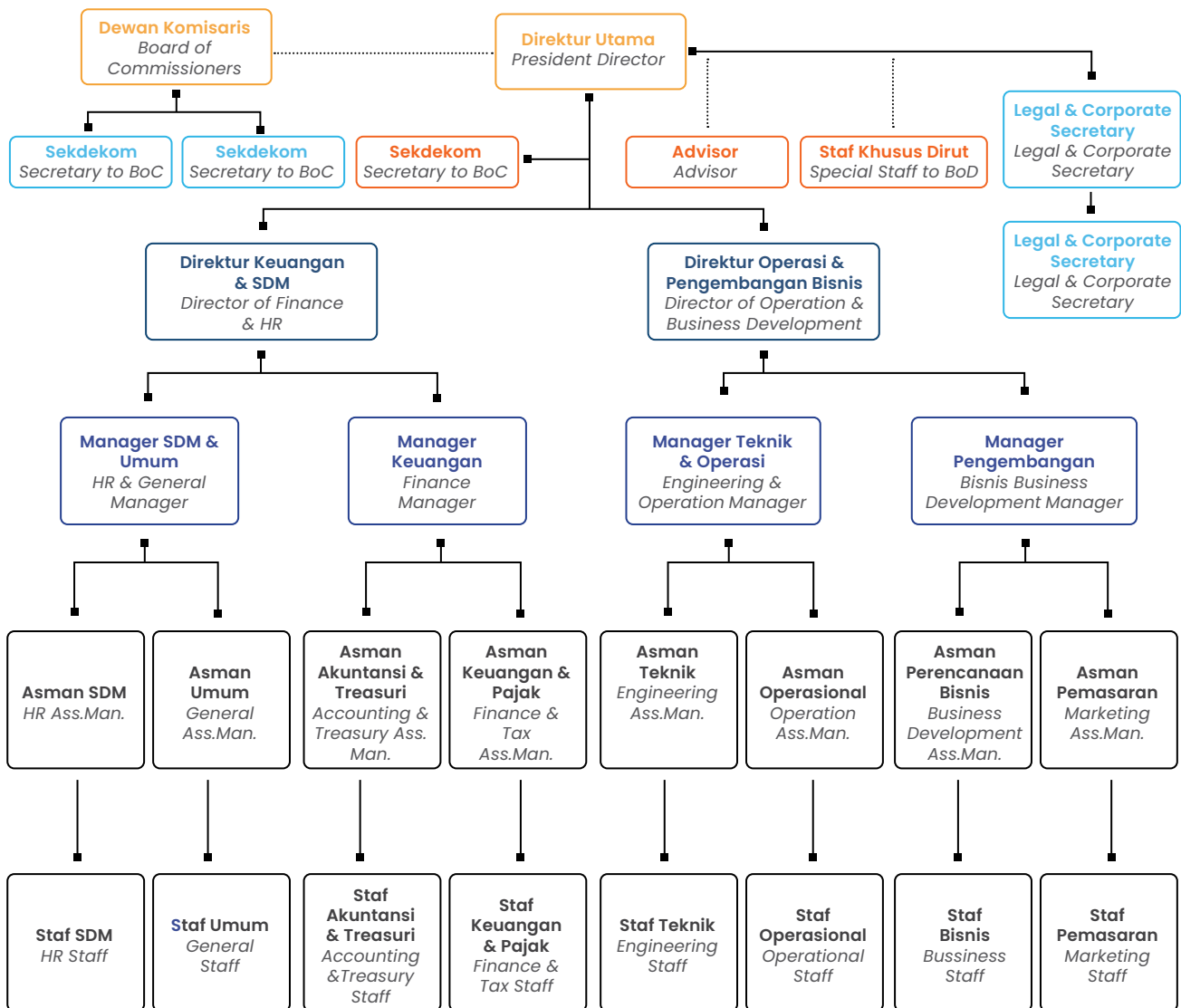
- Memulai pengembangan *Rest Area & Logistic Center* melalui penandatanganan HoA dengan mitra dan penandatanganan Perjanjian Awal dengan CTP.
- Rencana pemurnian bisnis API sebagai penghubung dari *hinterland* ke Pelabuhan Pelindo.
- Menjalankan rencana Divestasi Saham pada CTP.
- Mempercepat progres pembangunan JTCC.
- Melakukan sejumlah kajian untuk pengembangan NPEA.
- *Started developing the Rest Area & Logistic Center by signing the HoA with a partner and signing the Preliminary Agreement with CTP.*
- *Planned for refining API's business to connect the hinterland and Pelindo Port.*
- *Prepared the plan to divest the share ownership at CTP.*
- *Accelerated the construction of JTCC.*
- *Conducted several studies for the development of NPEA.*

STRUKTUR ORGANISASI

Organization Structure

The Company's organizational structure as of December 31, 2022, has been ratified based on the Decree of the Board of Directors Number: HK.569/03/C8/01/API-2020 which valid since January 3, 2020.

Struktur organisasi Perusahaan per 31 Desember 2022 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: HK.569/03/C8/01/API-2020 yang berlaku sejak 3 Januari 2020.



DEMOGRAFI KARYAWAN

Employee Demographics

Pada tahun 2022, jumlah karyawan API tercatat sebanyak 21 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 23 orang. Saat ini proses perekrutan karyawan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) Perusahaan belum maksimal karena bisnis API masih baru berjalan.

In 2022, API had a total of 21 employees. This total number of employees was lower compared to the 23 employees the Company had in the previous year. The Company's recruitment on PKWT (temporary) employees has not been optimal because API's business is still new.

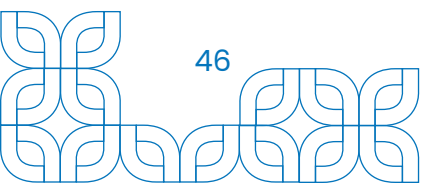
| Status Status | 2022 | 2021 |
|--|-----------|-----------|
| BOD/Pimpinan Pelindo <i>BOD/Management from Pelindo</i> | 1 | 2 |
| BOD/Pimpinan Non-Pelindo <i>BOD/Management from Non-Pelindo</i> | 1 | 1 |
| Organik Pelindo <i>Organic from Pelindo</i> | - | - |
| Organik Anak Perusahaan <i>Organic from Subsidiaries</i> | - | - |
| PKWT (Kontrak) Anak Perusahaan <i>PKWT (Contract) from Subsidiaries</i> | 13 | 14 |
| Tenaga Alih Daya Anak Perusahaan <i>Outsource from Subsidiaries</i> | 6 | 6 |
| Jumlah Total | 21 | 23 |

PROFIL DEWAN KOMISARIS

The Board of Commissioners Profile

Pada tahun 2022 terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris saat Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Bapak Eko Afrilianto selaku Komisaris Utama dan menggantikannya dengan Ibu Banu Astrini untuk menduduki jabatan yang sama. Disampaikan juga bahwa usia yang tercantum pada profil masing-masing Komisaris adalah usia per 31 Desember 2022.

In 2022 there was a change in the composition of the members of the Board of Commissioners when the Shareholders honorably dismissed Mr. Eko Afrilianto as the President Commissioner and replaced him with Mrs. Banu Astrini to hold the same position. For your information, the information regarding the age of each Commissioner is as of December 31, 2022.





Banu Astrini

Komisaris Utama
President Commissioner



Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia

Usia
Age

47 tahun | Yogyakarta, 17 Desember 1975
47 years old | Yogyakarta, December 17, 1975

Domisili
Domicile

Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Magister (S2) dari University of Melbourne, Australia (2002)
- Sarjana (S1) dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia (1998)
- Master's Degree from the University of Melbourne, Australia (2002)
- Bachelor's Degree from Gadjah Mada University, Indonesia (1998)

Dasar Pengangkatan
Basis of Appointment

Diangkat pertama kali tahun 2022 berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor: HM.03.03/26/4/7/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor: HK.55/26/4/1/PTP-22 tanggal 26 April 2022.
Appointed for the first time in 2022 based on the Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders (Circular Decision of the GMS) Number: HM.03.03/26/4/7/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number: HK.55/26/4/1/PTP-22 dated April 26, 2022.

Pengalaman Kerja
Working Experience

- Direktur SDM PT Jakarta International Container Terminal (2019-2022)
- Direktur Pengembangan dan Pemasaran PT Rumah Sakit Pelabuhan (2018-2019)
- Direktur Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2017-2018)
- Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2015-2017)
- General Manager Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014-2015)
- AGM bidang PFSO dan Monitoring Kinerja Cabang Pelabuhan Panjang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2013-2014)
- HR Director of PT Jakarta International Container Terminal (2019-2022)
- Development and Marketing Director of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2018-2019)
- Operational Director of PT Multi Terminal Indonesia (2017-2018)
- Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2015-2017)
- General Manager of Sunda Kelapa Port of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014-2015)
- AGM of PFSO and Monitoring of the Panjang Port of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2013-2014)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

-

Hubungan Afiliasi & Kepemilikan Saham Perusahaan

Affiliations & Company's Share Ownership

- Tidak memiliki hubungan afiliasi
- Tidak memiliki saham Perusahaan
- Has no affiliation
- Has no ownership in Company's shares



Hotman Napitupulu

Komisaris
Commissioner



| | |
|---|--|
| Kewarganegaraan Nationality | Indonesia |
| Usia Age | 66 tahun Porsea, 6 Maret 1956 66 years old Porsea, March 6, 1956 |
| Domisili Domicile | Bekasi |
| Riwayat Pendidikan Educational Background | <ul style="list-style-type: none"> • Magister Administrasi Bisnis dari The University of Hull, Hull, Inggris (1992) • Sarjana Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara, Medan (1982) • Master of Business Administration from The University of Hull, Hull, England (1992) • Bachelor Degree from North Sumatera University, Medan (1982) |
| Dasar Pengangkatan Basis of Appointment | <p>Diangkat pertama kali tahun 2019 berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: PPI-623-02092019-001 dan Nomor HK.55/2/9/1/PTP-19 tanggal 6 September 2019.</p> <p><i>Appointed for the first time in 2019 based on the Circular Decision of the Shareholders Number: PPI-623-02092019-001 and Number HK.55/2/9/1/PTP-19 dated September 6, 2019.</i></p> |
| Pengalaman Kerja Working Experience | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi di Kepala BPKP (2015-2016) • Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Kepala BPKP (2011-2015) • Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya di Kepala BPKP (2008-2011) • Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Kepala BPKP (2007-2008) • Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kepala BPKP (2005-2007) • Director of Industry and Distribution Supervision at BPKP Head Office (2015-2016) • Vice Chief of East Java BPKP at BPKP Head Office (2011-2015) • Director of Business Entity Supervision on Transportation, Tourism, Industrial Estate and Other Services at BPKP Head Office (2008-2011) • Vice Chief of East Kalimantan Supervisory Board at BPKP Head Office (2008-2008) • Director of Community Empowerment Supervisory Board at BPKP Head Office (2005-2007) |
| Rangkap Jabatan Concurrent Position | - |
| Hubungan Afiliasi & Kepemilikan Saham Perusahaan Affiliations & Company's Share Ownership | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki hubungan afiliasi • Tidak memiliki saham Perusahaan • Has no affiliation • Has no ownership in Company's shares |



David Ratadhi Wironegoro

Komisaris
Commissioner



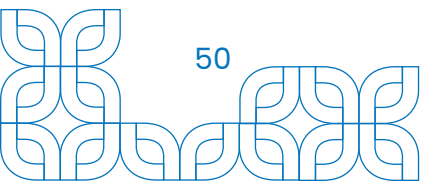
| | |
|---|--|
| Kewarganegaraan Nationality | Indonesia |
| Usia Age | 46 tahun Solo, 29 November 1976 46 years old Solo, November 29, 1976 |
| Domisili Domicile | Tangerang |
| Riwayat Pendidikan Educational Background | <ul style="list-style-type: none"> • Master Practical Ministry dari Wagner Leadership Institute Bandung (2005) • Diploma Rooms Division Management dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (1998) • Master Practical Ministry from Wagner Leadership Institute Bandung (2005) • Diploma Rooms Division Management from dari Bandung Tourism Institute (1998) |
| Dasar Pengangkatan Basis of Appointment | <p>Diangkat pertama kali berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: PPI-623-31052021-006 dan HK.55/31/5/1/PTP-21 tanggal 31 Mei 2021.</p> <p><i>Appointed for the first time through the Circular Decision of the Shareholders Number. PPI-623-31052021-006 and HK.55/31/5/1/PTP-21 dated May 31, 2021.</i></p> |
| Pengalaman Kerja Working Experience | <ul style="list-style-type: none"> • Chief Operating Officer dari PT Sinar Giant Indonesia (2018-2020) • Chief Operating Officer dari PT Pison Technology (2013-2017) • Chief Operating Officer dari PT Pison Tickettech (2012-2013) • Chief Operating Officer dari Kristal Tour (2009-2012) • Chief Operating Officer of PT Sinar Giant Indonesia (2018-2020) • Chief Operating Officer of PT Pison Technology (2013-2017) • Chief Operating Officer of PT Pison Tickettech (2012-2013) • Chief Operating Officer of Kristal Tour (2009-2012) |
| Rangkap Jabatan Concurrent Position | <p>Head of Public Relations Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (2020-sekarang)</p> <p><i>Head of Public Relations of Taman Taruna Nusantara Education Foundation (2020-present)</i></p> |
| Hubungan Afiliasi & Kepemilikan Saham Perusahaan Affiliations & Company's Share Ownership | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki hubungan afiliasi • Tidak memiliki saham Perusahaan • <i>Has no affiliation</i> • <i>Has no ownership in Company's shares</i> |

PROFIL DIREKSI

The Board of Directors Profile

Pada tahun 2022 terjadi perubahan komposisi anggota Direksi saat Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Cucu Kuswoyo selaku Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis. Disampaikan juga bahwa usia yang tercantum pada profil masing-masing Direktur adalah usia per 31 Desember 2022.

In 2022 there was a change in the composition of the members of the Board of Directors when the Shareholders honorably dismissed Mr. Cucu Kuswoyo as the Director of Operation and Business Development. For your information, the information regarding the age of each Director is as of December 31, 2022.





Iwan Ridwan

Direktur Utama
President Director



| | |
|---|---|
| Kewarganegaraan Nationality | Indonesia |
| Usia Age | 57 tahun Bandung, 21 Mei 1965 57 years old Bandung, May 21, 1965 |
| Domisili Domicile | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan Educational Background | <ul style="list-style-type: none"> • Magister Jalan Raya dan Transportasi dari Institut Teknologi Bandung • Insinyur Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung • <i>Master in Highway and Transportation from Bandung Institute of Technology</i> • <i>Engineer in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology</i> |
| Dasar Pengangkatan Basis of Appointment | <p>Pertama kali diangkat pada tahun 2014 dan kemudian terakhir diangkat kembali berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Akses Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-623-14072020 dan Nomor: HK.55/22/9/2/PTP-17 tanggal 14 Juli 2020.</p> <p><i>Firstly he was appointed in 2014 and lastly he was reappointed based on the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Akses Pelabuhan Indonesia Number: PPI-623-14072020 and Number: HK.55/22/9/2/PTP-17 dated July 14, 2020.</i></p> |
| Pengalaman Kerja Working Experience | <ul style="list-style-type: none"> • General Manager Cabang Pelabuhan Pangkalbalam (Desember 2019–Juli 2020) • Deputy Vice President Pengelolaan Cabang Pelabuhan Kantor Pusat Pelindo (Januari 2019–Desember 2019) • Sekretaris Dewan Komisaris KSO Terminal Petikemas Koja (Maret 2018–Desember 2019) • <i>General Manager of Pangkalbalam Port Branch (December 2019–July 2020)</i> • <i>Port Management Deputy Vice President of Pelindo Head Office (January 2019–December 2019)</i> • <i>Secretary to the Board of Commissioner of KSO Terminal Petikemas Koja (March 2018–December 2019)</i> |
| Rangkap Jabatan Concurrent Position | <ul style="list-style-type: none"> • Plt. Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis (2022–sekarang) • Komisaris Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (2015–sekarang) • <i>Act. Director of Operation and Business Development (2022–present)</i> • <i>President Commissioner of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (2015–present)</i> |
| Hubungan Afiliasi & Kepemilikan Saham Perusahaan Affiliations & Company's Share Ownership | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki hubungan afiliasi • Tidak memiliki saham Perusahaan • <i>Has no affiliation</i> • <i>Has no ownership in Company's shares</i> |



Juli Tarigan

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Director of Finance and Human Resources



Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia

Usia
Age

54 tahun | Sinargunung, 16 Juli 1968
54 years old | Sinargunung, July 16, 1968

Domisili
Domicile

Jakarta

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Magister Logistic & Leadership lulusan tahun 2018
- Sarjana Teknik Mesin lulusan tahun 1996
- *Master of Logistic & Leadership, graduated in 2018*
- *Bachelor of Mechanical Engineering, graduated in 1996*

Dasar Pengangkatan
Basis of Appointment

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Akses Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-623-011022021-031 dan Nomor: HK.55/1/10/1/PTP-21 tanggal 1 Oktober 2021.
General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Akses Pelabuhan Indonesia Number: PPI-623-011022021-031 and Number: HK.55/1/10/1/PTP-21 dated October 1, 2021.

Pengalaman Kerja
Working Experience

- SPV Pengadaan PT Pelindo II Pusat (2017-2021)
- GM Cabang Sundakelapa PT Pelindo II Pusat (2015-2017)
- AKBP Pengadaan B/J PT Pelindo II Pusat (2011-2015)
- *SPV of Procurement of PT Pelindo II Pusat (2017-2021)*
- *GM of Sundakelapa Branch of PT Pelindo II Pusat (2015-2017)*
- *AKBP Procurement of B/J PT Pelindo II Pusat (2011-2015)*

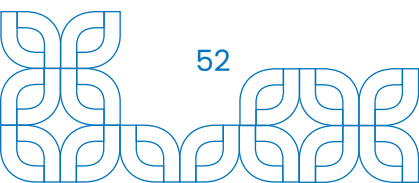
Rangkap Jabatan
Concurrent Position

-

Hubungan Afiliasi & Kepemilikan Saham Perusahaan

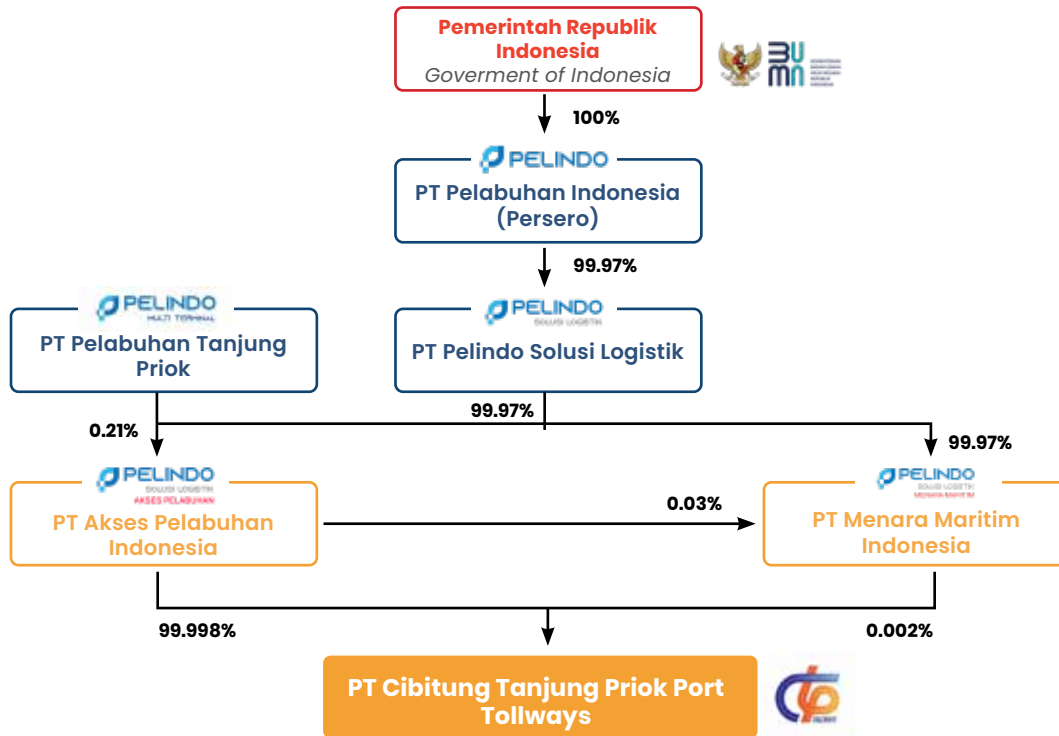
Affiliations & Company's Share Ownership

- Tidak memiliki hubungan afiliasi
- Tidak memiliki saham Perusahaan
- *Has no affiliation*
- *Has no ownership in Company's shares*



STRUKTUR GRUP

Group Structure



INFORMASI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Information

Kepemilikan Saham API per 31 Desember 2022 Share Ownership of API as of December 31, 2022

| Pemegang Saham Shareholders | Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares) | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Paid-in Capital (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%) |
|--------------------------------|--|--|--|
| PT Pelindo Solusi Logistik | 184.190.000 | 1.841.900.000.000 | 99,79 |
| PT Pelabuhan Tanjung Priok | 386.000 | 3.860.000.000 | 0,21 |
| Jumlah/Total | 184.576.000 | 1.845.760.000.000 | 100,00 |

Catatan: Nilai nominal saham adalah Rp10.000/lembar saham
Notes: The nominal value of share is Rp10,000/share

Sampai dengan 31 Desember 2022, API merupakan entitas anak PT Pelindo Solusi Logistik dengan kepemilikan 99,79%. Sampai dengan 31 Desember 2022, API tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek sehingga tidak terdapat kelompok pemegang saham dari masyarakat.

As of December 31, 2022, API is still the subsidiary of PT Pelindo Solusi Logistik with 99,79% of ownership. As of December 31, 2022, API has never traded its shares on the stock exchange, and therefore there are no groups of shareholders coming from the public.

PROFIL ANAK PERUSAHAAN

Subsidiary Profile



PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP)

Alamat/Address

Tamansari Hive Office Building, Lt. 6, Unit8
Jl. D.I Panjaitan Kav. 2, Cipinang Cempedak,
Jatinegara, Jakarta Timur 13340

Kepemilikan Saham/Share Ownership

PT Akses Pelabuhan Indonesia : 99,998%
PT Menara Maritim Indonesia : 0,002%

Bidang Usaha/Line of Business

Investasi dan Pengelola Jalan Tol
Investment and Management of Toll Road

Status Operasi Perusahaan/Operational Status

Aktif beroperasi/In operation

PROFIL SINGKAT PERUSAHAAN

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang berada di bawah naungan sekaligus berstatus sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Toll Road (WTR) sebagai pemegang saham mayoritas dan PT Akses Pelabuhan Indonesia (API) sebesar 45%. Pendirian CTP disahkan melalui Akta Pendirian No. 4 tanggal 13 September 2006. Sebagai BUJT, CTP memiliki tugas untuk melakukan kegiatan konstruksi dan pengelolaan untuk ruas jalan tol Cibitung hingga Tanjung Priok yang secara ekonomis memiliki peran signifikan dalam mendukung efektivitas alur distribusi dari kawasan industri strategis di sekitarnya hingga ke Pelabuhan Tanjung Priok sebagai sentra pelayanan jasa kepelabuhan.

Ruas jalan tol Cibitung-Pelabuhan Tanjung Priok memiliki panjang 34 km dengan pintu gerbang tol berlokasi di Cibitung dan memiliki 4 (empat) pintu keluar. Akses tol lainnya yaitu ruas jalan tol Cimanggis-Cibitung dan ruas jalan tol atas laut Pelabuhan New Tanjung Priok Kalibaru. Perkembangan ruas jalan tol hingga tahun 2022 adalah 98,70% konstruksi fisik dan 100% pembebasan tanah. Proyek ini ditargetkan selesai dan beroperasi secara keseluruhan pada tahun 2023 dan diharapkan tiap tahunnya dapat menampung 28.379.840 arus kendaraan serta memberi pemasukan bagi CTP sebesar Rp9.705.905.280.000.

COMPANY AT A GLANCE

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) is a Toll Road Enterprise (BUJT) under the auspices of and the subsidiary of PT Waskita Toll Road (WTR) as the majority shareholder and PT Akses Pelabuhan Indonesia (API) as much as 45%. The establishment of CTP was ratified under Deed No. 4 dated September 13, 2006. As a BUJT, CTP is engaged in construction and management of Cibitung Toll Road to Tanjung Priok which is economical and has a significant role in supporting the effectiveness of distribution flow from the surrounding strategic industrial areas to Tanjung Priok Port as the center of port services.

Cibitung-Tanjung Priok Port toll road has a 34 km length with toll gates located in Cibitung and has 4 (four) exits. Other access is on the Cimanggis-Cibitung section and other sections over the sea of New Tanjung Priok Kalibaru Port. The toll roads construction in 2022 was 98.70% physical construction and 100% land acquisition. The project is targeted to be complete and in operation in 2023 with the annual accommodation of 28,379,840 vehicles and Rp9,705,905,280,000 income to CTP.

Pada tahun 2022, CTP fokus untuk mempercepat pembangunan JTCC seksi 4 hingga selesai pada akhir tahun 2022 meskipun tidak sesuai dengan rencana dan mencapai 98,70% dari seluruh target. Total aset CTP pada tahun 2022 mencapai Rp12,44 triliun.

In 2022, CTP focused on accelerating the construction of JTCC, section 4, to finish by the end of 2022 though the plan deviated and reached 98.70% of the entire target. The total assets of CTP in 2022 reached Rp12.44 trillion.

PROSPEK USAHA

Industri jalan tol memiliki prospek yang sangat baik, dimana Pemerintah fokus untuk membangun infrastruktur dalam menunjang kelancaran dan percepatan arus barang dan jasa di seluruh Nusantara. Strategi ke depannya difokuskan untuk mencapai target operasional tahun 2023 dengan penyelesaian konstruksi tepat waktu. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah melanjutkan upaya untuk percepatan pembebasan lahan, percepatan pengajuan perubahan lingkup dan investasi serta percepatan pembangunan konstruksi.

BUSINESS PROSPECT

The toll road industry has excellent prospects as the Government is focusing on building infrastructure to support the movement of goods and services across the country. The future strategy will be to achieve the operational target in 2023 – finishing the construction on time. In the future, CTP will continue to accelerate land acquisition and completion of changes in business and investment scope as well as the construction process.

PROFIL ENTITAS ASOSIASI

Associates Profile



PT Menara Maritim Indonesia (MMI)

Alamat/Address

Maritime Tower Lantai 7 Jl. Yos Sudarso No 9 Kec. Koja, Jakarta Utara 14230

Kepemilikan Saham/Share Ownership

PT Pelindo Solusi Logistik : 99,97%
PT Akses Pelabuhan Indonesia : 0,03%

Bidang Usaha/Line of Business

Pengembang dan pengelola gedung
Developer and building management

Status Operasi Perusahaan/Operational Status

Aktif beroperasi/*In operation*

LEMBAGA DAN PROFESIONAL PENUNJANG PASAR MODAL/ PERUSAHAAN

Information on Professional Institutions Supporting Capital Market or the Company

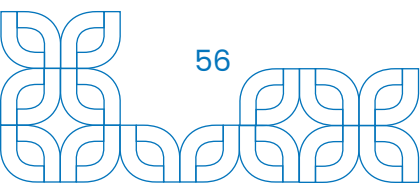
Pada tahun 2022, API tidak menggunakan lembaga dan profesional penunjang pasar modal.

In 2022, API did not use the service from capital market institutions and professionals.

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir dari 2021-2022 adalah:

List of Public Accountant Firms and Accountants that have audited the Company's Financial Statements for the last 2 (two) years from 2021-2022 are:

| Tahun Buku Fiscal Year | Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm | Akuntan Accountant | Jasa Service | Opini Opinion |
|---------------------------|---|------------------------|---|---|
| 2022 | Purwanto, Sungkoro & Surja | Moch. Dadang Syachruna | Audit laporan keuangan Perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2022. <i>Audited the Company's financial statements ended on December 31, 2022.</i> | Wajar dalam semua hal yang material <i>Unqualified opinion as the financial statements presents fairly in all material aspects</i> |
| 2021 | Purwanto, Sungkoro & Surja | Moch. Dadang Syachruna | Audit laporan keuangan Perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2021. <i>Audited the Company's financial statements ended on December 31, 2021.</i> | Wajar dalam semua hal yang material <i>Unqualified opinion as the financial statements presents fairly in all material aspects</i> |



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Information on the Company's Website

API memberikan kemudahan akses informasi secara transparan, aktual, dan akurat kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, termasuk regulator maupun masyarakat luas. Perusahaan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan keandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi melalui situs Perusahaan yaitu www.aksespelabuhan.co.id.

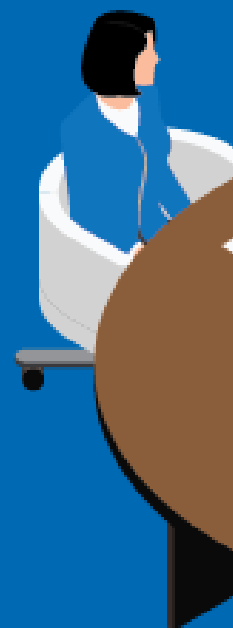
API provides the shareholders, stakeholders regulators, and the wider community with ease of access to updated corporate information transparently and accurately. The Company strives to maintain and improve its capacity to provide integrated corporate information through the official website at www.aksespelabuhan.co.id.

| No. | Informasi Information | Situs Web Perusahaan Official Website |
|-----|--|--|
| 1. | Profil Perusahaan: Layanan & Proyek <i>Corporate Profile: Services & Projects</i> | ✓ |
| 2. | Profil Manajemen: Dewan Komisaris & Direksi <i>Management Profile: Board of Commissioners & Board of Directors</i> | ✓ |
| 3. | Tata Kelola Perusahaan: Pedoman, Organ, Kode Etik, Whistleblowing System <i>Corporate Governance: Guideline, Organs, Code of Conduct, Whistleblowing System</i> | ✓ |
| 4. | Publikasi: Laporan Tahunan & Penghargaan <i>Publication: Annual Report & Awards</i> | ✓ |



Analisis dan Pembahasan Manajemen

*Management Discussion
and Analysis*





TINJAUAN UMUM

General Overview



Pada Oktober 2022, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan global di angka 3,2%. Namun, dalam publikasi World Economic Outlook Update, Januari 2023, estimasi untuk 2022 meningkat sebesar 0,2% menjadi 3,4%. Walaupun masih dalam masa pemulihan dari pandemi dan tantangan perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan ketidakpastian, ekonomi global mampu menunjukkan ketangguhannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan pada Februari 2023 mencatat bahwa perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang solid sebesar 5,01% (y-on-y) pada triwulan IV tahun 2022 dibandingkan triwulan IV tahun 2021. Secara kumulatif ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%.

In October 2022, the International Monetary Fund (IMF) estimated the global economy will grow at 3.2%. However, in its World Economic Outlook Update, as of January 2023, the estimation for 2022 increased by 0.2% to 3.4%. Despite the struggle of recovering from the pandemic and the impact of the Russia-Ukraine war which filled the world with uncertainty, the global economy was strong enough to show its resilience.

The Indonesian Statistics (BPS) through its Official Statistics News in February 2023 has recorded a 5.01% (y-on-y) growth of Indonesia's economy in the fourth quarter of 2022 compared to the fourth quarter of 2021. Cumulatively, the Indonesian economy in 2022 grew by 5.31%, higher than the 3.70% achievements in 2021.

Semua lapangan usaha tumbuh positif sepanjang tahun, terutama pada sektor-sektor unggulan seperti industri, perdagangan, pertambangan, pertanian, dan konstruksi. Pertumbuhan tertinggi di sisi produksi berasal dari transportasi & pergudangan dengan pertumbuhan 16,99% secara kumulatif dibandingkan tahun sebelumnya.

Konsumsi Rumah Tangga tumbuh menguat di tahun 2022 sebesar 4,9% secara kumulatif dibandingkan tahun sebelumnya yang menandakan adanya perbaikan dari pendapatan masyarakat. Situasi ini mendorong penguatan seluruh kelompok konsumsi, utamanya pada kelompok konsumsi transportasi dan pergudangan.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi makro di tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Masyarakat dan industri telah menjalani kehidupan normal dengan pulihnya mobilitas yang mendorong aktivitas dunia usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. API memandang optimis situasi ini untuk terus mengejar target pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing demi merealisasikan visi besar Pelindo untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim berkelas dunia – “Indonesia Maritime Gateway”.

All business activities had positive growth throughout the year, especially in leading sectors such as industry, trade, mining, agriculture and construction. The highest growth was transportation & storage with a cumulative growth of 16.99% compared to the previous year.

Household consumption had stronger cumulative growth in 2022 by 4.9% compared to the previous year, indicating that the people's income has improved. This situation strengthened the performance of all consumption groups, especially in transportation and storage.

It can be concluded that in terms of the macro economy, the situation in 2022 improved compared to 2021. Society and industry have lived somewhat a normal life and when mobility is restored, it encourages businesses to be more active and increases people's income. For API, this is a favorable situation for us to continue pursuing the target of the Cibitung-Cilincing toll road construction to help Pelindo achieve its grand vision to become a world-class integrated maritime ecosystem leader – “Indonesia Maritime Gateway”.

TINJAUAN OPERASI

Operational Review

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang konstruksi, pengangkutan dan pergudangan dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Saat ini, kegiatan Perusahaan dan entitas anaknya terutama bergerak dalam bidang penyelenggaraan proyek jalan tol.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of business of the Company is in the fields of construction, transportation and warehousing and professional, scientific and technical activities. Currently, the Company and its subsidiary primarily engaged in a toll road project.

JTCC memiliki 4 (empat) seksi dengan total panjang keseluruhan mencapai 34,76 km. Saat ini telah beroperasi sebanyak 3 (tiga) Seksi yakni Seksi 1 ruas SS Cibitung-Telaga Asih sepanjang 3,03 Km, sudah beroperasi sepanjang 2,65 km sejak 2021 lalu. Selanjutnya Seksi 2 dan 3 Telaga Asih-Tarumajaya sepanjang 24,45 km telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kemudian untuk Seksi 4 ruas Tarumajaya-Cilincing (7,52 km) sedang dalam tahap akhir penyelesaian konstruksi yakni telah mencapai progres 98,70%.

JTCC has 4 (four) sections that span 34.76 km. There are 3 (three) sections operating including Section 1 of SS Cibitung-Telaga Asih (3.03 km), of which 2.65 km has been operating since 2021. Furthermore, Sections 2 and 3 (24.45 km) of Telaga Asih-Tarumajaya have been inaugurated by President Jokowi. Section 4 of Tarumajaya-Cilincing (7.52 km) is in the final construction stage and currently reached 98.70%.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan disampaikan dengan memperhatikan sejumlah faktor seperti Laporan Keuangan (*Audited*) dan Laporan Manajemen (*Unaudited*) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Berdasarkan Laporan Manajemen, API membandingkan kinerja di tahun berjalan dengan target RKAP. Laporan Manajemen tidak ditampilkan dalam Laporan Tahunan ini, namun Laporan Keuangan dari auditor eksternal ditampilkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Discussion regarding the Company's financial performance is delivered based on several factors such as the Financial Statement (*Audited*) and Management Report (*Unaudited*) for the period ended on December 31, 2022. Based on the Management Report, API reviews its current year's performance with the targets set within RKAP. The Management Report is not presented in this Annual Report, but the Financial Statement from the external auditor is presented as an integral part of this Annual Report.

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Statement of Comprehensive Income

Dalam Jutaan Rupiah (In Million Rupiah)

| Keterangan Description | 2022 | 2021 | YoY | |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Nominal | % |
| PENDAPATAN REVENUES | | | | |
| Pendapatan jalan tol Toll road revenues | 55.181 | 13.391 | 41.790 | 312,08% |
| Pendapatan konstruksi Construction revenue | 1.596.541 | 1.931.003 | (334.462) | (17,32%) |
| Jumlah Total | 1.651.722 | 1.944.395 | (292.673) | (15,05%) |

Dalam Jutaan Rupiah (In Million Rupiah)

| Keterangan Description | 2022 | 2021 | YoY | |
|---|-------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | Nominal | % |
| BEBAN LANGSUNG <i>DIRECT COSTS</i> | | | | |
| Beban langsung operasional jalan tol <i>Toll road operational direct expenses</i> | (24.773) | (11.341) | 13.432 | 118,44% |
| Beban konstruksi <i>Construction costs</i> | (1.596.541) | (1.931.003) | (334.462) | (17,32%) |
| Jumlah <i>Total</i> | 1.621.314 | 1.942.344 | (321.030) | (16,53%) |
| LABA BRUTO <i>GROSS PROFIT</i> | | | | |
| Beban umum dan administrasi <i>General and administrative expense</i> | 44.899 | 34.129 | 10.770 | 31,56% |
| Pendapatan (beban) operasional lainnya <i>Other operating income (expenses)</i> | 7.961 | (457) | 8.418 | (1.842,01%) |
| RUGI USAHA <i>LOSS FROM OPERATIONS</i> | | | | |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN <i>OTHER INCOME (EXPENSES)</i> | | | | |
| Pendapatan keuangan <i>Finance income</i> | 6.441 | 2.570 | 3.871 | 150,62% |
| Beban keuangan <i>Finance costs</i> | 419.506 | 48.329 | 371.177 | 768,02% |
| RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN <i>LOSS BEFORE CORPORATE INCOME TAX</i> | | | | |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN <i>CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)</i> | | | | |
| Kini <i>Current</i> | - | - | - | - |
| Tangguhan <i>Deferred</i> | 70.747 | (214) | 70.961 | (33.159,35%) |
| RUGI TAHUN BERJALAN <i>LOSS FOR THE YEAR</i> | | | | |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN <i>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i> | | | | |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi <i>Item that will not be reclassified to profit or loss</i> | | | | |
| Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak <i>Remeasurement of defined benefit plans - net off tax</i> | 172 | 277 | (105) | (37,91%) |
| TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN <i>TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR</i> | | | | |
| | (348.675) | (78.232) | (270.443) | 345,69% |

Total pendapatan mengalami penurunan 15,05% atau Rp292,67 miliar menjadi Rp1,65 triliun pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Penurunan pendapatan dipengaruhi oleh penurunan pendapatan konstruksi sebesar 17,32%. Walaupun demikian, pendapatan jalan tol meningkat 312,08% akibat pengoperasian JTCC Seksi 1-3.

Seiring dengan progres penyelesaian konstruksi jalan tol, maka beban langsung dari konstruksi juga menurun dan operasional jalan tol meningkat. Dengan demikian laba bruto Perusahaan meningkat tajam mencapai 1.382,59% mencapai Rp30,41 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, Perusahaan tetap mengalami rugi usaha akibat tingginya beban umum dan administrasi. Pada akhir tahun 2022 Perusahaan mencatatkan peningkatan rugi tahun berjalan sebesar 344,34% menjadi Rp348.847 miliar. Total rugi komprehensif tahun berjalan tercatat Rp348.675 miliar.

Total revenues decreased by 15.05% or Rp292.67 billion to reach Rp1.65 trillion in 2022 compared to 2021. The decrease in revenues was affected by a decrease in construction revenues of 17.32%. Nonetheless, toll road revenues increased by 312.08% because the JTCC Sections 1 to 3 have operated.

Direct costs of construction decreased along with the progress of finishing the toll road construction. Hence, the Company's gross profit had a significant increase of 1,382.59% reaching Rp30.41 billion compared to the previous year. Nonetheless, the Company still experienced loss from operations due to high general and administrative expenses. By the end of 2022, the Company recorded an increase in loss for the year of 344.34% to Rp348,847 billion. The total comprehensive loss for the year amounted to Rp348,675 billion.

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position

Dalam Jutaan Rupiah (In Million Rupiah)

| Keterangan Description | 2022 | 2021 | YoY | |
|---|---------|---------|-----------|----------|
| | | | Nominal | % |
| ASET ASSETS | | | | |
| ASET LANCAR CURRENT ASSETS | | | | |
| Kas dan setara kas Cash and cash equivalents | 158.553 | 342.699 | (184.146) | (53,73%) |
| Piutang usaha Trade receivables | | | | |
| Pihak ketiga Third parties | 221 | 53 | 168 | 316,98% |
| Pihak berelasi Related parties | 161 | 101 | 60 | 59,41% |
| Piutang lain-lain Other receivables | | | | |
| Pihak ketiga Third parties | 1.090 | - | 1.090 | 100% |
| Pihak berelasi Related parties | 142.945 | 151.822 | (8.877) | (5,85%) |
| Pendapatan yang masih akan diterima Accrued revenues | 29 | 385 | (356) | (92,47%) |
| Uang muka dan beban dibayar di muka Advance and prepaid expenses | 6.361 | 10.900 | (4.539) | (41,64%) |

Dalam Jutaan Rupiah (In Million Rupiah)

| Keterangan Description | 2022 | 2021 | YoY | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | Nominal | % |
| Pajak dibayar di muka Prepaid tax | 3.016 | 6.681 | (3.665) | (54,86%) |
| Bank yang dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks | - | 693 | (693) | (100,00%) |
| Total Aset Lancar Total Current Assets | 312.377 | 513.335 | (200.958) | (39,15%) |
| ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS | | | | |
| Aset tetap - neto Fixed assets - net | 4.513 | 1.439 | 3.074 | 213,62% |
| Hak pengusahaan jalan tol Toll road concession rights | 12.070.806 | 10.477.626 | 1.593.180 | 15,21% |
| Aset hak-guna - neto Right-of-use assets - net | 5.213 | 2.148 | 3.065 | 142,69% |
| Aset pajak tangguhan Deferred tax assets | 70.699 | - | 70.699 | 100,00% |
| Goodwill | 31.407 | 31.407 | - | - |
| Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund | 6.057 | - | 6.057 | 70.699 |
| Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets | 100 | 188 | (88) | (46,81%) |
| Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets | 12.188.796 | 10.512.809 | 1.675.987 | 15,94% |
| TOTAL ASET TOTAL ASSETS | 12.501.173 | 11.026.144 | 1.475.029 | 13,38% |
| LIABILITAS LIABILITIES | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES | | | | |
| Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loan | 103.106 | 133.297 | (30.191) | (22,65%) |
| Utang usaha Trade payables | | | | |
| Pihak ketiga Third parties | 26.253 | 11.920 | 14.333 | 120,24% |
| Pihak berelasi Related parties | 936.628 | 1.093.658 | (157.030) | (14,36%) |
| Utang lain-lain Other payables | | | | |
| Pihak ketiga Third parties | 1.965 | 43 | 1.922 | 4.469,77% |
| Pihak berelasi Related parties | 652.010 | 21 | 651.989 | 3.104.709,52% |
| Utang pajak Taxes payable | 6.855 | 1.803 | 5.052 | 280,20% |
| Beban akrual Accrued expenses | 247.528 | 85.119 | 162.409 | 190,80% |

Dalam Jutaan Rupiah (In Million Rupiah)

| Keterangan Description | 2022 | 2021 | YoY | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | Nominal | % |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: <i>Current maturities of long-term liabilities:</i> | | | | |
| Liabilitas sewa <i>Lease liabilities</i> | 2.777 | 904 | 1.873 | 207,19% |
| Utang bank <i>Bank loans</i> | 46.339 | 23.169 | 23.170 | 100,00% |
| Total Liabilitas Jangka Pendek <i>Total Current Liabilities</i> | 2.023.462 | 1.349.934 | 673.528 | 49,89% |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES | | | | |
| Utang pihak berelasi <i>Due related parties</i> | 2.738.990 | 2.680.381 | 58.609 | 2,19% |
| Utang lain-lain - pihak berelasi <i>Other payables - related parties</i> | 464.538 | 466.538 | (2.000) | (0,43%) |
| Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: <i>Long-term liabilities - net of current maturities:</i> | | | | |
| Liabilitas sewa <i>Lease liabilities</i> | 3.107 | 1.364 | 1.743 | 127,79% |
| Utang bank <i>Lease liabilities</i> | 5.358.068 | 4.587.526 | 770.542 | 16,80% |
| Utang lembaga keuangan non-bank <i>Loans from non-bank</i> | 1.744.763 | 1.426.043 | 318.720 | 22,35% |
| Provisi jangka panjang <i>Long-term provision</i> | 2.387 | - | 2.387 | 100,00% |
| Liabilitas imbalan kerja <i>Employee benefit liabilities</i> | 899 | 817 | 82 | 10,04% |
| Total Liabilitas Jangka Panjang <i>Total Non-current Liabilities</i> | 10.312.753 | 9.162.669 | 1.150.084 | 12,55% |
| TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES | 12.336.216 | 10.512.602 | 1.823.614 | 17,35% |
| EKUITAS EQUITY | | | | |
| Modal saham <i>Capital stock</i> | 1.845.760 | 1.845.760 | - | - |
| Tambahan modal disetor <i>Additional paid-in capital</i> | (1.203.895) | (1.203.895) | - | - |
| Defisit <i>Deficits</i> | (476.907) | (128.323) | 348.584 | 271,65% |
| EKUITAS - NETO EQUITY - NET | 164.957 | 513.542 | (348.585) | (67,88%) |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO TOTAL LIABILITIES AND EQUITY - NET | 12.501.173 | 11.026.144 | 1.475.029 | 13,38% |

Total aset Perusahaan pada tahun 2022 tercatat mencapai Rp12,50 triliun, meningkat 13,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan aset tidak lancar sebesar 15,94% dari tahun sebelumnya sehingga mencapai Rp12,19 triliun pada tahun 2022. Peningkatan aset tidak lancar utamanya terjadi seiring dengan progres penyelesaian proyek jalan tol Cibitung-Cilincing yang meningkatkan hak pengusahaan jalan tol, aset tetap, dan aset hak guna.

Sedangkan aset lancar Perusahaan menurun 39,15% dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai Rp312,38 miliar pada tahun 2022. Secara keseluruhan mayoritas akun aset lancar mengalami penurunan akibat beroperasinya jalan tol Cibitung-Cilincing seksi 1-3.

Secara total, liabilitas Perusahaan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp12,34 triliun yang meningkat 17,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang Perusahaan meningkat. Peningkatan liabilitas jangka panjang dan jangka pendek terjadi karena adanya penambahan utang usaha baik dari pihak ketiga maupun pihak berelasi.

Ekuitas Perusahaan pada tahun 2022 mencapai Rp164,96 miliar yang menurun 67,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ekuitas terjadi karena defisit dari peningkatan kerugian yang diderita Perusahaan dari tahun sebelumnya.

Pada akhir tahun 2022 tercatat peningkatan modal Perusahaan sebesar 13,38% dari total liabilitas dan ekuitas mencapai Rp12,50 triliun.

The Company's total assets in 2022 were recorded at Rp12.50 trillion, 13.38% higher compared to the previous year. This increase occurred due to higher non-current assets which grew 15.94% from the previous year and therefore reached Rp12.19 trillion in 2022. The increase in non-current assets was in line with the construction progress of the Cibitung-Cilincing toll road project which increased the toll road concession rights, fixed assets, and right-of-use assets.

Meanwhile, the Company's current assets decreased by 39.15% compared to the previous year and reached Rp312.38 billion in 2022. Overall, most of the current asset accounts experienced a decrease due to the operation of the Cibitung-Cilincing toll road sections 1-3.

In total, the Company's liabilities in 2022 were recorded at Rp12.34 trillion, which increased by 17.35% compared to the previous year. This increase occurred because the Company's current liabilities and non-current liabilities increased. The increase in current and non-current liabilities was due to the addition of trade payables from third parties and related parties.

The Company's equity in 2022 reached Rp164.96 billion, which decreased by 67.88% compared to the previous year. The decrease in equity occurred because of a deficit due to higher losses suffered by the Company compared to the previous year.

By the end of 2022, there was an increase in the Company's capital of 13.38% from total liabilities and equity reaching Rp12.50 trillion.

ARUS KAS CASH FLOW

Dalam Jutaan Rupiah (In Million Rupiah)

| Keterangan Description | 2022 | 2021 | YoY | |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | Nominal | % |
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash Flows from Operating Activities</i> | (82.016) | (129.287) | (47.271) | (36,56%) |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash Flows from Investing Activities</i> | (1.414.028) | (5.036.591) | (3.622.563) | (71,92%) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flows from Financing Activities</i> | 1.311.899 | 5.423.297 | (4.111.398) | (75,81%) |
| Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas <i>Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent</i> | (184.146) | 257.420 | (441.566) | (171,54%) |
| Kas dan Setara Kas Awal Tahun <i>Cash and Cash Equivalent at Beginning of Year</i> | 342.699 | 85.279 | 257.420 | 301,86% |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun <i>Cash and Cash Equivalent at End of Year</i> | 158.553 | 342.699 | (184.146) | (53,73%) |

Arus Kas Aktivitas Operasi

Perusahaan menggunakan arus kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp82.016 miliar. Terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp129,29 miliar. Penerimaan kas dari pelanggan meningkat dari Rp13,24 miliar menjadi Rp56,20 miliar seiring dengan beroperasinya JTCC seksi 1-3 dan penerimaan *management fee* proyek NPEA. Selain itu seiring dengan progres penyelesaian proyek JTCC maka pembayaran kepada pemasok juga berkurang dari Rp371,67 miliar menjadi Rp88,66 miliar.

Arus Kas Aktivitas Investasi

Pada tahun 2022 Perusahaan mencatatkan investasi penambahan aset tetap dan hak pengusahaan jalan tol serta deposito berjangka dengan total sebesar Rp1,41 triliun. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5,04 triliun saat Perusahaan berinvestasi untuk aset tetap, penambahan hak pengusahaan jalan tol, pembayaran atas pengalihan saham, dan penambahan investasi pada entitas asosiasi.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2022 Perusahaan tercatat menerima pendanaan sebesar Rp1,31 triliun, menurun dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp5,42 triliun. Pada tahun 2022 Perusahaan

Cash Flows from Operating Activities

The Company used Rp82,016 of its cash flows for operating activities. There was an increase compared to Rp129.29 billion in the previous year. Cash receipts from customers increased from Rp13.24 billion to Rp56.20 billion along with the operation of JTCC section 1-3 and the management fee of the NPEA project. In addition, along with the progress of finishing the JTCC project, the payment to suppliers also decreased from Rp371.67 billion to Rp88.66 billion.

Investing Cash Flows

In 2022, the Company invested in fixed assets and toll road concession rights, as well as time deposits amounted to Rp1.41 trillion. Contrary to the Rp5.04 trillion investment in previous year when the Company invested in fixed assets, toll road concession rights, shares transfers payment, and additional investment in an associate.

Financing Cash Flows

In 2022 the Company received cash from financing amounted to Rp1.31 trillion, lower than the Rp5.42 trillion received in 2021. In 2022 the Company received loan from shareholders

menerima pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp650 miliar dan pinjaman dari Pelindo sebesar Rp58,61 miliar. Pinjaman dari Pelindo pada tahun 2022 menurun dibandingkan pinjaman tahun 2021 sebesar Rp2,68 triliun. Perusahaan masih menerima pinjaman dari non-bank sebesar Rp178,98 miliar dan telah melakukan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp2,41 miliar. Selain itu pada tahun 2022 Perusahaan mencatatkan pencarian bank garansi sebesar Rp693 juta.

amounted to Rp650 billion and loan from Pelindo amounted to Rp58.61 billion. Loan from Pelindo was lower than the total loan of Rp2.68 trillion in 2021. The Company still receiving loan from non-bank of Rp178.98 billion and paid its lease liabilities by Rp2.41 billion. In addition, in 2022, the Company also received placement of bank guarantee amounted to Rp693 million.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN INFORMASI MENGENAI PIUTANG

Solvency and Information on Trade Payables

Pada tahun 2022, kas dan setara kas Perusahaan tercatat Rp158,55 miliar. Di tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp342,70 miliar. Sedangkan aset lancar Perusahaan di 2022 tercatat sebesar Rp312,38 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp513,33 miliar.

In 2022, the Company's cash and cash equivalents were Rp158.55 billion. Last year it was Rp342.70 billion. Meanwhile, the Company's current assets in 2022 were Rp312.38 billion compared to Rp513.33 billion in the previous year.

Liabilitas jangka pendek Perusahaan di tahun 2022 tercatat Rp2,02 triliun dan di tahun sebelumnya tercatat Rp1,35 triliun.

The Company's current liabilities in 2022 were Rp2.02 trillion and Rp1.35 trillion in the previous year.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dari sisi kas dan aset lancar masih terbilang rendah.

Hence, it can be concluded that the Company's ability to pay its current debt using cash and current assets is still relatively low.

Perusahaan memiliki piutang usaha yang merupakan tagihan kepada bank penyedia layanan uang elektronik atas transaksi pembayaran oleh pengguna jalan tol. Perusahaan juga memiliki piutang lain-lain, seperti yang berasal dari pihak berelasi, terutama dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang merupakan dana talangan dibayarkan oleh CTP kepada pemilik lahan dan akan diganti oleh BPJT sesuai dengan amendemen PPJT.

The Company has trade receivables that represent receivables from electronic money service provider banks for payment transactions by toll road users. The Company also has other receivables, such as those coming from related parties, particularly the Toll Road Regulatory Agency ("BPJT") that represents bailout funds that have been paid by CTP to landowners and will be reimbursed by BPJT in accordance with the PPJT amendment.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Capital Structure and the Management Policy on Capital Structure

Dalam Jutaan Rupiah (In Million Rupiah)

| Struktur Modal Capital Structure | 2022 | Kontribusi Contribution | 2021 | Kontribusi Contribution |
|--|------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities | 2.023.462 | 16,19% | 1.349.934 | 12,24% |
| Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities | 10.312.753 | 82,49% | 9.162.669 | 83,10% |
| Total Liabilitas Total Liabilities | 12.336.216 | 98,68% | 10.512.602 | 95,34% |
| Ekuitas Equity | 164.957 | 1,32% | 513.542 | 4,66% |
| Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity | 12.501.173 | | 11.026.144 | |

Struktur modal Perusahaan di tahun 2021 dan 2022 tidaklah jauh berbeda. Struktur modal masih lebih banyak dipengaruhi oleh liabilitas, terutama liabilitas jangka panjang, yaitu 83,10% di 2021 dan 82,49% di 2022. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, porsi ekuitas Perusahaan terhadap keseluruhan modal tercatat di bawah 5%. Dapat dilihat terjadi penurunan ekuitas Perusahaan dari Rp513,54 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp164,96 miliar pada tahun 2022 karena masih terdampak oleh SNTRES negatif pada saat akuisisi 55% kepemilikan dari PT Waskita Toll Road (WTR) pada tahun 2021.

Manajemen sangat memperhatikan struktur modal Perusahaan dan senantiasa melakukan pengawasan ketat terhadap utang jangka pendek Perusahaan yang akan jatuh tempo. JTCC Seksi 1-3 saat ini telah beroperasi, walaupun belum maksimal secara komersial. Seksi 4 sedang dalam tahap penyelesaian dan diharapkan siap untuk beroperasi di tahun selanjutnya. Manajemen proyek NPEA saat ini juga tengah berjalan. Perusahaan juga sedang dalam upaya untuk melakukan divestasi 65% saham CTP.

Dapat dikatakan bahwa Perusahaan sedang dalam tahap memasuki operasi komersial secara penuh. Kinerja Perusahaan untuk menghasilkan pendapatan secara maksimal diharapkan nantinya akan segera terealisasi sehingga mampu memberikan Pemegang Saham imbal hasil yang maksimal.

There isn't much difference between the Company's capital structure in 2021 and 2022. The capital structure was mostly supported by liabilities, especially non-current ones, by as much as 83.10% in 2021 and 82.49% in 2022. In the last 2 (two) years, the equity portion of the Company's total capital was below 5%. There was a decrease in the Company's equity from Rp513.54 billion in 2021 to Rp164.96 billion in 2022 because the Company was still affected by the negative SNTRES when acquired 55% ownership from PT Waskita Toll Road (WTR) in 2021.

The Management pays close attention to the Company's capital structure and closely monitors any current debt near its due. JTCC Sections 1-3 have been in operation, although not in their full commercial state, yet. Section 4 is under construction and is expected to commence operation in the following year. The management of the NPEA project is also underway. The Company is also in the process of divesting 65% of CTP's shares.

It can be said that the Company is in the stage of entering into full commercial operation. The Company's performance to generate maximum revenue is expected to be realized soon and thus providing the Shareholders with maximum returns.

INVESTASI BARANG MODAL

Capital Investment

Pada tahun 2022, Perusahaan telah melakukan sejumlah investasi. Investasi pertama merupakan investasi saham yang terbagi menjadi investasi murni (tahun berjalan) dan investasi *multiyears*. Investasi selanjutnya adalah investasi fisik yang merupakan penyertaan modal.

Investasi saham murni yang terealisasi di tahun 2022 adalah sebesar Rp805,39 miliar untuk penyertaan modal CTP. Perusahaan belum merealisasikan rencana investasi untuk pembangunan *Rest Area & Logistics Park* (Proyek Mermaid), untuk membeli saham MMI, ataupun untuk mengakuisisi saham WTR di CTP.

Investasi saham *multiyears* yang telah terealisasi di tahun 2022 adalah untuk *capital expenditure* (*capex*) proyek JTCC sebesar Rp1,60 triliun. Perusahaan belum merealisasikan investasi saham pada *Joint-Venture Company* sebesar Rp50 miliar (dari total Rp224 miliar).

Sedangkan investasi fisik yang merupakan penyertaan modal adalah sebesar Rp1 miliar sebagai *intangible asset* Proyek Mermaid dan Rp4,2 miliar untuk *capex* furnitur CTP.

In 2022, the Company has made several investments. The first one was a share investment, divided into pure (current year) and multiyear investments. The next one is the physical investment in equity participation.

The pure share investment the Company realized in 2022 was Rp805.39 billion equity participation on CTP. The Company has yet to realize its investment plans to construct the Rest Area & Logistics Park (Mermaid Project), acquire MMI shares, or acquire WTR's shares in CTP.

The multiyear investment in shares that have been realized in 2022 was the Rp1.60 trillion capital expenditure (capex) on the JTCC project. The Company has yet to realize the stock investment in a Joint-Venture Company amounted to Rp50 billion (out of a total of Rp224 billion).

While the physical investment of capital participation was the Rp1 billion intangible assets for the Mermaid Project and the Rp4.2 billion capex on furniture for CTP.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Contribution to the State

Perusahaan mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Total pembayaran pajak pada tahun 2022 adalah Rp9.745.533.197 juta rupiah. Pembayaran tersebut terdiri dari PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan pajak lainnya (termasuk PBB).

The Company complies with the obligation to pay taxes to the state. In total, in 2022, the Company paid Rp9,745,533,197 million of taxes. The payment was for income taxes article 4 chapter 2, article 21, article 23, and other taxes (including land and building taxes).

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts Subsequent to Accountant Report Date

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah pelaporan KAP di tahun 2023.

There is no information or facts that are material that needs to be reported after the reporting date of KAP in 2023.

ASPEK PEMASARAN

Marketing Aspect

Pada tahun 2022, Perusahaan masih melanjutkan aktivitas bisnis melalui anak perusahaan untuk mengembangkan proyek JTCC. Perusahaan juga telah memulai pengerjaan manajemen proyek NPEA. Kedua aktivitas ini sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan untuk melayani Grup Pelindo dalam memberikan akses darat (terutama melalui jalan tol) untuk pelabuhan-pelabuhan Grup. Dengan demikian, kegiatan pemasaran API di tahun 2022 masih untuk *captive market* dari Grup walaupun tentunya tidak menutup kemungkinan ke depannya Perusahaan juga akan melayani pasar lainnya di luar Grup.

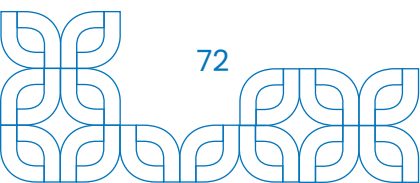
In 2022, the Company was still constructing the JTCC project through its subsidiary. The Company has also commenced its project management for the NPEA. Both of these activities are in line with the Company's purpose which was established to serve the Pelindo Group by providing land access (especially toll roads) for the Group's ports. Hence, API's marketing activities in 2022 were for the captive market of the Group, although there is a possibility that in the future the Company will also serve other markets outside the Group.

PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN 2022

Comparison Between 2022 Target and Achievement

Pencapaian target Perusahaan pada tahun 2022 tercermin dalam *Key Performance Indicator* (KPI) dalam Laporan Manajemen dengan pencapaian skor 80,25. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian, dan masing-masing memiliki kriteria tersendiri.

The Company's target achievement in 2022 is reflected in the Key Performance Indicators (KPI) which has been reported in the Management Report and the score of achievement was 80.25. There are 4 (four) aspects of assessment, and



Total KPI terdapat 10 kinerja utama yang dinilai. Terdapat sejumlah kinerja yang memenuhi target, dan bahkan lebih dari yang telah ditetapkan. Kas operasi dan program CSR telah terpenuhi. Perusahaan juga mencapai target jumlah kerja sama dengan penandatanganan HOA dengan PT HI untuk *Rest Area & Logistic Center*. Manajemen proyek dan digitalisasi proses bisnis juga telah tercapai. Begitu juga dengan program peningkatan kapabilitas pegawai juga sudah tercapai.

Sebagian besar KPI tahun 2022 tercapai, hanya ada 2 (dua) target yang tidak terpenuhi yaitu EBITDA Margin dan produktivitas pegawai.

Selain target KPI, Perusahaan juga memiliki target keuangan penting yang mencakup pendapatan, aset, liabilitas, dan ekuitas. Pencapaiannya adalah sebagai berikut:

each has its own criteria. In total, there are 10 main KPIs being assessed. There were key performance that have met the target, and some even achieved above the target. Cash from operation and CSR programs have all been achieved. The Company also achieved total partnerships by signing the HOA agreement with PT HI for the Rest Area & Logistic Center. Project management and digitization of business processes have also been achieved. Likewise, the employee capability improvement program has also been achieved.

The Company has reached most targets in the KPI of 2022, except for two targets including EBITDA Margin and employee productivity.

In addition to the KPI target, the Company also sets important financial targets covering revenues, assets, liabilities, and equity. The achievement was as follows:

Pencapaian Laba (Rugi)
Achievement of Income (Loss)

Dalam Jutaan Rupiah (In Million Rupiah)

| Uraian Description | 2022 | RKAP-P 2022 | Penyerapan RKAP 2022 Absorption of RKAP 2022 |
|--|-----------|-------------|---|
| Pendapatan Jalan Tol Toll Road Revenues | 55.181 | 163.247 | 34% |
| Pendapatan Konstruksi Construction Revenue | 1.596.541 | 2.204.221 | 72% |
| Laba (Rugi) Usaha Income (Loss) from Operations | (6.530) | 11.774 | (55%) |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) for the Year | (348.847) | 407.972 | (86%) |

Pendapatan usaha Perusahaan di tahun 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan atas operasi jalan tol dari CTP. Terealisasi 34% dikarenakan Seksi 1 beroperasi sejak tahun lalu, sedangkan Seksi 2 dan 3 beroperasi pada bulan Oktober 2022.
2. Pendapatan atas *management fee* NPEA terealisasi sebesar 9% dikarenakan adanya perubahan skema perjanjian.

The Company's operating revenues in 2022 consist of revenues from:

1. *CTP's Toll road operations. It was realized 34% because Section 1 has been operating since last year, while Sections 2 and 3 started their operation in October 2022.*
2. *NPEA management fee which was realized by 9% due to an amendment in the agreement.*

Beban usaha hanya terealisasi 38% karena sebagian besar beban usaha CTP dari Januari hingga April masih dikapitalisasi. Perusahaan baru mengakui beban untuk periode Mei dan Juni dikarenakan surat SLO tertanggal 31 Mei 2022, kecuali beban operasional (JMTO) yang sudah dibukukan dari Januari.

Pendapatan dan beban di luar usaha terealisasi -84% karena divestasi saham belum terealisasi hingga akhir 2022. Dengan demikian API belum menerima *capital gain* atas divestasi dan beban bunga pinjaman masih terkonsolidasi hingga Desember (meleset dari rencana realisasi September 2022).

Only 38% of operating expenses were realized because most of CTP's operating expenses from January to April were still capitalized. The Company has only recognized expenses in May and June due to the SLO letter dated May 31, 2022, except for operating expenses (JMTO) which have been recorded from January.

Non-operating income and expenses were -84% realized because the divestment had not been realized until the end of 2022. Thus, API has not yet received a capital gain on the divestment, and loan interest expenses are still consolidated until December (missed the plan to have it realized in September 2022).

Pencapaian Posisi Keuangan Achievement of Financial Position

Dalam Jutaan Rupiah (In Million Rupiah)

| Uraian Description | 2022 | RKAP-P 2022 | Penyerapan RKAP 2022 Absorption of RKAP 2022 |
|--|------------|-------------|---|
| Aset Lancar Current Assets | 312.377 | 374.149 | 83% |
| Aset Tidak Lancar Non-Current Assets | 12.188.796 | 1.901.676 | 641% |
| Total Aset Total Assets | 12.501.173 | 2.275.825 | 549% |
| Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities | 2.023.462 | 99.756 | 2.028% |
| Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities | 10.312.753 | - | N/A |
| Total Liabilitas Total Liabilities | 12.336.216 | 99.756 | 12.366% |
| Ekuitas Equity | 164.957 | 2.176.069 | 8% |

Aset

Realisasi aset sebesar Rp12,5 triliun mayoritas merupakan nilai aset konsesi JTCC sebesar Rp12,08 triliun. Total aset terealisasi 549% disebabkan oleh belum terealisasi divestasi atas kepemilikan 65% saham CTP sehingga laporan keuangan CTP masih terkonsolidasi dengan laporan keuangan API.

Assets

Realized assets amounted Rp12.5 trillion, which mostly is the value of JTCC concession assets amounted to Rp12.08 trillion. The total assets were 549% realized due to the unrealized divestment of 65% ownership of CTP shares and thus CTP's financial statements are still consolidated with API.

Liabilitas

Realisasi liabilitas sebesar Rp12,3 triliun sebagian besar merupakan fasilitas Kredit Investasi dan *Intercompany Loan* (ICL) dari Pelindo yang dipergunakan untuk pembangunan JTCC. Hal ini sejalan dengan belum terealisasi divestasi atas kepemilikan 65% saham CTP sehingga laporan keuangan CTP masih terkonsolidasi dengan laporan keuangan API.

Ekuitas

Realisasi ekuitas sebesar 8% disebabkan oleh belum terealisasinya divestasi 65% kepemilikan saham CTP sehingga API belum dapat mencatat *capital gain* yang menyebabkan nilai ekuitas masih terdampak oleh SNTRES negatif pada saat akuisisi 55% kepemilikan dari PT Waskita Toll Road (WTR) pada tahun 2021.

Liabilities

Realized liabilities of Rp12.3 trillion were mostly in the form of Investment Credit and Intercompany Loan (ICL) facilities from Pelindo to construct JTCC. This was in line with the unrealized divestment of 65% ownership of CTP shares and thus CTP's financial statements are still consolidated with API.

Equity

The equity was realized by 8% due to the unrealized divestment of 65% of CTP's share ownership that made API unable to record a capital gain and it has made the equity value affected by negative SNTRES when acquired 55% ownership from PT Waskita Toll Road (WTR) in 2021.

INFORMASI PEMBAGIAN DIVIDEN

Dividend Payment

Saat ini Perusahaan belum membagikan dividen.

The Company has not determined to make any dividend, yet.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Transaction with Related Parties

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 32 dalam Laporan Keuangan terlampir.

The Company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7. The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties. Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 32 of the attached Financial Statements.

Dewan Komisaris dan Direksi telah mengetahui setiap transaksi dengan pihak berelasi dan memastikan bahwa setiap transaksi telah dilakukan secara wajar sesuai regulasi berlaku untuk kepentingan Perusahaan.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are aware of every transaction with related parties and ensure that each transaction was fairly according to the prevailing regulations for the benefit of the Company.

| Sifat Relasi <i>Nature of Relationship</i> | Nama Pihak Berelasi <i>Name of Related Party</i> | Jenis Transaksi <i>Nature of Transaction</i> |
|--|---|--|
| Entitas induk pemegang saham <i>Parent company shareholders</i> | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | Utang lain-lain, beban akrual, beban keuangan <i>Other payables, accrued expenses, finance cost</i> |
| Entitas induk <i>Parent</i> | PSL | Pinjaman, biaya kantor <i>Loans, office expenses</i> |

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Changes in Rules and Regulation and Accounting Policy

Pada tahun 2022, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan.

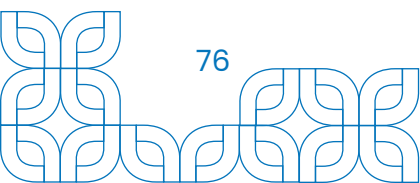
In 2022, there were no changes to laws and regulations that have a significant impact on the Company.

Pada tahun 2022 terdapat penyesuaian kebijakan akuntansi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022. Perusahaan telah menggunakan kebijakan akuntansi terbaru yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia, namun tidak terdapat dampak yang signifikan bagi Perusahaan. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah:

In 2022, there was an adjustment to the accounting policies effective on January 1, 2022. The Company has used the latest accounting policies that have been set according to the Indonesian Accounting Standards but felt that there has been no significant impact on the Company. The adjustment was:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Mengganggu - Biaya Pemenuhan Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen Keuangan
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 73: Sewa

- *Amendments to PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks*
- *Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs*
- *2020 Annual Improvements - PSAK 71: Financial Instruments*
- *2020 Annual Improvements - PSAK 73: Leases*



PROSPEK USAHA DAN TARGET 2023

Business Prospect and Targets for 2023

IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global diprediksi menurun dari estimasi pertumbuhan 3,4% di 2022 menjadi 2,95% di 2023. Walaupun di tengah tantangan ekonomi global, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2023 tetap kuat sebesar 4,9%-5,3%, sedangkan angka inflasi berada di kisaran 3,25%-3,75%. Sementara nilai tukar Rupiah terhadap USD diperkirakan berada di kisaran Rp15.676-Rp15.877/USD. Prakiraan peningkatan ekonomi tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan level mobilitas masyarakat yang semakin meningkat pasca pandemi, kegiatan logistik menjadi semakin meningkat untuk mengimbangi aktivitas permintaan & penawaran berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Keberadaan Tol Cilincing-Cibitung diperkirakan akan memperlancar konektivitas logistik, industri hingga mobilitas masyarakat mulai dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek di bagian selatan dan Jalan Tol Akses Tanjung Priok di bagian utara. Nantinya, Jalan Tol ini juga mendukung akses logistik menuju Pelabuhan Tanjung Priok hingga kawasan industri di sekitarnya.

Dengan berdasarkan prospek usaha dan sejumlah pertimbangan lainnya, Perusahaan telah menetapkan rencana pengembangan usaha di tahun 2023 yang menjadi target Manajemen secara keseluruhan mencakup percepatan penyelesaian dan pengoperasian proyek JTCC secara keseluruhan dan persiapan pembangunan proyek NPEA.

MF estimated the global economic growth in 2023 to be at 2.95%, lower than the an estimated growth of 3.4% in 2022. Despite global economic challenges, Bank Indonesia projects strong economic growth in Indonesia in the range between 4.9% and 5.3% in 2023 with inflation in the 3.25%-3.75% range. The exchange rate of Rupiah against USD is estimated to be in the Rp15,676-Rp15,877/USD range. The economic growth projection is in line with higher mobility of the community after the Community Restriction (PPKM) was dismissed, higher estimation of business prospects, higher Foreign Investment (PMA), and acceleration to finish the National Strategic Projects (PSN).

With higher mobility after the pandemic crisis, activities in logistics have also increased to accommodate the demand & supply of various commodities in the market. The Cilincing-Cibitung Toll Road is expected to bring logistics connectivity, and facilitate industrial and community mobility from the Jakarta-Cikampek Toll Road in the south and the Tanjung Priok Access Toll Road in the north. In the future, this toll road will also support logistic access to Tanjung Priok Port to its surrounding industrial areas.

Based on business prospects and several considerations, the Company has set the 2023 plan that has become the Management target which includes the acceleration to complete and operate the overall JTCC project and preparation to start the construction of the NPEA project.

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

API terus memberikan perhatian kepada kapabilitas Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan keunggulan kompetitif dalam mencapai target usaha dan mengembangkan kinerja bisnis. Dengan memanfaatkan kemajuan TI untuk mengintegrasikan aktivitas operasional di setiap lintas fungsi dan bisnis, API meyakini akan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan dan Tujuan Pengembangan Teknologi Informasi

API menjadikan *Code of Conduct* Perusahaan sebagai pedoman dalam menetapkan rencana strategis untuk mengelola dan mengembangkan teknologi informasi. Melalui Kebijakan Teknologi Informasi dalam *Code of Conduct*, pemanfaatan TI dilakukan secara terkoordinasi sesuai dinamika usaha dan memperhitungkan aspek-aspek lainnya di antaranya aspek hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, sumber daya manusia, dan jaringan komunikasi.

Direksi bertanggung jawab secara penuh untuk mengelola dan mengembangkan TI dalam lingkungan kerja API. Secara garis besar, tujuan pengelolaan dan pengembangan TI yang dilakukan Direksi senantiasa berpegang pada:

1. Acuan dalam pengelolaan TI Perusahaan agar dapat berjalan efektif dan efisien sehingga operasional Perusahaan berjalan lancar;
2. Peningkatan kapabilitas proses bisnis Perusahaan dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan;
3. Memastikan bahwa seluruh perangkat dan sistem yang digunakan dalam TI telah berada pada kualitas, kuantitas, waktu dan tingkat layanan yang diharapkan;
4. Penggerak penciptaan produk/jasa baru yang unggul dan kompetitif; dan
5. Menciptakan keberlanjutan tata kerja dari pejabat sebelumnya.

Dengan berdasarkan tujuan pengelolaan dan pengembangan TI di atas, tugas dan tanggung jawab Direksi dalam hal teknologi informasi adalah sebagai berikut:

API keeps on focusing on its Information Technology (IT) to provide a competitive advantage in achieving targets and increasing performance. API believes that by leveraging on the advanced IT to integrate operational activities across every business function, it will provide added value to all stakeholders.

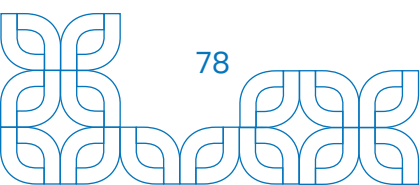
Policy and Objective of Enhancing Information Technology

API makes the Company's Code of Conduct a guideline in creating setting strategic plans for managing and developing information technology. Through the Information Technology Policy in the Code of Conduct, IT is used in a coordinated manner according to business dynamics and also consider legal and regulatory aspects, hardware, human resources, and communication networks.

The Board of Directors is fully responsible for managing and developing IT. Generally speaking, the objectives of IT management and development by the Board of Directors always refer to:

1. *As reference for the Company's information technology management in order to run effectively and efficiently and streamline the Company's operations;*
2. *Improve the capability of the Company's business process to achieve the Company's strategic objectives;*
3. *Ensure that all devices and systems used in the information technology have the expected quality, quantity, time, and service level;*
4. *As driving force for the creation of new, excellent and competitive products/services;*
5. *Create work continuity from the previous officials.*

Based on the management and objectives of IT development which mentioned above, the duties and responsibilities of the Board of Directors in terms of information technology are as follows:



1. Direksi bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengesahan panduan mengenai Kebijakan Teknologi Informasi dalam bentuk Pedoman Umum, SOP dan *Working Instruction* serta memastikan implementasinya dapat dilakukan secara konsisten;
2. Memastikan tersedianya mekanisme pengendalian yang efektif untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya penyimpangan TI serta menjalankan program sosialisasi yang berkesinambungan mengenai kebijakan TI;
3. Bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap kebijakan TI termasuk menyelesaikan setiap konflik yang timbul untuk menegakkan kepatuhan fungsi TI;
4. Memastikan setiap karyawan bekerja sesuai dengan kebijakan TI, SOP dan *Working Instruction* terkait;
5. Melakukan *review* secara berkala terhadap kebijakan TI dimana pelaksanaan *review* dapat dilakukan dengan berkoordinasi atau melibatkan pihak-pihak lain; dan
6. Bersama Dewan Komisaris, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki kebijakan TI yang efektif dan menjalankan rekomendasi serta input dari Dewan Komisaris.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Pengelolaan TI di lingkungan Perusahaan dilakukan dengan berdasarkan landasan tata kelola yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, dimana setiap karyawan yang berkepentingan dengan proses teknologi informasi dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan;
2. Responsibilitas, dimana dalam pelaksanaan fungsi TI harus memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas serta kewenangan yang jelas sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain;
3. Independensi, dimana setiap karyawan yang berkepentingan dalam fungsi TI harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap mengutamakan kepentingan Perusahaan;

1. *Board of Directors is responsible for the preparing and validating detailed guidelines regarding HR management in the form of General Policy, SOP, and Working Instruction, as well as ensuring its consistent implementation;*
2. *Ensure an effective control mechanism to minimize risk of deviation on IT and continuously disseminate IT policies;*
3. *Responsible to ensure the compliance on IT policies, including resolving any conflicts to enforce the compliance on IT functions;*
4. *Ensure that each employee works in accordance with relevant IT policies, SOP and Working Instruction;*
5. *Regularly reviews the IT policies with assistance from others; and*
6. *Together with the Board of Commissioners, responsible to ensure that the Company has an effective IT policy and follow the recommendations and input from the Board of Commissioners.*

Governance of Information Technology

IT management is done by following the governance principles that contains the following provisions:

1. *Accountability, where all Employees concerned with information technology process are accountable for actions and decisions based on the authority line that has been determined by the Company;*
2. *Responsibility, where the implementation of information technology function shall enable clear division and separation of duties and authority so as to be able to control each other;*
3. *Independence, where all Employees concerned with information technology function shall be free from conflict of interests and prioritize the Company's interests;*

4. Transparansi, dimana hasil penerapan kebijakan TI harus dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara transparan tanpa mengabaikan aspek kerahasiaan;
5. Kesetaraan, dimana penerapan kebijakan TI harus berlaku seimbang dan tidak bersifat memihak.

Pengembangan Teknologi Informasi

Pada tahun 2022, pengembangan teknologi di Perusahaan berfokus pada persiapan migrasi sistem informasi keuangan yang lebih handal dan penyesuaian *chart of account* (COA). Perusahaan telah mencapai target pengembangan dan COA Perusahaan saat ini telah disesuaikan dengan COA Grup Pelindo.

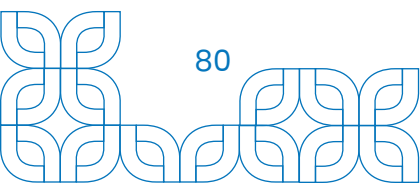
Kedepannya, pengembangan TI di API diperkirakan akan tetap sama mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh PSL untuk kemudian diadaptasi dalam kegiatan sehari-hari.

4. *Transparency, where the result of Information Technology Policy implementation shall be documented and accounted for transparently without disregarding confidentiality aspect;*
5. *Fairness, where Information Technology Policy implementation shall be balanced without any bias.*

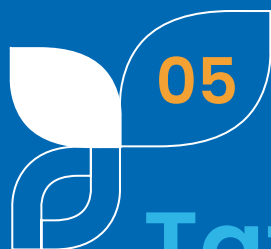
Enhancement of Information Technology

In 2022, the Company has improved its technology in preparation to migrate its financial information system into a new chart of account (COA) that is more reliable. The Company has achieved its target and currently, the COA has been aligned with the COA of Pelindo Group.

Going forward, IT development at API is expected to remain the same and follow the development at PSL which then adapted in API's daily activities.



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance





KOMITMEN PENERAPAN GCG

Commitment to Implementation of GCG Principles

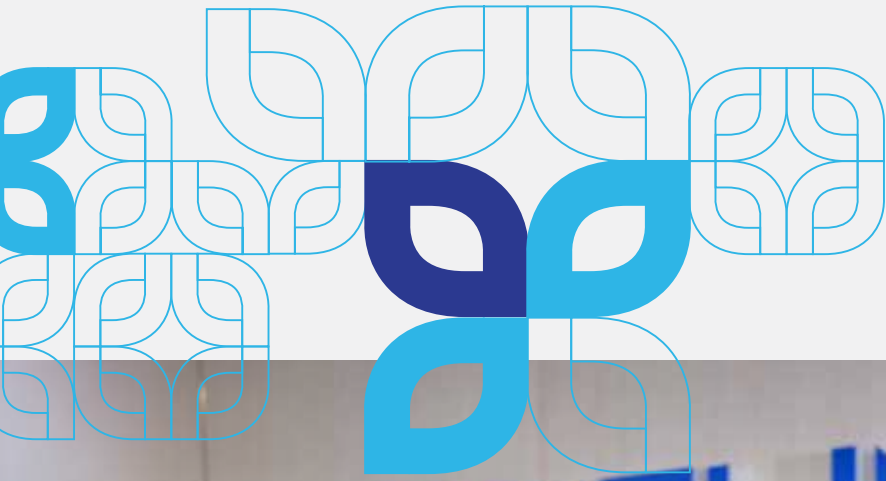
Perusahaan terus memperkuat komitmen untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) dalam lingkungan kerja dan operasional agar berjalan dengan optimal. Komitmen ini ditunjukkan karena Perusahaan meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang tercermin dalam sistem kerja Perusahaan akan memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah Perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari 3 (tiga) pilar pendukung penerapan GCG secara nasional yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa dunia usaha, Perusahaan berkomitmen penuh untuk ikut berpartisipasi dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The Company is committed to strengthening the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) principles in its working and operational environment to allow the principles to perform optimally. This commitment is important because the Company believes that the implementation of GCG principles within the Company's working system will have a significant impact on improving performance and providing added value to the stakeholders. As part of the supporting 3 (three) pillars of the national GCG implementation comprising the state and its instruments as regulators, the business world as participants, and the public as users of business products or services, the Company is fully committed to participating and implementing appropriate GCG principles with applicable laws and regulations.

PENERAPAN PRINSIP DASAR GCG

Implementation of GCG Principles

| | |
|---|--|
| <p>Keterbukaan <i>Transparency</i></p> | <p>Menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatan usaha dengan menyediakan informasi yang relevan kepada para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan dengan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses. <i>Maintain objectivity in conducting business activities by providing relevant information to shareholders and stakeholders in a timely, adequate, clear and accurate manner and easily accessible.</i></p> |
| <p>Akuntabilitas <i>Accountability</i></p> | <p>Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan berjalan secara efektif. <i>Clarity of functions, implementation, and accountability of the Company's Organs to ensure that the Company's management runs effectively.</i></p> |
| <p>Pertanggungjawaban <i>Responsibility</i></p> | <p>Kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. <i>Conformity of the Company's management to the applicable laws and regulations and sound corporate principles.</i></p> |
| <p>Kemandirian <i>Independence</i></p> | <p>Keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. <i>A condition where the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles.</i></p> |
| <p>Kesetaraan dan Kewajaran <i>Equality and Fairness</i></p> | <p>Perusahaan memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk mengakses informasi korporasi dalam lingkup kedudukan masing-masing pihak dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan untuk berkembang tanpa membedakan latar belakang. <i>The Company provides reasonable opportunities for everyone to access corporate information according to their rights and provides equal opportunities for employee to enhance their career without discrimination on their backgrounds.</i></p> |



DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

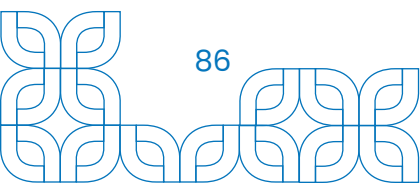
Legal Basis of GCG Implementation

Implementasi prinsip-prinsip GCG pada aktivitas bisnis API mengacu pada kebijakan terkait dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik mengacu kepada beberapa kebijakan hukum di antaranya:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Rencana Kerja Anggaran Perusahaan BUMN;
3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-102/MBU/2002 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan BUMN;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN;
8. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006;
9. Anggaran Dasar Perusahaan.

The implementation of GCG principles within API's business activities referred to the policies of Good Corporate Governance realization as follows:

1. *Law of the Republic of Indonesia No. 40 in 2007 regarding Limited Liability Companies;*
2. *Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-101/MBU/2002 regarding Corporate Work Plan and Budget of SOE;*
3. *Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-102/MBU/2002 regarding Company Long-Term Plan of SOE;*
4. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Per-09/MBU/2012 regarding Amendment to Regulation of the Minister of SOE No. Per-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance Implementation of State-Owned Enterprises;*
5. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-12/MBU/2012 regarding Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE;*
6. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/2012 regarding Guidelines for Appointment of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises;*
7. *Decree of the Secretary of the Minister of SOE SK-16/S.MBU/2012 regarding Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance (GCG) of SOE;*
8. *General Guidelines on Good Corporate Governance of Indonesia of 2006;*
9. *Articles of Association of the Company.*



TUJUAN DAN MAKSUD PENERAPAN GCG

Legal Basis of GCG Implementation

TUJUAN PENERAPAN GCG

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholders dan mendorong keberlanjutan Perusahaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberdayakan fungsi dan kemandirian Organ Perusahaan sehingga pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan Perusahaan dan perubahan lingkungan usaha menuju Budaya Perusahaan yang lebih baik;
4. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan Sumber Daya Perusahaan dan pengelolaan risiko usaha Perusahaan secara lebih hati-hati (*prudent*), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
5. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, efisien dan berbudaya demi tercapainya Visi dan Misi Perusahaan;
6. Mendorong Perusahaan melakukan mekanisme *check and balance* pada setiap fungsi dalam proses bisnis di tiap level maupun fungsi;
7. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan.

GCG IMPLEMENTATION OBJECTIVES

1. *Optimize the Company's value for the Shareholders by taking account of the Stakeholders' interests and supporting the Company's continuity by implementing GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness (equality);*
2. *Empower the function and independence of the Company Organs so that decision-making is based on high morals and compliance with the applicable laws and regulations;*
3. *Develop behavior and conduct that is in line with the Company's development and changes in the business environment towards a better Corporate Culture;*
4. *Support the development and management of the Company's Resources and business risk management in a prudent, accountable, and responsible manner in accordance with GCG principles;*
5. *Support Company management in a professional, effective, efficient and cultured manner for the achievement of the Company's vision and mission;*
6. *Encourage the Company to perform check and balance in the business process of all levels or functions;*
7. *Encourage awareness and Corporate Social Responsibility to community and environmental conservation, especially around the Company.*

MAKSUD PENYUSUNAN GCG CODE

1. Perusahaan menyusun pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan GCG sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh Insan API untuk memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk kepentingan Pemegang Saham dan *Stakeholders*;
2. Menjadikan pedoman dan peraturan GCG sebagai induk kebijakan yang mengatur seluruh peraturan, keputusan dan/atau kebijakan bisnis Perusahaan;
3. Pedoman dan peraturan GCG dikembangkan menjadi suatu sistem kebijakan yang bersifat holistik dan terintegrasi sesuai prinsip-prinsip GCG yang diseleraskan dengan perkembangan bisnis dan fokus Perusahaan ke depannya.

PURPOSE OF GCG CODE PREPARATION

1. *GCG Code was prepared as reference for the Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and Employees to implement Good Corporate Governance;*
2. *Position GCG Code as a master policy. All regulations, decisions and/or policies issued by the Company shall refer to the GCG Code;*
3. *GCG Code is developed to become a holistic and integrated policy system in accordance with GCG principles*

PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2022

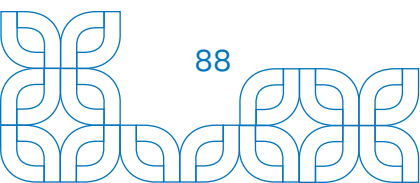
Assessment of GCG Implementation in 2022

API berkomitmen untuk membangun fondasi hukum dan kepatuhan organisasi yang kuat dalam mengembangkan bisnisnya. API sangat memahami bahwa komitmen ini dapat dibangun salah satunya dengan senantiasa memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG Perusahaan sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan dan *best practices* yang berlaku di dunia usaha.

Perusahaan juga memastikan bahwa penerapan GCG tidak hanya berjalan dari satu sisi yaitu internal Perusahaan semata, tapi juga berdasarkan pandangan eksternal yang independen dan terpercaya.

API is committed to building a strong foundation of the organization's legal aspect and compliance to grow its business. API is aware that this commitment can be built by always ensuring that the implementation of the GCG principles is in accordance with the applicable legislation standards and best practices.

The Company also ensures that the implementation of GCG does not base on the organization's internal perspective as the Company is open to the recommendations and inputs of trusted and independent external parties.



HASIL ASSESSMENT GCG TAHUN BUKU 2021

Aspek atau faktor pengujian penerapan GCG di API meliputi 6 (enam) aspek yaitu:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; serta
6. Aspek Lain.

Dibandingkan dengan nilai penerapan (assessment) GCG tahun buku 2020 sebesar 83,47%, nilai penerapan GCG API di tahun buku 2021 meningkat mencapai 85,01%. Hal ini menunjukkan komitmen API untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan.

ASSESSMENT RESULT OF GCG IMPLEMENTATION FOR FISCAL YEAR 2021

GCG implementation was tested based on the following 6 (six) aspects:

1. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance;
2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency; and
6. Other aspects.

Compared to the GCG assessment for the fiscal year 2020 at 83.47%, the GCG assessment for the fiscal year 2021 has increased to 85.01%. This shows API's commitment to continuously improving the quality of the implementation of GCG principles within the Company.

Indikator Penilaian Penerapan Indicator of Implementation Assessment

| No. | Aspek Pengujian Assessment Aspect | Bobot Value | Tahun Buku 2021 Fiscal Year 2021 | | Tahun Buku 2020 Fiscal Year 2020 | |
|--|---|----------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | | Tingkat Pemenuhan Achievement | % | Tingkat Pemenuhan Achievement | % |
| 1. | Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i> | 7,00 | 6,89 | 98,46 | 6,49 | 92,66 |
| 2. | Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i> | 9,00 | 8,60 | 95,51 | 7,76 | 86,19 |
| 3. | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/Supervisory Board</i> | 35,00 | 30,52 | 87,19 | 31,36 | 89,60 |
| 4. | Direksi <i>Board of Directors</i> | 35,00 | 32,41 | 92,60 | 33,02 | 94,36 |
| 5. | Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i> | 9,00 | 6,59 | 73,23 | 5,71 | 63,41 |
| 6. | Aspek Lainnya <i>Other aspects</i> | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skor Keseluruhan Overall Score | | 100,00 | 85,01 | 85,01 | 83,47 | 83,47 |
| Peringkat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Score | | | BAIK GOOD | | BAIK GOOD | |

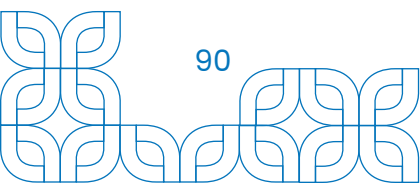
INFORMASI AREA OF IMPROVEMENT PADA ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Berdasarkan hasil *Self-Assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah 6,59 dari bobot sebesar 9,00 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 73,26%. Hal ini menunjukkan penerapan GCG pada aspek tersebut telah berjalan dengan Cukup Baik. Walaupun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

AREA OF IMPROVEMENT ON INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

Based on the Self-Assessment on the Information Disclosure and Transparency, the score was 6.59 out of 9.00 or 73.26%. This shows that the implementation of GCG in this aspect has gone Quite Well. Nevertheless, several items need to be considered and followed up as follows:

| No. | Rekomendasi (Area of Improvement atau AOI) <i>Recommendation (Area of Improvement or AOI)</i> |
|-----|---|
| 1. | Perusahaan diharapkan menyusun kebijakan tentang pengendalian informasi Perusahaan. <i>The Company is expected to prepare a policy regarding corporate information control.</i> |
| 2. | Perusahaan diharapkan dapat mengesahkan kebijakan pengelolaan website. <i>The Company is expected to approve the website management policy.</i> |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan mengungkapkan nama pejabat pada setiap jabatan yang tercantum dalam struktur organisasi. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the officers in each position within the organizational structure.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan mengungkapkan muatan pelatihan yang akan dilakukan karyawan. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses training programs for employees.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan mengungkapkan biaya yang telah dikeluarkan atas pelatihan karyawan. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses employee training expenses.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan mengungkapkan Kronologis Pencatatan Saham. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the Share Listing Chronology.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan mengungkapkan Kronologis Pencatatan Efek lainnya. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the Listing Chronology of other Securities.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan mengungkapkan Nama dan alamat BAE. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the name and address of the Registrar.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan mengungkapkan alamat Kantor Akuntan Publik. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the address of the Public Accounting Firm.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan mengungkapkan nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the name and address of the securities rating company.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan mengungkapkan besarnya fee audit kantor akuntan publik. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the amount of the public accounting firm's audit fee.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan mengungkapkan muatan mengenai masa berlaku, tahun perolehan dan badan pemberi penghargaan/sertifikasi. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the validity period, time of acquisition, and issuers of award/certification.</i> |

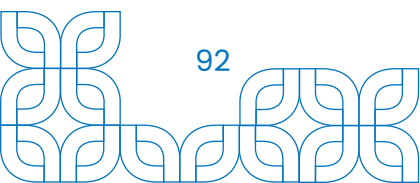


| No. | Rekomendasi (Area of Improvement atau AOI) Recommendation (Area of Improvement or AOI) |
|-----|--|
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat tinjauan operasi per segmen usaha, memuat uraian mengenai: (1) penjualan/pendapatan usaha; (2) profitabilitas; (3) peningkatan/penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha (NA untuk perusahaan yang tidak mempunyai segmen). <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses an overview of operations by segment, including its: (1) sales/revenues; (2) profitability; (3) increase/decrease in production for each segment (NA for companies with no segments).</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat bahasan tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses financial information regarding extraordinary and rare events.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the impact of price changes on sales or net income and operating profit for 2 (two) years or since started the business.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat uraian tentang aspek pemasaran atas pangsa pasar. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the marketing aspects of current market share.</i> |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat Uraian Dewan Komisaris mencakup antara lain: (1) frekuensi pertemuan; (2) tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the following information regarding the Board of Commissioners: (1) meeting frequency; (2) attendance level of of the Board of Commissioners during meetings.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat uraian Direksi mencakup antara lain: (1) frekuensi pertemuan; (2) tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan; (3) program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the following information regarding the Board of Directors: (1) meeting frequency; (2) attendance level of of the Board of Directors during meetings; (3) training programs to improve the competency of the Board of Directors.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat uraian Komite Audit mencakup antara lain: (1) uraian tugas dan tanggung jawab; (2) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the following information regarding the Audit Committee: (1) duties and responsibilities; (2) meeting frequency and attendance level of the audit committee.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat komite manajemen resiko mencakup antara lain: (1) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite pemantauan resiko; (2) independensi anggota komite pemantauan resiko; (3) uraian tugas dan tanggung jawab; (4) uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan resiko; (5) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite pemantauan resiko. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the following information regarding the committee responsible of risk management: (1) name, position and brief profile of its members; (2) independency of its members; (3) duties and responsibilities; (4) implementation of activities; (5) meeting frequency and attendance level of the committee.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial terutama mengenai komitmen terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) program peningkatan layanan kepada konsumen; (2) biaya yang telah dikeluarkan. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the information regarding activities and expenses related to social responsibility, especially in terms of consumer protection: (1) service improvement programs; (2) expenses.</i> |

| No. | Rekomendasi (Area of Improvement atau AOI) Recommendation (Area of Improvement or AOI) |
|-----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) mitra usaha binaan; (2) program pengembangan. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the information regarding the activities and expenses related to the Company's social responsibility, especially on the "community development program": (1) fostered partners; (2) development programs.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial terutama terkait aktivitas lingkungan, pengelolaan lingkungan; (3) biaya yang telah dikeluarkan. <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the information regarding the activities and expenses related to the Company's social responsibility, especially on the environmental activities: (1) environmental conservation (2) environmental management certification; (3) expenses.</i> • Perusahaan diharapkan memastikan Laporan Tahunan memuat Etika Perusahaan memuat uraian pernyataan mengenai budaya Perusahaan (corporate culture). <i>The Company shall ensure the Annual Report discloses the information regarding Code of Conduct and corporate culture.</i> |
| 6. | <p>Perusahaan diharapkan memastikan mengikuti Annual Report Award (ARA) untuk masa yang akan datang dan memenangkan ARA. <i>The Company shall ensure that in the future, participate in the Annual Report Award (ARA) and win it.</i></p> |
| 7. | <p>Perusahaan diharapkan berpartisipasi dalam penghargaan CSR (Sustainability Reporting Award) dan sejenisnya. <i>The Company shall ensure that in the future, participate in the CSR (Sustainability Reporting Award) or alike.</i></p> |

Perusahaan telah mencermati setiap rekomendasi yang terdapat dalam AOI. Rekomendasi tersebut akan dipertimbangkan sebagai masukan berharga bagi Perusahaan untuk mengembangkan implementasi GCG secara bertahap di tahun-tahun ke depannya.

The Company has assessed every recommendation in the AOI. These recommendations will be considered as valuable input for the Company to improve its GCG implementation in stages in the coming years.



GCG ROADMAP PERUSAHAAN

GCG Roadmap of the Company

2020

TRUSTED

API, dengan GCG yang unggul, mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan sebagai dasar membangun kredibilitas dan reputasi.

API, with superior GCG, earns the trust of stakeholders as the basis for building credibility and reputation.

2021

SUSTAINABLE

Secara berkesinambungan mampu tampil sebagai perusahaan terkemuka dengan terus membangun budaya GCG dalam setiap rantai bisnisnya

Continuously appear as a leading company by continuing to build a GCG culture in each of its business chains..

2022

CITIZENSHIP

API mampu menjadi perusahaan berkelas dunia dan menjadi rujukan penerapan GCG bagi perusahaan lain di tingkat nasional dan internasional.

API can become a world-class company and becomes a reference for other local and foreign companies to implement GCG.

INTEGRATED

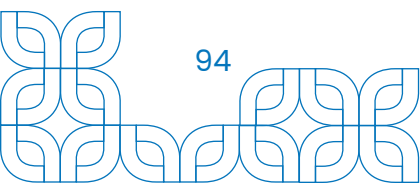
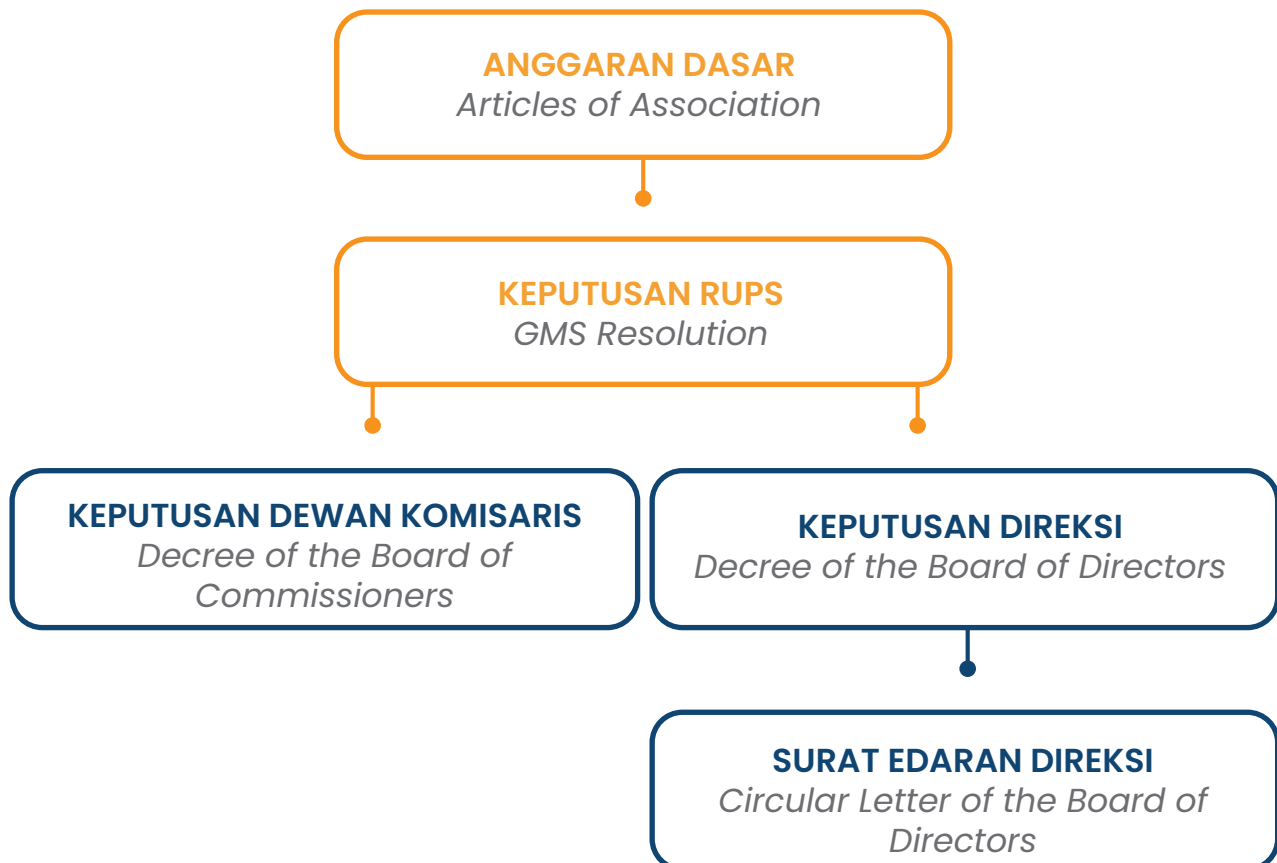
| PROGRAM | INDICATOR | RESULTS |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan infrastruktur GCG • Sosialisasi dan <i>Awareness Raising Roadmap GCG 2019-2022</i> • <i>Capacity Building</i> SDM untuk implementasi GCG • <i>Alignment GCG</i> dengan operasi bisnis • Memperkuat <i>internal control</i> dengan mengintegrasikan GCG, <i>Risk dan Compliance (GRC)</i> Penumbuhan inisiatif GCG di seluruh divisi, cabang, dan anak perusahaan • <i>Cascading GCG</i> induk ke anak perusahaan secara terintegrasi • <i>Improving GCG infrastructure Dissemination and Raising Awareness on the 2019-2022 GCG Roadmap</i> • <i>HR Capacity Building for GCG implementation</i> • <i>GCG alignment with business operations</i> • <i>Strengthen internal control by integrating GCG, Risk and Compliance (GRC)</i> • <i>GCG initiatives growing at all divisions, branches, and subsidiaries</i> • <i>Cascading the parent's GCG to the subsidiary in an integrated manner</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Skor assessment GCG mengalami kenaikan • Terpenuhinya seluruh infrastruktur GCG Perusahaan • Terdapat KPI GCG untuk pejabat setingkat manajemen menengah • Menurunnya pelanggaran yang ditemukan oleh auditor internal dan auditor eksternal • <i>GCG assessment scores increased</i> • <i>Fulfilled the entire corporate GCG infrastructure</i> • <i>GCG KPIs available for middle management</i> • <i>Lower numbers of violation found by internal and external auditors</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan seluruh Insan API untuk menjalankan GCG • Meningkatnya citra sebagai perusahaan yang terdepan menjalankan tata kelola • Terintegrasinya sistem pengendalian internal • Perbaikan tata kelola di anak perusahaan • <i>Increased awareness and compliance from all API Personnel to conduct GCG</i> • <i>Increased its image as a company is leading in governance</i> • <i>Integrated internal control system</i> • <i>Improved governance in subsidiaries</i> |

STRUKTUR GCG

GCG Structure

Struktur tata kelola (*Governance Structure*) API mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai organ-organ sebuah perusahaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, API menyusun Organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing dilengkapi dengan organ pendukung untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pengelola Perusahaan.

The Governance Structure of API refers to Law No. 40 in 2007 regarding Limited Liability Companies on the company's organs. Based on these provisions, API prepared its Organs which consist of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board Directors. Commissioners and Directors are equipped with supporting organs to help carry out their duties and functions as supervisors and managers of the Company.



| No. | Organ Utama Main Organ | Organ Pendukung Supporting Organ | Keterangan Description |
|-----|--|--|---|
| 1. | RUPS GMS | - | RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi. |
| 2. | Dewan Komisaris Board of Commissioners | a. Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Secretary b. Komite Audit Audit Committee | Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertindak sebagai pengawas dalam pengelolaan Perusahaan agar berjalan sesuai tujuan bisnis dan rencana Perusahaan. <i>The Board of Commissioners is the Company organ acted as a supervisor on the Company's management to ensure it runs according to business objectives and corporate plans.</i> |
| 3. | Direksi Board of Directors | - | Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. <i>The Board of Directors is the Company organ authorized and fully responsible for managing the Company, in accordance with its objectives Company, represents the Company, as stated in the provisions of the Articles of Association.</i> |

KEBIJAKAN GCG

GCG Policies

API memiliki sejumlah kebijakan mengenai GCG sebagai berikut:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
2. Piagam Internal Audit
3. Kode Etik
4. Board Manual – Pedoman Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi
5. Whistleblowing System (WBS)
6. Standard Operational Procedure (SOP)

Berbagai kebijakan tersebut selalu ditelaah dan diperbaharui secara berkala agar dapat mengakomodasi perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan, selalu sesuai dengan praktik bisnis terbaik, dan terjaga sesuai dengan koridor yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkini. Kebijakan-kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke semua karyawan dan Perusahaan senantiasa mengingatkan karyawan untuk mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut.

API has several policies concerning GCG as follows:

1. Good Corporate Governance Code
2. Internal Audit Charter
3. Code of Conduct
4. Board Manual –Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors
5. Whistleblowing System (WBS)
6. Standard Operational Procedure (SOP)

These policies are always reviewed and regularly updated to accommodate any changes in the Company's business, ensured to always followed the best practice, and maintained to stay within the line of the latest laws and regulations. These policies have been disseminated to all employees and the Company always reminds them to follow these policies.

MENANAMKAN NILAI-NILAI GCG

Embedding the Values of GCG

Guna memberikan informasi terkini tentang penerapan GCG di lingkungan API dan sebagai bahan evaluasi terhadap pemahaman karyawan mengenai nilai-nilai dan kebijakan GCG, Perusahaan melakukan sosialisasi secara terus-menerus, termasuk di tahun 2022. Dokumen-dokumen GCG yang dimiliki Perusahaan sudah tersedia di portal internal dan dapat diakses oleh setiap karyawan. Publikasi kebijakan GCG juga sudah dilakukan di portal website Perusahaan yang dapat diakses juga oleh para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2022, API telah melaksanakan pelatihan atau *workshop* mengenai ISO 37001 untuk sistem manajemen anti penyuapan pada tanggal 17-18 November 2022. Melalui pelatihan ini diharapkan seluruh karyawan API dapat memperkuat integritas diri untuk menjadi individu yang tangguh dalam menolak segala bentuk penyuapan demi kepentingan Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan.

To provide employees with the latest information regarding the implementation of GCG within API and as a basis for evaluating employees' understanding of GCG values and policies, the Company keeps on embedding the values in all employees, including in 2022. The GCG documents are available on the internal portal and accessible to employees. The documents have also been published on the Company's website for stakeholders to access.

In 2022, API has conducted a training or workshop on ISO 37001, anti-bribery management system, from November 17 to November 18, 2022. Through this training, all employees can hopefully have more integrity to become strong individuals in rejecting all forms of bribery for the Company's best interest and all stakeholders.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

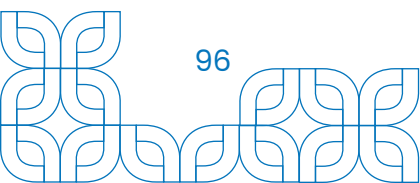
General Meeting of Shareholders

RUPS merupakan organ utama Perusahaan, yang dengan hak dan wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan menjadi wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan Perusahaan

GMS is Company's main organ, with exclusive rights and authorities unlike the Board of Commissioners and Board of Directors, and become the place for Shareholders to make important decisions as regulated in the provisions of the Company's Articles of Association and laws and regulations. Decisions at the GMS must be based on the Company's long-term business interests.

In accordance with the Company's Articles of Association, the GMS is divided into 2 (two), namely the Annual GMS and the Extraordinary GMS. The



setiap tahun dan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direksi, untuk kepentingan Perusahaan, atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari Pemegang Saham.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham Perusahaan adalah PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (dengan kepemilikan 99,79%) dan PT Pelabuhan Tanjung Priok (dengan kepemilikan 0,21%).

HAK PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham memiliki sejumlah hak sebagai berikut:

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS
3. Hak untuk mengajukan usulan untuk dibahas dalam acara RUPS
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS
5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan, secara tepat waktu dan teratur
6. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya

PELAKSANAAN RUPS DI 2022

Pada tahun 2022, Perusahaan mengadakan RUPS secara fisik, yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 7 Juni 2022 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021. Dewan Komisaris dan Direksi PT Akses Pelabuhan Indonesia semuanya hadir dalam RUPS Tahunan.

Keputusan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2021

Annual General Meeting of Shareholders is held by the Company every year and an Extraordinary General Meeting of Shareholders can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, for the benefit of the Company, at the written request of the Board of Commissioners or from the Shareholders.

SHAREHOLDERS

The Company's shareholders are PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (with 99.79% ownership) and PT Pelabuhan Tanjung Priok (with 0.21% ownership).

RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Shareholders have several rights as follows:

1. *The right to request a GMS to be organized*
2. *The right to request information about the agenda of the GMS*
3. *The right to submit a proposal to be discussed during one of the agendas of the GMS*
4. *The right to attend and cast a vote at the GMS*
5. *The right to always receive regular updates regarding the Company, on time*
6. *The right to receive a portion of the Company's profits in the form of dividends and other schemes of profit sharing*

IMPLEMENTATION OF GMS IN 2022

In 2022, the Company organized a physical, Annual GMS on June 7, 2022, regarding the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the Financial Year 2021. The Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Akses Pelabuhan Indonesia were all present at the Annual GMS.

The resolutions of the GMS are as follows:

1. *Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of the Financial Year 2021*
2. *Appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year 2021*

3. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris beserta Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun Buku 2022
4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2022

3. Appropriation of Tantiem for the Financial Year 2021, Salary for the Board of Directors, and Honorarium for the Board of Commissioners, along with Facilities and Other Allowances for the Financial Year 2022
4. Approval of the Appointed Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements in 2022

KEPUTUSAN SIRKULER RUPS DI 2022

Selain RUPS fisik, Pemegang Saham juga mengambil Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler). Sepanjang tahun 2022, terdapat 9 (sembilan) Keputusan Sirkuler yang telah diambil Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan-keputusan Sirkuler RUPS di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

CIRCULAR RESOLUTIONS IN 2022

In addition to the physical GMS, Shareholders also issued other resolutions outside the General Meeting of Shareholders (Circular Resolutions). Throughout 2022, there were 9 (nine) Circular Resolutions the Shareholders have taken outside the General Meeting of Shareholders. The circular resolutions of the GMS in 2022 were as follows:

Keputusan Sirkuler RUPS di 2022 Circular Resolutions in 2022

| No. | Nomor Keputusan Sirkuler Circular Resolution Numbers | Perihal Subjects |
|-----|--|--|
| 1. | No: PPI-6223-31012022-026 & No: HK.55/31/1/2/PTP-22 | Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 <i>Determination of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) in 2022</i> |
| 2. | No: SK.03/17/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22623 & No: KH.566/17/3/1/PTP-22 | Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal oleh Perusahaan kepada PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways <i>Approval of Additional Equity Participation by the Company to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways</i> |
| 3. | No: SK.03/14/3/2/PAPR/DIUT/PLSL-22 & No: HK.55/14/3/1/PTP-22 | Pemberhentian Direksi <i>Dismissal of the Board of Directors</i> |
| 4. | No: HM.03.03/26/4/7/PAPR/DIUT/PLSL-22 & No: HK.55/26/4/1/PTP-22 | Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris <i>Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners</i> |
| 5. | No: SK.03/22/4/5/PAPR/DIUT/PLSL-22 & No: HK.55/22/4/1/PTP-22 | Persetujuan Perubahan Logo <i>Approval to Change the Logo</i> |
| 6. | No: SK.03/12/8/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 & No: HK.55/12/8/1/PTP-22 | Penetapan Pedoman Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris <i>Appropriation of Guidelines of the Income for the Board of Directors and the Board of Commissioners</i> |
| 7. | No: SK.03/10/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 & No: HK.55/10/5/1/PTP-22 | Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 <i>Approval to Change the Company's Work Plan and Budget (RKAP) in 2022</i> |
| 8. | No: SK.03/8/8/1/PGBS/DIUT/PLSL-22 & No: HK.55/8/8/1/PTP-22 | Implementasi Integrasi, Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan Bidang SDM (Parenting SDM) <i>Implementation of Integration, Harmonization and Synergy of HR Management (Parenting SDM) Policies</i> |
| 9. | No: SK.03/26/10/2/PAPR/DIUT/PLSL-22 & No: HK.55/26/10/1/PTP-22 | Penarikan Shareholder Loan (SHL) dari PT Pelindo Solusi Logistik kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia <i>Withdrawal of Shareholder Loan (SHL) from PT Pelindo Solusi Logistik to PT Akses Pelabuhan Indonesia</i> |

REALISASI KEPUTUSAN RUPS DI 2021

Pada tahun 2021, Perusahaan tidak mengadakan RUPS secara fisik. Seluruh keputusan Pemegang Saham diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler). Sepanjang tahun 2021, terdapat 10 Keputusan Sirkuler yang telah diambil Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan telah merealisasikan seluruh keputusan tersebut di tahun berjalan tanpa tertunda ke tahun berikutnya. Secara garis besar, keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Penyertaan Modal dari PSL Kepada API
2. Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal oleh API kepada CTP
3. Persetujuan Penambahan Modal Disetor PSL kepada API
4. Persetujuan Penjaminan Perseroan
5. Penambahan Penyertaan Modal Lanjutan kepada API
6. Persetujuan Penyertaan Modal pada PT Menara Maritim Indonesia
7. Penetapan KAP untuk Melakukan Audit atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, dan Laporan Kepatuhan, serta Laporan Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) API Tahun Buku 2021
8. Persetujuan Akuisisi Saham WTR di CTP oleh API
9. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Tahun 2021 API
10. Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi API

REALIZATION OF GMS RESOLUTIONS IN 2021

In 2021, the Company did not hold a physical GMS. All decisions from the Shareholders are decided outside the General Meeting of Shareholders (Circular Resolutions). Throughout 2021, 10 Circular Resolutions were taken by the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders. The Company has realized all resolutions in the current year without being delayed to the following year. In general, those resolutions are as follows:

1. *Completion of Equity Participation from PSL to API*
2. *Approval of Additional Equity Participation from API to CTP*
3. *Approval of Additional Paid-Up Capital from PSL to API*
4. *Approval of the Company's Guarantees*
5. *Addition of Advanced Equity Participation to API*
6. *Approval of Equity Participation to PT Menara Maritim Indonesia*
7. *Appointment of KAP to Audit the Financial Statements, Performance Report, Compliance Report, and Achievement of Key Performance Indicator (KPI) of API for the Fiscal Year 2021*
8. *Approval of Acquiring the Shares of WTR at CTP by API*
9. *Approval of Work Plan and Amendment of API's Budget for 2021*
10. *Approval of Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of API*

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perusahaan berjalan sesuai Visi dan Misi serta rencana jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perusahaan berjalan sesuai Visi dan Misi serta rencana jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris.

Para Pemegang Saham beranggapan bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas usaha dan status API, komposisi Dewan Komisaris saat ini sudah memadai. Komposisi ini dianggap sebagai komposisi yang ideal dan Pemegang Saham telah memberikan wewenang bagi Komisaris Utama untuk mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya ke setiap anggota dan mengambil keputusan untuk kepentingan Perusahaan.

The Board of Commissioners is the Company's organ responsible to supervise the Company's management by the Board of Directors. The supervision from the Board of Commissioners is conducted to ensure that the Company runs according to its Vision and Mission and both its short and long-term plans.

BOARD OF COMMISSIONERS

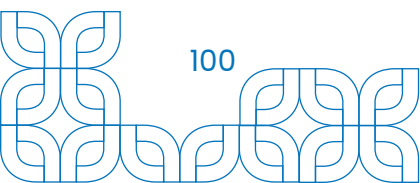
The Board of Commissioners is the Company's organ responsible to supervise the Company's management by the Board of Directors. The supervision from the Board of Commissioners is conducted to ensure that the Company runs according to its Vision and Mission and both its short and long-term plans.

COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

The composition of the Board of Commissioners is determined by the GMS. The composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022 consisted of 3 (three) people including the President Commissioner and 2 (two) Commissioners.

The Shareholders believe that in consideration of the API's business and its status, the current composition of the Board of Commissioners is already adequate. This composition is already ideal and the Shareholders have authorized the President Commissioner to delegate the duties and responsibilities to each member and make any decisions for the sake of the Company.

| Nama Name | Jabatan Position | Warga Negara Nationality | Dasar Pengangkatan Basis of Appointment |
|---------------|--|-----------------------------|---|
| Banu Astrini* | Komisaris Utama President Commissioner | Indonesia | Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor: HM.03.03/26/4/7/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor: HK.55/26/4/1/PTP-22 tanggal 26 April 2022. The Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders (Circular Decision of the GMS) Number: HM.03.03/26/4/7/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number: HK.55/26/4/1/PTP-22 dated April 26, 2022. |



| Nama Name | Jabatan Position | Warga Negara Nationality | Dasar Pengangkatan Basis of Appointment |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| Hotman Napitupulu | Komisaris Commissioner | Indonesia | Keputusan Para Pemegang Saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: PPI-623-02092019-001 dan Nomor HK.55/2/9/1/PTP-19 tanggal 6 September 2019. <i>Circular Decision of the Shareholders Number: PPI-623-02092019-001 and Number HK.55/2/9/1/PTP-19 dated September 6, 2019.</i> |
| David Ratadhi Wironegoro | Komisaris Commissioner | Indonesia | Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: PPI-623-31052021-006 dan HK.55/31/5/1/PTP-21 tanggal 31 Mei 2021. <i>The Circular Decision of the Shareholders Number: PPI-623-31052021-006 and HK.55/31/5/1/PTP-21 dated May 31, 2021.</i> |

Keterangan | Remarks:
*) Beliau diangkat menggantikan Sdra. Eko Afrilianto pada 26 April 2022.
She was appointed to replace Mr. Eko Afrilianto on April 26, 2022.

MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berlaku sesuai dengan keputusan RUPS yang menyatakan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

PENGANGKATAN DAN KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Pemegang saham pengendali dapat mengusulkan nama-nama untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Ke depannya, Perusahaan juga akan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai komite yang akan melakukan fungsi administratif untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi mengenai profil dan kualifikasi kandidat-kandidat.

TERM OF OFFICE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office for members of the Board of Commissioners is set according to the resolution of the GMS which states that the dismissal of members of the Board of Commissioners follows the prevailing laws and regulations. The term of office for members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) more term.

APPOINTMENT AND CRITERIA OF BOARD OF COMMISSIONERS

The controlling shareholder can propose the candidates to be appointed as members of the Company's Board of Commissioners. The term of office of the Board of Commissioners is set to be 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the resolution of the GMS.

In the future, the Company will also form a Nomination and Remuneration Committee to conduct administrative function to collect and evaluate information regarding the profiles and qualifications of candidates.

TATA LAKSANA KERJA DEWAN KOMISARIS

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur dalam Board Manual yang mencakup:

1. Persyaratan pengangkatan anggota;
2. Komposisi anggota;
3. Masa jabatan anggota;
4. Pemberhentian anggota;
5. Tugas, wewenang, kewajiban, hak dan tanggung jawab anggota;
6. Program kerja dan anggaran;
7. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban;
8. Program pengenalan dan pengembangan kompetensi;
9. Remunerasi; dan
10. Informasi lain mencakup rangkap jabatan, rapat, korespondensi, organ pendukung, etika jabatan, evaluasi kinerja.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

Dewan Komisaris bertugas memberikan arahan sekurang-kurangnya meliputi:

- Perubahan lingkungan bisnis;
- Hubungan dengan Stakeholder;
- Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
- Manajemen Risiko;
- Sistem Teknologi Informasi;
- Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir;
- Kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan;
- Kebijakan pengadaan barang dan jasa;
- Kebijakan mutu dan pelayanan.

BOARD MANUAL FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners working guideline is regulated in the Board Manual which includes:

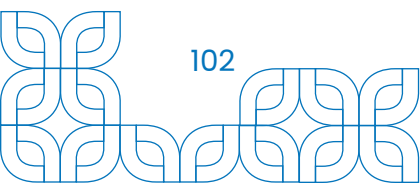
1. Requirements for appointment;
2. Members composition;
3. Members terms of office;
4. Members dismissal;
5. Members duties, authorities, obligations, rights and responsibilities;
6. Working program and budget;
7. Reporting and accountability mechanisms;
8. Induction and development program;
9. Remuneration; and
10. Other information includes concurrent positions, meetings, correspondence, supporting organs, job ethics, performance evaluation.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Board of Commissioners has the duty to perform supervision on the management policy, general implementation of management, both concerning the Company or the Company's business carried out by the Board of Directors and to provide advice to the Board of Directors, including supervision on the implementation of the Company Long-Term Plan, Work Plan and Budget, provisions of the Articles of Association and GMS Resolution as well as the applicable laws and regulations for the Company's interests in accordance with the Company's purpose and objectives;

Board of Commissioners has the duty to provide guidance which at least includes:

- Changes in business environment;
- Relationship with Stakeholders;
- Strengthening of Internal Control System;
- Risk Management;
- Information Technology System;
- Policy and Implementation of Career Development;
- Accounting Policy and Preparation of Financial Statements;
- Policy on Goods and Service Procurement;
- Quality and Service Policy.



Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan Perusahaan sekurang-kurangnya meliputi:

- Kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
- Kepatuhan Direksi sesuai RKAP dan/atau RJP;
- Persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris;
- Pengajuan calon Auditor Eksternal;
- Efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal;
- Gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
- Kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan;
- Kebijakan seleksi dan pengusulan calon Direksi kepada Pemegang Saham;
- Kebijakan penilaian kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan pelaporan kepada Pemegang Saham;
- Kebijakan pengajuan usulan remunerasi Direksi;
- Kebijakan potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris;
- Kebijakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SETIAP ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh para anggota. Di tahun 2022, Dewan Komisaris melakukan pembagian lingkup tugas sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Board of Commissioners is responsible for the supervision of the Company, which at least includes:

- *Compliance of the Board of Directors with Laws and Regulations and Agreements with Third Parties;*
- *Compliance of the Board of Directors with RKAP and/or RJP*
- *Approval of Transactions or Actions within the Authority of the Board of Commissioners;*
- *Proposal of External Auditor Candidates;*
- *Effectiveness of Internal and External Audit;*
- *Indications of Declining Company Performance;*
- *Policy on Subsidiaries/Joint Ventures Management;*
- *Policy on Selection and Proposal of Board of Directors' Candidates to the Shareholders;*
- *Policy on Performance Assessment of the Board of Directors (Individual and Collegial) and Reporting to Shareholders;*
- *Policy on Proposal of Remuneration for the Board of Directors;*
- *Policy on Potential Conflict of Interests concerning the Board of Commissioners;*
- *Policy on Good Corporate Governance Practice.*

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

There is a stipulation governing that the Board of Commissioners is obligated to decide on the segregation of duties among members of the Board of Commissioners. The segregation of duties among members of the Board of Commissioners is self-regulated. In 2022, the Board of Commissioners has divided the scope of duties each Commissioner has to take according to each of their function and expertise in supervising the Company's management the Board of Directors is doing.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi jalannya manajemen Perusahaan. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan Perusahaan dan telah dicatatkan dalam sebuah risalah.

PROGRAM INDUKSI KOMISARIS BARU

Perusahaan memiliki program induksi (program pengenalan) untuk anggota Komisaris yang baru diangkat pertama kali. Program ini meliputi pengenalan terhadap Perusahaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang industri Perusahaan, sistem dan kebijakan penerapan GCG Perusahaan, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Komisaris. Program pengenalan menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Per 31 Desember 2022, Perusahaan sudah menjalankan program pengenalan dimaksud untuk Komisaris yang baru diangkat, yaitu Sdri. Banu Astrini.

PENILAIAN KINERJA ORGAN PENDUKUNG DAN/ATAU KOMITE

Pada akhir tahun 2022, Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit sebagai organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan.

Kriteria penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit meliputi antara lain: efektivitas rapat, pelaksanaantugas dan tanggung jawab, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dengan didasarkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

DUTIES DONE BY BOARD OF COMMISSIONERS IN 2022

In 2022, the Board of Commissioners has conducted the duties and responsibilities in overseeing the management of the Company. Every action and decision was in the Company's interest recorded in minutes.

INDUCTION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONER

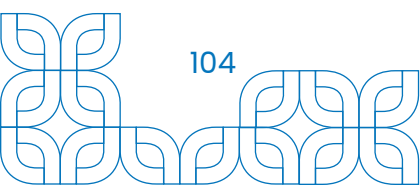
The Company has an induction program (introduction program) for the newly appointed member of the Board of Commissioners. This program includes an introduction to the Company, the applicable regulations and legislation in the Company's field of industry, systems, and policies of GCG implementation, and other issues deemed necessary to support the duties and responsibilities of the Commissioner. The introduction program becomes the responsibility of the Corporate Secretary. As of December 31, 2022, the Company had conducted the introduction program for the newly appointed Commissioner, Mrs. Banu Astrini.

ASSESSMENT ON THE SUPPORTING BODIES AND/OR COMMITTEES

By the end of 2022, the Board of Commissioners had the Secretary of the Board of Commissioners and Audit Committee as the supporting organ that helped the Board in supervising the Company's management.

The assessment criteria of the Secretary of the Board of Commissioners and Audit Committee include, among others: the effectiveness of meetings, implementation of duties and responsibilities, reporting, and accountability.

The Secretary of the Board of Commissioners and Audit Committee submitted a regular written report of their work, which is set according to their duties and responsibilities, to the Board of Commissioners.



Dewan Komisaris menilai selama tahun 2022, organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI

Program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris termasuk dalam rencana pengembangan SDM yang dilakukan Perusahaan. Perusahaan memandang penting bagi Dewan Komisaris untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan, berikut dengan rekomendasi yang diperlukan, terhadap kepengurusan Perusahaan oleh Direksi, untuk kemajuan Perusahaan. Pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris pada tahun 2022 adalah pelatihan atau workshop mengenai ISO 37001 untuk sistem manajemen anti penyuapan pada tanggal 17-18 November 2022.

KOMISARIS INDEPENDEN DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2022, Perusahaan tidak memiliki Komisaris Independen. API bukan merupakan perusahaan publik dan tidak memiliki kewajiban untuk mengangkat Komisaris Independen. Walaupun demikian setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan sudah dipastikan memiliki tingkat independensi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan.

The Board of Commissioners has assessed the supporting organs' performance during 2022 and came to the conclusion that they have done their duties properly.

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT

The competency development program for the Board of Commissioners becomes part of the Company's HR development plan. The Company believes that it is important for the Board of Commissioners to gain more insight and knowledge to improve its supervision quality and give the necessary recommendations concerning the Company's management by the Board of Directors, for the Company's progress. The training program followed by the Board of Commissioners in 2022 was the training or workshop on ISO 37001, an anti-bribery management system, from November 17 to November 18, 2022.

INDEPENDENT COMMISSIONER AND THE INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who have no relations with the Company in terms of financial or management and has no share ownership and/or family relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Company itself.

By the end of 2022, the Company did not have an Independent Commissioner. API is not a public company and has no obligation to appoint an Independent Commissioner. Nevertheless, each member of the Company's Board of Commissioners has been ensured to have a sufficient level of independence and is free from conflicts of interest.

Informasi mengenai independensi Dewan Komisaris API per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Information regarding the independence of API's Board of Commissioners as of December 31, 2022, is as follows:

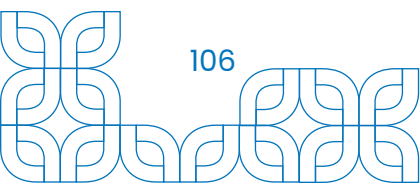
| Nama Name | Jabatan Position | Kepemilikan Saham di Perusahaan Share Ownership at the Company | Hubungan Afiliasi dengan Direksi dan Pemegang Saham Affiliation with Directors and Shareholders |
|--------------------------|--|---|--|
| Banu Astrini | Komisaris Utama President Commissioner | x | x |
| Hotman Napitupulu | Komisaris Commissioner | x | x |
| David Ratadhi Wironegoro | Komisaris Commissioner | x | x |

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Code*) yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2020 oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam pedoman tersebut terdapat Board Manual yang salah satunya mengatur mengenai rangkap jabatan. Terdapat seorang Komisaris, yaitu Sdra. David Ratadhi Wironegoro, yang memiliki rangkap jabatan di luar Perusahaan. Saat ini beliau mengemban tugas sebagai Head of Public Relations Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara. Pemegang Saham telah mengetahui rangkap jabatan beliau dan dipastikan tidak akan menyebabkan benturan kepentingan.

DUAL POSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company has a Good Corporate Governance Code which was ratified on December 31, 2020 by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The GCG Code also contains the Board Manual, which among others, regulates the dual position of a Commissioner. There is a Commissioner, Mr. David Ratadhi Wironegoro, who holds other positions outside the Company. Currently, he is also the Head of Public Relations at Taman Taruna Nusantara Education Foundation. Shareholders are aware of his dual position and have ensured that there will be no conflict of interest.



DIREKSI

Board of Directors

Secara kolegal, Direksi memiliki tugas mengelola dan mengurus Perusahaan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan sesuai dengan target dan rencana bisnis Perusahaan. Secara garis besar, pelaksanaan tugas ini memungkinkan Direksi untuk bertindak bagik secara individual maupun kolegal menguasai dan mengelola aset Perusahaan.

In collegial, the Board of Directors was appointed to manage the Company, improving its performance in accordance with the targets and business plans. In general, this allows the Board of Directors to act individually and collegially in controlling and managing Company's assets.

KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Per 31 Desember 2019, Direksi Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) anggota. Komposisi ini dianggap sebagai komposisi yang ideal dan Perusahaan telah memberikan wewenang bagi Direksi untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya serta mengelola Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.

COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS

The composition and amount of members of the Board of Directors are determined by the GMS, based on the Board of Commissioners' proposal in consideration of the Company's condition to conduct business activities. As of December 31, 2019, the Company's Board of Directors consisted of 3 (three) members. The composition considered to be ideal and the Company has authorized the Directors to perform their duties and responsibilities and manage the Company for the benefit of the Company.

| Nama Name | Jabatan Position | Warga Negara Nationality | Dasar Pengangkatan Basis of Appointment |
|--------------|--|-----------------------------|--|
| Iwan Ridwan* | Direktur Utama President Director | Indonesia | Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) Nomor: PPI-623-22072019-010 Nomor HK.55/22/7/2/PTP-19 pada tanggal 22 Juli 2019. <i>Circular Decision of the Shareholders Number: PPI-623-22072019-010 and Nomor HK.55/22/7/2/PTP-19 on July 22, 2019.</i> |
| Juli Tarigan | Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Resources | Indonesia | Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: PPI-623-01102021-031 dan HK.55/1/10/1/PTP-21 tanggal 1 Oktober 2021. <i>Resolution of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders Number: PPI-623-01102021-031 and HK.55/1/10/1/PTP-21 dated October 1, 2021.</i> |

Keterangan | Remarks:

*) Beliau juga menjabat sebagai Plt. Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Perusahaan untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Direktur sebelumnya. |
He is also the Act. Director of Operations and Business Development of the Company to fill the vacant position left by the previous Director.

MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi berlaku sesuai dengan keputusan RUPS yang menyatakan pemberhentian anggota Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa Jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

PENGANGKATAN DAN KRITERIA DIREKSI

Pemegang saham pengendali, atas rekomendasi Dewan Komisaris, dapat mengusulkan nama-nama untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perusahaan. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Ke depannya, Perusahaan juga akan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai komite yang akan melakukan fungsi administratif untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi mengenai profil dan kualifikasi kandidat-kandidat.

TATA LAKSANA KERJA DIREKSI

Pedoman kerja Direksi diatur dalam *Board Manual* yang mencakup:

1. Persyaratan pengangkatan anggota;
2. Komposisi anggota;
3. Masa jabatan anggota;
4. Pemberhentian anggota;
5. Tugas, wewenang, kewajiban, hak dan tanggung jawab anggota;
6. Program kerja dan anggaran;
7. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban;
8. Program pengenalan dan pengembangan kompetensi;
9. Remunerasi; dan
10. Informasi lain mencakup rangkap jabatan, rapat, korespondensi, organ pendukung, etika jabatan, evaluasi kinerja.

TERM OF OFFICE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The term of office for members of the Board of Directors is set according to the resolution of the GMS which states that the dismissal of members of the Board of Directors follows the prevailing laws and regulations. The term of office for members of the Board of Directors is set at 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) more term.

APPOINTMENT AND CRITERIA OF BOARD OF DIRECTORS

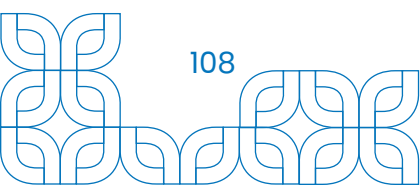
The controlling shareholder can propose the candidates to be appointed as members of the Company's Board of Commissioners. The term of office of the Board of Directors is set to be 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. Members of the Board of Directors may be dismissed at any time based on the resolution of the GMS.

In the future, the Company will also form a Nomination and Remuneration Committee to conduct administrative function to collect and evaluate information regarding the profiles and qualifications of candidates.

BOARD MANUAL FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors working guideline is regulated in the Board Manual which includes:

1. *Requirements for appointment;*
2. *Members composition;*
3. *Members terms of office;*
4. *Members dismissal;*
5. *Members duties, authorities, obligations, rights and responsibilities;*
6. *Working program and budget;*
7. *Reporting and accountability mechanisms;*
8. *Induction and development program;*
9. *Remuneration; and*
10. *Other information includes concurrent positions, meetings, correspondence, supporting organs, job ethics, performance evaluation.*



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Direksi bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola Perusahaan serta bertugas memberikan arahan terhadap:
 - Kebijakan operasional dan *Standard Operational Procedure* (SOP);
 - Penerapan Manajemen Risiko;
 - Program/kegiatan sesuai dengan RKAP;
 - Pengukuran dan penilaian kinerja;
 - Usulan insentif kinerja;
 - Sistem Teknologi Informasi;
 - Sistem peningkatan produk dan pelayanan;
 - Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - Pengelolaan anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan;
 - Penerapan kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAK;
 - Pengelolaan Sistem Pengendalian Internal;
 - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
 - Pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Hubungan *Stakeholder*;
 - Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan Manajemen di bawah Direksi;
 - Keterbukaan informasi dan komunikasi;
 - Pengadaan barang dan jasa.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. *The Board of Directors has the collegial duty and responsibility in managing the Company and provide guidance on:*
 - *Operational Policies and Standard Operating Procedure (SOP);*
 - *Risk Management Implementation;*
 - *Programs/Activities according to RKAP;*
 - *Performance Measurement and Assessment;*
 - *Performance Incentive Proposal;*
 - *Information Technology System;*
 - *Product and Service Improvement System;*
 - *Corporate Social Responsibility Management;*
 - *Human Resources (HC) Management;*
 - *Governance of Subsidiaries and/or Joint Ventures;*
 - *Implementation of Accounting Policies and Preparation of Financial Statements according to SAK;*
 - *Internal Control Management;*
 - *Follow-Up on Assessment Results by Internal and External Auditors;*
 - *Management of the Company according to Laws and Regulations;*
 - *Stakeholder Relations;*
 - *Monitoring and Management of Potential Conflict of Interests of Members of the Board of Directors and Management under the Board of Directors;*
 - *Information and Communication Transparency;*
 - *Goods and Service Procurement.*
2. *The Board of Directors is fully responsible for the management of the Company for the Company's interests and objectives and for representing the Company both inside and outside the court.*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SETIAP ANGGOTA DIREKSI

Terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Sesuai dengan komposisi Direksi per 31 Desember 2022, setiap anggota Direksi bertugas untuk mengemban tanggung jawab sesuai dengan posisinya dalam mengelola bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mengelola Perusahaan. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan Perusahaan dan telah dicatatkan dalam sebuah risalah.

PENILAIAN KINERJA ORGAN PENDUKUNG DAN/ATAU KOMITE

Hingga akhir tahun 2022, Direksi belum membentuk komite di bawah Direksi untuk membantu mengelola Perusahaan. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait penilaian atas kinerja komite di bawah Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan, serta Satuan Pengawasan Intern dan organ fungsional lainnya.

Penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern dilakukan berdasarkan pada tugas dan kewajiban serta program kerja masing-masing di tahun berjalan. Kriteria penilaian kinerja meliputi realisasi laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab, rekomendasi yang diberikan dan frekuensi rapat yang dilakukan dalam membantu fungsi pengelolaan Direksi. Dalam pelaksanaan fungsinya di tahun 2022, Direksi menilai bahwa Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya dan memberikan masukan dan rekomendasi yang membantu pengelolaan Perusahaan secara efektif.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

There is a stipulation by the Board of Directors regarding the segregation of duties and responsibilities for each member of the Board of Directors. Based on the composition of the Board of Directors as of December 31, 2022, the duties and responsibilities of each member are different according to the particular field each Director holds.

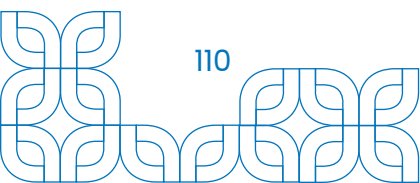
DUTIES DONE BY BOARD OF DIRECTORS IN 2022

In 2022, the Board of Directors has conducted the duties and responsibilities that are necessary for managing the Company. Every action and decision was in the Company's interest and recorded in minutes.

ASSESSMENT ON THE SUPPORTING ORGANS AND/OR COMMITTEES

By the end of 2022, the Board of Directors had not yet formed a committee under the Board of Directors to help manage the Company. Therefore, there is no information related to the assessment of the committees under the Board of Directors. In carrying out its duties, the Board of Directors is supported by the Corporate Secretary, Internal Audit, and other functional bodies.

Evaluation of the Corporate Secretary and Internal Audit is carried out based on the duties, obligations, and work programs in the current year. The evaluation is done from the report that covers their implementation of duties according to the responsibilities, the quality of recommendations, and the frequency of meetings held in assisting the Board of Directors' management function. The Board of Directors has assessed the Corporate Secretary and Internal Audit and believes they have done their duties and responsibilities splendidly and provided input and recommendations that help manage the Company effectively.



PROGRAM INDUKSI DIREKSI BARU

Perusahaan memiliki program induksi (program pengenalan) untuk anggota Direksi yang baru diangkat pertama kali. Program ini meliputi pengenalan terhadap Perusahaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang industri Perusahaan, sistem dan kebijakan penerapan GCG Perusahaan, kinerja finansial dan operasional, aset-aset Perusahaan, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi. Program pengenalan menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Perusahaan tidak mengangkat Direktur baru di tahun 2022 sehingga tidak mengadakan program induksi.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI

Program pengembangan kompetensi Direksi termasuk dalam rencana pengembangan SDM yang dilakukan Perusahaan. Perusahaan memandang penting bagi Direksi untuk menambah wawasan dan pengetahuan, terutama di bidang industri properti dan realti, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Perusahaan, berikut dengan sejumlah keputusan strategis untuk mengembangkan Perusahaan. Pelatihan yang diikuti Direksi pada tahun 2022 adalah pelatihan atau workshop mengenai ISO 37001 untuk sistem manajemen anti penyuapan pada tanggal 17-18 November 2022.

INDEPENDENSI DIREKSI

Informasi mengenai independensi Direksi API per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

INDUCTION PROGRAM FOR NEW DIRECTOR

The Company has an induction program (introduction program) for the newly appointed member of the Board of Directors. This program includes an introduction to the Company, the applicable regulations and legislation in the Company's field of industry, systems and policies of GCG implementation, and other issues deemed necessary to support the duties and responsibilities of the Directors. The introduction program becomes the responsibility of the Corporate Secretary. The Company did not appoint a new Director in 2022 and therefore there wasn't any induction program held.

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT

The competency development program for the Board of Commissioners becomes part of the Company's HR development plan. The Company believes that it is important for the Board of Directors to have more insight and knowledge, particularly in the property sector, to improve the management quality along and strategic decisions to develop the Company. The training program followed by the Board of Directors in 2022 was the training or workshop on ISO 37001, an anti-bribery management system, from November 17 to November 18, 2022.

INDEPENDENCY OF BOARD OF DIRECTORS

Information regarding the independence of API's Board of Directors as of December 31, 2022, is as follows:

| Nama Name | Jabatan Position | Kepemilikan Saham di Perusahaan Share Ownership at the Company | Hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Affiliations with Members of Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders |
|--------------|--|---|--|
| Iwan Ridwan | Direktur Utama President Director | x | x |
| Juli Tarigan | Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Director of Finance and Human Resources | x | x |

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Code*) yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2020 oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam pedoman tersebut terdapat Board Manual yang salah satunya mengatur mengenai rangkap jabatan. Terdapat seorang Direktur, yaitu Sdra. Iwan Ridwan, yang memiliki rangkap jabatan di dalam dan luar Perusahaan. Saat ini beliau mengemban tugas sebagai Plt. Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Perusahaan dan Komisaris Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

Jabatan Plt. Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Perusahaan diemban untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Direktur sebelumnya. Sedangkan jabatan Komisaris Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways diemban karena beliau merupakan perpanjangan tangan API, sebagai induk perusahaan, untuk mengawasi jalannya anak perusahaan.

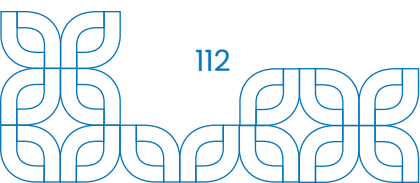
Pemegang Saham telah mengetahui rangkap jabatan beliau dan dipastikan tidak akan menyebabkan benturan kepentingan.

DUAL POSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company has a Good Corporate Governance Code which was ratified on December 31, 2020 by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The GCG Code also contains the Board Manual, which among others, regulates the dual position of a Commissioner. There is a Director, Mr. Iwan Ridwan, who holds other positions inside and outside the Company. Currently, he is also the Act. Director of Operation and Business Development of the Company and the President Commissioner of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

His position as the Act. Director of Operations and Business Development of the Company is to fill the vacant position left by the previous Director. Meanwhile, his position as the President Commissioner of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways is to represent API, the parent company, to monitor the subsidiary.

Shareholders are aware of his dual position and have ensured that there will be no conflict of interest.



RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki mekanisme rapat internal antar masing-masing anggota dan rapat gabungan. Perusahaan mengatur bahwa rapat internal dan gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau bilamana diperlukan. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat mengundang karyawan atau anggota komite lain bilamana dianggap perlu.

Dewan Komisaris dan Direksi telah mengadakan rapat secara berkala. Agenda pembahasan dalam rapat-rapat internal mencakup Laporan Tahunan Perusahaan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, realisasi RKAP Tahun 2022, isu-isu strategis Perusahaan. Sedangkan dalam rapat gabungan sepanjang tahun 2022, agenda pembahasan mencakup pembahasan progres proyek dan kinerja Perusahaan yang mencakup progres pencapaian Rencana Kerja Manajemen 2022, realisasi RKAP 2022, progres proyek JTCC, divestasi saham, progres pengembangan *rest area & logistic center*, laporan keuangan bulan berjalan.

Dewan Komisaris dan Direksi telah menghadiri rapat-rapat yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022.

The Board of Commissioners and the Board of Directors have an internal meeting mechanism between each member and joint meetings. The Company has determined that the internal and joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors should be held at least once every 3 (three) months or whenever necessary. The members of the Board of Commissioners and Board of Directors may invite other employees or committees if necessary.

*The agendas during the internal meetings were around the Company's Annual Report and Ratification of Financial Statements for fiscal year 2021, achievement of the 2022 RKAP, strategic corporate issues. Meanwhile, during the coordination meetings throughout 2022, the agendas were around project progress and Company performance which includes the 2022 Management Work Plan, the 2022 RKAP, the JTCC progress, share divestment, the progress of *rest area & logistics center*, monthly financial report.*

The Board of Commissioners and the Board of Directors have attended all meetings in 2022.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 dan Keputusan Pemegang Saham. Komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

The remuneration policy of the Board of Commissioners and Board of Directors refers to SOE Ministerial Regulation Number: PER-04/MBU/2014 and Shareholder Decree. The income components of the Board of Commissioners and Board of Directors consist of:

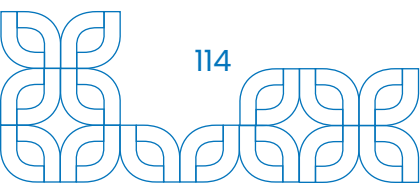
| Dewan Komisaris Board of Commissioners | Direksi Board of Directors |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium; 2. Tunjangan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Tunjangan Hari Raya; b. Tunjangan transportasi; c. Asuransi purna jabatan. 3. Fasilitas yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas kesehatan; b. Fasilitas bantuan hukum. 4. Tantiem/insentif kinerja. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium; 2. Tunjangan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Tunjangan Hari Raya; b. Tunjangan perumahan; c. Asuransi purna jabatan. 3. Fasilitas yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas kendaraan; b. Fasilitas kesehatan; c. Fasilitas bantuan hukum. 4. Tantiem/Insentif Kinerja. |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium; 2. Allowance comprising of: <ol style="list-style-type: none"> a. Holiday allowance; b. Transportation allowance; c. Retirement insurance. 3. Facilities comprising of: <ol style="list-style-type: none"> a. Medical facility; b. Legal assistance facility. 4. Performance bonus/incentives. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium; 2. Allowance comprising of: <ol style="list-style-type: none"> a. Holiday allowance; b. Housing allowance; c. Retirement Insurance. 3. Facilities comprising of: <ol style="list-style-type: none"> a. Vehicle facility b. Medical facility; c. Legal assistance facility. 4. Performance bonus/incentives. |

Penetapan besaran remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

The amount of remuneration is determined by considering the business scale, the business complexity, inflation rate, the Company's and financial capability, and other relevant factors not conflicting with laws and regulations.

Sementara untuk penetapan penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan.

Meanwhile, variable (*merit rating*) Bonuses/ Performance Incentives are determined based on the Company's performance and financial capability, as well as other relevant factors.



PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

RUPS menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Secara khusus, remunerasi Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris dan ketentuan Key Performance Indicator (KPI) atau kontrak manajemen Direksi.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada Badan Usaha Milik Negara, manajemen Perusahaan membuat kontrak manajemen antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham Perusahaan. Salah satu isi kontrak manajemen tersebut adalah kesepakatan mengenai ukuran keberhasilan kinerja dari Direksi dan manajemen yang memuat Key Performance Indicator (KPI). Realisasi pencapaian KPI telah disampaikan dalam Bab "Analisis dan Pembahasan Manajemen" dalam pembahasan "Perbandingan Target dan Pencapaian 2022". Skor pencapaian KPI tahun 2022 adalah 80,25.

TOTAL INSENTIF KHUSUS

Total insentif khusus bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2022 atas kinerja tahun buku 2021 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Nomor: SK.03/31/10/7/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor: HK.55/31/10/1/PTP-22. Total nilainya adalah sebesar Rp1.146.580.456 dengan komposisi:

1. Anggota Direksi: 85% dari Direktur Utama;
2. Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama;
3. Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama.

PROCEDURE TO DETERMINE REMUNERATION

GMS determines remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors. Particularly, the remuneration for the Board Directors is determined based on the recommendation from the Board of Commissioners and the Key Performance Indicator (KPI) or management contract.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2022

Based on the Letter of the Secretary of SOE Ministry No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013, regarding Submission of KPI Determination Guideline and Criteria for Excellent Performance Assessment (KPKU) in State-Owned Enterprises, the Company's management made a management contract between the Board of Commissioners and Board of Directors with the Company's Shareholders. Contents of the management contract include an agreement on the measurement of performance achievement of the Board of Directors and management that comprises the Key Performance Indicator (KPI). The KPI achievement has been presented in the "Management Analysis and Discussion" Chapter in the discussion regarding "Comparison Between 2022 Target and Achievement". The KPI achievement in 2022 was 80.25.

TOTAL SPECIAL INCENTIVES

Total special incentives for the Board of Commissioners and Directors received in 2022 for the financial year 2021 performance has been determined based on Circular Resolution Number: SK.03/31/10/7/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number: HK.55/31/10/1/PTP-22. The total amounted to Rp1,146,580,456 with the following composition:

1. Members of the Board of Directors: 85% of the President Director;
2. President Commissioner: 45% of the President Director;
3. Board of Commissioners: 90% of the President Commissioner.

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

The Diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Perusahaan memiliki ketentuan khusus dalam Board Manual terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam Board Manual disebutkan bahwa komposisi anggota harus memperhatikan keberagaman yang meliputi keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perusahaan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan semuanya adalah laki-laki Warga Negara Indonesia. Terdapat keberagaman dari latar belakang mereka yang berbeda dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, dan usia. Informasi lebih lengkap mengenai profil masing-masing Komisaris dan Direksi telah disampaikan di Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi pada Laporan Tahunan ini.

The Company has stipulated in the Board Manual regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. According to the Board Manual, the composition must take into account the diversity of each member in terms of expertise, knowledge, and experience according to what the Company is needing.

The diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is part of the Company's efforts to help the oversight and management functions to consider wider aspects before making any decision.

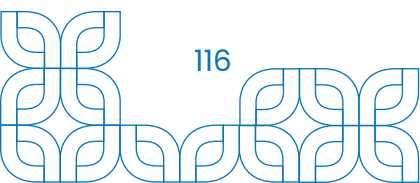
The Board of Commissioners and the Board of Directors are all male Indonesian citizens. There is a diverse background among members in terms of education, work experience, skills, and age. Detailed information regarding the profiles of each Commissioner and Director has been presented in the Board of Commissioners Profile and the Board of Directors Profile in this Annual Report.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Secretary to the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa: mempersiapkan rapat, membuat risalah rapat, mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris, menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris. Evaluasi Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metode *self-assessment* yang ditetapkan Dewan Komisaris.

The Secretary to the Board of Commissioners has to conduct activities to assist the Board of Commissioners in performing their duties, including preparing meetings, making meeting minutes, administering documents of the Board of Commissioners, preparing the work plan and budget of the Board of Commissioners, preparing drafts of Board of Commissioners' reports. Performance evaluation of Secretary to the Board of Commissioners is carried out once every year using the self-assessment method determined by the Board of Commissioners.





Margiyono

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

| | |
|---|---|
| Kewarganegaraan Nationality | Indonesia |
| Usia Age | 40 tahun years old |
| Domisili Domicile | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan Educational Background | <ul style="list-style-type: none"> • Magister Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada (2008) • Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Sebelas Maret (2005) • Master of Business Administration from the Gadjah Mada University (2008) • Bachelor of State Administration from the University of Sebelas Maret (2005) |
| Pengalaman Kerja Work Experience | <ul style="list-style-type: none"> • Manager HSSE Cabang Pelabuhan Pontianak • Deputy Vice President Pembinaan Anak Perusahaan PPI • Senior Officer Pengelolaan Cabang Kantor Pusat • Senior Officer PAP Bisnis Pendukung Kantor Pusat • Senior Officer PAP Bisnis Inti Kantor Pusat • HSSE Manager of Pontianak Port Branch • HSSE Manager of Pontianak Port Branch • Deputy Vice President of Subsidiary Management at PPI • Senior Officer of Branch Management of Head Office • Senior Officer of PAP Business Support at Head Office • Senior Officer of PAP Core Business at Head Office |

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Setiap tindakan yang diambil adalah untuk membantu Dewan Komisaris dan telah dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

DUTIES DONE BY THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2022

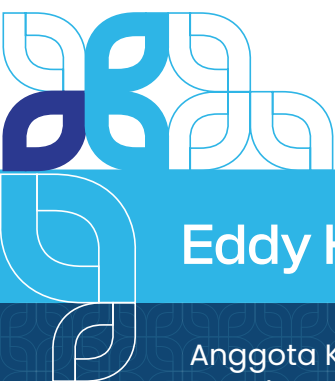
In 2022, the Secretary of the Board of Commissioners has conducted the duties and responsibilities that are necessary in helping the Board of Commissioners in doing the job. Every action and decision was to assist the Board of Commissioners and all have been reported regularly to the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Komite Audit API terdiri seorang anggota yang telah diangkat dengan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan Nomor: 01/KEP-DK/II/API-2018 tanggal 26 Februari 2018.

The Audit Committee has the duty to assist the Board of Commissioners in supervising the Company's management by the Board of Directors. API's Audit Committee consists of one member who has been appointed based on the Decree of the Board of Commissioners Number: 01/KEP-DK/II/API-2018 dated February 26, 2018.



Eddy Kuswaedi Husein

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee



Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia

Usia
Age

64 tahun | years old

Domisili
Domicile

Bekasi

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Penanggungjawab Unit Manajemen Risiko Korporasi PT RNI (2010)
- Kepala Satuan Pengawas Intern di PT RNI (2007)
- Deputi Direktur Manajemen Aset di PT RNI (2004)
- Person in Charge for Corporate Risk Management Unit at PT RNI (2010)
- Head of Internal Control Unit at PT RNI (2007)
- Deputy Director of Asset Management at PT RNI (2004)

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

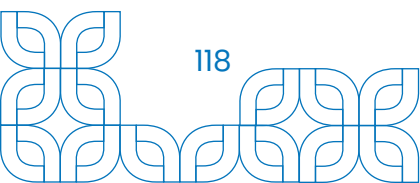
Anggota Komite Audit PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2016-saat ini)
Member of the Audit Committee of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2016-present)

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Perusahaan menetapkan bahwa anggota Komite Audit API harus terbebas dari konflik benturan kepentingan sehingga semua anggota yang terpilih dipastikan adalah anggota independen yang tidak memiliki kepentingan/keterkaitan

INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

The Company stipulated that members of Audit Committee must be free from conflicts of interest and therefore all elected members are ascertained to be independent members who have no personal interest/connection with API. Mr.



pribadi dengan API. Adapun Sdra. Eddy Kuswaedi Husein sudah memenuhi kriteria independensi anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada API dalam waktu 6 bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di API.
3. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham utama API.
5. Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
6. Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2022

Pelaksanaan tugas Komite Audit direalisasikan dalam bentuk rapat. Sepanjang 2022 Komite Audit telah melaksanakan tugas sebagai bagian pendukung Dewan Komisaris yang memberikan rekomendasi serta memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

RAPAT KOMITE AUDIT

Pada tahun 2022, rapat Komite Audit digabung dengan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Sdra. Eddy Kuswaedi telah menghadiri semua rapat.

Eddy Kuswaedi Husein has met the independence criteria for members of the Audit Committee as follows:

1. *Not an insider of public accounting firm, legal consulting firm, or other parties that provide audit and non-audit or other consulting services to API in the last 6 months.*
2. *Have no shares either directly or indirectly in API.*
3. *Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company in the last 6 months.*
4. *Have no family relationship from marriage and lineage up to second degree, either horizontally or vertically, with the Board of Commissioners, Board of Directors, or majority Shareholder of API.*
5. *Have no direct and indirect business relationship with the Company's business activities.*
6. *Not being in an institution of which business activities provide services to the Company.*

DUTIES DONE BY AUDIT COMMITTEE IN 2022

The duty implementation of the Audit Committee is realized through meetings. Throughout 2022, the Audit Committee has performed its duty as support for the Board of Commissioners by providing recommendations and ensuring the effectiveness of the internal control system and duty implementation of external and internal auditors.

AUDIT COMMITTEE MEETING

In 2022, the Audit Committee meeting was held together with the joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors. Mr. Eddy Kuswaedi has attended all meetings.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nomination and Remuneration Committee

Sampai dengan 31 Desember 2022, API belum secara khusus membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh Pemegang Saham dengan dibantu oleh Komite Audit sebagai Pelaksana Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksana Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas memastikan bahwa sistem remunerasi dan nominasi Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi Perusahaan dan pencapaian kinerja.

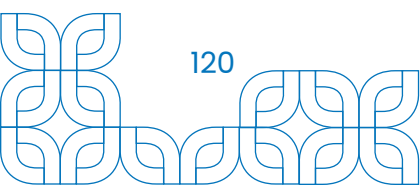
As of December 31, 2022, API had not specifically formed a Nomination and Remuneration Committee. However, the function was conducted by the Shareholders with the assistance from the Audit Committee as the implementor of the Nomination and Remuneration Committee Function. The Nomination and Remuneration Committee's function was to ensure that the Company's remuneration and nomination system was in accordance with applicable laws and regulations with consideration of the Company's conditions and target achievements.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai organ penghubung antara Perusahaan dengan publik eksternal termasuk para *Stakeholder*, regulator, dan masyarakat luas. Sekretaris Perusahaan berada di bawah perintah langsung dari Direktur Utama Perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspek keterbukaan dan transparansi informasi Perusahaan berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor PR.102/02/05/01/API-18 tanggal 2 Februari 2018, Perusahaan telah mengangkat Zahra Meutia sebagai Sekretaris Perusahaan.

The Corporate Secretary acts as the Company's organ that liaise the Company and its external public including Stakeholders, regulators, and the general public. The Corporate Secretary works under direct orders from the President Director and has the responsibility to ensure that the disclosure and transparency aspects of the Company's information were carried out properly in accordance with applicable laws and regulations. Based on Decree Number PR.102/02/05/01/API-18 dated February 2, 2018, the Company has appointed Zahra Meutia as Company Secretary.





Zahra Meutia

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



| | |
|---|--|
| Kewarganegaraan Nationality | Indonesia |
| Usia Age | 29 tahun years old |
| Domisili Domicile | Banten |
| Riwayat Pendidikan Educational Background | <ul style="list-style-type: none"> • Magister Kenotariatan dari Universitas Jayabaya, Jakarta (2018) • Sarjana Hukum dari Universitas Negeri Semarang (2015) • Magister in Notary from Jayabaya University, Jakarta (2018) • Bachelor of Laws from Semarang State University (2015) |
| Pengalaman Kerja Work Experience | <ul style="list-style-type: none"> • Bekerja di Kantor Hukum Ragil Widodo & Partners • Legal Admin and Legal Corporate di Alila • Legal Mining External di PT Buva Tbk • Praktisi di Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai Analis Putusan Hakim • Pekerja kontrak di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pidana dan Perdata • Worked at Ragil Widodo & Partners Law Office • Legal Admin and Legal Corporate at Alila • Legal Mining External at PT Buva Tbk • Practitioners in the Judicial Commission of the Republic of Indonesia as Analysts of Judge Decisions • Contract workers in the Supreme Court of the Republic of Indonesia for Criminal and Civil Law |

TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary senantiasa mendukung upaya mencapai kinerja optimal API dengan pelaksanaan tugas yang dituangkan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung kegiatan kehumasan Perusahaan. Adapun kegiatan Corporate Secretary sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat Direksi;
2. Membuat risalah rapat Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Direksi, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;

DUTIES OF CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary continuously supports the achievement of optimum performance of API by performing duties that are implemented through various activities of public relations. The activities of Corporate Secretary in 2022 were as follows:

1. Prepare meetings, including materials for Board of Directors' meetings;
2. Make minutes of the Board of Directors' meetings in accordance with the Company's Articles of Association;
3. Administer documents of the Board of Directors, including incoming and outgoing letters, meeting minutes, and other documents;

4. Melaksanakan tugas lain dari Direksi;
5. Memastikan bahwa Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan serta menetapkan prinsip-prinsip GCG;
6. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
7. Mengkoordinasikan anggota Dewan Komisaris, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Direksi;
8. Sebagai penghubung dengan pihak lain.
9. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
10. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
11. Sebagai penghubung (liaison officer);
12. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS.

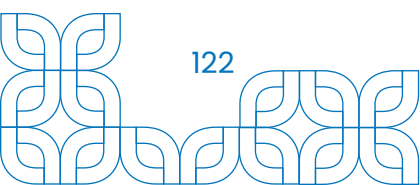
4. Carry out other assignments from the Board of Directors;
5. Ensure that the Board of Directors complies with laws and regulations and implements GCG principles;
6. Provide information required by the Board of Directors periodically and/or incidentally at request;
7. Coordinate members of the Board of Commissioners if necessary in order to support the Board of Directors' duties;
8. Act as liaison with other parties;
9. Ensure that the Company complies with the regulations on transparency requirements in accordance with GCG principles implementation;
10. Provide information required by the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board periodically and/or incidentally at request;
11. Act as liaison officer;
12. Administer and store the Company's documents, including but not limited to Shareholders List, Special List, and minutes of Board of Directors' meetings, Board of Commissioners/Supervisory Board's meetings, and GMS.

EVALUASI KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2022

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan berdasarkan penilaian Direktur Utama. Pada tahun 2022, Direktur Utama menilai bahwa Sekretaris Perusahaan telah melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

EVALUATION ON PERFORMANCE OF CORPORATE SECRETARY IN 2022

The evaluation of the Corporate Secretary's performance was conducted once every year by the President Director. In 2021, the President Director considered that the Corporate Secretary had done a proper job under the assigned duties and responsibilities.



SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) ATAU INTERNAL AUDIT

Internal Control Unit or Internal Audit

Direksi perlu membentuk Fungsi SPI atau Internal Audit guna memberikan assurance yang independen dan objektif, serta jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan terhadap evaluasi atas pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, operasional, SDM, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Kepala SPI harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi dan keahlian yang diperlukan dalam Fungsi Auditor Internal agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PROFIL KEPALA SPI

Kepala SPI API dijabat oleh M. Aslam Fuadi yang telah memenuhi latar belakang profesional dan memenuhi persyaratan Perusahaan.

The Board of Directors felt necessary to form an Internal Audit to provide independent and objective assurance, as well as consultancy services to the Board of Commissioners and Board of Directors to evaluate the audit and efficiency and effectiveness in finance, operations, human resources, information technology and others.

REQUIREMENTS, APPOINTMENT AND TERMINATION

SPI Head must possess the academic qualifications, competencies and expertise in the Internal Auditor Function to perform the duties and responsibilities. SPI Head appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

HEAD OF SPI PROFILE

Head of SPI at API is held by M. Aslam Fuadi, who has a professional background that is deemed appropriate by the Company.



M. Aslam Fuadi

Kepala SPI
Head of SPI

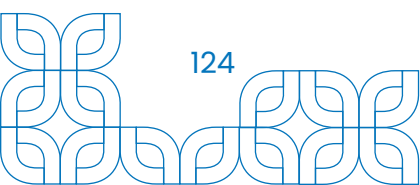
| | |
|---|---|
| Kewarganegaraan Nationality | Indonesia |
| Usia Age | 51 tahun years old |
| Domisili Domicile | Jakarta |
| Riwayat Pendidikan Educational Background | <ul style="list-style-type: none"> Diploma Teknik Komputer, Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) (1997) Diploma of Computer Engineering, Polytechnic of Bandung Institute of Technology (ITB) (1997) |
| Pengalaman Kerja Work Experience | <p>Beliau telah bergabung dengan Pelindo sejak tahun 1997 saat bekerja di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Berikut merupakan jabatan yang diemban dalam beberapa tahun terakhir (sejak 2015):</p> <ul style="list-style-type: none"> Head of Internal Audit PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2020) Senior Auditor Pengawasan Internal Kantor Pusat (2019-2020) Junior Auditor Pengawasan Internal Kantor Pusat (2016-2019) Auditor Jr. Kantor Pusat (2015-2016) <p><i>He has joined Pelindo since 1997 from the moment he joined the Branch Port of Tanjung Priok. The following is his positions in the past few years (since 2015):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Head of Internal Audit PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2020) Senior Auditor of Internal Control Head Office (2019-2020) Junior Auditor of Internal Control Head Office (2016-2019) Auditor Jr. Head Office (2015-2016) |

KEDUDUKAN SPI

- SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit;
- SPI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
- Satuan kerja Pengawasan Internal mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

SPI POSITION

- SPI is positioned directly under the President Director to guarantee the independence in conducting the activity;
- SPI is led by a head appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners;
- SPI Head reports directly to the President Director;
- SPI has a functional relationship with the Board of Commissioners through the Audit Committee.



PIAGAM INTERNAL AUDIT

Piagam Internal Audit mengatur kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab SPI serta hubungan kelembagaan antara SPI dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal yang dituangkan lebih lanjut dalam piagam internal audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Kepala SPI dan Dewan Komisaris selaku ketua Komite Audit.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI

1. Membuat strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan pengawasan;
2. Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi efektif termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta melakukan assessment terhadap sistem tersebut secara berkala;
3. Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja;
4. Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha yang meliputi antara lain bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
5. Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik pekerja maupun manajemen Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara keseluruhan serta melakukan kajian secara berkala;
7. Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis untuk Direksi dalam rangka penyampaian laporan Direksi kepada Dewan Komisaris;
8. Mendukung penerapan GCG dilingkungan Perusahaan;
9. Memberikan seluruh hasil kegiatan pengawasannya langsung kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

INTERNAL AUDIT CHARTER

The Internal Audit Charter regulates the position, duties, authority and responsibilities of SPI and its institutional relationship between the Audit Committee and External Auditors as outlined furthermore in the internal audit charter signed by the President Director, SPI Head and the Board of Commissioners as the chairman of the Audit Committee.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF SPI

1. *Make strategies, policies, and plans for supervision activities;*
2. *Ensuring that the Company's internal control system is functioning effectively, including carrying out activities that can prevent irregularities and regularly assessing the system;*
3. *Provide consultation to all levels of management regarding efforts to increase the effectiveness of internal control, risk management, and other activities related to performance improvement;*
4. *Oversee all business activities which include among others in finance, operations, human resources, information technology, and others;*
5. *Conduct audits to encourage the creation of compliance of both workers and company management with the applicable laws and regulations;*
6. *Monitor the achievement of overall objectives and oversee strategies and conduct periodic reviews;*
7. *Prepare data, information and analysis support for Directors for the reports to the Board of Commissioners;*
8. *Support the implementation of GCG within the Company;*
9. *Provide the entire results of its supervisory activities directly to the President Director and provide copies to the Board of Commissioners through the Audit Committee.*

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA INTERNAL AUDIT 2022

Unit Audit Internal PSL telah melakukan Audit Performansi 2022 pada API.

REALIZATION OF THE INTERNAL AUDIT WORKING PLAN IN 2021

The Internal Audit Unit of PSL has conducted a Performance Audit 2022 on API.

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari 2018-2021 adalah:

List of Public Accountant Firms and Accountants that have audited the Company's Financial Statements for the last 3 (three) years from 2018-2021 are:

| Tahun Buku Fiscal Year | Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm | Akuntan Accountant | Jasa Service | Jasa Lainnya Other Services | Opini Opinion |
|---------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------|---|
| 2022 | Purwanto, Sungkoro & Surja | Moch. Dadang Syachruna | Audit laporan keuangan Perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2022 <i>Audited the Company's financial statements ended on December 31, 2022</i> | - | Wajar dalam semua hal yang material <i>Unqualified opinion as the financial statements presents fairly in all material aspects</i> |
| 2021 | Purwanto, Sungkoro & Surja | Moch. Dadang Syachruna | Audit laporan keuangan Perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2021 <i>Audited the Company's financial statements ended on December 31, 2021</i> | - | Wajar dalam semua hal yang material <i>Unqualified opinion as the financial statements presents fairly in all material aspects</i> |
| 2020 | Purwanto, Sungkoro & Surja | Moch. Dadang Syachruna | Audit laporan keuangan Perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2020 <i>Audited the Company's financial statements ended on December 31, 2020</i> | - | Wajar dalam semua hal yang material <i>Unqualified opinion as the financial statements presents fairly in all material aspects</i> |

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan merupakan upaya Perusahaan untuk memberikan jaminan bahwa aktivitas usaha dan pengelolaan API berjalan dengan sehat usaha dan aman dari segala risiko usaha untuk memastikan keberlanjutan Perusahaan. Perusahaan telah memiliki Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Sistem Pengendalian Keuangan di lingkungan Perusahaan diterapkan dengan selalu mengedepankan kualitas audit yang sesuai dengan standar akuntansi dan finansial yang berlaku serta pertimbangan terhadap sifat industri Perusahaan dan tren perkembangannya. Perusahaan senantiasa memastikan bahwa informasi keuangan yang akuntabel dan transparan dapat diakses oleh Manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan aset-aset Perusahaan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Perusahaan.

Sementara itu, Sistem Pengendalian Operasional di lingkungan Perusahaan dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan dan standar prosedur operasi yang ketat. Hal ini penting untuk dilakukan agar setiap Insan API dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh Perusahaan. Sistem Pengendalian Operasional juga menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan Perusahaan terlindungi dari risiko usaha yang berat dan senantiasa menjamin mutu dan kualitas produk dan pelayanan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL

Manajemen Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi secara berkala terhadap Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Perusahaan dan menyesuaikannya dengan standar internasional yang berlaku dalam lingkup bisnis Perusahaan.

The Company's Internal Control System is acted as an assurance that API's business activities and management were running soundly and safe from all business risks to ensure sustainability. The Company has General Guidelines for Internal Control Systems.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL

The Financial Control System in the Company's environment was implemented with priority on audit quality in accordance with applicable accounting and financial standards and consideration of the nature of the Company's industry and its development trends. The Company always ensures that accountable and transparent financial information can be accessed by Management to support the decision making and management of the Company's assets for the Company's best interest.

In addition, the Operational Control System within the Company was done by applying strict operating policies and standard operating procedures. This is essential to ensure that every personnel of API can work responsibly in accordance with the expected quality standards that the Company has set. The Operational Control System is also important to ensure the Company is protected from major business risks and always guarantees the quality of products and services.

ALIGNMENT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH INTERNATIONAL STANDARD

The management regularly evaluates the Company's Internal Control System and made necessary adjustment to the international standards applicable in the Company's business scope.

Secara garis besar, kebijakan Sistem Pengendalian Internal yang telah ditetapkan Perusahaan mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum, pengertian, tujuan dan ruang lingkup sistem pengendalian internal;
2. Penjelasan terkait komponen sistem pengendalian internal meliputi:
 - a. Lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi;
 - e. Pemantauan.
3. Penilaian mandiri (*control self assessment*) merupakan serangkaian proses pengujian dan penilaian efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh tujuan dari pelaksanaan kegiatan dapat dicapai/dilaksanakan dengan baik;
4. Pelaporan perlunya disusun dan disampaikan laporan tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal kepada Direksi.

EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2022 DAN PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

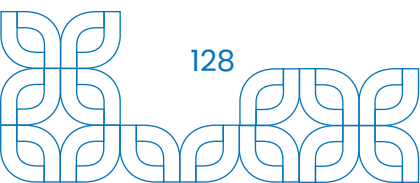
Implementasi pengendalian korporasi berfokus pada penguatan aspek fundamental untuk memastikan proses pembangunan JTCC berjalan sesuai dengan rencana. Dewan Komisaris dan Direksi turut aktif berperan dalam pengendalian internal, termasuk pada tahun 2022. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa sistem pengendalian internal tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan akan selalu memantau dan mengendalikan komponen finansial yang terkait investasi dan pendanaan agar tetap pada koridor yang telah direncanakan dan tidak menyimpang jauh sehingga akhirnya memberatkan Perusahaan. Perusahaan akan selalu melakukan perkembangan dan peningkatan sistem pengendalian sesuai dengan kemajuan perkembangan pembangunan JTCC di tahun-tahun berikutnya.

In general, the Internal Control System policies at the Company include the following aspects:

- 1. Explanation on the background, legal basis, definition, objectives, and scope of internal control system;*
- 2. Explanation on internal control system components, including:*
 - a. Control environment;*
 - b. Risk assessment;*
 - c. Control activities;*
 - d. Information and communication;*
 - e. Monitoring.*
- 3. Control self-assessment is a series of evaluation and assessment on the effectiveness of internal control system implementation so as to provide adequate assurance that all objectives of activities implementation can be achieved properly;*
- 4. Reporting is needed to be compiled and reported regarding the implementation of the Internal Control System to the Directors.*

EVALUATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN 2022 AND STATEMENT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Internal control has always been focused on the fundamental aspects to ensure that the JTCC construction is going according to plan. The Board of Commissioners and Board of Directors play an active role in internal control, and that includes 2022. The Board of Commissioners and Board of Directors have seen that the internal control system in 2022 has performed appropriately and will always monitor and control the financial components related to investment and funding to remain within the corridor of the investment plan and did not stray too far that might burden the Company. The Company will always improve and manage the internal control system along with the progress of JTCC development in the following years.



SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Risk Management System

Perusahaan menyusun Kebijakan Manajemen Risiko sebagai acuan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan Perusahaan untuk mendukung kelancaran kegiatan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan.

The Company prepares a Risk Management Policy as a basic reference to prepare all policies and decision making process to support the proper supervision and management of the Company.

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Manajemen Risiko meliputi pengaturan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan sistem manajemen risiko yang meliputi konteks strategis, konteks organisasi, konteks pengelolaan risiko, kriteria risiko, dan struktur pengelolaan risiko.
2. Seluruh risiko yang dihadapi, baik yang telah maupun yang belum dikendalikan, harus diidentifikasi dengan menggunakan metode dan sistematika yang terstruktur, antara lain melalui verifikasi Dokumen Manajemen Risiko (DMR) oleh unit kerja yang mengusulkan suatu kegiatan/proyek.
3. Analisis risiko yang bersifat minor dan mayor harus dilakukan sehingga risiko dapat dievaluasi secara memadai.
4. Dilakukan perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga Perusahaan dapat memprioritaskan risiko mana yang harus ditangani lebih dahulu.
5. Harus dipastikan bahwa Perusahaan memiliki pilihan-pilihan yang dapat diambil untuk menangani setiap risiko dan dipastikan bahwa pilihan yang diambil tersebut telah diterapkan.
6. Perusahaan harus memiliki proses pemantauan risiko untuk memastikan bahwa penanganan risiko masih tetap efektif dan relevan dengan perubahan situasi yang terjadi.
7. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa terdapat komunikasi dan konsultasi yang efektif diantara seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan risiko, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

SCOPE OF RISK MANAGEMENT POLICY

The Risk Management Policy covers the following aspects:

1. *The Board of Commissioners and Board of Directors established a risk management system that includes the strategic context, organizational context, risk management context, risk criteria, and risk management structure.*
2. *All risks, both those that have been and have not been controlled, must be identified by using structured methods and systematic, among others through verification of the Risk Management Document (DMR) by the working unit that proposes an activity/project.*
3. *Minor and major risk analyzes must be carried out so that the risks can be adequately evaluated.*
4. *The risk analysis results were compared with predetermined criteria so that the Company can prioritize which risks must be handled first.*
5. *It must be ensured that the Company has choices to handle every risk and ensure that the choices were implemented.*
6. *The company must have a risk monitoring process to ensure that risk management is still effective and relevant to the changing situation.*
7. *The Board of Commissioners and Board of Directors ensure that there is effective communication and consultation among all parties to manage risks, both internal and externally.*

Laporan Manajemen Risiko Tahun 2022
Risk Management Report in 2022

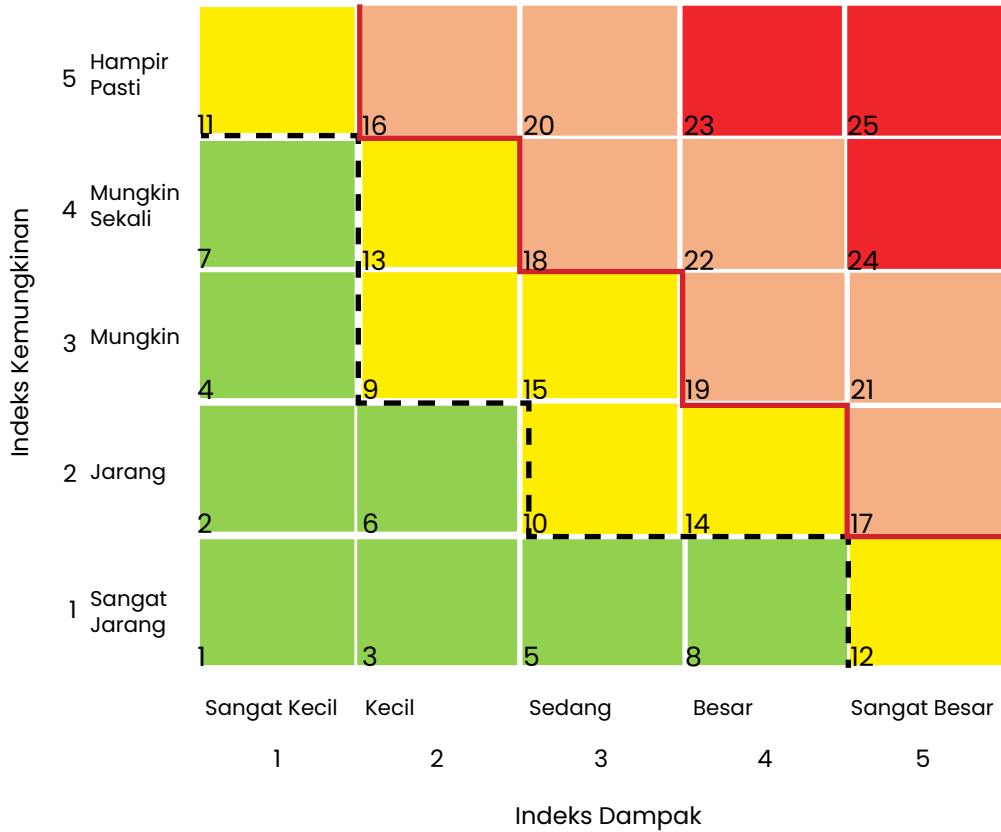
| No. | Nama Risiko Risk Names | Realisasi Mitigasi Mitigation Action |
|-----|---|--|
| 1. | Potensi permasalahan hukum dalam pembebasan lahan <i>Potential legal issues in land acquisition</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan monitoring setiap minggu dengan melakukan koordinasi antara API dan CTP terkait JTCC dan tiap bulan dengan HI terkait rest area Lahan telah sepenuhnya dimiliki pemerintah dan siap dikonstruksi Pelaporan dilaksanakan setiap minggu |
| 2. | Tidak diperolehnya perizinan dalam usaha <i>Failed to acquire the license for operation</i> | <ul style="list-style-type: none"> PHO telah dilaksanakan akhir Maret JTCC seksi 2 dan 3 telah beroperasi Izin lokasi TIP sedang diproses oleh ALI |
| 3. | Tidak tercapainya target pertumbuhan dan pengembangan bisnis logistik dan hinterland <i>Failure to reach the growth and development targets of the logistics business and hinterland</i> | <ul style="list-style-type: none"> Lahan telah sepenuhnya dimiliki pemerintah dan siap dikonstruksi Sudah dilaksanakan monitoring tiap minggu dengan CTP Seluruh lahan telah siap untuk dikonstruksi |
| 4. | Gagal bayar Kredit Investasi (KI) CTP dan ICL/SHL API <i>Failure to Pay the Investment Credit (CI) for CTP and ICL/SHL for API</i> | <ul style="list-style-type: none"> Monitoring progres penyelesaian JTCC tiap minggu (progress konstruksi 98,7%) API telah menyampaikan surat somasi pertama kepada CMK pada 17 Desember 2022 Pada 30 Maret 2022, Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan atas proses persetujuan divestasi dan API telah menerima surat persetujuan izin prinsip divestasi dari Pemegang Saham (16 April 2022); laporan progress disampaikan secara rutin kepada Pemegang Saham Telah diterima ICL dari Pelindo sebesar Rp400 miliar (19 Mei 2022) dan telah diterima SHL dari PSL sebesar Rp317 miliar (s.d. 30 Juni 2022) |
| 5. | Tidak optimalnya pelaksanaan Governance, Risk, Compliance (GRC) dalam Tata Kelola Perusahaan <i>Ineffective Governance, Risk, Compliance (GRC) within the Corporate Governance</i> | <ul style="list-style-type: none"> API telah melengkapi aturan-aturan Tata Kelola Perusahaan (Board Manual, Code of Conduct, Pedoman GCG) yang semuanya telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi API telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, Tim Manajemen Risiko, dan sedang dalam proses pembaharuan struktur organisasi API telah memenuhi tindak lanjut monitoring hasil telaah SPI |

| No. | Nama Risiko Risk Names | Realisasi Mitigasi Mitigation Action |
|-----|---|--|
| 6. | Penyebaran Covid-19 <i>Covid-19 virus</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan aturan protokol kesehatan bagi seluruh karyawan • Memenuhi sarana kesehatan (masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, susu cair) • Telah terbentuk Gugus Tim Anti-Covid |
| 7. | Kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam kegiatan operasional | <ul style="list-style-type: none"> • API telah mematuhi setiap aturan terkait lingkungan hidup pada setiap proyek • Kegiatan konstruksi dan operasi JTCC telah mendapatkan izin lingkungan (AMDAL, RKL & RPL) |
| 8. | Kecelakaan kerja <i>Occupational accident</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan sosialisasi K3, khususnya melalui bulan K3 (Februari) • Melaksanakan Safety Induction dan pemeriksaan kelengkapan APD rutin sebelum bekerja • Telah dilaksanakan swab test rutin sebagai upaya pencegahan Covid-19 dan pemeriksaan APAR di kantor dan lapangan secara berkala |
| 9. | Turunnya kinerja karyawan <i>Lower employee performance</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Telah diimplementasikan kebijakan HO terkait tidak adanya perekrutan karyawan baru di API • Sudah dilakukan diskusi antara API dan PSL terkait Job Sharing • Seluruh karyawan API telah melaksanakan pelatihan • Telah dilakukan koordinasi dengan SDM PSL untuk implementasi monitoring kinerja di PSL Group |
| 10. | Keterlambatan penyelesaian proyek JTCC <i>Late in finishing the JTCC project</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan monitoring percepatan progres konstruksi (98,7%) dan lahan (100%) secara mingguan dan terperinci; tim 24/7 standby untuk memonitor sisa pekerjaan konstruksi • Lahan seksi 4 telah selesai 100% |
| 11. | Rendahnya penyerapan investasi <i>Low realization of investment</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan monitoring dan koordinasi progres JTCC dengan CTP dan PSL setiap minggunya sehingga investasi dapat sesuai dengan timeline • API memfasilitasi CTP untuk melakukan koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, BPN Jakarta Utara dan Direksi Kontraktor terhadap konstruksi seksi 4 |

| No. | Nama Risiko Risk Names | Realisasi Mitigasi Mitigation Action |
|-----|---|---|
| 12. | Cost Overrun dalam kegiatan konstruksi dan akuisisi lahan <i>Cost Overrun in the construction and land acquisition</i> | <ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan monitoring konstruksi JTCC tiap minggunya agar CTP mengupayakan selesai sesuai jadwal Lahan telah bebas 100% |
| 13. | Terganggunya Cashflow Perusahaan <i>Company Cashflow disrupted</i> | <ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan total setoran modal kepada CTP sebesar Rp805 miliar sesuai RKAP 2022 dan kondisi keuangan API telah disesuaikan dengan kebutuhan Lahan telah bebas 100% dan monitoring konstruksi JTCC dilakukan setiap minggunya agar selesai sesuai jadwal |
| 14. | Potensi fraud & pungli pada pengembangan kawasan dan pelayanan logistik <i>Potential fraud & extortion in construction area and logistics services</i> | <ul style="list-style-type: none"> API telah mengikuti kick-off meeting pembangunan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016 sebagai bekal penerapan SMAP Telah dilaksanakan pelatihan SMAP ISO 37001:2016 pada 17-18 November 2022 Telah dilaksanakan pengawasan ketat dan melekat API telah membuat Pakta Integritas untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan semua karyawan Telah dilaksanakan Whistleblowing System |
| 15. | Gagal bekerjasama dengan mitra strategis <i>Failed to cooperate with strategic partners</i> | <ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan monitoring progres konstruksi (98,7%) dan lahan (100%) tiap minggunya agar selesai sesuai jadwal API telah menjaring dan menyeleksi calon mitra divestasi saham CTP Roadshow telah dilaksanakan untuk mencari mitra pembeli saham API pada CTP Final Kajian Divestasi telah selesai pada 24 Maret 2022 Telah dilakukan monitoring pembebasan lahan Rest Area & Logistic Center oleh Mitra secara intens dan berkala |

| No. | Nama Risiko Risk Names | Realisasi Mitigasi Mitigation Action |
|-----|--|---|
| 16. | Respon pasar tidak sesuai dengan kajian kelayakan <i>The market's response is lower than the study</i> | <ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan monitoring konstruksi JTCC tiap minggunya agar CTP mengupayakan selesai sesuai jadwal; lahan telah bebas 100% dan konstruksi telah mencapai 98,7% Telah dilakukan pengkinian business plan CTP terkait traffic Final laporan divestasi saham telah dikirimkan dan akan difinalisasi setelah audit CTP Telah dilakukan pengkinian traffic pasca akuisisi saham WTR oleh konsultan traffic CTP |
| 17. | Rendahnya validitas dan kredibilitas laporan keuangan <i>Low validity and credibility of financial statements</i> | <ul style="list-style-type: none"> Penerapan Mandiri Cash Management (MCM) untuk efisiensi dalam waktu dan pemeriksaan berjenjang pengendalian internal API telah mempelajari SAP keuangan yang nantinya akan terintegrasi dengan PSL dan Holding Sudah dilakukan optimalisasi jumlah dan beban kerja di tim keuangan |
| 18. | Perubahan regulasi yang mempengaruhi bisnis Perusahaan <i>Change in regulations affecting the Company's business</i> | <ul style="list-style-type: none"> Telah disusun skema terkini untuk bisnis Rest Area & Logistic Center Progres RJPP telah mencapai 70% Perkembangan makro ekonomi telah dipertimbangkan dalam kajian bisnis Sudah dilakukan koordinasi dengan BPKP, PUPR, ATR dan KKP untuk memitigasi apabila ada perubahan regulasi |
| 19. | Kurang bayar dan potensi denda pajak <i>Underpayment and fine in taxes</i> | <ul style="list-style-type: none"> Konsultan pajak telah membantu API dalam mengurus administrasi perpajakan sehingga potensi kurang bayar dan denda dapat dimitigasi Sudah dilakukan pencatatan dan pelaporan pajak pada Maret 2022 |
| 20. | Ketidakjelasan peruntukan lahan Rest Area & Logistic Center <i>Unclear land use for Rest Area & Logistic Center</i> | <ul style="list-style-type: none"> Izin lokasi sedang diproses Mitra telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait izin-izin yang diperlukan untuk membangun Rest Area & Logistic Center |

Peta Risiko Residual Akhir Tahun 2022
Residual Risk Map by the End of 2022



EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2022 DAN PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seperti yang terlihat pada tabel Laporan Manajemen Risiko Tahun 2022 sebelumnya, keseluruhan risiko telah berhasil dimitigasi. Perusahaan telah memitigasi 20 risiko teridentifikasi hingga mayoritas risiko dikategorikan dalam risiko rendah dan menengah. Terdapat dua risiko tergolong tinggi dalam Transformasi & Pengembangan Bisnis (gagal kerja sama dengan mitra strategis, potensi respon pasar tidak sesuai dengan kajian kelayakan). Walaupun demikian, kedua risiko dengan tingkat tinggi tersebut telah dimitigasi melalui perencanaan yang matang.

EVALUATION OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN 2022 AND STATEMENT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In the previous Risk Management Report for 2022, it can be concluded that all risks were successfully mitigated. The Company has mitigated 20 identified risks and the majority have been lowered to low and medium risk. There were two risks with high classifications in the Business Transformation & Development (failure to cooperate with strategic partners, low market response). Nevertheless, both of these high-level risks were successfully mitigated through careful planning.

Dewan Komisaris dan Direksi telah berperan secara aktif dalam memastikan praktik manajemen risiko di tahun 2022. Dewan Komisaris telah mengeluarkan sejumlah keputusan dan secara keseluruhan membantu memberikan arahan dan persetujuan terkait langkah-langkah strategis untuk mengelola usaha dan menangani risiko-risiko secara langsung. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa sistem manajemen risiko tahun 2022 telah berjalan dengan baik karena risiko-risiko yang teridentifikasi di awal tahun berhasil dimitigasi pada saat akhir tahun.

The Board of Commissioners and the Board of Directors have constantly monitored the risk management practice in 2022. The Board of Commissioners has issued several recommendations and approvals related to the strategic measures for business management and risk mitigation. The Board of Commissioners and the Board of Directors have considered that the risk management system in 2022 has run properly since the risk level was lower by the end of the year compared to when identified in the early year.

PERKARA PENTING

Material Cases

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perkara hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris maupun Direksi.

In 2022, there were no civil or criminal lawsuits faced by the Company, Subsidiaries, Board of Commissioners, and Board of Directors.

SANKSI ADMINISTRATIF

Administrative Sanction

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perkara hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris maupun Direksi.

In 2022, there were no civil or criminal lawsuits faced by the Company, Subsidiaries, Board of Commissioners, and Board of Directors.

KODE ETIK PERUSAHAAN

Code of Conduct

API memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Pemikiran tersebut menjadi dasar bagi Perusahaan untuk mewujudkan komitmen mengimplementasikan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) sebagai suatu standar perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh Insan API dalam kegiatan operasional sehari-hari.

ISI KODE ETIK

Secara garis besar, isi *Code of Conduct* API menjelaskan mengenai:

1. Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan
2. Etika Bisnis dan Etika Perlaku
3. Petunjuk Pelaksanaan

SOSIALISASI

Perusahaan melakukan sosialisasi *Code of Conduct* ke lingkungan internal Perusahaan agar seluruh Insan API dapat memperoleh pemahaman yang memadai tentang substansi *Code of Conduct* berikut kebijakan atau panduan tambahannya dan dapat mengamalkannya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Perusahaan telah mensosialisasikan pokok-pokok mengenai kebijakan dan ketentuan *Code of Conduct* ke lingkungan internal Perusahaan di tahun 2019 melalui media internal Perusahaan.

PEMBERLAKUKAN DAN PENEGAKAN CODE OF CONDUCT

Code of Conduct API berlaku bagi setiap individu yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, serta semua Entitas Anak dan Afiliasi di bawah pengendalian, Pemegang Saham serta seluruh Stakeholders yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

API ensured that the Company's management run well in accordance with applicable regulations and upholds ethical norms and values. This becomes the basis for the Company to realize its commitment to implement the Code of Conduct as a behavioural standard that must be used as guideline by all Personnel of API in their daily operations.

CONTENT OF CODE OF CONDUCT

In general, the contents of the Code of Conduct explains about:

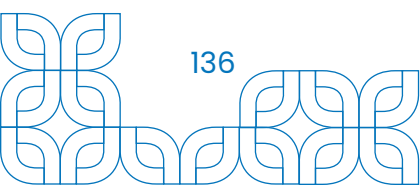
1. *Vision, Mission, and Corporate Values*
2. *Business Ethics and Ethical Conduct*
3. *Implementation Guidelines*

SOCIALIZATION OF CODE OF CONDUCT

The Company disseminates the Code of Conduct to its internal environment so that all personnel can understand the substance of Code of Conduct along with additional policies or guidelines and able to apply it in daily operational activities. The Company has socialized the main points regarding the policies and provisions of the Code of Conduct to the Company's internal environment in 2019 through internal media channel.

IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF CODE OF CONDUCT

API's Code of Conduct was valid to every personnel acting for and on behalf of the Company, as well as all Subsidiaries and Affiliates under control, Shareholders and all Stakeholders who conduct business transactions with the Company.



SANKSI ATAS PELANGGARAN

API telah menetapkan konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima oleh karyawan jika melakukan pelanggaran atas *Code of Conduct* yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan akan ditindak lanjuti secara tegas dan konsisten;
2. Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atas *Code of Conduct* akan menerima sanksi berupa tindakan-tindakan disipliner sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya;
3. Mitra Kerja Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan keputusan Perusahaan;
4. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran pidana dan perdata, maka permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

PELANGGARAN KODE ETIK 2022

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak mendapati adanya pelanggaran *Code of Conduct* oleh karyawan Perusahaan dalam kegiatan operasional serta pihak lainnya yang berhubungan dengan Perusahaan seperti Entitas Anak dan Afiliasi di bawah pengendalian, Pemegang Saham serta seluruh *Stakeholders* yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

SANCTION ON VIOLATION

API has determined the consequences for the employees if they act against the Code of Conduct of the Company, among others:

1. *Violation against the Company's Code of Conduct will be imposed firm and consistent actions;*
2. *The Company's Personnel that are proven to have violated the Code of Conduct will be sanctioned with disciplinary actions according to the severity of the committed violation;*
3. *The Company's Work Partners that are proven to committed violations will be imposed sanctions according to regulations and the Company's decision;*
4. *If the occurrence involves criminal and civil violations, the issue can be handed over to the authorities.*

VIOLATION OF CODE OF CONDUCT IN 2022

Throughout 2022 the Company did not find any violations of the Code of Conduct by our employees during the operational activities as well as other parties related to the Company such as Subsidiaries and Affiliates under control, Shareholders and all Stakeholders who conduct business transactions with the Company.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System

Perusahaan menyediakan media atau wadah penyampaian atau pelaporan (*whistleblowing*) bilamana terjadi pelanggaran dalam lingkungan Perusahaan terkait aspek bisnis dan operasi. Media ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, termasuk karyawan sendiri, dalam kaitan pelanggaran etika bisnis dan etika kerja Perusahaan.

The Company provides a channel to deliver report on any violations that occurred within the Company (whistleblowing) regarding business and operations aspects. This channel can be used by stakeholders, including employees, in connection with violations of business ethics and work ethics of the Company.

TUJUAN PEMBUATAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penyusunan *Whistleblowing System* memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pengelolaan pengaduan atas pelanggaran di Perusahaan;
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*);
3. Meminimalisir potensi terjadinya kecurangan (*fraud*);
4. Tersedianya penanganan masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.

OBJECTIVE OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing Policy was created with the following objectives:

1. *As guidelines for violation report management at the Company;*
2. *As an early warning system;*
3. *Minimize potential frauds;*
4. *Provide internal violation handling before the issue spreads to the public.*

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan Kebijakan Pengelolaan WBS. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan WBS dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Direksi bertanggung jawab untuk menunjuk dan menetapkan pejabat dan tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan WBS. Seluruh Pejabat terkait di Perusahaan wajib mematuhi WBS.

MANAGEMENT OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

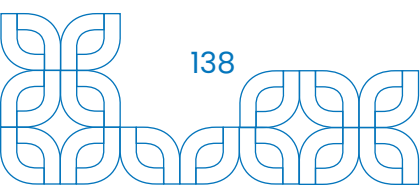
The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for upholding WBS Management Policy. The Board of Commissioners and Board of Directors ensured that the implementation of WBS was done effectively, efficiently and sustainably. The Board of Directors also responsible for appointing and assigning officials and teams responsible for implementing WBS. All relevant officials in the Company are required to comply with WBS.

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk mendorong setiap Insan Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya. API berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang beritikad baik dan

OBJECTIVE OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

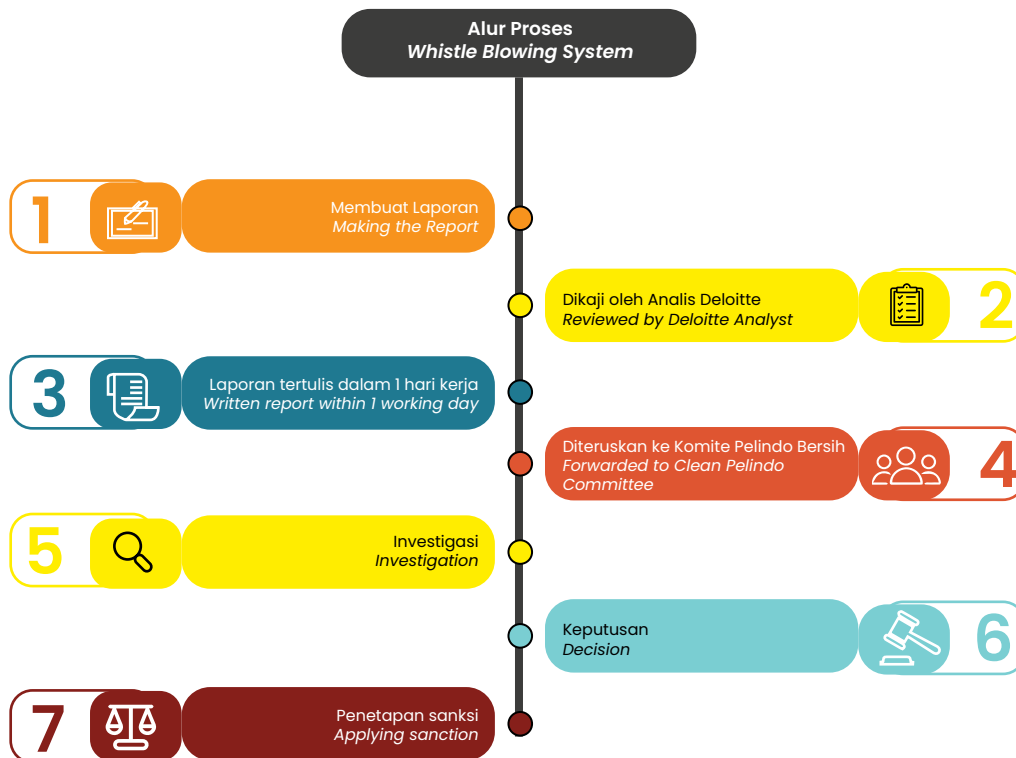
The whistleblower protection policy aims to encourage all Personnel of the Company and other Whistleblowers to report violations and ensure the safety of the Whistleblower and their family. API is committed to protect Whistleblowers who act in good faith and the Company complies



Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran.

with the relevant laws and regulations and applicable best practices in the implementation of whistleblowing system.

Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran Mechanism of Whistleblowing System



JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES TAHUN 2022

Selama tahun 2022, tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui saluran WBS Perusahaan.

NUMBER OF INCOMING AND PROCESSED REPORTS IN 2022

During 2022 no complaints were received through the Company's WBS channel.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Report of State Official Assets (LHKPN)

Sebagai entitas anak dari BUMN, Perusahaan berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengikat, salah satunya mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilandasi semangat pemberantasan korupsi. LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pada tahun 2022, wajib lapor LHKPN Perseroan terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Sebesar 100% dari para wajib lapor telah mengisi dan melaporkan LHKPN melalui e-LHKPN.

As a subsidiary of an SOE, the Company is obliged to comply with laws and regulations that apply to SOE including the State Officials' Wealth Report (LHKPN) to eradicate corruption. LHKPN is a list of all assets of state administrators as set out in the LHKPN form from the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in the KPK Decree No. KEP 07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination, and Announcement of State Administrators' Assets Reports.

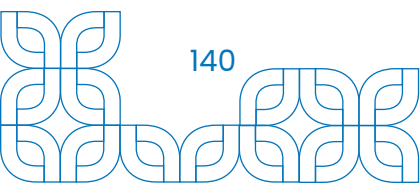
In 2022, those who are obligated to fill in the LHKPN report are the Board of Commissioners and the Board of Directors. As much as 100% of those who are obligated have reported the LHKPN through the e-LHKPN.

PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI GRATIFIKASI

Implementation of Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies

Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Code*) yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2020 oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman tersebut mengatur salah satunya mengenai "Kebijakan Pengendalian Gratifikasi". Dalam kebijakan tersebut dinyatakan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi terkait Pengendalian Gratifikasi. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan karyawan menyampaikan laporan gratifikasi untuk setiap penerimaan yang berhubungan dengan gratifikasi yang dianggap suap kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Perusahaan untuk selanjutnya UPG melaporkan kepada KPK. Tata cara pelaporan mengacu

The Company has a Good Corporate Governance Code which was ratified on December 31, 2020 by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The guideline regulates many policies including the "Gratification Control". The policy has also stated the commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors to Gratification Control. All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, along with employees submitted the report for each present they received, if falls into the category of gratuity, to the Company's Gratification Control Unit (UPG) before then submitted to the KPK. The reporting procedure refers to the gratification control policy. The Board of Commissioners



pada kebijakan pengendalian gratifikasi. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan Pengendalian Gratifikasi dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pedoman bagi jajaran Perusahaan dalam memahami, mencegah dan menanggulangi gratifikasi di Perusahaan;
2. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Menumbuhkan kesadaran dan integritas seluruh Jajaran Perusahaan tentang pentingnya pengendalian dan pengambilan sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di Perusahaan dalam menciptakan tata kelola Perusahaan yang baik.

Perusahaan memantau pelaksanaan Gratifikasi melalui Fungsi Pengelola Gratifikasi yang berada di bawah Unit Sekretariat Perusahaan. Fungsi Pengelola Gratifikasi memiliki beberapa tugas, yaitu:

1. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait penerapan ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan;
2. Membuka rekening untuk menyimpan uang yang diterima dari gratifikasi yang menjadi kewenangan Perusahaan dalam memutuskan peruntukannya;
3. Menerima dan menyimpan barang dan/ atau uang yang diserahkan oleh Pelapor yang diterima dari gratifikasi sampai adanya keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai status kepemilikannya;
4. Mensosialisasikan ketentuan pengendalian gratifikasi kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Perusahaan dan *stakeholders*;
5. Melakukan evaluasi atas efektivitas ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan;
6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Direksi setiap 6 (enam) bulan sekali.

and the Board of Directors are responsible for establishing the Company's Gratification Control Policy. The Board of Commissioners and the Board of Directors ensure that Gratification Control is carried out effectively, efficiently, and continuously.

Preparation of Gratification Control Policy has the following objectives:

1. *Guidelines for the Company's personnel to understand, prevent, and mitigate gratification at the Company;*
2. *Realize Company management that is free from all forms of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN);*
3. *Instill awareness and integrity in all Personnel of the Company regarding the importance of control and firm actions against gratification at the Company in order to create Good Corporate Governance.*

The Company monitors the implementation of Gratification through the Gratification Management Function which is under the Corporate Secretariat Unit. The Gratification Manager function has several tasks, namely:

1. *Prepare work instruments and facilities related to the implementation of gratification control within the Company.*
2. *Open an account to save the money received from gratification that is under the Company's authority to decide its allocation.*
3. *Accept and store goods and/or money handed over by the Reporter from gratification until a decision by the Corruption Eradication Commission (KPK) is made on its ownership status.*
4. *Disseminate provision on gratification control to all Officials and Employees of the Company and stakeholders.*
5. *Conduct evaluation on effectiveness of gratification control provision at the Company.*
6. *Report the development of gratification control implementation to the Board of Directors every 6 months.*

Pada tahun 2022, API telah melaksanakan pelatihan atau *workshop* mengenai ISO 37001 untuk sistem manajemen anti penyuapan pada tanggal 17-18 November 2022. Seluruh karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan juga komitmen seluruh karyawan untuk menolak segala bentuk gratifikasi.

Selama tahun 2022, Perusahaan tidak menerima laporan gratifikasi dari karyawan dan/atau Insan API lainnya.

In 2022, API has conducted training or a workshop on ISO 37001, an anti-bribery management system, from November 17 to November 18, 2022. All employees including the Board of Commissioners and the Board of Directors attended this training. From this training, all employees are expected to have more knowledge and be more committed refusing all forms of gratification.

During 2022, the Company did not receive any gratification reports from employees and/or other personnel of API.

PROSES PEMILIHAN DAN EVALUASI PENYEDIA BARANG DAN JASA

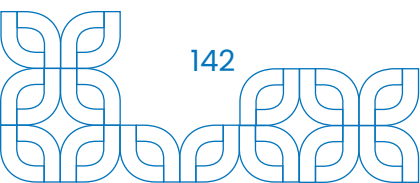
Selection and Evaluation Process of Goods and Service Supplier

Perusahaan memiliki ketentuan dalam hal penyediaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki metodologi dan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk memilih dan mengevaluasi penyedia barang dan jasa sehingga dapat diperoleh barang dan jasa dengan volume (*quantity*) dan kualitas yang diperlukan, harga yang pantas dan total biaya terendah. Kriteria yang dimaksud harus menjamin bahwa proses pengadaan dilakukan dengan adil dan transparan.
2. Memastikan bahwa penyedia barang dan jasa yang dipilih oleh Perusahaan mampu dan sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasinya yang dibutuhkan Perusahaan.
3. Memastikan bahwa kontrak/surat pesanan yang dikeluarkan oleh Perusahaan harus disetujui dan disahkan oleh pihak yang berwenang menurut level otoritas yang sudah ditetapkan.

The Company owns a regulation regarding the procurement of goods and services as the following:

1. *Ensure that the Company has methods and criteria that can be used to select and evaluate goods and service suppliers in order to obtain goods and service in the necessary volume and quality, with appropriate price and lowest total cost. The criteria should ensure that the process is implemented fairly and transparently.*
2. *Ensure that the goods and service supplier selected by the Company is able and up to the qualification and classification required by the Company.*
3. *Ensure that the contract/order issued by the Company is approved and validated by the authorized parties according to the determined level of authority.*



4. Setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus memastikan bahwa permintaan barang dan jasa telah direncanakan dengan waktu yang cukup sehingga menghindari hilangnya posisi tawar Perusahaan terhadap penyedia barang dan jasa.

4. All parties involved in the procurement process should ensure that the goods and service request has been planned with adequate time to prevent the loss of the Company's bargaining position towards the goods and service suppliers.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company's Information and Data

Perusahaan memastikan bahwa stakeholders dan masyarakat umum lainnya dapat dengan mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan Perusahaan. Berbagai akses informasi yang telah disediakan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company ensures that stakeholders and the general public can easily access information relating to the Company. Various information channels that the Company provided have are as follows:

| Akses Informasi Information Access | Keterangan Description |
|---------------------------------------|---|
| Situs Website | <p>Website www.aksespelabuhan.co.id yang tersedia dalam Bahasa Indonesia memuat informasi mengenai: The website at www.aksespelabuhan.co.id is available in Indonesian contains information about:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Perusahaan <i>Company Profile</i> 2. Visi dan Misi <i>Vision and Mission</i> 3. Model Bisnis <i>Business Model</i> 4. Informasi Keuangan <i>Financial Information</i> 5. Berita Terbaru <i>Latest News</i> 6. Keterbukaan Informasi <i>Information Transparency</i> |
| Media Sosial Social Media | <p>Twitter : @aksespelabuhan Instagram : @aksespelabuhan</p> |

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

Transparency of Bad Governance Practices

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Di sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak mendapati adanya laporan atas pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha Perusahaan.

REPORT ON COMPANY ACTIVITIES POLLUTING THE ENVIRONMENT

Throughout 2022, the Company did not receive any reports of environmental pollution due to the Company's business activities.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Perusahaan telah menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Pada tahun 2022, total pajak yang dibayarkan Perusahaan adalah sebesar Rp9,75 miliar.

COMPLIANCE ON TAX OBLIGATION

The Company has done what is obligated in terms of tax payment. In 2022, the Company paid Rp9.75 billion in tax to the state.

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2022 telah disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

NONCONFORMITY OF ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS PRESENTATION WITH THE APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

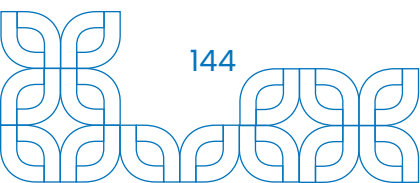
The Annual Report and Financial Statements for the fiscal year 2022 had been presented according to the applicable regulations and Financial Accounting Standard (SAK) in Indonesia.

KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN KARYAWAN

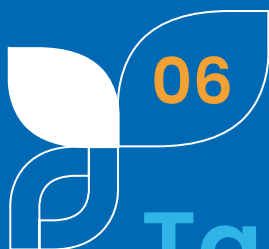
Di sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak mendapati adanya laporan kasus terkait dengan buruh dan karyawan.

CASES RELATED TO LABORS AND EMPLOYEES

Throughout 2022, the Company did not receive any report related to laborers and employees.



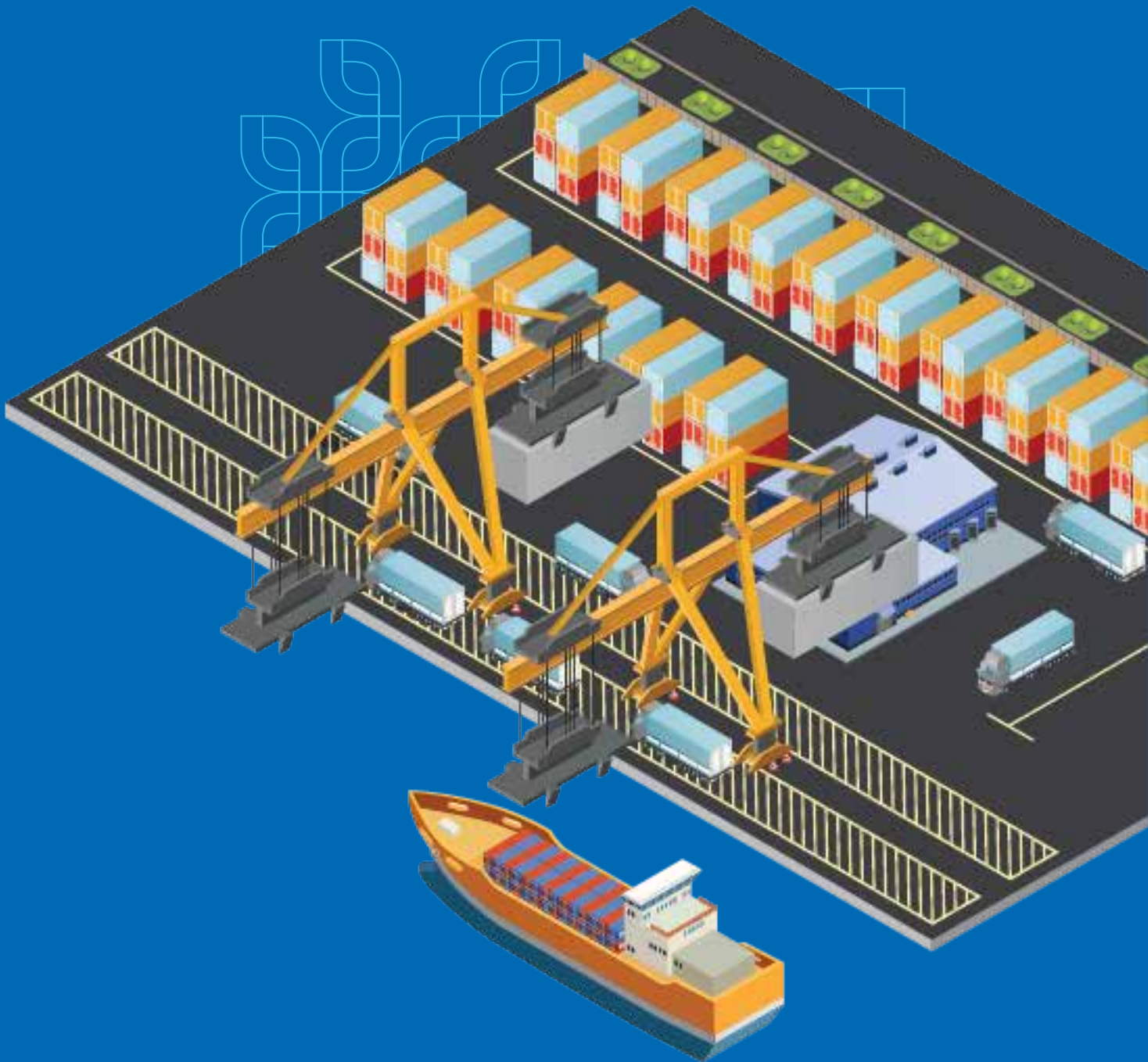
Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

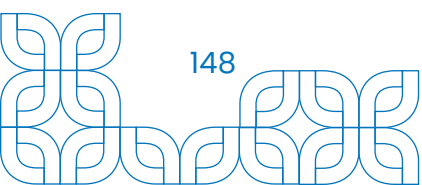


Penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan merujuk kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan, dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

The Company followed SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 regulation on the Form and Content of Annual Report for Issuers or Public Companies.

Information on the Company's social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report, which was published separately from the Annual Report, according to POJK No. 51/POJK.03/2017 regulation on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Institution, Issuers, and Public Companies.



Laporan Keberlanjutan akan disampaikan bersamaan dengan Laporan Tahunan, yang paling sedikit memuat:

- a. penjelasan strategi keberlanjutan;
- b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);
- c. profil Perusahaan;
- d. penjelasan Direksi;
- e. tata kelola keberlanjutan;
- f. kinerja keberlanjutan;
- g. lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada;
- h. tanggapan terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

Mengingat tahun buku 2022 merupakan tahun pertama penyusunan dan pembuatan Laporan Keberlanjutan Perusahaan, maka tidak terdapat tanggapan Perusahaan terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

The Sustainability Report is published along with the Annual Report, which covered at least the following information:

- a. explanation of sustainable strategy;*
- b. highlights of sustainable aspects (economy, social, and environment);*
- c. Company profile;*
- d. explanation from the Board of Directors;*
- e. sustainable governance;*
- f. sustainable performance;*
- g. written verification from an independent party, if any;*
- h. feedback on the previous report.*

As the Company has just made its first Sustainability Report for the fiscal year 2022, thus there is no feedback from the previous year's report.

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan 2022 PT Akses Pelabuhan Indonesia telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

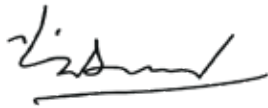
We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2022 Annual Report of PT Akses Pelabuhan Indonesia has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners



Hotman Napitupulu
Komisaris
Commissioner



Banu Astrini
Komisaris Utama
President Commissioner



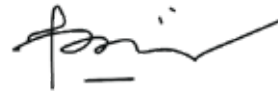
David Ratadhi Wironegoro
Komisaris
Commissioner

Direksi

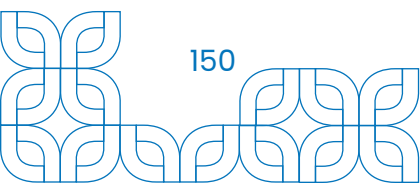
Board of Directors



Iwan Ridwan
Direktur Utama
President Director



Juli Tarigan
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Director of Finance and Human Resources





Laporan Keuangan

Financial Report



PT Akses Pelabuhan Indonesia

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements as of December 31, 2022
and for the year then ended
with independent auditors' report*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

| | Halaman/ Page | |
|--|------------------|--|
| Surat Pernyataan Direksi | | <i>Directors' Statements</i> |
| Laporan Auditor Independen..... | i-v | <i>Independent Auditors' Report</i> |
| Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian..... | 1-2 | <i>Consolidated Statement of Financial Position</i> |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain Konsolidasian | 3 | <i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> |
| Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian..... | 4 | <i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i> |
| Laporan Arus Kas Konsolidasian | 5 | <i>Consolidated Statement of Cash Flows</i> |
| Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian | 6-79 | <i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i> |
| Informasi Tambahan: Informasi Keuangan Entitas Induk | 80-85 | <i>Additional Information: Parent Entity Financial Informaton</i> |

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTORS' STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas
lain/Residential address/in accordance with personal
identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title
2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas
lain/Residential address/in accordance with personal
identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned below:

- : Iwan Ridwan
: Pelindo Tower, Lantai 12, Jl. Yos Sudarso No 9
: Kec. Koja, Jakarta Utara 14230
: Jl. Gili Sampeng II/54, RT007 RW003
: Kebon Jeruk, Jakarta Barat
: (021) 6456310
: Direktur Utama/President Director
- : Juli Tarigan
: Pelindo Tower, Lantai 12, Jl. Yos Sudarso No 9
: Kec. Koja, Jakarta Utara 14230
: Jl. Amanah I No.137
: Pondok Rangan, Cipayang
: Jakarta Timur 13860
: (021) 6456310
: Direktur Keuangan dan SDM/Finance and Human
: Resources Director

declare that:

1. Directors are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiary as of December 31, 2022 and for the year then ended.
2. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiary, and,
b. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiary do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. Directors are responsible for the Company and its subsidiary internal control system.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 27 April 2023 / April 27, 2023

Iwan Ridwan
Direktur Utama/President Director



Juli Tarigan
Direktur Keuangan dan SDM/Finance and Human Resources Director



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01023/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Akses Pelabuhan Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Akses Pelabuhan Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 01023/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023

*The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Akses Pelabuhan Indonesia*

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Akses Pelabuhan Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2022, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01023/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01023/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01023/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01023/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01023/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01023/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01023/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01023/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

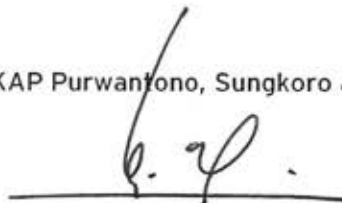
Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP Purwanono, Sungkoro & Surja



Moch. Dadang Syachruna

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/Public Accountant Registration No. AP.0697

27 April 2023/April 27, 2023



**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | Catatan/ Notes | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 | |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|
| ASET | | | | ASSETS |
| ASET LANCAR | | | | CURRENT ASSETS |
| Kas dan setara kas | 158.553.529.681 | 5,32 | 342.699.144.494 | <i>Cash and cash equivalents</i> |
| Piutang usaha | | 7,32 | | <i>Trade receivables</i> |
| Pihak ketiga | 220.704.011 | | 53.046.860 | <i>Third parties</i> |
| Pihak berelasi | 161.365.683 | | 101.473.011 | <i>Related parties</i> |
| Piutang lain-lain | | 8,32 | | <i>Other Receivables</i> |
| Pihak ketiga | 1.090.517.078 | | - | <i>Third parties</i> |
| Pihak berelasi | 142.944.608.352 | | 151.822.082.808 | <i>Related parties</i> |
| Pendapatan yang masih akan diterima | 29.342.466 | | 384.700.998 | <i>Accrued revenues</i> |
| Uang muka dan beban dibayar di muka | 6.360.418.835 | 9 | 10.900.399.757 | <i>Advance and prepaid expenses</i> |
| Pajak dibayar di muka | 3.016.076.112 | 18a | 6.681.019.308 | <i>Prepaid tax</i> |
| Bank yang dibatasi penggunaannya | - | 6,20 | 693.532.340 | <i>Restricted cash in banks</i> |
| Total Aset Lancar | 312.376.562.218 | | 513.335.399.576 | Total Current Assets |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | NON-CURRENT ASSETS |
| Aset tetap - neto | 4.513.099.571 | 10 | 1.438.745.440 | <i>Fixed assets - net</i> |
| Hak perusahaan jalan tol | 12.070.806.222.348 | 11 | 10.477.626.278.241 | <i>Toll road concession rights</i> |
| Aset hak-guna - neto | 5.213.327.943 | 12 | 2.148.531.270 | <i>Right-of-use assets - net</i> |
| Aset pajak tangguhan | 70.698.917.434 | 18e | - | <i>Deferred tax assets</i> |
| <i>Goodwill</i> | 31.407.482.856 | 13 | 31.407.482.856 | <i>Goodwill</i> |
| Taksiran tagihan restitusi pajak | 6.056.992.639 | 18a | - | <i>Estimated claims for tax refund</i> |
| Aset tidak lancar lainnya | 100.000.000 | 14 | 187.557.155 | <i>Other non-current assets</i> |
| Total Aset Tidak Lancar | 12.188.796.042.791 | | 10.512.808.594.962 | Total Non-Current Assets |
| TOTAL ASET | 12.501.172.605.009 | | 11.026.143.994.538 | TOTAL ASSETS |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | Catatan/ Notes | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 | |
|---|--|-------------------|--|--|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | LIABILITIES AND EQUITY |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | CURRENT LIABILITIES |
| Pinjaman bank jangka pendek | 103.106.529.338 | 15 | 133.296.919.362 | <i>Short-term bank loan</i> |
| Utang usaha | | 16,32 | | <i>Trade payables</i> |
| Pihak ketiga | 26.253.333.315 | | 11.920.016.514 | <i>Third parties</i> |
| Pihak berelasi | 936.628.252.025 | | 1.093.658.210.789 | <i>Related parties</i> |
| Utang lain-lain | | 17,32 | | <i>Other payables</i> |
| Pihak ketiga | 1.965.500.828 | | 42.902.418 | <i>Third parties</i> |
| Pihak berelasi | 652.010.193.572 | | 21.000.089 | <i>Related parties</i> |
| Utang pajak | 6.855.391.284 | 18b | 1.802.560.532 | <i>Taxes payable</i> |
| Beban akrual | 247.527.847.151 | 19 | 85.118.769.593 | <i>Accrued expenses</i> |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | | <i>Current maturities of long-term liabilities:</i> |
| Liabilitas sewa | 2.776.600.634 | 12 | 903.986.644 | <i>Lease liabilities</i> |
| Utang bank | 46.338.642.033 | 20 | 23.169.321.017 | <i>Bank loans</i> |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | <u>2.023.462.290.180</u> | | <u>1.349.933.686.958</u> | <i>Total Current Liabilities</i> |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | NON-CURRENT LIABILITIES |
| Utang pihak berelasi | 2.738.990.349.157 | 32 | 2.680.381.070.000 | <i>Due related parties</i> |
| Utang lain-lain - pihak berelasi | 464.538.398.153 | 17,32 | 466.538.398.153 | <i>Other payables - related parties</i> |
| Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | | <i>Long-term liabilities - net of current maturities:</i> |
| Liabilitas sewa | 3.107.353.410 | 12 | 1.364.347.778 | <i>Lease liabilities</i> |
| Utang bank | 5.358.067.711.332 | 20,32 | 4.587.525.561.148 | <i>Bank loans</i> |
| Utang lembaga keuangan non-bank | 1.744.763.265.878 | 21,32 | 1.426.042.654.623 | <i>Loans from non-bank financial institutions</i> |
| Liabilitas imbalan kerja | 899.065.282 | 22 | 816.660.956 | <i>Employee benefits liabilities</i> |
| Provisi jangka panjang | 2.387.364.824 | 23 | - | <i>Long-term provision</i> |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | <u>10.312.753.508.036</u> | | <u>9.162.668.692.658</u> | <i>Total Non-Current Liabilities</i> |
| TOTAL LIABILITAS | <u>12.336.215.798.216</u> | | <u>10.512.602.379.616</u> | TOTAL LIABILITIES |
| EKUITAS | | | | EQUITY |
| Modal saham - nilai nominal Rp10.000 per saham | | | | <i>Capital stock - Rp10,000 par value per share</i> |
| Modal dasar - 320.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 | | | | <i>Authorized - 320,000,000 shares as of December 31, 2022 and 2021, respectively</i> |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 184.576.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 | 1.845.760.000.000 | 24 | 1.845.760.000.000 | <i>Issued and fully paid - 184,576,000 shares as of December 31, 2022 and and 2021, respectively</i> |
| Tambahan modal disetor | (1.203.895.262.412) | 25 | (1.203.895.262.412) | <i>Additional paid-in capital</i> |
| Defisit | (476.907.930.795) | | (128.323.122.666) | <i>Deficits</i> |
| EKUITAS - NETO | <u>164.956.806.793</u> | | <u>513.541.614.922</u> | EQUITY - NET |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO | <u>12.501.172.605.009</u> | | <u>11.026.143.994.538</u> | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY - NET |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY**
**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31, | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------|--|
| | 2022 | Catatan/ Notes | 2021 | |
| PENDAPATAN | | | | REVENUES |
| Pendapatan jalan tol | 55.181.218.500 | 27 | 13.391.532.437 | Toll road revenues |
| Pendapatan konstruksi | 1.596.541.313.595 | 26 | 1.931.003.072.633 | Construction revenue |
| Total | 1.651.722.532.095 | | 1.944.394.605.070 | Total |
| BEBAN LANGSUNG | | | | DIRECT COSTS |
| Beban langsung operasi jalan tol | (24.772.895.809) | 28 | (11.340.622.640) | Toll road operation direct expenses |
| Beban konstruksi | (1.596.541.313.595) | 26 | (1.931.003.072.633) | Construction costs |
| Total | (1.621.314.209.404) | | (1.942.343.695.273) | Total |
| LABA BRUTO | 30.408.322.691 | | 2.050.909.797 | GROSS PROFIT |
| Beban umum dan administrasi | (44.898.763.882) | 30 | (34.129.357.713) | General and administrative expense |
| Pendapatan (beban) operasi lainnya | 7.960.669.652 | 29 | (457.209.992) | Other operating income (expenses) |
| RUGI USAHA | (6.529.771.539) | | (32.535.657.908) | LOSS FROM OPERATIONS |
| Pendapatan keuangan | 6.440.984.774 | 31 | 2.569.775.440 | Finance income |
| Beban keuangan | (419.505.709.157) | 31 | (48.329.244.739) | Finance costs |
| RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN | (419.594.495.922) | | (78.295.127.207) | LOSS BEFORE CORPORATE INCOME TAX |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN | | 18c | | CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) |
| Kini | - | | - | Current |
| Tangguhan | 70.747.437.126 | | (214.191.369) | Deferred |
| RUGI TAHUN BERJALAN | (348.847.058.796) | | (78.509.318.576) | LOSS FOR THE YEAR |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | | OTHER COMPREHENSIVE INCOME |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | | | Item that will not be reclassified to profit or loss |
| Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak | 172.020.323 | 22 | 276.967.625 | Remeasurement of defined benefit plans - net off tax |
| TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | (348.675.038.473) | | (78.232.350.951) | TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

| Catatan/ Notes | Modal saham/ Share capital | Tambahan modal disetor/Additional paid-in capital | Ekuitas merging entity/ Equity merging entity | Defisit/ Deficits | Total Ekuitas/ Total Equity | Balance as of December 31, 2020 |
|---|-------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------------|---|
| Saldo 31 Desember 2020 | 805.760.000.000 | | 677.054.966.632 | (50.090.771.715) | 1.432.724.194.917 | |
| Setoran modal | 1.040.000.000.000 | - | - | - | 1.040.000.000.000 | Capital Injection |
| Laba proforma merging entity | - | - | 3.248.909.712 | - | 3.248.909.712 | Proforma income from merging entity |
| Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali | - | (1.203.895.262.412) | - | - | (1.203.895.262.412) | Difference arising from business combination of entities under common control |
| Rugi neto tahun berjalan | - | - | - | (78.509.318.576) | (78.509.318.576) | Net loss for the year |
| Penghasilan komprehensif lain | - | - | - | 276.967.625 | 276.967.625 | Other comprehensive income |
| Pembalikan proforma ekuitas merging entity | - | - | (680.303.876.344) | - | (680.303.876.344) | Reversal of proforma equity merging entity |
| Saldo 31 Desember 2021 | 1.845.760.000.000 | (1.203.895.262.412) | - | (128.323.122.666) | 513.541.614.922 | Balance as of december 31, 2021 |
| Rugi neto tahun berjalan | - | - | - | (348.756.828.452) | (348.756.828.452) | Net loss for the year |
| Penghasilan komprehensif lain | - | - | - | 172.020.323 | 172.020.323 | Other comprehensive income |
| Saldo 31 Desember 2022 | 1.845.760.000.000 | (1.203.895.262.412) | - | (476.907.930.795) | 164.956.806.793 | Balance as of december 31, 2022 |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Years Ended December 31,

| | 2022 | Catatan/ Notes | 2021 | |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 56.197.719.996 | | 13.237.012.566 | Cash receipts from customers |
| Pembayaran kepada pemasok | (88.660.981.256) | | (371.671.644.465) | Payment to suppliers |
| Pembayaran kepada karyawan | (17.074.726.980) | | (16.072.702.074) | Payment to employees |
| Penerimaan pendapatan bunga | 6.772.289.908 | | 2.605.548.862 | Receipt from interest income |
| Pembayaran beban keuangan | (38.852.314.163) | | (48.493.203.689) | Payment for financial expenses |
| Pembayaran pajak penghasilan | (5.284.521.665) | | (7.801.532.986) | Payment for income taxes |
| Penerimaan untuk kegiatan operasi lainnya | 4.885.989.608 | | 298.909.659.061 | Receipts for other operating activities |
| Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi | (82.016.544.552) | | (129.286.862.725) | Net cash used in operating activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES |
| Penempatan deposito berjangka - neto | (70.000.000.000) | | - | Net placements of time deposits |
| Penambahan aset tetap | (856.067.866) | | (387.935.161) | Addition of fixed assets |
| Penambahan hak pengusahaan jalan tol | (1.343.171.747.345) | | (2.590.961.657.504) | Addition of toll road concession rights |
| Pembayaran atas pengalihan saham | - | 1c | (2.445.141.067.125) | Payment of the shares transfer |
| Penambahan investasi pada entitas asosiasi | - | 14 | (100.000.000) | Addition of investment in associate |
| Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi | (1.414.027.815.211) | | (5.036.590.659.790) | Net cash used in investing activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | | CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES |
| Penerimaan pinjaman dari PSL | 650.000.000.000 | | - | Proceed of loans from PSL |
| Penerimaan pinjaman dari Pelindo | 58.609.279.157 | | 2.680.381.070.000 | Proceed of loans from Pelindo |
| Penerimaan setoran modal | 91.000.000 | | 1.040.000.000.000 | Proceed from paid-up capital |
| Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank | 425.935.557.357 | | 1.280.604.251.229 | Receipt (payment) of bank loans |
| Penerimaan pinjaman non-bank | 178.976.254.761 | | 423.714.586.317 | Proceed from non-bank loans |
| Pencairan bank garansi neto | 693.532.340 | | - | Placement of bank guarantee |
| Pembayaran liabilitas sewa | (2.406.878.665) | 12 | (1.402.516.968) | Payment of lease liabilities |
| Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan | 1.311.898.744.950 | | 5.423.297.390.578 | Net cash provided by financing activities |
| (PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS | (184.145.614.813) | | 257.419.868.063 | (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN | 342.699.144.494 | 5 | 85.279.276.431 | CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 158.553.529.681 | 5 | 342.699.144.494 | CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Akses Pelabuhan Indonesia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 1 tanggal 5 November 2020 dari Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan peningkatan modal Perusahaan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0406722 tanggal 12 November 2020 (Catatan 21).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang konstruksi, pengangkutan dan pergudangan dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Saat ini, kegiatan Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") terutama bergerak dalam bidang penyelenggaraan proyek jalan tol.

Kantor Perusahaan berlokasi di Maritime Tower Lantai 12 Jalan Yos Sudarso No. 9, Jakarta Utara 14230.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Pelindo Solusi Logistik ("PSL") dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah Republik Indonesia.

b. Manajemen kunci dan karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, susunan manajemen kunci Grup, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

Banu Astrini
Hotman Napitupulu
David Ratadhi Wironegoro

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Akses Pelabuhan Indonesia (the "Company") was established based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta. The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014. The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest of which was based on Deed No. 1 dated November 5, 2020 from Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, regarding changes in the aims and objectives as well as business activities and an increase in the Company's capital, which has been acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Receipt No. AHU-AH.01.03-0406722 dated November 12, 2020 (Note 21).

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of business of the Company is in the fields of construction, transportation and warehousing and professional, scientific and technical activities.

Currently, the Company and its subsidiary (collectively referred to hereafter as "the Group") primarily engaged in a toll road project.

The Company's office is located at Maritime Tower 12th floor Jalan Yos Sudarso No.9, Jakarta Utara 14230.

The Company's parent is PT Pelindo Solusi Logistik ("PSL") and its ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

b. Key management and employees

As of December 31, 2022 and 2021, the composition of the Group's key management, which consists of Board of Commissioners and Board of Directors, are as follows:

December 31, 2022

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Manajemen kunci dan karyawan (lanjutan)

31 Desember 2022

Direksi

| | |
|---|--------------|
| Direktur Utama | Iwan Ridwan |
| Plt. Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis | Iwan Ridwan |
| Direktur Keuangan dan SDM | Juli Tarigan |

31 Desember 2021

Dewan Komisaris

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Komisaris Utama | Eko Afrilianto |
| Komisaris | Hotman Napitupulu |
| Komisaris | David Ratadhi Wironegoro |

Direksi

| | |
|--|--------------|
| Direktur Utama | Iwan Ridwan |
| Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis | Cucu Kuswoyo |
| Direktur Keuangan dan SDM | Juli Tarigan |

Total gaji dan imbalan jangka pendek lainnya yang diakru atau dibayar kepada manajemen kunci Grup adalah sebesar Rp8.907.225.616 dan Rp9.776.373.482 (tidak diaudit) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup memiliki masing-masing 22 dan 23 orang karyawan yang terdiri dari karyawan organik dan karyawan non-organik (tidak diaudit).

c. Entitas anak

Berdasarkan Perjanjian Pengambilbagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (dahulu PT MTD CTP Expressway) tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, Perusahaan, MTD Capital Bhd dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa Perusahaan akan melakukan investasi di CTP dengan cara mengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200.000 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan CTP. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan Perusahaan menjadi pemilik 45% saham CTP. Atas transaksi tersebut, Perusahaan mencatat *goodwill* sebesar Rp31.407.482.856.

1. GENERAL (continued)

b. Key management and employees (continued)

December 31, 2022

Board of Directors

| |
|--|
| President Director |
| Acting Operational and Business Development Director |
| Finance and HR Director |

December 31, 2021

Board of Commissioners

| |
|------------------------|
| President Commissioner |
| Commissioner |
| Commissioner |

Board of Directors

| |
|---|
| President Director |
| Operational and Business Development Director |
| Finance and HR Director |

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's key management amounted to Rp8,907,225,616 and Rp9,776,373,482 (unaudited) for the year ended December 31, 2022 and 2021.

As of December 31, 2022 and 2021, the Group has 22 and 23 employees (unaudited), respectively, consists of organic and non-organic employee (unaudited).

c. Subsidiary

Based on Conditional Share Subscription Agreement and Shareholders Agreement of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (formerly PT MTD CTP Expressway) dated April 14, 2015, which was amended and restated on August 28, 2015, the Company, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that the Company will invest in CTP by subscribing to 130,220 new shares with a total nominal amount of Rp118,500,200,000 (representing 45% share ownership) issued by CTP. On September 18, 2015, the transaction was completed and the Company became the owner of 45% shares in CTP. For this transaction, the Company recorded *goodwill* amounting to Rp31,407,482,856.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Pada tanggal 7 Juni 2018, 21 November 2018 dan 27 Desember 2018, Perusahaan mengambil bagian atas 349.182 saham baru dengan total nilai nominal Rp317.755.620.000 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan CTP.

Pada tanggal 20 September 2019, Perusahaan mengambil bagian atas 146.646 saham baru dengan total nilai nominal Rp133.447.860.000 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan CTP.

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 28 Mei 2021 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui mengkonversi pinjaman pemegang saham sebesar Rp462.333.690.000 menjadi 508.059 lembar saham (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan oleh CTP.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat pada tanggal 21 Juli 2021 dan Akta Jual Beli Saham yang diaktakan dengan akta Notaris Ny. Hastuti Nainggolan, SH., M.Kn, No. 1 tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan membeli saham CTP yang dimiliki oleh PT Waskita Toll Road (entitas dibawah pengendalian yang sama dan tidak bersifat sementara) sebanyak 1.386.131 lembar saham yang mewakili 55,00% kepemilikan saham di CTP dengan harga beli sebesar Rp2.445.141.067.125 sehingga kepemilikan Perusahaan pada CTP mengalami peningkatan dari 45,00% menjadi 100,00%.

Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada PT Waskita Toll Road pada tanggal 14 Oktober 2021.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiary (continued)

On June 7, 2018, November 21, 2018 and December 27, 2018, the Company subscribed to 349,182 new shares with a total nominal amount of Rp317,755,620,000 (representing 45% share ownership) issued by CTP.

On September 20, 2019, the Company subscribed to 146,646 new shares with a total nominal amount of Rp133,447,860,000 (representing 45% share ownership) issued by CTP.

Based on Notarial Deed No. 5 dated May 28, 2021 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, a notary in Jakarta, the Company agreed to convert shareholder loans amounting to Rp462,333,690,000 into 508,059 shares (representing 45% share ownership) issued by CTP.

Based on the Conditional Sales and Purchase Agreement on July 21, 2021 and The Deed of Shares Sales and Purchase which notarized by the Notarial Deed of Ny. Hastuti Nainggolan SH., M.Kn, No. 1 dated October 1 2021, the Company acquired CTP's shares which owned by PT Waskita Toll Road (an entity under common control and is not temporary) amounted to 1,386,131 shares represents 55,00% shares ownership in CTP at a purchase price of Rp2,445,141,067,125 which made the the Company's ownership in CTP increased from 45.00% to 100.00%.

The Company has made payment of the shares transfer to PT Waskita Toll Road on October 14, 2021.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Pembelian saham milik WTR di CTP sebesar 55,00% tersebut di atas oleh Perusahaan memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi penambahan kepemilikan di CTP tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto di CTP diakui sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, dengan perhitungan sebagai berikut:

| | Nilai yang diakui pada saat transaksi/ Amount recognized on transaction | |
|--|--|--|
| Total nilai tercatat aset neto | 2.256.810.554.024 | <i>Total carrying amount of net assets</i> |
| 55,00% dari total nilai tercatat aset neto | 1.241.245.804.713 | <i>55.00% of total carrying amount of net assets</i> |
| Peningkatan aset neto | 1.241.245.804.713 | Increase in net assets |
| Imbalan yang dialihkan | 2.445.141.067.125 | <i>Consideration paid</i> |
| Tambahan modal disetor | (1.203.895.262.412) | Additional paid-in capital |

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 12 November 2021 oleh Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor di CTP sebanyak 462.637 lembar saham dengan harga Rp910.000 per saham atau setara dengan Rp421.000.580.000 yang telah diambil dan disetor penuh oleh Perusahaan sehingga menjadi kepemilikan saham Perusahaan di CTP.

Berdasarkan Akta Notaris No. 29 tanggal 31 Desember 2021 oleh Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui mengkonversi pinjaman pemegang saham sebesar Rp354.099.200.000 menjadi 389.120 lembar saham.

Berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 4 Maret 2022 oleh Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PT Menara Maritim Indonesia melakukan penyertaan modal saham di CTP sebanyak 100 lembar saham dengan harga Rp910.000 per saham atau setara dengan Rp91.000.000.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiary (continued)

The acquisition of 55,00% WTR's shares in CTP by the Company meet the criteria of business combination entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the increase in ownership of CTP transaction is recognized using the pooling of interest method. The difference between the consideration paid and the carrying amount of the net assets in CTP is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, with calculation as follows:

Based on Notarial Deed No. 10 dated November 12, 2021 by Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company approved an increase in issued and paid-up capital in CTP of 462,637 shares at a price of Rp910,000 per share or equivalent to Rp421,000,580,000 which has been taken and fully paid by the Company so that it becomes the Company's share ownership in CTP.

Based on Notarial Deed No. 29 dated December 31, 2021 by Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company agreed to convert shareholder loans amounting to Rp354,099,200,000 into 389,120 shares.

Based on Notarial Deed No. 4 dated March 4, 2022 by Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, PT Menara Maritim Indonesia invests in share capital in CTP by 100 shares at a price of Rp910,000 per share or equivalent to Rp91,000,000.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 20 Mei 2022 oleh Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor di CTP sebanyak 885.047 lembar saham dengan harga Rp910.000 per saham atau setara dengan Rp805.392.770.000 yang telah diambil dan disetor penuh oleh Perusahaan sehingga kepemilikan saham Perusahaan di CTP meningkat 0,0006%. Perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-01.03-0240246 tanggal 23 Mei 2022.

d. Penyelesaian laporan Keuangan konsolidasian

Laporan Keuangan konsolidasian PT Akses Pelabuhan Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 27 April 2023. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dengan dasar biaya historis, kecuali dinyatakan lain dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiary (continued)

Based on Notarial Deed No. 8 dated May 20, 2022 of Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company agreed to increase the issued and paid-up capital in CTP by 885,047 shares at a price of Rp910,000 per share or equivalent to Rp805,392,770,000 which has been taken and fully paid by the Company so that the Company's share ownership in CTP increased by 0.0006%. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights with letter No. AHU-01.03-0240246 dated May 23, 2022.

d. Completion of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements of PT Akses Pelabuhan Indonesia and its subsidiary as of December 31, 2022 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on April 27, 2023. The Company's Board of Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concept except as otherwise disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2e dibawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan kemampuan mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2e.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

- i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk goodwill), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang selain mata uang Rupiah dijabarkan menjadi mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

c. Transactions and balances in foreign currencies

Transactions denominated in currencies other than Rupiah are converted into Rupiah at the rates prevailing as of the date of the transaction.

At the reporting date, monetary assets and monetary liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Bank of Indonesia middle rate prevailing as of that date.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
(lanjutan)**

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut
(nilai penuh):

| | 31 Desember/ December 31, 2022 | 31 Desember/ December 31, 2021 |
|-------------------------------|---|---|
| Dolar Amerika Serikat (USD) 1 | 15.731 | 14.269 |

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 32.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

e. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Grup telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 sebagai berikut:

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum Amendemen PSAK 22 ini:

- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30" yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C.
- Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**c. Transactions and balances in foreign
currencies (continued)**

The exchange rates used are as follows (full amount):

| | 31 Desember/ December 31, 2022 | 31 Desember/ December 31, 2021 |
|------------------------------|---|---|
| United States Dollar (USD) 1 | 15.731 | 14.269 |

d. Transactions with related parties

The Company and its subsidiary have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

The nature of relationships and transactions with related parties are disclosed in Note 32.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

e. Changes in Accounting Principles

The Group has applied a number of amendments and improvements to accounting standards that are relevant to its financial reporting and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2022 as follow:

Amendments to PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks

The amendments to PSAK 22 Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks clarify the interactions between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.

In general, the Amendments to PSAK 22:

- Add a description regarding "liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 or ISAK 30" stated in paragraphs 21A-21C.
- Amend paragraph 23 by clarifying the contingent liabilities recognized at the acquisition date.
- Add paragraph 23A regarding the definition of a contingent asset and its accounting treatment.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

**Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas
Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang
Kontrak Mengganggu - Biaya Pemenuhan
Kontrak**

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya untuk menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

- biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
- alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71:
Instrumen Keuangan**

Amendemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

Amendemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Changes in Accounting Principles
(continued)**

**Amendments to PSAK 57: Provisions,
Contingent Liabilities, and Contingent
Assets regarding Aggravating Contracts -
Contract Fulfillment Costs**

This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is a burdensome contract.

The amendments to PSAK 57 provide that costs to fulfill a contract consist of costs that are directly related to the contract. Costs that are directly related to the contract consist of:

- *incremental costs to fulfill the contract, and*
- *allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.*

The amendments are effective January 1, 2022 with early adoption permitted and the amendments are not expected to have an impact on the Group's financial reporting upon first-time adoption.

**2020 Annual Improvements - PSAK 71:
Financial Instruments**

The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the modified terms of a financial liability required derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 73: Sewa

Amandemen terhadap Contoh Ilustrasi 13 yang merupakan bagian dari PSAK 73 menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian perbaikan properti sewaan oleh pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan mengenai perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena cara insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

Amandemen ini diterapkan secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun amandemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dibatasi atau dijadikan jaminan atas pinjaman dan pinjaman lainnya.

Deposito yang dijadikan jaminan pinjaman dan dana yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

g. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2q.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Changes in Accounting Principles
(continued)**

**2020 Annual Improvements - PSAK 73:
Leases**

The amendment to Illustrative Example 13 accompanying PSAK 73 removes from the example the illustration of the reimbursement of leasehold improvements by the lessor in order to resolve any potential confusion regarding the treatment of lease incentives that might arise because of how lease incentives are illustrated in that example.

The amendment prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of 3 (three) months or less from the date of placement and not restricted or pledged as collateral to loans or other borrowings.

Time deposit pledged as collateral to loan and restricted fund are presented as restricted cash and cash equivalent.

g. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2q.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- NWLR.

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Initial recognition and measurement
(continued)

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- FVTPL.

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang, aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Instrumen utang Grup yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada instrumen utang dengan kuotasi yang termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas).

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investments, other current assets and other non-current assets.

Financial assets at FVOCI (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Group's debt instruments at FVOCI includes investments in quoted debt instruments included under other non-current financial assets.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang) (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLRL")

Aset keuangan pada NWLRL tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLRL. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLRL.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at FVOCI (debt instruments) (continued)

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir
Atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired*
Or
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual dan akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, utang bank, liabilitas jangka panjang lainnya, utang obligasi, utang lembaga keuangan non-bank dan liabilitas sewa.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

(ii) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Initial Recognition and Measurement
(continued)

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liability, bank loans, other long term liabilities, bonds payable, loan from non-bank financial institution and lease liabilities.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

h. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka dibebankan selama masa manfaat atau kontrak dengan menggunakan metode garis lurus atau menggunakan dasar sistematis lainnya yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati.

i. Aset tetap

Grup menerapkan PSAK No. 16 "Aset Tetap".

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

h. Prepaid expenses

Prepaid expenses are recognized as expenses over their beneficial or contract periods using the straight-line method or using other systematic basis which represents more the time pattern of the user's benefit of the asset.

i. Fixed assets

The Group applied PSAK No. 16 "Fixed Assets".

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises their purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for them to be capable of operating in the manner intended by management.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Aset tetap (lanjutan)

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Penyusutan dimulai pada saat aset telah siap digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

| | <u>Tahun/Years</u> |
|------------------|--------------------|
| Peralatan kantor | 4 |
| Kendaraan | 4 - 5 |

Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sesuai pada saat konstruksi telah selesai dan tersedia untuk digunakan. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Fixed assets (continued)

Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

The cost of major inspections is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if the recognition criteria are met. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations for more than 1 (one) year.

Depreciation starts when the asset is already available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the asset as follows:

| | <u>Tahun/Years</u> |
|------------------|--------------------|
| Peralatan kantor | 4 |
| Kendaraan | 4 - 5 |

Construction in progress is stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the construction in progress. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and available for use. Construction in progress is not depreciated as it is not yet available for use.

The carrying amount of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year in which the asset is derecognized.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Aset tetap (lanjutan)

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif. Grup melakukan uji penurunan nilai aset tetap bila terdapat indikasi bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

j. Aset takberwujud

Aset takberwujud Grup terdiri dari aset hak perusahaan jalan tol dan *goodwill*.

Aset takberwujud diakui jika Grup kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direvisi setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat: i) dilepaskan; atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas, sebagai contoh *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan, tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Fixed assets (continued)

At each end of reporting period, the residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate. The Group conducts impairment test for the fixed assets when there is any indication that the carrying values may not be fully recoverable.

j. Intangible assets

Intangible assets of the Group consist of toll road concession rights asset and goodwill.

Intangible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset shall be derecognize: i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Assets that have an indefinite useful life, for example, goodwill or intangible assets not ready for use, are not subject to amortization and are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi

Grup menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak perusahaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") tanpa syarat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Intangible assets (continued)

Concession Rights Assets

The Group applies ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are toll concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of toll road. During the construction period, the accumulated toll road construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Indonesia Toll Road Authority ("BPJT") for no consideration.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Aset konsesi yang diberikan kepada Grup dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/BPJT. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - hak perusahaan jalan tol yang meliputi biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Intangible assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

Concession asset which granted to the Group are transferrable with approval from the Government/BPJT. These concession assets will be transferred to the Government/BPJT at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - toll concession rights which includes cost of construction and other costs directly related to the development, including the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets are amortized over the concession period using unit of usage method based on traffic volume.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Provisi pelapisan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk melakukan pelapisan jalan tol secara berkala. Provisi pelapisan jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 48 "Penurunan Nilai Aset".

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau apabila pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu disyaratkan, maka Grup membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual, dengan nilai pakainya, dan ditentukan secara individual, kecuali apabila aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Intangible assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

Provision for toll road overlay

In operating toll road, the Group has the obligation to perform overlay of toll road routinely. The estimated net provision for toll road overlay is discounted to its present value that reflects current provision.

k. Impairment of non-financial assets

The Group applied PSAK No. 48 "Impairment of Assets".

At each end of reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for certain asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash generating unit's fair value less costs to sell, and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**k. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa masa manfaatnya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**k. Impairment of non-financial assets
(continued)**

At each end of reporting period, the Group assesses whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Group estimates the asset's recoverable amount. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on such asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the Group uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

l. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

1. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
2. untuk diperdagangkan,
3. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4. kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

1. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
2. untuk diperdagangkan,
3. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

m. Provisi

Grup menerapkan PSAK No. 57 Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi”.

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

1. expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
2. held primarily for the purpose of trading,
3. expected to be realised within 12 months after the reporting period, or
4. cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

1. expected to be settled in the normal operating cycle,
2. held primarily for the purpose of trading,
3. due to be settled within 12 months after the reporting period, or
4. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period

All other liabilities are classified as non-current.

m. Provisions

The Group applied PSAK No. 57 “Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets”.

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities and a reliable estimate can be made of the amount of the liabilities.

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities, the provision is reversed.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Perpajakan

Grup menerapkan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan".

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Grup menyajikan beban pajak final atas pendapatan usaha dari sewa sebagai pos tersendiri, sementara beban pajak final atas pendapatan keuangan disajikan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Beban pajak final diakui secara proporsional dengan pendapatan yang diakui dalam laba rugi. Selisih antara jumlah pajak final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada laba rugi diakui sebagai beban pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Taxation

The Group applied PSAK No. 46 "Income Taxes".

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

The Group presents final tax expense on operating revenue arising from rent as a separate line item, while final tax expense on finance income is presented as part of general and administrative expenses in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Final tax expense is recognized proportionately based on revenues recognized in profit or loss. The difference between final tax paid with expense recognized in profit or loss is recognized as prepaid tax expense or tax payable.

Current tax

Current tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment of income tax are presented as part of current tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Group presented interest/penalty, if any, as part of other operating expenses.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Grup mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Taxation (continued)

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax basis at each reporting date.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statements of financial position.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Imbalan kerja karyawan

Kewajiban imbalan pensiun merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Grup. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pasca-kerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Karyawan tetap yang merupakan karyawan Pelindo yang ditugaskan di Grup dan memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan imbalan kerja, perhitungan dan kewajiban pembayarannya dilakukan oleh Pelindo, sementara Grup memiliki kewajiban membayarkannya kepada Pelindo sehingga disajikan sebagai utang lain-lain - pihak berelasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 22).

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") menerbitkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 Employee Benefits. Siaran pers tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision *Attributing Benefit to Periods of Service* IAS 19. Grup telah menerapkan siaran pers tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi terkait atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Employee benefits

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

Other long-term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Group's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long-term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Permanent employees of Pelindo who are assigned to the Group and qualified for employee benefits, the calculation and obligation to pay are conducted by Pelindo, while the Group has an obligation to pay them to Pelindo, hence, it is presented as other payables - related parties in the consolidated statement of financial position (Note 22).

Changes in Accounting Policy

*In April 2022, the Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board ("DSAK IAI") issued a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: Imbalan Kerja which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The press release conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision *Attributing Benefit to Periods of Service* IAS 19. The Group has adopted the said press release and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied.*

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Pada tahun-tahun sebelumnya, Grup mengatribusikan imbalan berdasarkan formula imbalan program imbalan pasti berdasarkan masa kerja sejak tanggal pekerja memberikan jasa hingga usia pensiun. Berdasarkan siaran pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) di bulan April 2022, Grup telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk mengatribusikan imbalan berdasarkan program tersebut, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material dibawah program tersebut. Namun, perubahan tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan dan telah dibebankan pada periode berjalan.

p. Sewa

Grup menilai pada saat insepisi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Employee benefits (continued)

Changes in Accounting Policy (continued)

In prior years, the Group attribute benefits under the defined benefit plan’s benefit formula to periods of service from the date when employees provide their services until their retirement age. Based on the press release of the Board of Financial Accounting Standard (“DSAK”) in April 2022, the Group change the policy for attributing benefits under the plan to the date when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further employee service will lead to no material amount of further benefits under the plan. However, the impact is not material to the financial statements and charged to current period.

p. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna (lanjutan)

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai (Note 2g).

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Leases (continued)

Right-of-use assets (continued)

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment (Note 2g).

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

q. Pendapatan dan beban

Grup mengadopsi PSAK 72 pada tanggal 1 Januari 2020 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui efek kumulatif pada awal penerapan PSAK 72 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020.

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah (*5-steps model*) tunggal berbasis prinsip untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan, sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Leases (continued)

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

q. Revenue and expense

The Group adopted PSAK 72 dated January 1, 2020 using a retrospective method modified by recognizing the cumulative effect at the beginning of the application of PSAK 72 as an adjustment to the opening balance of equity on January 1, 2020.

PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers" provides a comprehensive framework for determining how, when and how much revenue should be recognized. This standard provides a principle-based, single 5-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers, as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pendapatan dan beban (lanjutan)

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah (5-steps model) tunggal berbasis prinsip untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan, sebagai berikut: (lanjutan)

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Selain itu, dalam mengadopsi PSAK 72, Grup juga memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pembiayaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengalihan untuk barang atau layanan tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk pendapatan pelayanan terminal petikemas, perusahaan tanah, bangunan, air & listrik, pelayanan jasa terminal, pelayanan jasa kapal, jasa logistik, pelayanan kesehatan, pendapatan pas pelabuhan, perusahaan & konsultasi sistem informasi, pelayanan jasa barang, jasa keuangan, pendapatan dan pendapatan jasa lain-lain.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Grup menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Revenue and expense (continued)

PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers" provides a comprehensive framework for determining how, when and how much revenue should be recognized. This standard provides a principle-based, single 5-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers, as follows: (continued)

5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

In addition, in adopting PSAK 72, the Group has also chosen to apply practical guidance not to take into account the impact of the financing component when the period between payment for the goods or services promised and the transfer for the goods or services to the customer is less than one year.

Below is a summary of the Group's revenue recognition accounting policies for revenue from container services, land, building, water & electricity, terminal services, vessel services, logistic services, medical services, port entry fee, equipment services, network services and consultant of information system, cargo services, financial services, cleaning services and other services.

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Group and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.

The Group assesses its revenue arrangements against certain criteria to determine whether it is acting as principal or agent. The Group acts as the principal if it bears the impact of significant benefits and risks associated with the sale of goods and services.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Fitur yang mengindikasikan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal mencakup:

- a. Grup mempunyai tanggung jawab utama menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan, atau memenuhi pesanan, misalnya Grup bertanggungjawab untuk penerimaan atas produk dan jasa yang dipesan atau dibeli oleh pelanggan;
- b. Grup mempunyai risiko persediaan sebelum atau setelah pesanan pelanggan, selama pengiriman atau pengembalian;
- c. Grup mempunyai kebebasan untuk menentukan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya menyediakan barang dan jasa tambahan; dan
- d. Grup menanggung risiko kredit pelanggan atas jumlah yang dapat diterima dari pelanggan.

Grup telah melakukan analisa atas transaksi penjualan dan menyimpulkan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal pada semua perjanjian pendapatan.

Pengakuan Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama tahun berjalan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan dari aset atau peningkatan liabilitas yang menyebabkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan pembagian kepada pemilik ekuitas. Beban diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

r. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal pelaporan ("peristiwa penyesuaian"), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika material.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Revenue and expense (continued)

Features that indicate that the Group is acting as a principal include:

- a. The Group has the main responsibility of providing goods or services to customers, or fulfilling orders, for example, the Group is responsible for receiving products and services ordered or purchased by customers;*
- b. The Group is subject to inventory risk before or after a customer order, during delivery or return;*
- c. The Group has the freedom to determine prices either directly or indirectly, for example providing additional goods and services; and*
- d. The Group bears the credit risk of the customers for the amounts it can receive from the customers.*

The Group has analyzed the sales transaction and concluded that the Group acts as the principal in all revenue agreements.

Expenses Recognition

Expenses represent decreases in economic benefits during the year in the form of cash outflows or decreases from assets or increases in liabilities that cause a decrease in equity, other than those related to distributions to owners of equity. Expenses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred.

r. Events after the reporting period

Post period-end events that provide additional information about the Group's financial position at the reporting date ("adjusting events"), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post period-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**s. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan dibawah ini. Grup bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1
Januari 2023**

- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan (Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Panjang).
- Amendemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan.
- Amendemen PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan tentang definisi estimasi akuntansi.
- Amendemen PSAK No. 46: Pajak penghasilan tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal.

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1
Januari 2024**

- Amendemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.
- Amendemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**s. Accounting standards issued but not yet
effective**

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current financial statements are disclosed below. The Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

**Effective beginning on or after January 1,
2023**

- Amendments to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements (Liabilities Classification as Short or Long Term).
- Amendments to PSAK No. 16: Fixed Assets regarding Proceeds before Intended Use.
- Amendments to PSAK No. 25: Accounting policies, changes in accounting estimates and errors definition of accounting estimates.
- Amendments to PSAK No. 46: Income taxes - deferred tax related to asset and liabilities arising from a single transaction.

**Effective beginning on or after January 1,
2024**

- Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants.
- Amendment to PSAK 73: Lease Liability in a Sale and Leaseback.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgements and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. These estimates and assumptions are made based on historical experiences and other factor that are considered to be relevant.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Penentuan mata uang fungsional

Berdasarkan substansi ekonomi dari keadaan mendasar yang relevan terhadap Grup, mata uang fungsional yang ditetapkan adalah Rupiah. Mata uang tersebut adalah mata uang yang terutama mempengaruhi sebagian besar pendapatan dan biaya pokok pendapatan Grup di masa yang akan datang serta pendanaan dan beban usahanya.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

Sewa

Sebelum 1 Januari 2020, Grup mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai lessee. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK 30, "Sewa", yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'Sewa Operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamendemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Management believes that the following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgements and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by the management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Determination of functional currency

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Rupiah. It is the currency that mainly influences the majority of the Group's future revenue and cost of revenue as well as its financing and operating expenses.

Classification of financial assets and liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by complying the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2e.

Leases

Before January 1, 2020, the Group has several leases whereas the Group acts as lessee. The Group evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on PSAK 30, "Leases", which requires the Group to make judgement and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of asset.

From January 1, 2020, the Group has adopted PSAK 73, which sets the requirement for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as 'operating leases'. This policy is applied to contracts entered into or amended, on or after January 1, 2020.

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi masa manfaat atas aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat direviu paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2i. Tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat aset tetap selama periode pelaporan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next reporting period are disclosed below.

The Group based its assumption and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimated useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of fixed asset is based on the Group's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2i. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the reporting period.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset hak-guna

Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset hak-guna antara 2 (dua) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Ketidakpastian kewajiban perpajakan

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari pendapatan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Pajak penghasilan telah diungkapkan dalam Catatan 18d.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan beban pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu dalam kegiatan usaha normal yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18d.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Depreciation of right-of-use assets

The costs of right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these leased assets to be within 2 (two) to 30 (thirty) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Uncertain tax exposure

Income taxes In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". Income tax is disclosed in Note 18d.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the corporate income tax expense. There are certain transactions and computation during the ordinary course of business for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group recognizes liabilities for corporate income tax based on estimated taxable income. Further details are disclosed in Note 18d.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak, jika besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui, berdasarkan kemungkinan waktu realisasi dan jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2n dan 18e.

4. REKLASIFIKASI AKUN

Berikut adalah akun - akun pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah direklasifikasi untuk memungkinkan perbandingan mereka dengan akun pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021:

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2n and 18e.

4. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Following are the accounts in the statements of financial position as of December 31, 2022 which have been reclassified to allow their comparison with the account in the December 31, 2021 financial statements:

| | <u>Sebelum reklasifikasi/ As previously reported</u> | <u>Reklasifikasi/ Reclassification</u> | <u>Setelah reklasifikasi/ As reclassified</u> | |
|---|--|--|---|--|
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | CURRENT LIABILITIES |
| Pinjaman bank jangka pendek | - | 133.296.919.362 | 133.296.919.362 | Short-term bank loans |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang bank | 133.296.919.362 | (110.127.598.345) | 23.169.321.017 | Current maturities of long term liabilities: Bank loans |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | NON-CURRENT LIABILITIES |
| Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang bank | 4.610.694.882.165 | (23.169.321.017) | 4.587.525.561.148 | Long-term liabilities - net of current maturities: Bank loans |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|--|--|--|
| Kas | | |
| Rupiah | 113.150.000 | 42.118.218 |
| Bank | | |
| Rupiah | | |
| Pihak ketiga | | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 1.296.568.077 | 3.388.150.726 |
| PT Bank KB Bukopin Tbk | - | 2.852.838 |
| Subtotal | 1.296.568.077 | 3.391.003.564 |
| Pihak berelasi (Catatan 32) | | |
| Rupiah | | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 38.944.390.947 | 118.496.738.097 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 19.205.701.346 | 18.101.065.995 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 676.209.738 | 133.287.517 |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 317.509.573 | 100.473.607 |
| Dolar AS | | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | - | 34.457.496 |
| Subtotal | 59.143.811.604 | 136.866.022.712 |
| Deposito berjangka | | |
| Rupiah | | |
| Pihak ketiga | | |
| PT Bank KB Bukopin Tbk | - | 50.000.000.000 |
| Pihak berelasi (Catatan 32) | | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 70.000.000.000 | 82.400.000.000 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 28.000.000.000 | 70.000.000.000 |
| Subtotal | 98.000.000.000 | 202.400.000.000 |
| Total | 158.553.529.681 | 342.699.144.494 |

5. CASH AND CASH EQUIVALENT

| |
|--|
| Cash on hand |
| Rupiah |
| Cash in banks |
| Rupiah |
| Third parties |
| PT Bank Central Asia Tbk |
| PT Bank KB Bukopin Tbk |
| Subtotal |
| Related parties (Note 32) |
| Rupiah |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| US Dollar |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| Subtotal |
| Time deposits |
| Rupiah |
| Third parties |
| PT Bank KB Bukopin Tbk |
| Related parties (Note 32) |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| Subtotal |
| Total |

Tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Contractual interest rates on time deposits are as follows:

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,**

| | 2022 | 2021 | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| Rupiah | 2,00% - 5,00% | 2,50% - 5,00% | Rupiah |

6. BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Bank yang dibatasi penggunaannya merupakan bank garansi yang ditempatkan oleh CTP sehubungan dengan pinjaman sindikasi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bank garansi merupakan jaminan aktivitas konstruksi dan pembangunan di kawasan ruang milik jalan tol yang dipersyaratkan oleh BPJT. Bank garansi ini berlaku untuk 211 hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 (Catatan 20).

Bank yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp693.532.340.

6. RESTRICTED CASH IN BANK

Restricted cash in banks is a bank guarantee owned by CTP for a syndicated loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bank guarantees are guarantees for construction activities and development activities in the toll road space area required by BPJT. This bank guarantee is valid for 211 days from October 15, 2021, to May 13, 2022 (Note 20).

Restricted cash in bank as of December 31, 2022, and December 31, 2021 amounting to RpNil and Rp693,532,340.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. PIUTANG USAHA

Piutang usaha merupakan tagihan kepada bank penyedia layanan uang elektronik atas transaksi pembayaran oleh pengguna jalan tol.

7. TRADE RECEIVABLES

Trade receivables represent receivables from electronic money service provider banks for payment transactions by toll road users.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 |
|---------------------------------|--|
| Pihak ketiga | 1.090.517.078 |
| Pihak berelasi | |
| Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) | 142.604.258.879 |
| Indonesia Financial Group Life | 301.836.097 |
| Lain-lain | 38.513.376 |
| Subtotal pihak berelasi | 142.944.608.352 |
| Total | 144.035.125.430 |

| | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 | |
|--------------|--|------------------------------------|
| | - | Third parties |
| | - | Related parties |
| | 151.822.082.808 | Toll Road Regulatory Agency (BPJT) |
| | - | Indonesia Financial Group Life |
| | - | Others |
| | 151.822.082.808 | Sub-total related parties |
| Total | 151.822.082.808 | Total |

Piutang dari Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") merupakan dana talangan yang telah dibayarkan oleh CTP kepada pemilik lahan dan akan diganti oleh BPJT sesuai dengan amendemen PPJT.

Receivables from the Toll Road Regulatory Agency ("BPJT") represent bailout funds that have been paid by CTP to landowners and will be reimbursed by BPJT in accordance with the PPJT amendment.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 148 tahun 2015, Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 148 tahun 2015, Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha yang akan dibayar kembali dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 3 of 2016 on the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 30 of 2015 on the Third Amendment to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 of 2012 on the Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest as amended last time by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 148 of 2015, Funding for Land Acquisition for the Public Interest can be sourced first from the funds of the Business Entity which will be repaid with funds sourced from the State Budget.

BPJT akan mengembalikan dana talangan tersebut secara berkala setelah dana tersebut telah terpakai dan terserap berdasarkan berita acara penyerapan dana talangan tanah. Berdasarkan Amendemen X Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol-Cibitung-Cilincing. Amendemen tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No. 3 pada tanggal 8 Desember 2020, oleh Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta, CTP menyediakan dana talangan kepada BPJT dengan nilai maksimum sebesar Rp4.560.709.011.223.

BPJT will return the bailout funds on a regular basis after the funds have been used and utilized based on the minutes of the land bailout utilization. Based on Amendment X of Toll Road Concession Agreement for the Cibitung-Cilincing Toll Road Section. The amendment is set forth in Notarial Deed No. 3 dated December 8, 2020, by Rina Utami Djauhari, S.H., a Notary in Jakarta, CTP provides bailout funds to BPJT with a maximum total value of Rp4,560,709,011,223.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021 pendapatan bunga atas piutang pemerintah masing-masing sebesar Rp10.650.094.310 dan Rp7.039.290.124 yang dikurangkan dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada aset konsesi dalam penyelesaian (Catatan 11). Piutang ini digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 20).

As of December 31, 2022 and 2021, interest income from the government receivables amounted to Rp10,650,094,310 and Rp7,039,290,124, respectively, which were deducted to the borrowing cost capitalized to concession assets in progress (Note 11). These receivables used as collateral for bank loan (Note 20).

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rincian uang muka dan beban dibayar di muka adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|------------------------|--|--|
| Uang muka | 2.305.569.892 | 8.741.161.629 |
| Beban dibayar di muka: | | |
| Asuransi | 1.833.790.220 | 1.016.525.789 |
| Umum | 1.771.029.534 | - |
| Sewa | 435.185.020 | - |
| Gaji | - | 1.142.712.339 |
| Lain-lain | 14.844.169 | - |
| Total | 6.360.418.835 | 10.900.399.757 |

Uang muka merupakan pembayaran kepada konsultan dan kontraktor untuk pekerjaan pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing.

9. ADVANCE AND PREPAID EXPENSES

The details of advance and prepaid expenses are as follows:

| |
|-------------------|
| Advances |
| Prepaid expenses: |
| Insurance |
| Expense |
| General |
| Rent |
| Salaries |
| Others |
| Total |

Advances represents payment to consultant and contractor for construction of toll road Cibitung-Cilincing.

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/
Year ended December 31, 2022

| | Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Additions | Pengurangan/ Deductions | Reklasifikasi/ Reclassifications | Saldo akhir/ Ending balance | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Biaya perolehan | | | | | | Acquisition costs |
| Peralatan kantor | 1.874.314.888 | 3.140.701.349 | - | 1.408.411.045 | 6.423.427.282 | Office equipment |
| Kendaraan | 656.060.000 | - | - | - | 656.060.000 | Vehicles |
| Aset dalam penyelesaian | 733.909.092 | 674.501.953 | - | (1.408.411.045) | - | Construction in progress |
| Subtotal | 3.264.283.980 | 3.815.203.302 | - | - | 7.079.487.282 | Sub-total |
| Akumulasi penyusutan | | | | | | Accumulated depreciation |
| Peralatan kantor | (1.169.478.540) | (740.849.171) | - | - | (1.910.327.711) | Office equipment |
| Kendaraan | (656.060.000) | - | - | - | (656.060.000) | Vehicles |
| Subtotal | (1.825.538.540) | (740.849.171) | - | - | (2.566.387.711) | Sub-total |
| Nilai buku neto | 1.438.745.440 | | | | 4.513.099.571 | Net book value |

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/
Year ended December 31, 2021

| | Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Additions | Pengurangan/ Deductions | Reklasifikasi/ Reclassifications | Saldo akhir/ Ending balance | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Biaya perolehan | | | | | | Acquisition costs |
| Peralatan kantor | 1.486.379.727 | 387.935.161 | - | - | 1.874.314.888 | Office equipment |
| Kendaraan | 656.060.000 | - | - | - | 656.060.000 | Vehicles |
| Aset dalam penyelesaian | - | 733.909.092 | - | - | 733.909.092 | Construction in progress |
| Subtotal | 2.142.439.727 | 1.121.844.253 | - | - | 3.264.283.980 | Sub-total |
| Akumulasi penyusutan | | | | | | Accumulated depreciation |
| Peralatan kantor | (924.297.932) | (245.180.608) | - | - | (1.169.478.540) | Office equipment |
| Kendaraan | (638.899.737) | (17.160.263) | - | - | (656.060.000) | Vehicles |
| Subtotal | (1.563.197.669) | (262.340.871) | - | - | (1.825.538.540) | Sub-total |
| Nilai buku neto | 579.242.058 | | | | 1.438.745.440 | Net book value |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31, 2021 | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|
| | Persentase penyelesaian/ Percentage of completion | Akumulasi biaya/ Accumulated costs | Estimasi penyelesaian/ Estimated completion | |
| Peralatan kantor | 95,00% | 733.909.092 | Januari/January 2022 | Office equipment |

Beban penyusutan masing-masing sebesar Rp539.311.777 dan Rp58.845.197 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi. Beban penyusutan masing-masing sebesar Rp201.537.394 dan Rp203.495.674 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, dikapitalisasi sebagai aset hak perusahaan jalan tol (Catatan 11).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Grup berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Aset tetap kepemilikan langsung tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

10. FIXED ASSETS (continued)

The details of construction in progress are as follows:

Depreciation expenses amounted to Rp539,311,777 and Rp58,845,197 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, are recorded in general and administrative expenses in the statements of profit or loss. Depreciation expenses amounted to Rp201,537,394 and Rp203,495,674 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, is capitalized as toll road concession right asset (Note 11).

Based on the evaluation of the management there are no events or changes in circumstances that might indicate an impairment in the value of the Group's property and equipment as at December 31, 2022 and 2021.

Directly owned fixed assets were not used as collateral at reporting date.

11. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL

11. TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS

| Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/ Year ended December 31, 2022 | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Additions | Pengurangan/ Deductions | Reklasifikasi/ Reclassifications | Saldo akhir/ Ending balance | |
| Biaya perolehan | | | | | | Acquisition costs |
| Hak perusahaan jalan tol | 10.477.626.278.241 | 1.596.541.313.596 | - | - | 12.074.167.591.837 | Toll road concession rights |
| Akumulasi amortisasi | | | | | | Accumulated amortization |
| Hak perusahaan jalan tol | - | (3.361.369.489) | - | - | (3.361.369.489) | Toll road concession rights |
| Total | - | (3.361.369.489) | - | - | (3.361.369.489) | Total |
| Nilai buku neto | 10.477.626.278.241 | | | | 12.070.806.222.348 | Net book value |
| Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ Year ended December 31, 2021 | | | | | | |
| | Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Additions | Pengurangan/ Deductions | Reklasifikasi/ Reclassifications | Saldo akhir/ Ending balance | |
| Biaya perolehan | | | | | | Acquisition costs |
| Hak perusahaan jalan tol | - | - | - | 10.477.626.278.241 | 10.477.626.278.241 | Toll road concession rights |
| Aset konsesi dalam Penyelesaian | 8.567.691.778.200 | 1.909.934.500.041 | - | (10.477.626.278.241) | - | Concession assets in progress |
| Total | 8.567.691.778.200 | 1.909.934.500.041 | - | - | 10.477.626.278.241 | Total |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL (lanjutan)

Hak pengusahaan jalan tol berasal dari biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai aset takberwujud, yaitu: biaya konstruksi, biaya konsultan dan supervisi, biaya *overhead*, biaya pinjaman atas pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing.

Biaya pinjaman setelah dikurangi pendapatan bunga yang dikapitalisasi ke dalam aset konsesi dalam penyelesaian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp264.262.405.179 dan Rp521.671.225.084.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kemajuan pembangunan proyek jalan tol Cibitung-Cilincing masing-masing telah mencapai 99,99% untuk seksi I Cibitung-Telaga Asih, 100,00% untuk seksi II Telaga Asih-Tabelang, 100,00% untuk seksi III Tabelang-Tarumajaya, dan 95,21% untuk seksi IV Tarumajaya-Cilincing.

Berdasarkan Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol, dari Direktur Jendral Bina Marga, No. BM 0702-Db/732 tanggal 23 Juni 2021 dan No. BM 0702-Db/587 tanggal 31 Mei 2022, menyatakan bahwa Seksi I, Seksi II dan Seksi III Jalan Tol Cibitung Cilincing, laik operasi dan dapat direkomendasikan untuk dioperasikan sebagai jalan tol.

Hak pengusahaan jalan tol telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7.167.166.008.994 dan RpNihil. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset konsesi dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**11. TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS
(continued)**

Toll road concession rights are derived from costs that can be capitalized as intangible assets, namely: construction cost, consultant and supervision cost, overhead cost, borrowing cost for the construction of Cibitung-Cilincing toll road.

Borrowing costs net of interest income capitalized to concession assets in progress for the year ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp264,262,405,179 and Rp521,671,225,084, respectively.

As of December 31, 2022, the progress of Cibitung-Cilincing toll road project development reached 99.99% for the section I of Cibitung-Telaga Asih, 100.00% for the section II Telaga Asih-Tabelang, 100.00% for the section III Tabelang-Tarumajaya, and 95.21% for the section IV Tarumajaya-Cilincing.

Based on the Toll Road Operation Certificate, from the Director General of Bina Marga, No. BM 0702-Db/732 dated June 23, 2021 and No. BM 0702-Db/587 dated May 31, 2022, Section I, Section II and Section III of the Cibitung Cilincing Toll Road, was declared feasible for operation and can be recommended to be operated as a toll road.

Toll road concession rights are covered by insurance for the year ended as at December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp7,167,166,008,994 and RpNil, respectively. Management believes that the coverage is adequate to cover any possible losses from such risks.

Management believes that there was no impairment in the value of all concession assets in progress as of December 31, 2022 and 2021.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

12. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

The movements in right-of-use assets are as follows:

| Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, 2022 | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Saldo Awal/ Beginning Balance | Penambahan/ Additions | Pengurangan/ Deductions | Reklasifikasi/ Reclassification | Saldo Akhir/ Ending Balance |
| Harga perolehan | | | | | |
| Ruang kantor | - | 4.023.184.025 | - | - | 4.023.184.025 |
| Kendaraan | 2.274.915.463 | 2.111.346.195 | (225.376.992) | - | 4.160.884.666 |
| Subtotal | 2.274.915.463 | 6.134.530.220 | (225.376.992) | - | 8.184.068.691 |
| Akumulasi penyusutan | | | | | |
| Ruang kantor | - | (1.462.976.009) | - | - | (1.462.976.009) |
| Kendaraan | (126.384.193) | (1.393.901.490) | 12.520.944 | - | (1.507.764.739) |
| Subtotal | (126.384.193) | (2.856.877.499) | 12.520.944 | - | (2.970.740.748) |
| Nilai buku bersih | 2.148.531.270 | | | | 5.213.327.943 |
| | | | | | |
| Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, 2021 | | | | | |
| | Saldo Awal/ Beginning Balance | Penambahan/ Additions | Pengurangan/ Deductions | Reklasifikasi/ Reclassification | Saldo Akhir/ Ending Balance |
| Harga perolehan | | | | | |
| Ruang kantor | 520.389.364 | - | (520.389.364) | - | - |
| Kendaraan | 2.192.176.598 | 1.790.240.342 | (1.707.501.477) | - | 2.274.915.463 |
| Subtotal | 2.712.565.962 | 1.790.240.342 | (2.227.890.841) | - | 2.274.915.463 |
| Akumulasi penyusutan | | | | | |
| Ruang kantor | (289.105.202) | (231.284.162) | 520.389.364 | - | - |
| Kendaraan | (969.163.189) | (730.545.004) | 1.573.324.000 | - | (126.384.193) |
| Subtotal | (1.258.268.391) | (961.829.166) | 2.093.713.364 | - | (126.384.193) |
| Nilai buku bersih | 1.454.297.571 | | | | 2.148.531.270 |

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities is as follows:

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 | |
|------------------------|--|--|--------------------------|
| Liabilitas sewa | | | Lease liabilities |
| Bagian jangka pendek | 2.776.600.634 | 903.986.644 | Current portion |
| Bagian jangka panjang | 3.107.353.410 | 1.364.347.778 | Non-current portion |
| Total | 5.883.954.044 | 2.268.334.422 | Total |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS SEWA
(lanjutan)**

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | |
|--------------------------------|---|-------------|
| | 2022 | 2021 |
| Beban penyusutan aset hak-guna | 2.338.501.019 | 847.140.938 |
| Bunga atas liabilitas sewa | 297.945.645 | 45.520.011 |

Beban penyusutan aset hak-guna masing-masing sebesar Rp2.338.501.019 dan Rp847.140.938 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi. Sedangkan, selisihnya dikapitalisasi sebagai aset hak pengusahaan jalan tol (Catatan 11).

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | |
|----------------------------|---|----------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Jumlah kas keluar untuk | | |
| Pembayaran liabilitas sewa | 2.108.933.020 | 1.027.242.582 |
| Pembayaran bunga | 297.945.645 | 375.274.386 |
| Total | 2.406.878.665 | 1.402.516.968 |

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Grup mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Liabilitas sewa | | |
| Saldo awal | 2.268.334.422 | 1.835.348.542 |
| Perubahan non-kas | 113.345.059 | 45.262.505 |
| Penambahan selama tahun berjalan | 5.909.153.228 | 1.790.240.343 |
| Pembayaran | (2.406.878.665) | (1.402.516.968) |
| Total | 5.883.954.044 | 2.268.334.422 |

**12. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE
LIABILITIES (continued)**

Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | |
|--------------------------------|---|-------------|
| | 2022 | 2021 |
| Beban penyusutan aset hak-guna | 2.338.501.019 | 847.140.938 |
| Bunga atas liabilitas sewa | 297.945.645 | 45.520.011 |

Depreciation of right-of-use assets amounted to Rp2,338,501,019 and Rp847,140,938 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, are recorded in general and administrative expenses in the statements of profit or loss. Meanwhile, the excess is capitalized as a toll road concession right asset (Note 11).

Amount recognized in statement of cash flow is as follows:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | |
|----------------------------|---|----------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Jumlah kas keluar untuk | | |
| Pembayaran liabilitas sewa | 2.108.933.020 | 1.027.242.582 |
| Pembayaran bunga | 297.945.645 | 375.274.386 |
| Total | 2.406.878.665 | 1.402.516.968 |

Some leases contain extension options exercisable by the Grup before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Grup. The Grup assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Grup reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as follow:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Liabilitas sewa | | |
| Saldo awal | 2.268.334.422 | 1.835.348.542 |
| Perubahan non-kas | 113.345.059 | 45.262.505 |
| Penambahan selama tahun berjalan | 5.909.153.228 | 1.790.240.343 |
| Pembayaran | (2.406.878.665) | (1.402.516.968) |
| Total | 5.883.954.044 | 2.268.334.422 |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. GOODWILL

Goodwill timbul dari transaksi akuisisi 45,00% kepemilikan saham di CTP senilai Rp31.407.482.856 pada tahun 2015 (Catatan 1c).

13. GOODWILL

Goodwill arising from acquisition of 45.00% shares ownership in CTP amounting to Rp31,407,482,856 in 2015 (Note 1c).

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya terutama merupakan investasi saham kepada PT Menara Maritim Indonesia sebanyak 1.000.000 lembar saham sebesar Rp100.000.000.

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Other non-current assets mainly represent investment in shares to PT Menara Maritim Indonesia for 1,000,000 shares amounting to Rp100,000,000.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 |
|---|--|
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 103.106.529.338 |
| Total | 103.106.529.338 |

15. CURRENT BANK LOANS

| | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 | |
|--|--|---|
| | 133.296.919.362 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| | 133.296.919.362 | Total |

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Non-Sindikasi No. 83 tanggal 22 Maret 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., notaris di Jakarta, CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Non-Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. CTP memperoleh fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1.920.000.000.000 yang terbagi menjadi 2 (dua) tranche.

Based on the Non-Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 83 dated March 22, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a notary in Jakarta, CTP entered into a Non-Syndicated Loan with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a maximum credit facility of Rp1,920,000,000,000 divided in 2 (two) tranches.

Fasilitas kredit maksimum pada tranche I dan tranche II masing-masing adalah sebesar Rp890.000.000.000 dan Rp1.030.000.000.000. Fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk pembiayaan dana talangan tanah pembebasan lahan tol ruas Cibitung-Cilincing.

Maximum credit facilities for tranche I and II amounted to Rp890,000,000,000 and Rp1,030,000,000,000. The credit facility is intended to finance land bailout funds for land acquisition for the Cibitung-Cilincing toll road section.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2021 (2 tahun setelah tanggal perjanjian). Denda 2% akan dihitung untuk semua saldo yang belum dibayar baik untuk pokok dan bunga.

This loan is subject to fixed interest rate of 8.50% per annum which shall mature in 2021 (2 years after the agreement date). A 2% penalty shall be calculated for all unpaid balances for both principal and interest.

Selain itu, CTP juga diwajibkan untuk mematuhi negative covenant antara lain:

In addition, CTP is required to adhere to the following negative covenants, among others:

- Mengubah bentuk, status badan hukum, dan lingkup kegiatan usaha debitur, dan investasi serta penyertaan bidang lain;
- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dan go public;
- Mengubah susunan pemegang saham
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang;
- Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham;
- Melakukan pembagian dividen;
- Mengalihkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit; dan
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit.

- Change the form, status of legal entity, and scope of business activities, and investment and participation in other fields;
- Conduct mergers, acquisitions, sale of Company assets and go public;
- Change the composition of shareholders;
- Be bound as guarantor of debt;
- Pay off and or pay debts to shareholders;
- Declare dividends;
- Transfer to another party, in part or in whole of the rights and obligations arising in connection with the credit facility; and
- Declare bankruptcy.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Pada tanggal 5 Agustus 2022, para pihak sepakat untuk mengubah jumlah maksimum fasilitas kredit menjadi Rp1.494.685.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- *Tranche I*: Rp890.000.000.000
- *Tranche II*: Rp604.685.000.000

Para pihak juga sepakat untuk mengubah jangka waktu perjanjian menjadi 23 April 2023 dan suku bunga menjadi 7,25%.

Beban bunga yang diakui untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.516.833.682 dan Rp11.543.098.981, yang dikapitalisasi ke aset dalam hak pengusahaan jalan tol (Catatan 11).

15. CURRENT BANK LOANS (continued)

On August 5, 2022, both parties agreed to amend the maximum credit facility to become Rp1,494,685,000,000 with each tranche as follows:

- *Tranche I*: Rp890,000,000,000
- *Tranche II*: Rp604,685,000,000

Both parties also agreed to change the maturity of the agreement to be on April 23, 2023 and the fixed interest rate to become 7.25% per annum.

Interest expenses recognized for the year ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp16,516,833,682 and Rp11,543,098,981, respectively, which were all capitalized to toll road access rights during the period (Note 11).

16. UTANG USAHA

16. TRADE PAYABLES

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Pihak ketiga | | | <i>Third parties</i> |
| PT Module Intracs Yasatama | 8.552.916.432 | 2.333.417.480 | <i>PT Module Intracs Yasatama</i> |
| PT Powerindo Teknik Indonesia | 5.630.681.192 | - | <i>PT Powerindo Teknik Indonesia</i> |
| PT Manikam Mega Persada | 4.630.508.500 | - | <i>PT Manikam Mega Persada</i> |
| PT Argo Sukses Abadi | 3.383.902.117 | 2.035.200.000 | <i>PT Argo Sukses Abadi</i> |
| PT Mobyco Magno Indonesia | 1.146.142.067 | - | <i>PT Mobyco Magno Indonesia</i> |
| PT SMEC Denka | 1.051.634.875 | 1.095.602.750 | <i>PT SMEC Denka</i> |
| PT Tektikal | 931.769.955 | - | <i>PT Tektikal</i> |
| PT Putratama Satya Bhakti | 664.303.482 | - | <i>PT Putratama Satya Bhakti</i> |
| PT Buana Raya Bumi Pertiwi | 136.979.000 | 665.752.531 | <i>PT Buana Raya Bumi Pertiwi</i> |
| PT Perentjana Djaja | - | 3.266.390.000 | <i>PT Perentjana Djaja</i> |
| PT Cahaya Agung Dirgayasa | - | 1.633.253.753 | <i>PT Cahaya Agung Dirgayasa</i> |
| PT Oetomo Hikmat Konstruksi | - | 890.400.000 | <i>PT Oetomo Hikmat Konstruksi</i> |
| Lain-lain | 124.495.695 | - | <i>Others</i> |
| Subtotal | <u>26.253.333.315</u> | <u>11.920.016.514</u> | <i>Subtotal</i> |
| Pihak berelasi (Catatan 32) | | | <i>Related parties (Note 32)</i> |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 864.094.284.329 | 971.282.137.982 | <i>PT Waskita Karya (Persero) Tbk</i> |
| PT Waskita Beton Precast Tbk | 39.704.745.794 | 111.703.005.488 | <i>PT Waskita Beton Precast Tbk</i> |
| PT Jasamarga Tollroad Maintenance | 22.995.318.837 | 6.476.575.270 | <i>PT Jasamarga Tollroad Maintenance</i> |
| PT Jasamarga Tollroad Operator | 5.710.690.722 | - | <i>PT Jasamarga Tollroad Operator</i> |
| PT Virama Karya (Persero) | 4.123.212.343 | 4.196.492.049 | <i>PT Virama Karya (Persero)</i> |
| Subtotal | <u>936.628.252.025</u> | <u>1.093.658.210.789</u> | <i>Subtotal</i> |
| Total | <u>962.881.585.340</u> | <u>1.105.578.227.303</u> | <i>Total</i> |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Kementerian PUPR - BLU Set-BPJT

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 4 Februari 2013 oleh Ny. Trie Sulistiowarni, S.H., Notaris di Jakarta, CTP telah menandatangani Perjanjian dengan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT"). CTP mendapatkan pinjaman biaya pergantian atas pembelian tanah untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dengan batas maksimal biaya pergantian Rp288.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Seksi I: Cibitung-Telaga Asih sebesar Rp11.519.488.023.
- Seksi II: Telaga Asih-Tembalang sebesar Rp87.445.713.524.
- Seksi III: Tembalang-Tarumajaya sebesar Rp118.906.715.257.
- Seksi IV: Tarumajaya-Cilincing sebesar Rp70.128.083.196.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, CTP menerima tagihan atas kewajiban Nilai Tambah sebesar Rp119.043.297.971 dan denda sebesar Rp59.498.400.318. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan manajemen belum mengambil keputusan untuk membayar Nilai Tambah dan denda tersebut.

Utang pokok CTP kepada BLU Set-BPJT adalah sebesar Rp287.996.699.864 berdasarkan laporan dari BLU Set-BPJT atas besaran dana yang dipakai yang menjadi bagian CTP dalam pelepasan lahan untuk proyek jalan tol Cibitung - Cilincing.

Jangka waktu pinjaman ini adalah sampai proses pengadaan tanah selesai oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Atas perjanjian ini, Perusahaan membayar biaya administrasi sebesar Rp25.000.000 dan biaya provisi sebesar Rp2.880.000.000 di tahun 2013. Setiap tiga (3) bulan sekali CTP akan dikenakan nilai tambah (beban bunga) oleh BLU Set-BPJT. Tingkat bunga dalam nilai tambah adalah berdasarkan tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") ditambah 1%.

Pada tanggal 31 Maret 2016, CTP menahan pembayaran beban bunga dan denda. Hal ini dikarenakan CTP keberatan atas berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2007 tanggal 26 Februari 2007 untuk mengganti Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.23/PRT/M/2014 tanggal 31 Desember 2014 sehubungan dihapusnya Pasal 8.d perihal jangka waktu maksimum pengenaan bunga terhitung dari sejak pembayaran pertama ganti rugi tanah adalah 2 (dua) tahun.

17. OTHER PAYABLES (continued)

Kementerian PUPR - BLU Set-BPJT

Based on the Notarial Deed No. 2 dated February 4, 2013 by Mrs. Trie Sulistiowarni, S.H., a Notary in Jakarta, CTP has signed an agreement with Ministry of Public Works & Human Settlements - Public Service Agencies Secretariat of Toll Road Regulatory Body ("BLU Set-BPJT"). CTP obtained expense reimbursement loan on the purchase of land for Cibitung-Cilincing toll project for a maximum expense reimbursement amount of Rp288,000,000,000, with the following details:

- Section I: Cibitung-Telaga Asih amounting to Rp11,519,488,023.
- Section II: Telaga Asih-Tembalang amounting to Rp87,445,713,524.
- Section III: Tembalang-Tarumajaya amounting to Rp118,906,715,257.
- Section IV: Tarumajaya-Cilincing amounting to Rp70,128,083,196.

As of December 31, 2021 and December 31, 2020, CTP has received billing for Value Added amounting to Rp119,043,297,971 and penalties amounting to Rp59,498,400,318. Until the issuance of these financial statements, the management has not yet made a decision to pay these Value Added and penalties.

The principal amount of CTP loan to BLU Set-BPJT amounting to Rp287,996,699,864 based on the BLU Set-BPJT report on the amount of funds spent on CTP that became part of the release of land for Projects Cibitung-Cilincing Toll Road.

The loan period is until the completion of the land acquisition process by the Ministry of Public Works. Based on this agreement, the Company has to pay an administration fee amounting to Rp25,000,000 and estimated cost of Rp2,880,000,000 in 2013. Once in every three (3) months, CTP will be charged an additional value (interest expense) by BLU Set-BPJT. The interest rate on the additional value is based on the Indonesia Deposit Insurance Corporation ("LPS") interest rate plus 1%.

On March 31, 2016, the CTP withheld payment of interest expense and penalty. This is due to CTP objection to the enactment of the Minister of Public Works Regulation No. 04/PRT/M/2007 dated February 26, 2007 to replace the Regulation No. 23/PRT/M/2014 of the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia dated December 31, 2014, concerning the abolition of Article 8.d for the maximum period of rate hikes starting from the first payment of land compensation is 2 (two) years.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Kementerian PUPR - BLU Set-BPJT (lanjutan)

CTP telah menyampaikan surat keberatan atas berlakunya peraturan Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan surat No. 020/BLU-BPJT/CTP/VI/2015 pada tanggal 1 Juli 2015. Surat tersebut juga telah ditanggapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Layanan Umum No.KU.02.09-PTS/BLU/238 tanggal 29 Juli 2015 dengan menyebutkan bahwa jangka waktu maksimum pengenaan bunga hanya selama 2 tahun tapi sampai proses pengadaan tanah telah selesai dilakukan.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, CTP masih menunggu bentuk penyelesaian pinjaman dari BPJT dan Kementerian Keuangan.

17. OTHER PAYABLES (continued)

Kementerian PUPR - BLU Set-BPJT (continued)

CTP has sent a letter of objection to the enactment of Ministry Public Works regulation based on letter No. 020/BLU-BPJT/CTP/VI/2015 dated July 1, 2015. The Ministry of Public Works-Public Service Agency has responded to the Company letter through its letter No. KU.02.09-PTS/BLU/238 dated July 29, 2015, by stating that the maximum period of interest rate increase is only for 2 years but until the land acquisition process is completed.

Until the completion date of the consolidated financial statements, CTP is still waiting for the form of loan settlement from BPJT and the Ministry of Finance.

18. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

Rincian pajak dibayar di muka adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 | |
|-------------------------|--|--|---|
| Perusahaan | | | |
| Pajak Pertambahan Nilai | 3.016.076.112 | 1.768.582.700 | <i>The Company Value Added Tax Income taxes</i> |
| Pajak penghasilan | - | 4.912.436.608 | |
| Total | 3.016.076.112 | 6.681.019.308 | Total |

a. Prepaid taxes

Details of prepaid taxes are as follows:

Taksiran tagihan restitusi pajak

Estimated claims for tax refund

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 | | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|------|
| Perusahaan | | | | |
| Pajak penghasilan | | | <i>The Company Income taxes</i> | |
| 2022 | 1.405.648.478 | - | | 2022 |
| 2021 | 4.651.344.161 | - | | 2021 |
| Total | 6.056.992.639 | - | Total | |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN

b. Utang pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|-------------------|--|--|
| Perusahaan | | |
| Pajak penghasilan | | |
| Pasal 4 ayat 2 | 4.975.551 | 14.074.911 |
| Pasal 21 | 1.027.094.572 | 502.492.607 |
| Pasal 23 | 37.694.878 | 3.170.921 |
| PPN Keluaran | 6.448.884 | 11.831.836 |
| Subtotal | <u>1.076.213.885</u> | <u>531.570.275</u> |
| Entitas anak | | |
| Pajak penghasilan | | |
| Pasal 4 ayat 2 | 5.177.003.807 | 1.231.810.056 |
| Pasal 21 | 409.215.083 | 35.461.654 |
| Pasal 23 | 192.958.509 | 3.718.547 |
| Subtotal | <u>5.779.177.399</u> | <u>1.270.990.257</u> |
| Total | <u>6.855.391.284</u> | <u>1.802.560.532</u> |

18. TAXATION

b. Taxes payables

Details of taxes payable are as follows:

The Company
Income taxes
Article 4 (2)
Article 21
Article 23
VAT Out
Subtotal
The Subsidiary
Income taxes
Article 4 (2)
Article 21
Article 23
Subtotal
Total

c. Pajak kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan badan dengan taksiran rugi fiskal adalah sebagai berikut:

c. Current tax

The reconciliation between loss before corporate income tax and estimated tax loss is as follows:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| | 2022 | 2021 | |
| Rugi sebelum pajak badan penghasilan Grup | (419.594.495.922) | (78.295.127.207) | Loss before corporate income tax of the Group |
| Dikurangi: Rugi (laba) sebelum pajak penghasilan entitas anak | (205.796.324.651) | (20.154.268.729) | Less: Loss (income) before income tax of the subsidiary |
| Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan | (213.798.171.271) | (58.140.858.478) | Loss before corporate income tax expenses - the Company |
| Beban pajak penghasilan pada tarif pajak berlaku | (47.035.597.680) | (12.790.988.865) | Income tax expense at the applicable tax rate |
| Pengaruh perbedaan permanen pada tarif pajak berlaku | 33.505.155.846 | 12.783.598.597 | Effect of permanent differences at the applicable tax rate |
| Aset pajak tangguhan yang tidak diakui atas rugi fiskal | 13.530.441.834 | 7.390.268 | Unrecognized deferred tax on fiscal loss |
| Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan | - | - | Income tax expense at the applicable tax rate |
| Manfaat (beban) pajak penghasilan badan - entitas anak | 70.747.437.126 | (214.191.369) | Corporate income tax benefit (expense) - subsidiary |
| Total | <u>70.747.437.126</u> | <u>(214.191.369)</u> | Total |

Grup menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan atas dasar perhitungan sendiri (*self-assessment*).

The Group submits its Annual Corporate Income Tax Return on a self-assessment basis.

Entitas anak mengakui aset pajak tangguhan yang timbul dari akumulasi rugi fiskal.

Subsidiary recognize deferred tax assets arising from the cumulative tax losses.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan

d. *Income tax expense*

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan badan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between loss before corporate income tax multiplied by the applicable tax rate and income tax expense is as follows:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | | |
|---|---|-------------------------|--|
| | 2022 | 2021 | |
| Rugi sebelum pajak penghasilan Grup | (419.594.495.922) | (78.295.127.207) | <i>Loss before corporate income tax of the Group</i> |
| Dikurangi: Rugi (laba) sebelum pajak penghasilan entitas anak | (205.796.324.651) | (20.154.268.729) | <i>Deduct: Loss (income) before income tax of the subsidiary</i> |
| Rugi sebelum pajak penghasilan Perusahaan | (213.798.171.271) | (58.140.858.478) | <i>Loss before income tax of the Company</i> |
| <u>Perbedaan permanen</u> | | | <i>Permanent differences</i> |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan | 151.768.525.790 | 59.084.608.211 | <i>Non-deductible expenses</i> |
| Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final | 527.637.143 | (977.341.860) | <i>Interest income subject to final tax</i> |
| Taksiran rugi fiskal tahun berjalan | (61.502.008.338) | (33.592.127) | <i>Estimated tax loss for the year</i> |
| Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya | | | <i>Cumulative tax losses from previous years</i> |
| Tahun 2021 | - | - | <i>Year 2021</i> |
| Tahun 2020 | (16.909.850.968) | (16.909.850.968) | <i>Year 2020</i> |
| Tahun 2019 | (10.462.209.385) | (10.462.209.385) | <i>Year 2019</i> |
| Tahun 2018 | (7.949.551.747) | (7.949.551.747) | <i>Year 2018</i> |
| Tahun 2017 | - | (25.940.087.757) | <i>Year 2017</i> |
| Taksiran akumulasi rugi fiskal | (96.823.620.438) | (61.295.291.984) | <i>Estimated cumulative tax losses</i> |

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2022 sesuai dengan yang dilaporkan Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Kantor Pajak.

The calculation of corporate income tax for 2022 conforms to the amounts that reported by the Company to Tax Office in its Annual Tax Return.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|--------------------|--|--|
| Bunga | 214.205.259.791 | 52.845.989.816 |
| Pemeliharaan | 21.652.706.653 | 11.340.622.641 |
| Jasa profesional | 7.000.874.283 | 11.120.335.273 |
| Gaji dan tunjangan | 4.613.410.240 | 8.359.731.173 |
| Biaya agensi | - | 1.430.000.000 |
| Lain-lain | 55.596.184 | 22.090.690 |
| Total | 247.527.847.151 | 85.118.769.593 |

19. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

| |
|-----------------------|
| Interest |
| Maintenance |
| Professional fees |
| Salaries and benefits |
| Agency fees |
| Others |
| Total |

20. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|---|--|--|
| Utang bank jangka panjang | 5.404.406.353.365 | 4.610.694.882.165 |
| Bagian lancar | (46.338.642.033) | (23.169.321.017) |
| Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar | 5.358.067.711.332 | 4.587.525.561.148 |

20. BANK LOANS

This account consists of:

| |
|---|
| Long-term bank loans |
| Current portion |
| Long-term bank loans, net of current portion |

| 31 Desember 2022 | Bagian lancar/ Current portion | Bagian jangka panjang/long term portion | Total | December 31, 2022 |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| Pinjaman Bank Sindikasi | | | | Syndicated Bank Loans |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 12.085.465.958 | 1.400.637.982.803 | 1.412.723.448.761 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 11.657.250.100 | 1.339.248.405.130 | 1.350.905.655.230 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT CIMB Niaga Tbk | 8.063.089.101 | 934.373.568.280 | 942.436.657.381 | PT CIMB Niaga Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 7.257.123.860 | 840.964.004.167 | 848.221.128.027 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk | 4.049.708.650 | 469.023.952.141 | 473.073.660.791 | PT Bank Pan Indonesia Tbk |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 1.613.435.992 | 186.953.336.793 | 188.566.772.785 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk |
| PT Bank DKI | 1.612.568.372 | 186.866.462.018 | 188.479.030.390 | PT Bank DKI |
| Subtotal | 46.338.642.033 | 5.358.067.711.332 | 5.404.406.353.365 | Sub-total |
| | | | | |
| 31 Desember 2021 | Bagian lancar/ Current portion | Bagian jangka panjang/long term portion | Total | December 31, 2021 |
| Pinjaman Bank Sindikasi | | | | Syndicated Bank Loans |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 5.828.625.050 | 1.154.067.759.872 | 1.159.896.384.922 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT CIMB Niaga Tbk | 4.031.544.551 | 798.245.821.036 | 802.277.365.587 | PT CIMB Niaga Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 3.628.561.930 | 718.455.262.088 | 722.083.824.018 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 6.042.732.979 | 1.196.461.129.788 | 1.202.503.862.767 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk | 2.024.854.325 | 400.921.156.414 | 402.946.010.739 | PT Bank Pan Indonesia Tbk |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 806.717.996 | 159.730.163.163 | 160.536.881.159 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk |
| PT Bank DKI | 806.284.186 | 159.644.268.787 | 160.450.552.973 | PT Bank DKI |
| Subtotal | 23.169.321.017 | 4.587.525.561.148 | 4.610.694.882.165 | Sub-total |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG BANK (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

20. BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

| Fasilitas pinjaman/ Credit facility | Kreditur/ Creditor | Jadwal pembayaran/ Repayment schedule | Jangka waktu (tahun)/ Period (year) | Tingkat bunga/ Interest rates | Jaminan/ Collateral |
|--|--|---|--|---|---|
| Pinjaman bank sindikasi/ Syndicated loan | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Beberapa cicilan/Several installment (2019-2034) | 15 | Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.80%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9.00%) Tranche A operation period ATD+3.90% (min equiv. 6.55%) Tranche B operation Period ATD+5.94% (min equiv. 9.00%) | Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API./This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API. |
| Pinjaman bank sindikasi/ Syndicated loan | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Beberapa cicilan/Several installment (2019-2034) | 15 | Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.80%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9.00%) Tranche A operation period ATD+3.90% (min equiv. 6.55%) Tranche B operation Period ATD+5.94% (min equiv. 9.00%) | Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API./This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API. |
| Pinjaman bank sindikasi/ Syndicated loan | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Beberapa cicilan/Several installment (2019-2034) | 15 | Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.80%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9.00%) Tranche A operation period ATD+3.90% (min equiv. 6.55%) Tranche B operation Period ATD+5.94% (min equiv. 9.00%) | Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API./This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API. |
| Pinjaman bank sindikasi/ Syndicated loan | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Beberapa cicilan/Several installment (2019-2034) | 15 | Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.80%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9.00%) Tranche A operation period ATD+3.90% (min equiv. 6.55%) Tranche B operation Period ATD+5.94% (min equiv. 9.00%) | Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API./This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API. |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. UTANG BANK (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2022 and 2021 are as follows: (continued)

| Fasilitas pinjaman/ <i>Credit facility</i> | Kreditur/ <i>Creditor</i> | Jadwal pembayaran/ <i>Repayment schedule</i> | Jangka waktu (tahun)/ <i>Period (year)</i> | Tingkat bunga/ <i>Interest rates</i> | Jaminan/ <i>Collateral</i> |
|---|--|--|---|--|---|
| Pinjaman bank sindikasi/ <i>Syndicated loan</i> | PT Bank Pan Indonesia Tbk | Beberapa cicilan/ <i>Several installment</i> (2019-2034) | 15 | <i>Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.80%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9.00%) Tranche A operation period ATD+3.90% (min equiv. 6.55%) Tranche B operation Period ATD+5.94% (min equiv. 9.00%)</i> | Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API./This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API. |
| Pinjaman bank sindikasi/ <i>Syndicated loan</i> | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Beberapa cicilan/ <i>Several installment</i> (2019-2036) | 15 | <i>Reference Rate + Margin Eqv 10.50% untuk Tranche A1 dan A2 , dan Reference Rate + Margin eqv 12.50% untuk tranche B Tranche A operation period ATD+3.90% (min equiv. 6.55%) Tranche B operation Period ATD+5.94% (min equiv. 9.00%)</i> | Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API./This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API. |
| Pinjaman bank sindikasi/ <i>Syndicated loan</i> | PT Bank DKI | Beberapa cicilan/ <i>Several installment</i> (2019-2036) | 15 | <i>Reference Rate + Margin Eqv 10.50% untuk Tranche A1 dan A2 , dan Reference Rate + Margin eqv 12.50% untuk tranche B. Tranche A operation period ATD+3.90% (min equiv. 6.55%) Tranche B operation Period ATD+5.94% (min equiv. 9.00%)</i> | Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API./This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API. |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|---|--|--|
| Pihak berelasi (Catatan 32) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | 1.160.435.133.273 | 949.751.736.046 |
| Pihak ketiga PT Indonesia Infrastructure Finance | 584.328.132.605 | 476.290.918.577 |
| Total | 1.744.763.265.878 | 1.426.042.654.623 |

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No.30 tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta. CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan lainnya.

Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi CTP untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan memiliki limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp7.404.162.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate + Margin eqv. 10,50%* untuk tranche A1 dan A2, dan *Reference Rate + Margin eqv. 12,50%* untuk tranche B yang bersifat Subordinasi.

Berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Penundukan Diri tertanggal 22 Oktober 2019, dinyatakan bahwa PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") selaku kreditur baru telah bergabung dengan pola *incremental option* dan telah menjadi salah satu kreditur untuk fasilitas tranche B dalam Perjanjian Kredit dengan limit pinjaman Rp521.248.000.000.

Pada tanggal 17 Desember 2019, para pihak sepakat untuk merubah limit fasilitas kredit investasi menjadi sebesar Rp7.321.248.000.

21. LOANS FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION

This account consists of:

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|---|--|--|
| Related party (Note 32) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | 1.160.435.133.273 | 949.751.736.046 |
| Third party PT Indonesia Infrastructure Finance | 584.328.132.605 | 476.290.918.577 |
| Total | 1.744.763.265.878 | 1.426.042.654.623 |

Based on the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 45 dated December 21, 2018 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta which was restated based on the deed of Restatement of the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No.30 dated February 26, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta. CTP entered into a Loan Syndicated with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk and other banking financial institution.

In accordance with the decision of the Syndicated Creditor for participation in the syndicated financing of CTP for the purpose of development financing investment has an Investment Credit facility limit of Rp7,404,162,000,000 with a maximum period of 180 months from the Signing of the Credit Agreement including *Grace Period* with the construction interest rate is the *Reference Rate + Margin eqv. 10.50%* for tranche A1 and A2, and the *Reference Rate + Margin eqv. 12.50%* for tranche B which is Subordinated.

Based on the Notification of Self-Submission Statement dated October 22, 2019, it was stated that PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") as a new creditor had joined the incremental option pattern and had become one of the creditors for tranche B facilities in the Credit Agreement with a loan limit of Rp521,248,000,000.

On December 17, 2019, the parties agreed to change the investment credit facility limit to Rp7,321,248,000.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK
(lanjutan)**

Berdasarkan surat Agen Fasilitas nomor SSK/3.2/4425 tanggal 29 Desember 2021 perihal Penyesuaian Keputusan Para Kreditor Sindikasi atas Permohonan Penyesuaian Ketentuan Fasilitas Kredit CTP, terdapat penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit sebagai berikut:

- Tranche A masa konstruksi dari ATD+4,94% (equiv. 7,48%) menjadi ATD+4,15% (min equiv. sebesar 6,8%) masa operasi dari ATD+4,69% (equiv 7,23%) menjadi ATD+3,90% (min equiv. sebesar 6,55%)
- Tranche B masa konstruksi dari ATD+6,94% (equiv.9,48%) menjadi ATD+6,19% (min equiv. sebesar 9%) masa operasi dari ATD+6,69% (equiv. 9,23%) menjadi ATD+5,94% (min equiv. sebesar 9%)

Berdasarkan surat Agen Fasilitas nomor SSK/3.2/1528 tanggal 9 Juni 2022, perihal Perubahan Masa Penarikan Fasilitas Kredit CTP, para pihak sepakat untuk mengubah jangka waktu penarikan *Tranche A* dan *B* menjadi sampai dengan tanggal 30 September 2023 (57 bulan sejak tanggal perjanjian ini) atau paling lambat 9 bulan sejak tanggal pengoperasian keseluruhan proyek, mana yang lebih dulu terjadi.

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan kerja neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas imbalan kerja berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuarial Nandi dan Sutama.

Asumsi aktuarial utama yang digunakan aktuaris independen yang memenuhi syarat, adalah sebagai berikut:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | |
|--------------------------|--|-------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Usia pensiun normal | 55 tahun/years | 55 tahun/years |
| Tingkat diskonto | 7,00% | 7,57% |
| Tingkat kenaikan gaji | 5,00% | 5,00% |
| Tingkat kematian tahunan | TMI 4 (2019) | TMI 4 (2019) |
| Tingkat kecacatan | 5% x TMI 4 (2019) | 5% x TMI 4 (2019) |
| Tingkat pengunduran diri | 2% pada usia 20-24 dan menurun secara linear menjadi 0% pada usia >50 tahun/ 2% up to age 20-24 and declining linearly upto 0% up to >50 and there after | |

**21. LOANS FROM NON-BANK FINANCIAL
INSTITUTION (continued)**

Based on the Facility Agent's letter number SSK/3.2/4425 dated December 29, 2021 regarding the Adjustment of the Syndicated Creditors' Decision on the Application for Adjustment to CTP's Credit Facility Provisions, there is an adjustment to the interest rate of the credit facility as follows:

- Tranche A construction period from ATD+4.94% (equiv. 7.48%) to ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) operating period from ATD+4.69% (equiv 7.23%) to ATD+3.90% (min equiv. of 6.55%)
- Tranche B construction period from ATD+6.94% (equiv.9.48%) to ATD+6.19% (min equiv. 9%) operating period from ATD+6.69% (equiv. 9.23%) to ATD+5.94% (min equiv. of 9%)

Based on the Facility Agent's letter number SSK/3.2/1528 dated June 9, 2022, regarding Changes to the Withdrawal Period of the CTP Credit Facility, the parties agreed to amend the withdrawal period for *Tranche A* and *B* until September 30, 2023 (57 months from the date of this agreement) or no later than 9 months from the date of the operation of the entire project, whichever occurs first.

22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The following tables summarize the components of employee benefits expense recognized in the statement of profit of loss and other comprehensive income the amounts recognized in the statement of financial position employee benefits liability as determined by an as independent actuary Kantor Konsultan Aktuarial Nandi dan Sutama.

The principal actuarial assumptions used by the independent qualified actuaries, are as follows:

Normal retirement age
Discount rate
Salary increment rate
Annual mortality rate
Disability rate
Turnover rate

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|------------------------------------|--|--|
| Nilai kini kewajiban imbalan pasti | 844.660.079 | 770.058.532 |
| Imbalan jangka panjang lainnya | 54.405.203 | 46.602.424 |
| Total | 899.065.282 | 816.660.956 |

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

Nilai kini kewajiban imbalan pasti

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|--|--|--|
| Saldo awal tahun | 770.058.532 | 631.064.134 |
| Biaya jasa kini | 299.811.004 | 316.903.346 |
| Biaya bunga | 53.604.972 | 44.178.489 |
| Biaya jasa lalu | - | 16.285.653 |
| Penyesuaian atas perubahan metode | (70.804.782) | - |
| Pengukuran Kembali | (216.879.713) | (238.373.090) |
| Penyesuaian atas perubahan metode atribusi | 8.870.066 | - |
| Nilai kini kewajiban imbalan pasti | 844.660.079 | 770.058.532 |

Nilai kini imbalan jangka panjang lainnya

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|---|--|--|
| Saldo awal tahun | 46.602.424 | 65.853.083 |
| Biaya jasa kini | 16.809.385 | 17.945.845 |
| Biaya bunga | 3.527.803 | 4.609.715 |
| Pengukuran Kembali | (12.534.409) | (41.806.219) |
| Nilai kini kewajiban imbalan pasti | 54.405.203 | 46.602.424 |

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba - rugi adalah:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | |
|-----------------|---|--------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Biaya jasa kini | 316.620.389 | 334.849.191 |
| Biaya jasa lalu | - | 16.285.653 |
| Biaya bunga | 57.132.775 | 48.784.204 |
| Total | 373.753.164 | 399.919.048 |

22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

The amounts recognized in the statement of financial position are determined as follows:

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|------------------------------------|--|--|
| Nilai kini kewajiban imbalan pasti | 844.660.079 | 770.058.532 |
| Imbalan jangka panjang lainnya | 54.405.203 | 46.602.424 |
| Total | 899.065.282 | 816.660.956 |

The amounts recognized in the statement of financial position are determined as follows:

Present value defined benefit obligation

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|--|--|--|
| Saldo awal tahun | 770.058.532 | 631.064.134 |
| Biaya jasa kini | 299.811.004 | 316.903.346 |
| Biaya bunga | 53.604.972 | 44.178.489 |
| Biaya jasa lalu | - | 16.285.653 |
| Penyesuaian atas perubahan metode | (70.804.782) | - |
| Pengukuran Kembali | (216.879.713) | (238.373.090) |
| Penyesuaian atas perubahan metode atribusi | 8.870.066 | - |
| Nilai kini kewajiban imbalan pasti | 844.660.079 | 770.058.532 |

Present value other long-term employee benefits

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|---|--|--|
| Saldo awal tahun | 46.602.424 | 65.853.083 |
| Biaya jasa kini | 16.809.385 | 17.945.845 |
| Biaya bunga | 3.527.803 | 4.609.715 |
| Pengukuran Kembali | (12.534.409) | (41.806.219) |
| Nilai kini kewajiban imbalan pasti | 54.405.203 | 46.602.424 |

The amounts recognized in profit or loss in respect of employee benefits are as follows:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | |
|-----------------|---|--------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Biaya jasa kini | 316.620.389 | 334.849.191 |
| Biaya jasa lalu | - | 16.285.653 |
| Biaya bunga | 57.132.775 | 48.784.204 |
| Total | 373.753.164 | 399.919.048 |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

| | <u>1% Kenaikan/ 1% Increase</u> | <u>1% Penurunan 1% Decrease</u> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tingkat diskonto | | |
| Nilai kini liabilitas imbalan kerja | (66.347.842) | 73.700.014 |
| Biaya jasa kini | (19.238.447) | 21.272.551 |
| Tingkat kenaikan gaji | | |
| Nilai kini liabilitas imbalan kerja | 18.154.458 | (63.258.285) |
| Biaya jasa kini | 19.844.042 | (18.313.363) |

Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja karyawan telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

| | <u>2022</u> |
|-------------------------|---------------|
| Lebih dari 1 - 2 tahun | 35.004.375 |
| Lebih dari 2 - 5 tahun | 1.226.787.742 |
| Lebih dari 5 - 10 tahun | 1.235.439.008 |
| Lebih dari 10 tahun | 3.916.621.426 |

23. PROVISI JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan provisi atas pemeliharaan jalan tol terkait penerapan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa (Catatan 11).

24. MODAL SAHAM

Susunan kepemilikan saham pada Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| <u>Pemegang saham</u> | <u>Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid</u> | <u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u> | <u>Total nilai nominal/ Total nominal amount</u> | <u>Shareholders</u> |
|----------------------------|---|--|--|----------------------------|
| PSL | 184.190.000 | 99,79% | 1.841.900.000.000 | PSL |
| PT Pelabuhan Tanjung Priok | 386.000 | 0,21% | 3.860.000.000 | PT Pelabuhan Tanjung Priok |
| Total | 184.576.000 | 100,00% | 1.845.760.000.000 | Total |

22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2022 is as follows:

| | <u>1% Kenaikan/ 1% Increase</u> | <u>1% Penurunan 1% Decrease</u> | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | Discount rate |
| Nilai kini liabilitas imbalan kerja | (66.347.842) | 73.700.014 | <i>Present value of benefit liability</i> |
| Biaya jasa kini | (19.238.447) | 21.272.551 | <i>Current service cost</i> |
| | | | Salary increase rate |
| Nilai kini liabilitas imbalan kerja | 18.154.458 | (63.258.285) | <i>Present value of benefit liability</i> |
| Biaya jasa kini | 19.844.042 | (18.313.363) | <i>Current service cost</i> |

Management believes that the employee benefits liability is sufficient in accordance with the requirements of the Labor Law.

The maturity of defined benefits obligations as of December 31, 2022 are as follows:

| | <u>2022</u> | |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| Lebih dari 1 - 2 tahun | 35.004.375 | <i>Maturity 1 - 2 year</i> |
| Lebih dari 2 - 5 tahun | 1.226.787.742 | <i>Maturity 2 - 5 years</i> |
| Lebih dari 5 - 10 tahun | 1.235.439.008 | <i>Maturity 5 - 10 years</i> |
| Lebih dari 10 tahun | 3.916.621.426 | <i>Maturity > 10 years</i> |

23. LONG-TERM PROVISION

This account represents provision for toll road maintenance related to the application of ISAK 16 concerning Concession Right (Note 11).

24. CAPITAL STOCK

The composition of shares ownership in the Company as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

| <u>Pemegang saham</u> | <u>Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid</u> | <u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u> | <u>Total nilai nominal/ Total nominal amount</u> | <u>Shareholders</u> |
|----------------------------|---|--|--|----------------------------|
| PSL | 184.190.000 | 99,79% | 1.841.900.000.000 | PSL |
| PT Pelabuhan Tanjung Priok | 386.000 | 0,21% | 3.860.000.000 | PT Pelabuhan Tanjung Priok |
| Total | 184.576.000 | 100,00% | 1.845.760.000.000 | Total |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

24. MODAL SAHAM

Berdasarkan akta pendiriannya, modal dasar Perusahaan sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 per saham, serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp125.000.000 dimana PSL dan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) masing-masing mengambil bagian sebesar Rp123.750.000 dan Rp1.250.000 atau mewakili 99% dan 1% kepemilikan saham.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000.000 yang diambil bagian oleh PSL dan PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000.000 dan Rp3.860.000.000. Akta ini telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019.

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 5 November 2020 dari Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp3.200.000.000.000 yang terbagi atas 320.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000. Akta ini telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0406722 tanggal 12 November 2020.

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 12 November 2021 dari Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia melakukan penambahan setoran modal sebesar Rp1.040.000.000.000 yang terbagi atas 104.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0472965 tanggal 15 November 2021.

24. CAPITAL STOCK

Based on its deed of establishment, the Company's authorized capital is Rp500,000,000 which is divided into 50,000 shares with a nominal amount of Rp10,000 per share, and issued and fully-paid capital of Rp125,000,000 in which PSL and PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) subscribed the shares amounting to Rp123,750,000 and Rp1,250,000 or represent 99% and 1% share ownership, respectively.

Based on Deed No. 26 dated December 28, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased the issued and fully paid capital to Rp805,760,000,000 which was subscribed by PSL and PTP amounting to Rp801,900,000,000 and Rp3,860,000,000, respectively. The deed has been acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Receipt No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019.

Based on Deed No. 1 dated November 5, 2020 from Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased its authorized capital to Rp3,200,000,000,000 which is divided into 320,000,000 shares with a nominal value of Rp10,000. The deed has been acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Receipt No. AHU-AH.01.03-0406722 dated November 12, 2020.

Based on Deed No. 9 dated November 12, 2021 from Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia increased its authorized capital amounting to Rp1,040,000,000,000 which is divided into 104,000,000 shares with a nominal value of Rp10,000. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Receipt No. AHU-AH.01.03-0472965 dated November 15, 2021.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Desember 2021, tambahan modal disetor merupakan selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar Rp1.203.895.262.412 atas transaksi penambahan kepemilikan saham di CTP (Catatan 1c).

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

As of December 31, 2021, additional paid-in capital represents difference in value of business combination transaction of entities under common control amounting to Rp1,203,895,262,412 arising from additional shares ownership in CTP (Note 1c).

26. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan kompensasi untuk jasa yang diakui oleh Grup dalam pembangunan jalan tol baru dan peningkatan kapasitas jalan tol. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode *cost* yang mana seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tambahan tanpa margin tertentu.

26. REVENUE AND CONSTRUCTION EXPENSE

Construction revenue is the compensation of the service recognised by the Group for building new toll roads and to upgrade toll roads capacity. Construction revenue measured using cost method, which specified no margin added up to all cost directly attributable to acquire the assets.

27. PENDAPATAN JALAN TOL

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian jalan tol Cibitung-Tanjung Priok atas seksi yang telah beroperasi.

27. TOLL ROAD REVENUE

This account represents revenue earned from the operation of the Cibitung-Tanjung Priok toll road for the operated section.

28. BEBAN LANGSUNG OPERASIONAL JALAN TOL

Akun ini terdiri dari:

28. TOLL ROAD OPERATIONAL DIRECT EXPENSES

This account consists of:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | | |
|--|---|-----------------------|--|
| | 2022 | 2021 | |
| Pengumpulan tol | 8.487.901.774 | 3.239.935.204 | Toll road collection |
| Manajemen lalu lintas tol | 5.526.797.574 | 3.496.722.875 | Toll road traffic maintenance |
| Amortisasi aset hak pengusahaan jalan tol (Catatan 11) | 3.361.369.489 | - | Amortization of toll road concession rights assets (Note 11) |
| Administrasi dan umum | 3.215.769.088 | 4.603.964.561 | General and administration |
| Provisi pelapisan ulang jalan tol | 2.273.680.783 | - | Provision for toll road overlay |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 1.753.695.101 | - | Repairs and maintenance |
| Lain-lain | 153.682.000 | - | Others |
| Total | 24.772.895.809 | 11.340.622.640 | Total |

29. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2022, akun ini terutama merupakan penerimaan uang ganti rugi dari Pelindo atas pengurusan dokumen legalitas pembangunan jalan akses timur Kalibaru.

29. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)

As of December 31, 2022, this account mainly represents receipts of compensation/reimbursement from Pelindo for the processing of legality documents for the construction of the East Kalibaru access road.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Gaji dan tunjangan | 24.557.919.063 | 17.205.876.302 |
| Jasa profesional | 4.237.623.397 | 12.973.200.951 |
| Administrasi kantor | 2.961.764.057 | 346.586.603 |
| Pemeliharaan kantor | 2.639.114.200 | 270.525.562 |
| Penyusutan aset hak guna (Note 12) | 2.338.501.019 | 847.140.938 |
| Listrik, air dan komunikasi | 1.515.821.933 | 253.786.437 |
| Sewa | 1.329.005.242 | - |
| Kerjasama mitra usaha | 1.232.953.481 | 876.959.379 |
| Perjalanan dinas | 1.097.712.739 | 408.003.168 |
| Asuransi | 1.044.891.957 | 267.141.518 |
| Biaya subkontraktor | 739.729.853 | - |
| Penyusutan (Catatan 10) | 539.311.777 | 58.845.197 |
| Pelatihan dan pengembangan | 100.162.347 | 585.136.258 |
| Bahan bakar | 93.386.264 | 36.155.400 |
| Lain-lain | 470.866.553 | - |
| Total | 44.898.763.882 | 34.129.357.713 |

30. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

| |
|---|
| Salaries and benefits |
| Professional fees |
| Office administration |
| Office maintenance |
| Depreciation of right-of-use assets (Note 12) |
| Electricity, water and communication |
| Rent |
| Partnership |
| Travel |
| Insurance |
| Subcontractor fees |
| Depreciation (Note 10) |
| Training and development |
| Fuel |
| Others |
| Total |

31. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Pendapatan keuangan | | |
| Jasa giro | 433.820.322 | 1.609.734.400 |
| Bunga deposito berjangka | 6.007.164.452 | 960.041.040 |
| Total | 6.440.984.774 | 2.569.775.440 |
| Beban keuangan | | |
| Bunga pinjaman | 419.069.987.043 | 48.280.606.901 |
| Bunga aset sewaan | 297.945.645 | 45.520.011 |
| Biaya administrasi bank | 24.092.430 | 3.117.827 |
| Lain-lain | 113.684.039 | - |
| Total | 419.505.709.157 | 48.329.244.739 |

31. FINANCE INCOME AND COSTS

| |
|------------------------------|
| Finance income |
| Interest on current accounts |
| Interest on time deposits |
| Total |
| Finance costs |
| Interest on loans |
| Lease interest |
| Bank charges |
| Others |
| Total |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

32. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the ordinary course of business, the Group engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:

| Sifat relasi/ Nature of relationship | Nama pihak berelasi/ Name of related party | Jenis transaksi/ Nature of transaction |
|---|--|--|
| Entitas induk pemegang saham /Parent Company shareholders | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | Utang lain-lain (Catatan 17), beban akrual (Catatan 19), beban keuangan (Catatan 31)/ Other payables (Note 17), accrued expenses (Note 19), finance cost (Note 31) |
| Entitas induk/Parent | PSL | Pinjaman (Catatan 15), biaya kantor/ Loans (Note 15), office expenses |
| Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia/Entity under common control of the Government of the Republic of Indonesia | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Jasa perbankan dan pinjaman/ Banking services and loans |
| | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Jasa perbankan dan pinjaman/ Banking services and loans |
| | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Jasa perbankan dan pinjaman/ Banking services and loans |
| | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Jasa perbankan dan pinjaman/ Banking services and loans |
| | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Pembelian barang dan jasa/ Purchase of goods and services |
| | PT Waskita Beton Precast (Persero) Tbk | Pembelian barang dan jasa/ Purchase of goods and services |
| | PT Jasamarga Tollroad Maintenance | Pembelian jasa/Purchase of services |
| | PT Virama Karya (Persero) | Pembelian jasa/Purchase of services |
| | PT Waskita Toll Road | Pemberian pinjaman/Provision of loan |
| | Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) | Piutang lain-lain (Catatan 8), Utang lain-lain (Catatan 17)/ Other receivables (Note 8), Other payables (Note 17) |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Utang lain-lain (Catatan 17) /Other payables (Note 17) | |
| PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | Pinjaman/Availment of loan | |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman dengan
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No. KS.01/8/10/1/MNKS/UTMA/PLND-21 dan No. HK.566/10/29/01/API-2021 tanggal 8 Oktober 2021 antara Perusahaan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo"), Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp3.372.500.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama pinjaman.

Pada tanggal 14 Oktober 2021, Perusahaan dan Pelindo telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Fasilitas Pinjaman *Intercompany Loan* ("ICL") sebesar Rp2.680.381.070.000.

Pada tanggal 8 April 2022, Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman ICL yang kedua. Kemudian, pada tanggal 19 April 2022, Perusahaan menerima pencairan Fasilitas Pinjaman ICL tersebut sebesar Rp275.000.000.000.

Pada tanggal 10 Mei 2022, Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman ICL yang ketiga. Kemudian, pada tanggal 17 Mei 2022, Perusahaan menerima pencairan Fasilitas Pinjaman ICL tersebut sebesar Rp400.000.000.000.

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perusahaan dan Pelindo telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pelunasan Sebagian Fasilitas Pinjaman ICL dengan nilai pokok sebesar Rp521.561.379.175 dan dengan nilai bunga sebesar Rp28.438.620.825.

Pada tanggal 29 November 2022, Perusahaan dan Pelindo telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pelunasan Sebagian Fasilitas Pinjaman ICL dengan nilai pokok sebesar Rp94.829.341.668 dan dengan nilai bunga sebesar Rp5.170.658.332.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo utang pihak berelasi masing-masing sebesar Rp2.738.990.349.157 dan Rp2.680.381.070.000.

**32. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Agreement of Loan Facility with PT Pelabuhan
Indonesia (Persero)**

Based on the Loan Facility Agreement No. KS.01/8/10/1/MNKS/UTMA/PLND-21 and No. HK.566/10/29/01/API-2021 dated October 8, 2021 between the Company and PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo"), the Company obtained a loan facility amounted to Rp3,372,500,000,000. The loan period is 5 (five) years or 60 (sixty) months starting from the date of the first drawdown of the loan.

On October 14, 2021, the Company and Pelindo signed the minutes of handover of the *Intercompany Loan* ("ICL") facility amounted to Rp2,680,381,070,000.

On April 8, 2022, the Company submitted a second *Application for Disbursement of the ICL Facility*. Then, on April 19, 2022, the Company received the disbursement of the ICL Facility amounted to Rp275,000,000,000.

On May 10, 2022, the Company submitted the third *Application for Disbursement of the ICL Facility*. Then, on May 17, 2022, the Company received the disbursement of the ICL Facility amounted to Rp400,000,000,000.

On October 31, 2022, the Company and Pelindo signed the *Minutes of Handover of Partial Redemption of the ICL Facility* with a principal amount of Rp521,561,379,175 and an interest rate amounted to Rp28,438,620,825.

On November 29, 2022, the Company and Pelindo signed the *Minutes of Handover of Partial Redemption of the ICL Facility* with a principal amount of Rp94,829,341,668 and an interest rate of Rp5,170,658,332.

As of December 31, 2022 and 2021, due to related parties amounting to Rp2,738,990,349,157 and Rp2,680,381,070,000, respectively.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai tercatat instrumen keuangan merefleksikan nilai wajarnya. Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

a. Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang termasuk kas dan setara kas, piutang lain-lain, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas sewa dan pinjaman jangka pendek. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya.

b. Aset keuangan jangka panjang:

Nilai wajar dari aset keuangan jangka panjang, diasumsikan sama dengan nilai tunai yang akan diterima karena saat jatuh temponya tidak dinyatakan dalam kontrak-kontrak terkait, sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan kapan aset keuangan jangka panjang tersebut akan direalisasi dan dilunasi termasuk uang jaminan dan investasi pada entitas asosiasi.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.
- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.

33. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The carrying amounts of financial instruments reflect the estimated fair value. Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current arm's length transaction between knowledgeable willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

The methods and assumptions used to estimate the fair value of financial instruments are as follow:

a. *Short-term financial assets and liabilities:*

Short-term financial instruments with maturities of one year or less includes cash and cash equivalents, other receivables, security deposits, other payables, accrued expenses, lease liabilities and short-term loans. The fair values of these financial instruments are approximately the same with their carrying amounts.

b. *Long-term financial assets:*

The fair values of non-current financial assets are assumed to be the same as the cash amount that will be received to the fact that their maturities are not stated in the related contracts, therefore it is not possible to determine when the financial assets will be realized and settled includes guarantee deposits and investment in associate.

Fair value estimation is judgmental and involved various boundaries, including:

- *Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.*
- *Fair value estimation are not always indicating value that the Group will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.*
- *Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk: (lanjutan)

- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

Selain aset dan liabilitas keuangan yang disebutkan di atas, Grup tidak mempunyai aset dan liabilitas lain yang diukur dan disajikan pada nilai wajar, oleh karena itu, Grup tidak menyajikan hirarki nilai wajar sesuai PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar".

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Grup adalah risiko likuiditas, risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Grup.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

**33. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

*Fair value estimation is judgmental and involved various boundaries, including:
(continued)*

- Level 2 : *Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*
- Level 3 : *Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

Other than financial assets and financial liabilities mentioned above, the Group does not have other assets or liabilities measured and disclosed at fair value, therefore the Grup does not present fair value hierarchy under PSAK 68 "Fair Value Measurements"

34 FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Group's financial instruments are liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk. The operational activities of the Group are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalent deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan.

31 Desember 2022/December 31, 2022

| | Kurang dari 1 tahun/ Below 1 year | 1-3 tahun/ 1-3 years | 3-5 tahun/ 3-5 years | Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years | Total/ Total | |
|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--|
| Pinjaman bank jangka pendek | 103.106.529.338 | - | - | - | 103.106.529.338 | Short-term bank loan |
| Utang usaha | 962.881.585.340 | - | - | - | 962.881.585.340 | Trade payables |
| Utang lain-lain | 653.975.694.400 | 464.538.398.153 | 2.738.990.349.157 | - | 3.857.504.441.710 | Other payables |
| Beban akrual | 247.527.847.151 | - | - | - | 247.527.847.151 | Accrued expenses |
| Liabilitas sewa | 2.776.600.634 | 3.107.353.410 | - | - | 5.883.954.044 | Lease liabilities |
| Utang bank | 46.338.642.033 | 139.015.926.096 | 278.031.852.192 | 4.941.019.933.044 | 5.404.406.353.365 | Bank loans |
| Utang lembaga keuangan non-bank | - | - | - | 1.744.763.265.878 | 1.744.763.265.878 | Loans from non-bank financial institution |
| Total | 2.016.606.898.896 | 606.661.677.659 | 3.017.022.201.349 | 6.685.783.198.922 | 12.326.073.976.826 | Total |

31 Desember 2021/December 31, 2021

| | Kurang dari 1 tahun/ Below 1 year | 1-3 tahun/ 1-3 years | 3-5 tahun/ 3-5 years | Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years | Total/ Total | |
|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--|
| Pinjaman bank jangka pendek | 133.296.919.362 | - | - | - | 133.296.919.362 | Short-term bank loan |
| Utang usaha | 1.105.578.227.303 | - | - | - | 1.105.578.227.303 | Trade payables |
| Utang lain-lain | 63.902.507 | 466.538.398.153 | 2.680.381.070.000 | - | 3.146.983.370.660 | Other payables |
| Beban akrual | 85.118.769.593 | - | - | - | 85.118.769.593 | Accrued expenses |
| Liabilitas sewa | 903.986.644 | 1.364.347.778 | - | - | 2.268.334.422 | Lease liabilities |
| Utang bank | 23.169.321.017 | 92.677.284.064 | 92.677.284.064 | 4.402.170.993.020 | 4.610.694.882.165 | Bank loans |
| Utang lembaga keuangan non-bank | - | - | - | 1.426.042.654.623 | 1.426.042.654.623 | Loans from non-bank financial institution |
| Total | 1.348.131.126.426 | 560.580.029.995 | 2.773.058.354.064 | 5.828.213.647.643 | 10.509.983.158.128 | Total |

Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Grup tidak memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya karena tidak ada saldo dan transaksi mata uang asing.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap risiko suku bunga terutama terkait dengan kas.

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap rugi setelah pajak dengan semua variabel lain tetap:

| | Dampak/Effect | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| Kenaikan 100 basis poin | 4.195.057.092 | 100 basis points increase |
| Penurunan 100 basis poin | (4.195.057.092) | 100 basis points decrease |

**34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity risk (continued)

The table below summarizes the maturity profile of financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

Foreign exchange risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value of future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's doesn't have any exposure to the foreign exchange risk arising from their operational transactions as there is no foreign exchange balance and transactions.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group's exposure to the interest rate risk relates primarily to cash and cash equivalent.

Effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to loss after tax with all other variables constant:

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Manajemen permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

35. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas Grup adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 |
|--|--|
| Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa | 5.883.954.044 |

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

| | 1 Januari 2022/ January 1, 2022 | Arus kas/ Cash flow | Non-arus kas/Non-cash flow | | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | | | Pengakuan bunga/ Interest recognition | Lainnya/ Others | | |
| Utang lain-lain | (863.039.641.629) | (189.802.583.529) | - | - | (1.052.842.225.158) | Short-term loans |
| Liabilitas sewa | 1.460.487.967 | (2.579.332.832) | 747.424.200 | 6.255.374.709 | 5.883.954.044 | Lease liabilities |
| Utang bank | 4.743.991.801.527 | 1.089.262.761.438 | - | (325.741.680.262) | 5.507.512.882.703 | Bank loans |
| Utang lembaga keuangan non-bank | 1.426.042.654.623 | 318.720.611.255 | - | - | 1.744.763.265.878 | Loans from non-bank financial institution |

**34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Capital management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its businesses and to maximize the shareholders' value.

The Group manages its capital structures and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structures, the Group may adjust dividend payments to the shareholders, issue new shares or raise debt financing.

35. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Significant activities which did not affect the Group's cash flows are as follows:

| | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 |
|---|--|
| Addition of right-of-use assets through lease liabilities | 2.274.915.463 |

Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Entitas anak

Perjanjian Konsesi Jalan Tol Cibitung-Cilincing

Pada tanggal 29 Januari 2007, CTP menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Cibitung-Cilincing No. 01/PPJT/I/Mn/2007 dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perjanjian tersebut telah diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cibitung-Cilincing antara CTP dan Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") dari notaris Rina Utami Djauhari, S.H., notaris di Jakarta, No. 10 tanggal 15 Agustus 2021. Perjanjian telah beberapa kali diAmendemen, terakhir berdasarkan Akta No. 3 tanggal 8 Desember 2020 dari Rina Utami Djauhari, Notaris di Jakarta, tentang Amendemen X Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Berdasarkan perjanjian tersebut CTP bertanggung jawab untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan perundangan-undangan. Jangka waktu perjanjian konsesi adalah 50 (lima puluh) tahun sejak Surat Perintah Mulai Kerja ("SPMK") tanggal 23 November 2018. Setelah berakhirnya masa konsesi, CTP harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT dalam kondisi terpelihara baik.

Pada 8 Desember 2020, perjanjian ini telah mengalami perubahan. Para pihak sepakat untuk meningkatkan total estimasi biaya pengadaan lahan menjadi Rp4.560.709.011.223.

Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

CTP menunjuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian No. 007/KONTRAK/WK-CTP/VII/2017 sebagai kontraktor pembangunan jalan tol Cibitung - Cilincing dengan nilai kontrak Rp5.591.934.626.000 (termasuk PPN).

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Subsidiary

Concession Agreement of Toll Road Cibitung-Cilincing

On January 29, 2007, CTP entered into Operation Agreement of Cibitung - Cilincing Toll Road No. 01/PPJT/I/Mn/2007 with the Government of Indonesia through Ministry of General Works and Public Housing. The agreement has been amended and restated through Deed of Operation Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road between CTP and Toll Road Regulatory Body ("BPJT") from notary Rina Utami Djauhari, S.H., notary in Jakarta, No. 10 dated August 15, 2021. The agreement has been amended several times, lastly based on Deed No. 3 dated December 8, 2020 from Rina Utami Djauhari, Notary in Jakarta, regarding Amendment X of Operation Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road.

Based on the agreement, CTP is responsible for implementing the toll road operation, including funding, technical planning, construction, operation, and maintenance by the terms of the agreement and laws and regulations. The Term of the concession agreement is 50 (fifty) years since the issuance of the Instruction Letter of Work Commencement ("SPMK") dated November 23, 2018. After the end of the concession period, CTP should transfer the toll road to BPJT in a well-maintained condition.

On December 8, 2020, this agreement has been amended. Both parties agreed to increase the total estimated cost of land acquisition to become Rp4,560,709,011,223.

Construction Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

CTP appointed PT Waskita Karya (Persero) Tbk based on Agreement No. 007/KONTRAK/WK-CTP/VII/2017 as a construction contractor for the Cibitung - Cilincing toll road with a contract value of Rp5,591,934,626,000 (including VAT).

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (lanjutan)

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (lanjutan)

Perjanjian ini telah mengalami beberapa addendum dengan addendum yang terakhir yaitu addendum XV pada tanggal 30 September 2021 dengan nilai kontrak Rp8.638.699.442.000 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai dari tanggal ditandatangani kontrak yakni 7 Juli 2017 sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir yang terbagi menjadi 4 seksi, yaitu seksi I Interchange Cibitung sampai dengan Interchange Telaga Asih (STA -0+440 s/d STA 2+700), seksi II Interchange Telaga Asih sampai dengan Interchange Tambelang (STA 2+700 s/d STA 13+140), seksi III Interchange Tambelang sampai dengan Interchange Tarumajaya (STA 13+140 s/d STA 27+150), dan seksi IV Interchange Tarumajaya sampai dengan Interchange Cilincing (STA 27+150 s/d STA 34+385).

Pembayaran dilakukan menggunakan sistem pembayaran bulanan berdasarkan sertifikat bulanan dengan retensi 5%. Pembayaran harus dilakukan berdasarkan nilai kemajuan fisik pekerjaan minimal 5% sebulan sekali berdasarkan sertifikat bulanan yang disetujui.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 730 hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak dan Berita Acara Serah Terima Lahan oleh para pihak secara keseluruhan serta diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa perubahan selama tahun ini, yaitu pada tanggal 29 Juli 2022 No. 07/ADD.XVIII/KONTRAK/WK-CTP/VII/2022, dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp9.351.671.626.000 (termasuk PPN). Bank garansi yang diberikan akan menjadi pembayaran retensi proporsional per seksi secara bertahap sebesar 1/3 per tahun dari nilai 5,00% retensi masing-masing seksi yang akan dibayarkan setiap akhir dari 1 bulan sejak dilakukan *Partial Hand Over* masing-masing seksi selama 3 tahun masa pemeliharaan. Ketentuan pembayaran menjadi 1,50%.

Perubahan terakhir pada tanggal 15 Desember 2022, No. 07/ADD.XX.KONTRAK/WK-CTP/XII/2022 para pihak sepakat untuk mengubah target penyelesaian menjadi 31 Januari 2023.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Subsidiary (continued)

Construction Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road (continued)

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (continued)

This agreement has been amended several times, the latest addendum of which is addendum XV dated September 30, 2021 with a contract value of Rp8,638,699,442,000 (including VAT) with the exercise period from the date of signing which was on July 7, 2017 until the signing of Final Hand Over which divided into 4 sections, which are section I Interchange Cibitung - Interchange Telaga Asih (STA -0+440 s/d STA 2+700), section II Interchange Telaga Asih - Interchange Tambelang (STA 2+700 s/d STA 13+140), section III Interchange Tambelang - Interchange Tarumajaya (STA 13+140 s/d STA 27+150), dan section IV Interchange Tarumajaya - Interchange Cilincing (STA 27+150 s/d STA 34+385).

Payment is made using a monthly payment system based on a monthly certificate with a retention of 5%. Payment shall made based on the value of the physical progress of work of at least 5% once a month based on an approved monthly certificate.

The implementation period is 730 calendar days starting the date of contract and Final Hand Over (BAST) of Land signed by both parties and the commencement of the work issued.

This agreement has undergone several amendments during the year, on agreement No. 07/ADD.XVIII/KONTRAK/WK-CTP/VII/2022 dated July 29, 2022 the parties agreed to change the contract value to Rp9,351,671,626,000 (including VAT). Bank guarantees provided shall become retention payments proportionally 1/3 increments per year from the retention value of 5.00% for each Sections which will be paid at the end of 1 month since Partial Hand Over for each Sections for 3 years of maintenance period. Payment terms to become 1.50%.

The latest amended on December 15, 2022, No. 07/ADD.XX.KONTRAK/WK-CTP/XII/2022 the parties agreed to change the settlement target to January 31, 2023.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (lanjutan)

PT Waskita Beton Precast Tbk

CTP juga menunjuk PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan Perjanjian No. CTP-ADM-XII-2017-WBP-00001 tanggal 23 Desember 2017 sebagai kontraktor pembangunan jalan tol Cibitung - Cilincing (STA 30+200 s/d STA 32+800) dengan nilai kontrak Rp635.173.781.000 (termasuk PPN).

Berdasarkan Addendum V Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing dengan PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-XI-2020-WBP-0000006 tanggal 25 November 2020 nilai kontrak menjadi Rp422.155.854.000 (termasuk PPN).

Berdasarkan Addendum VII Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing dengan PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-V-2021-WBP-0000008 tanggal 31 Mei 2021 jangka waktu pelaksanaan menjadi 1.369 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2021.

Berdasarkan Addendum XI Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing dengan PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) tanggal 29 Juli 2022 dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp423.273.100.000 (termasuk PPN) dan mengubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 1.775 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, amandemen terkait dengan kontrak ini masih dalam proses.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Subsidiary (continued)

Construction Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road (continued)

PT Waskita Beton Precast Tbk

CTP appointed PT Waskita Beton Precast Tbk based on Agreement No. CTP-ADM-XII-2017-WBP-00001 dated on December 23, 2017, as a construction contractor for the Cibitung - Cilincing toll road (STA 30+200 s/d STA 32+800) with a contract value of Rp635,173,781,000 (including VAT).

Based on Addendum V of the Contract for construction of Cibitung - Cilincing toll road with PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-XI-2020-WBP-0000006 dated November 25, 2020, the contract value is Rp422,155,854,000 (including VAT).

Based on Addendum VII of the Contract for construction of Cibitung - Cilincing toll road with PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-V-2021-WBP-0000008 dated May 31, 2021, the period of execution of the work is 1,369 calendar days commencing from December 21, 2017 up to September 30, 2021.

Based on Addendum XI of the Contract for construction of Cibitung - Cilincing toll road with PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) dated July 29, 2022, both parties agreed to change the total contract value to Rp423,273,100,000 (including VAT) and to change the implementation period to become 1,775 days commencing from December 21, 2017 to October 31, 2022.

As at the issuance of the financial statements, amendments related to this contract are still in progress.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Pekerjaan Jembatan Over Pass (JOP)
Seksi II Jalan Tol Cibitung - Cilincing**

PT Jasamarga Tollroad Maintenance

Pada tanggal 4 Agustus 2021, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance terkait Pekerjaan Jembatan Over Pass (JOP) Pada Seksi II Jalan Tol Cibitung - Cilincing dengan nilai kontrak Rp97.280.699.560 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*Final Hand Over*) hasil pekerjaan.

Pada tanggal 1 November 2021, CTP mengadakan addendum perjanjian dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance terkait Pekerjaan Jembatan Over Pass (JOP) Pada Seksi II Jalan Tol Cibitung - Cilincing dengan nilai kontrak Rp99.770.781.880 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*Final Hand Over*) hasil pekerjaan.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan pada tanggal 30 Mei 2022 No. CTP-ADM-CTR-V-2022-JOP-00005, dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp100.766.233.349, (termasuk PPN) dan untuk mengubah jangka waktu kontrak menjadi 210 hari berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*Final Hand Over*) hasil pekerjaan.

**Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi
Pembangunan Gedung Kantor Pusat CTP**

Pada tanggal 15 Juni 2021, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Mobyco Magno Indonesia terkait Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat CTP, Kantor Operasional, dan Bangunan Penunjang Lainnya dengan nilai kontrak Rp50.476.800.000 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*Final Hand Over*) hasil pekerjaan. Jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan adalah 180 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**Agreement of Over Pass (JOP) Construction
Section II Cibitung - Cilincing Toll Road**

PT Jasamarga Tollroad Maintenance

On August 4, 2021, CTP entered into an agreement with PT Jasamarga Tollroad Maintenance regarding the work of Over Pass (JOP) at the Section II Cibitung - Cilincing Toll Road Construction Project with a contract value amounting to Rp97,280,699,560 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Final Hand Over of work.

On November 1, 2021, CTP entered into an addendum agreement with PT Jasamarga Tollroad Maintenance regarding the work of Over Pass (JOP) at the Section II Cibitung - Cilincing Toll Road Construction Project with a contract value amounting to Rp99,770,781,880 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Final Hand Over of work.

This agreement has amended on May 30, 2022 No. CTP-ADM-CTR-V-2022-JOP-00005, wherein both parties agreed to change the contract value to become Rp100,766,233,349, (include VAT), and to change the term of the contract to become 210 days from the date the contract is signed until the Final Hand Over of work.

**Agreement for CTP Head Office Building
Construction Services**

On June 15, 2021, CTP entered into an agreement with PT Mobyco Magno Indonesia regarding Head Office, Operational Office, and Other Supporting Buildings of CTP, Construction Services with a contract value of Rp50,476,800,000 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Final Hand Over of work. The construction period is 180 calendar days commencing after the date of issuance of better work to Proceed ("SPMK").

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi
Pembangunan Gedung Kantor Pusat CTP
(lanjutan)**

Berdasarkan Addendum I No. CTP-ADM-CTR-XII-2021-KTR-00002 tanggal 10 Desember 2021 jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan (*construction period*) menjadi 230 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Berdasarkan Addendum II No. CTP-ADM-CTR-I-2022-KTR-00003 tanggal 28 Januari 2022 nilai kontrak menjadi Rp32.058.124.000 (belum termasuk PPN) dan jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan (*construction period*) menjadi 319 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

**Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan
Operasi dan Pemeliharaan**

Pada tanggal 23 Desember 2019, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Jasamarga Tollroad Operator terkait Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Operasi dan Pemeliharaan Pada Jalan Tol Cibitung - Cilincing dengan nilai kontrak Rp244.082.022.639 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Pengakhiran Kontrak.

Total biaya yang dibayarkan oleh CTP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing berjumlah Rp16.884.942.168 dan Rp11.340.622.640, yang dicatat sebagai biaya jasa.

Pada tanggal 23 Maret 2022, kontrak No. CTP-ADM-CTR-III-2022-JMTO-00003 di amendemen dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp125.494.149.163 (termasuk PPN).

Pada tanggal 1 April 2022, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Metrindo terkait Pekerjaan Sewa Kendaraan Operasional Pool dan Ambulans Pada Ruas Tol Cibitung-Cilincing dengan nilai kontrak Rp861.138.000 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai 31 Maret 2025.

Total biaya yang dibayarkan oleh CTP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing berjumlah Rp143.523 dan RpNihil, yang dicatat sebagai biaya jasa dan beban umum dan administrasi.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**Agreement for CTP Head Office Building
Construction Services (continued)**

Based on Addendum I No. CTP-ADM-CTR-XII-2021-KTR-00002 dated December 10, 2021, the construction period will be 230 calendar days from the issuance of the Work Commencement Order (SPMK).

Based on Addendum II No. CTP-ADM-CTR-I-2022-KTR-00003 dated January 28, 2022 the contract value is Rp32,058,124,000 (excluding VAT) and the construction period is 319 calendar days from the issuance of the Work Commencement Order (SPMK).

**Agreement of Procurement of Operating and
Maintenance Service**

On December 23, 2019, CTP entered into an agreement with PT Jasamarga Tollroad Operator regarding the work of Procurement of Operating and Maintenance Service at the Cibitung - Cilincing Toll Road Construction Project with a contract value amounting to Rp244,082,022,639 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Minutes of Termination are signed.

The total expenses paid by CTP for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp16,884,942,168 and Rp11,340,622,640, respectively, which are recorded under cost of services.

On March 23, 2022, this contract with No. CTP-ADM-CTR-III-2022-JMTO-00003 was amended wherein both parties agreed to change the contract value to become Rp125,494,149,163 (including VAT).

On April 1, 2022, CTP entered into an agreement with PT Metrindo regarding Pool Operational Vehicles and Ambulance Rental at the Cibitung-Cilincing Toll Road with a contract value of Rp861,138,000 (including VAT). The term of the contract is valid from April 1, 2022 to March 31, 2025.

The total expenses paid by CTP for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp143,523 and RpNil, respectively, which are recorded under cost of services and general and administrative expenses.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan
Operasi dan Pemeliharaan (lanjutan)**

Pada tanggal 1 April 2022, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Pesona Lintang Kemukus terkait Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Water Tank Pada Ruas Tol Cibitung-Cilincing dengan nilai kontrak Rp2.317.680.000 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai 31 Maret 2025.

Total biaya yang dibayarkan oleh CTP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing berjumlah Rp116.000.000 dan RpNihil, yang dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

37. HAL LAINNYA

COVID-19

Operasi Grup telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia meliputi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak pandemi ini terhadap Grup belum memberikan pengaruh signifikan. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari pandemi ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Grup di periode-periode berikutnya.

Kondisi peperangan di Ukraina

Invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan tantangan yang luas. Mengingat situasi yang sedang berkembang, ada banyak faktor dan peristiwa yang belum atau tidak dapat diketahui yang dapat berdampak material terhadap operasi Grup. Peristiwa terkait kondisi peperangan di Ukraina ini telah dan terus berdampak pada harga komoditas, rantai pasokan, risiko kredit termasuk yang terkait dengan piutang, perdagangan komoditas, perbendaharaan, dan faktor lainnya. Salah satu dari faktor-faktor ini, secara individu atau agregat, dapat berdampak material terhadap pendapatan, arus kas, dan kondisi keuangan Grup.

Grup telah dan mungkin terus menilai dampak yang disebabkan oleh kondisi peperangan di Ukraina terhadap operasi Grup. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari peperangan ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Grup di periode-periode berikutnya.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**Agreement of Procurement of Operating and
Maintenance Service (continued)**

On April 1, 2022, CTP entered into an agreement with PT Pesona Lintang Kemukus regarding Operational Vehicles and Water Tank Rental at the Cibitung-Cilincing Toll Road with a contract value of Rp2,317,680,000 (including VAT). The term of the contract is valid from April 1, 2022 to March 31, 2025.

The total expenses paid by CTP for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp116,000,000 and RpNil, respectively, which are recorded under general and administrative expenses.

37. OTHER MATTER

COVID-19

The Group operation has and may continue to be impacted by the outbreak of COVID-19 pandemic. The effects of COVID-19 pandemic to the global and Indonesian economy include lower economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. The effects of the pandemic to the Group are not significant. Further significant impact of the pandemic, if any, will be reflected in the Group financial reporting in the subsequent periods.

The war in Ukraine

Russia's recent invasion of Ukraine poses wide-ranging challenges. Given the evolving situation, there are many unknown factors and events that could materially impact to the Group operations. These events related to the war in Ukraine have and continue to impact commodity prices, our supply chain, credit risks including those related to receivables, commodity trading, treasury and other factors. Any of these factors, individually or in aggregate, could have a material effect on The Group earnings, cash flows and financial condition.

The Group has and may continue to assess the impact of the war in Ukraine to Group operations. Further significant impact of the war, if any, will be reflected in The Group financial reporting in the subsequent periods.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

38. TAMBAHAN INFORMASI FINANSIAL

Berikut ini adalah Informasi Keuangan terpisah PT Akses Pelabuhan Indonesia (Entitas Induk), terdiri dari laporan posisi keuangan Entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan arus kas Entitas Induk terkait untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

38. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The following is separate PT Akses Pelabuhan Indonesia (the Parent Entity)'s Financial Information, consisting of the statement of financial position of the Parent Entity as of December 31, 2022 and statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Parent Entity for the year ended December 31, 2022 and a summary of significant accounting policies. The Parent Entity's Financial Information is presented as supplementary information to the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2022 and for the year then ended.

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
PARENT ENTITY**

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | Catatan/ Notes | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 | |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|
| ASET | | | | ASSETS |
| ASET LANCAR | | | | CURRENT ASSETS |
| Kas dan setara kas | 42.566.320.216 | | 208.072.056.676 | Cash and cash equivalents |
| Piutang lain-lain | | | | Other receivables |
| Pihak berelasi | 65.075.102 | | - | Related parties |
| Pendapatan yang masih akan diterima | 29.342.466 | | 384.700.998 | Accrued income |
| Uang muka dan beban dibayar | | | | Advance payments and prepaid |
| di muka | 2.207.711.286 | | 2.120.904.587 | expenses |
| Pajak dibayar di muka | 3.016.076.112 | | 6.681.019.309 | Prepaid taxes |
| Total Aset Lancar | 47.884.525.182 | | 217.258.681.570 | Total Current Assets |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | NON-CURRENT ASSETS |
| Investasi saham | 5.057.770.987.000 | | 4.252.378.217.000 | Investment in shares |
| Aset tetap - neto | 1.649.197.236 | | 986.886.202 | Fixed assets - net |
| Aset hak guna - neto | 3.501.609.936 | | 1.690.782.546 | Right-of-use assets - net |
| Taksiran tagihan restitusi pajak | 6.056.992.639 | | - | Estimated claims for tax refund |
| Aset tidak lancar lainnya | - | | 87.557.155 | Other non-current assets |
| Total Aset Tidak Lancar | 5.068.978.786.811 | | 4.255.143.442.903 | Total Non-Current Assets |
| TOTAL ASET | 5.116.863.311.993 | | 4.472.402.124.473 | TOTAL ASSETS |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK (lanjutan)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
PARENT ENTITY (continued)**

| | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | Catatan/ Notes | 31 Desember 2021/ December 31, 2021 | |
|--|--|-------------------|--|---|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | LIABILITIES AND EQUITY |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | CURRENT LIABILITIES |
| Utang lain-lain - pihak ketiga | - | | 42.902.417 | Other payables - third parties |
| Utang pajak | 1.076.213.885 | | 531.570.275 | Taxes payable |
| Beban akrual | 204.397.045.104 | | 57.540.773.773 | Accrued expenses |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | | Current maturities of long-term liabilities: |
| Liabilitas sewa | 1.911.695.447 | | 753.797.881 | Lease liabilities |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 207.384.954.436 | | 58.869.044.346 | Total Current Liabilities |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | NON-CURRENT LIABILITIES |
| Utang pihak berelasi | 3.388.990.349.157 | | 2.680.381.070.000 | Due related parties |
| Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | | Long-term liabilities - net of current maturities: |
| Liabilitas sewa | 2.187.848.791 | | 1.053.679.247 | Lease liabilities |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 3.391.178.197.948 | | 2.681.434.749.247 | Total Non-Current Liabilities |
| TOTAL LIABILITAS | 3.598.563.152.384 | | 2.740.303.793.593 | TOTAL LIABILITIES |
| EKUITAS | | | | EQUITY |
| Modal saham - nilai nominal Rp10.000 per saham | | | | Capital stock - Rp10,000 par value per share |
| Modal dasar - 320.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 | | | | Authorized - 320,000,000 shares as of December 31, 2022 and 2021, respectively |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 184.576.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 | 1.845.760.000.000 | | 1.845.760.000.000 | Issued and fully paid - 184,576,000 shares as of December 31, 2022 and 2021, respectively |
| Defisit | (327.459.840.391) | | (113.661.669.120) | Deficits |
| EKUITAS - NETO | 1.518.300.159.609 | | 1.732.098.330.880 | EQUITY - NET |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO | 5.116.863.311.993 | | 4.472.402.124.473 | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY - NET |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
ENTITAS INDUK**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PARENT ENTITY**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31

| | 2022 | Catatan/ Notes | 2021 | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| Beban umum dan administrasi | (27.891.807.421) | | (34.829.470.207) | General and administrative expense |
| Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto | 5.972.793.843 | | 17.139.380.093 | Others operating income (expense) - net |
| RUGI USAHA | (21.919.013.578) | | (17.690.090.114) | LOSS FROM OPERATIONS |
| Pendapatan keuangan | 11.406.359.148 | | 1.204.926.217 | Finance income |
| Beban keuangan | (203.285.516.841) | | (48.329.244.739) | Finance costs |
| RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN | (213.798.171.271) | | (64.814.408.636) | LOSS BEFORE CORPORATE INCOME TAX |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN | | | | CORPORATE INCOME TAX EXPENSE |
| Kini | - | | - | Current |
| Tangguhan | - | | - | Deferred |
| RUGI PERIODE BERJALAN | (213.798.171.271) | | (64.814.408.636) | LOSS FOR THE PERIOD |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | - | | - | OTHER COMPREHENSIVE INCOME |
| TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN | (213.798.171.271) | | (64.814.408.636) | TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE PERIOD |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PE
AND I
NOTES TO
FINANC
Decemb
for the
(Expressed in Rup**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK**

**PT AKSES PEL
STATEMENT OF
PART**

| | Catatan/ Notes | Modal saham/ Share capital | Defisit/ Deficits | Total Ekuitas/ Total Equity |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Saldo 31 Desember 2020 | | 805.760.000.000 | (48.847.260.484) | 756.912.739.516 |
| Tambahan modal disetor | | 1.040.000.000.000 | - | 1.040.000.000.000 |
| Rugi neto tahun berjalan | | - | (64.814.408.636) | (64.814.408.636) |
| Penghasilan komprehensif lain | | - | - | - |
| Saldo 31 Desember 2021 | | 1.845.760.000.000 | (113.661.669.120) | 1.732.098.330.880 |
| Rugi neto tahun berjalan | | - | (213.798.171.271) | (213.798.171.271) |
| Penghasilan komprehensif lain | | - | - | - |
| Saldo 31 Desember 2022 | | 1.845.760.000.000 | (327.459.840.391) | 1.518.300.159.609 |

PELABUHAN INDONESIA

ITS SUBSIDIARY
THE CONSOLIDATED
IAL STATEMENTS

er 31, 2022 and for

Year then Ended

iah, unless otherwise stated
Seluruh yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk

Seluruh yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PELABUHAN INDONESIA

F CHANGES IN EQUITY
ENT ENTITYPT AKSES PELABUHAN INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUKPT AKSES PELABUHAN INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
PARENT ENTITYTahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

| | 2022 | Catatan/ Notes | 2021 | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| <i>Balance as of December 31, 2020</i> | | | | |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Penerimaan dari pelanggan <i>Additional Paid-in Capital</i> | 2.014.239.935 | | 709.910.208 | Receipts from customers |
| Penerimaan dari pendapatan lain-lain <i>Other comprehensive income</i> | (31.932.386.238) | | (24.669.791.627) | Payment to suppliers |
| Pembayaran kepada pemasok <i>Balance as of December 31, 2021</i> | (6.411.818.832) | | (11.909.300.758) | Payment to employees |
| Pembayaran kepada karyawan <i>Balance as of December 31, 2021</i> | (4.946.630.007) | | (5.971.720.659) | Payment for taxes |
| Pembayaran pajak | | | | Receipt (payment) of bank loan interest |
| Penerimaan (pembayaran) bunga pinjaman <i>Net loss for the year</i> | (32.563.313.190) | | 19.948.318.964 | Cash receipts from finance income |
| Penerimaan dari pendapatan keuangan <i>Other comprehensive income</i> | 2.684.727.956 | | 1.204.926.217 | Other Receipts |
| Penerimaan lain-lain <i>Balance as of December 31, 2022</i> | 4.885.989.608 | | - | |
| Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi | (66.269.190.768) | | (20.687.657.655) | Net cash flows provided by (used in) operating activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES |
| Perolehan aset tetap | (833.969.866) | | (1.013.056.872) | Acquisitions of fixed assets |
| Penempatan investasi saham | (805.392.770.001) | | (2.851.070.583.110) | Acquisitions of investment in shares |
| Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi | (806.226.739.867) | | (2.852.083.639.982) | Net cash flows used in investing activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | | CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES |
| Tambahan setoran modal saham | - | 1.040.000.000.000 | - | Additional paid-up share capital |
| Pembayaran liabilitas sewa (Pemberian) penerimaan pinjaman dari Pelindo | (1.619.084.982) | (1.027.502.086) | - | Payments of lease liabilities |
| (Pemberian) penerimaan pinjaman dari pemegang saham | 58.609.279.157 | 2.458.901.013.320 | - | Receipt (providing) loans from Pelindo |
| (Pemberian) penerimaan pinjaman dari entitas anak | 650.000.000.000 | - | - | Receipt (providing) loans from shareholder |
| | - | (440.618.360.000) | - | Receipt (providing) loans from subsidiary |
| Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | 706.990.194.175 | | 3.057.255.151.234 | Net cash flow used in financing activities |
| KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS | (165.505.736.460) | | 184.483.853.597 | NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE | 208.072.056.676 | | 23.588.203.079 | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE | 42.566.320.216 | | 208.072.056.676 | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD |

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and for
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN
ENTITAS INDUK**

**PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL INFORMATION
PARENT ENTITY**

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri". PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak dan entitas asosiasi. Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2009), Entitas Induk mencatat penyertaan pada entitas anak dan entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya. Entitas Induk juga mengakui dividen dari entitas anak dan entitas asosiasi pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of preparation of the separate financial statements

The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 4 (Revised 2009), "Consolidated and Separate Financial Statements". PSAK No. 4 (Revised 2009) regulates that when an entity elected to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a Parent Entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees. Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries and associates. In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2009), the Parent Entity recorded the investments in subsidiaries and associates using cost method. The Parent Entity also recognizes dividends from subsidiaries and associate in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.



PT Akses Pelabuhan Indonesia

Pelindo Tower, 12th Floor
Jl. Yos Sudarso No. 9
Jakarta 14230, Indonesia

Phone : 021-50918818
Email : humas@aksespelabuhan.co.id

www.aksespelabuhan.co.id

